

**PERUBAHAN FUNGSI LEMBAGA PERTANIAN
DENGAN ADANYA PERTAMBANGAN EMAS
DI KABUPATEN BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

***CHANGES IN THE FUNCTIONS OF AGRICULTURAL
INSTITUTIONS RESULTED FROM
THE PRESENCE OF GOLD MINING ACTIVITIES
IN BOMBANA REGENCY
SOUTH EAST SULAWESI PRIVINCE***

MEISANTI



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

**PERUBAHAN FUNGSI LEMBAGA PERTANIAN
DENGAN ADANYA PERTAMBANGAN EMAS
DI KABUPATEN BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi
Ilmu-Ilmu Pertanian**

Disusun dan diajukan oleh

MEISANTI

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

DISERTASI
PERUBAHAN FUNGSI LEMBAGA PERTANIAN
DENGAN ADANYA PERTAMBANGAN EMAS
DI KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Disusun dan diajukan oleh

MEISANTI
Nomor Pokok P0100309009

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Disertasi
pada tanggal 19 November 2014
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat,


Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, M.S
Promotor



Prof. Ir. M. Saleh S. Ali, M.Sc, Ph.D.
Kopromotor


Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S.
Kopromotor

Ketua Program Studi
Ilmu-ilmu Pertanian,

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S


Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meisanti
Nomor Pokok Mahasiswa : P0100309009
Program Studi : Ilmu-Ilmu Pertanian
Konsentrasi : Sosial Ekonomi Pertanian Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dengan ini menyatakan bahwa Kajian Disertasi ini adalah **Karya Akademik Orisinal** Penulis dan apabila dikemudian hari ternyata di dalamnya ditemukan unsur kepalsuan (*plagiat*), maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Makassar, 19 November 2014

Penulis,

Meisanti

PRAKATA

Rasa haru dan kenikmatan yang luar biasa ketika disertasi ini dapat dirampungkan secara utuh sebagai sebuah karya ilmiah. Kajian sosiologi pertanian yang bertumpu pada analisis structural fungsional Merton pada disertasi ini dihasilkan melalui perjuangan panjang di lapangan dalam mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, juga menghabiskan jam-jam panjang di meja tulis ketika realitas yang ditemukan coba untuk ditata dalam kalimat-kalimat ilmiah.

Dengan kesadaran penuh, penulis merasakan siraman ilmu pengetahuan dari bimbingan ketiga promotor dan ko-promotor yang sangat kompeten menuntun penulisan karya ilmiah ini ke jalur yang tepat. Untuk itu, ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan terbesar penulis persembahkan kepada Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, Prof. Ir. M. Saleh S. Ali, M.Sc. Ph.D dan Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S. Selanjutnya, untuk Dosen-dosen Penguji yang Luar Biasa mencerahkan karya ilmiah ini, penulis haturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. Ir. Sitti Bulkis, M.S., Prof. Dr. Ir. Hazairin Zubaer, M.S., Dr. Ir. Imam Mujahidin Fahmid, MT, DEV., Dr. Ir. Eymal Bahsar Demmalino, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Weka Widayati, M.Si.

Atas ijin dan dukungan penuh kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin, secara khusus penulis berterimakasih kepada Rektor Universitas Halu Oleo, Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, M.S., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Prof. Ir. I Gusti Ray Sadimantara, M.Sc. Ph.D., Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H, M.S.

Kepada rekan-rekanku, sahabat berbagi suka dan duka, teman diskusi terbaik yang sama-sama menapak di Kampus Unhas sejak tahun 2009: Bunda Apiaty Amin Syam, Andi Amidah Amrawaty, Heliawati Adwiawan, Andi Kasirang, Nurdiah Husna, Nurbaya Busthanul, Josep Monim, serta rekan sesama pengajar UHO yang sama mencari kedalaman pengetahuan: Nur Rahmah dan Anas Nikoyan, kalian adalah yang terbaik semoga kesuksesan

menyertai hari depan kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan yang tak ternilai itu.

Teristimewa atas cinta dan dukungannya yang tiada tara, kuhaturkan terimakasih paling tulus dari lubuk hatiku yang terdalam kepada suamiku terkasih Ilham Yamin, A.P. M.Si, dan anak-anakku Fauzan Perdana Ilham, Fadhil Pradwira Ilham dan Ilsa Tri Azizah, sungguh pengorbanan terbesar telah kalian lakukan untukku. Terima kasih setulus hati kepada mama tercinta Hj. Emmah Azis atas cinta dan doa yang tak pernah putus untukku. Kepada almarhum papaku Drs. Abdul Azis Razake, S.U. telah kupenuhi mimpimu untuk menjadi seorang Doktor, semoga tenang jiwa papa di sisiNya. Dan untuk Bapak M. Yamin Ismail, SE dan Mama Hj. Hamidah Yamin, terimakasih atas doa dan dukungan Bapak dan Mama untukku.

Ucapan terima kasih juga kupersembahkan kepada adik-adikku dan semua keluargaku yang lebih dua tahun kutitip anak-anakku untuk studi ini, kepada kolega-kolega penulis di kampus UHO, kepada sahabat dan teman yang tidak mampu kutuliskan namanya satu persatu, kepada semua pihak yang membantu pengumpulan data di lapangan, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan kalian.

Akhirnya adalah doa, semoga pengetahuan yang dimiliki penulis akan membawa manfaat bagi sesama umat manusia, dan kerja yang kemarin dan akan datang semata bernilai ibadah kepada Allah SWT... Amin Ya Rabbal Alamiin.

Makassar, 19 November 2014

Penulis,

Meisanti

ABSTRAK

MEISANTI. *Perubahan Fungsi Lembaga Pertanian dengan Adanya Pertambangan Emas di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara* (dibimbing oleh Didi Rukmana, M. Saleh S. Ali, dan Darmawan Salman).

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis dampak-dampak kegiatan pertambangan emas yang memengaruhi lembaga pertanian di Kabupaten Bombana, terjadinya perubahan fungsi lembaga pertanian akibat perkembangan pertambangan di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Bombana dan strategi penghidupan (*livelihood*) yang ditempuh petani dalam merespon perubahan fungsi lembaga pertanian di balik perkembangan pertambangan di Kabupaten Bombana.

Penelitian ini menggunakan paradigma *postpositivisme*, dengan pendekatan kualitatif yang berjenis deskriptif dan eksplanatif. Metode penelitian yang digunakan, yaitu studi kasus. Analisis data yang digunakan bertumpu pada analisis fungsional-struktural Merton yang terdiri atas fungsi manifest, fungsi laten, disfungsi, manifestasi, dan nonfungsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan emas memengaruhi perubahan fungsi lembaga pertanian di Kabupaten Bombana. Bentuk perubahan fungsi pada kelompok tani (*gapoktan*), lembaga pengairan, lembaga kredit, lumbung pangan, dan kelompok ternak memenuhi minimal dua kategori perubahan fungsi Merton. Selanjutnya, petani merespon perubahan fungsi yang ada dengan menempuh lima strategi *livelihood*, yaitu mencari pekerjaan lain, melakukan penghematan, penjualan aset, menerima transfer, dan melakukan pinjaman. Penelitian ini juga menghasilkan konsep baru, yaitu mutasi fungsi lembaga pertanian yang memperkaya khazanah teori-teori fungsional struktural yang ada.

Kata kunci: lembaga pertanian, pertambangan emas, perubahan fungsi, mutasi fungsi lembaga pertanian



ABSTRACT

MEISANTI. *Changes in the Functions of Agricultural Institution Resulted from the Presence of Gold Mining Activities in Bombana Regency, South East Sulawesi Province* (Supervised by Didi Rukmana, M. Saleh S. Ali, and Darmawan Salman)

The research aims to: (1) review and analyze the impacts of gold mining activities on agricultural institution in Bombana regency; (2) review and analyze the forms of changes in the functions of the agricultural institution due to the development of gold mining at villages in Bombana regency; and (3) to analyze the livelihood strategies of the peasants in responding to the change of function.

This study applied post positivism paradigm with qualitative approach (descriptive and explanative types). It used the case study method. The analysis was based on Merton structural functional analysis consisting of the function of manifest, function of latency, disfunction, and non function.

The results reveal that gold mining activities affect the agricultural institution in Bombana regency. The forms of functional changes in Farmer Group/Unification of Farmer Group, irrigation institution, credit institution, rice barn, and livestock group fulfill at least two categories of Merton functional change. The peasants respond to the change of function by adopting five livelihood strategies: looking for other jobs, saving money, selling out assets, taking transfer, and looking for loan. This research also results in a new concept, functional mutation of agricultural institutions. It enriches the coverage of the existing functional theories.

Keywords: agricultural institution, gold mining, functional change, functional mutation of agricultural institution



DAFTAR ISI

Uraian	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BOX	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	2
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	21
D. Kegunaan Penelitian	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Dampak Lingkungan Fisik, Ekonomi dan Sosial Kegiatan Pertambangan	24
B. Fungsi dan Disfungsi	32
C. Lembaga Pertanian	42
D. Pertanian dan Strategi Penghidupan Petani	49
E. Kerangka Pemikiran	59
F. Definisi Operasional	62
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	66
B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti	68
C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis	69
D. Teknik Pengumpulan Data	70
E. Teknik Penentuan Informan	72
F. Analisis Data	73
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	75
H. Keterkaitan Tujuan dengan Metode Penelitian	75
BAB IV GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN	77
A. Kondisi Geografi dan Iklim Wilayah Penelitian	78
B. Penduduk dan Sumber Pencarian hidup	85

C.	Potensi Pertanian	90
a.	Tanaman Padi Sawah	90
b.	Tanaman Perkebunan	91
c.	Peternakan	93
d.	Perikanan	95
D.	Kelembagaan Pertanian (Era Mokole-2014)	96
E.	Keadaan Pertambangan	102
a.	Pertambangan Rakyat/Pertambangan Tradisional	103
b.	Pertambangan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan	112
BAB V	DAMPAK LINGKUNGAN FISIK, SOSIAL DAN EKONOMI KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS PADA KOMUNITAS TANI	120
A.	Dampak Lingkungan Fisik	121
a.	Dampak Air	122
Berkurangnya Debit Air Irigasi		122
Pencemaran Air		133
b.	Dampak Akibat Lumpur	138
c.	Puso Akibat Kekeringan	141
d.	Perubahan Bentang Alam (Bentuk Fisik Tanah)	146
e.	Dampak Pencemaran Udara	151
B.	Dampak Lingkungan Sosial	157
a.	Perubahan Sosial	157
Pertambahan penduduk		158
Struktur Sosial		159
Perubahan Strata Berdasarkan Kriteria Ekonomi (Kekayaan)		165
Perubahan Strata Berdasarkan Kriteria Kekuasaan		169
Interaksi Sosial		172
b.	Psikososial	178
Keamanan		179
Kecemasan		182
Kepercayaan (<i>Trust</i>)		184
Penyakit Sosial		187
c.	Budaya (Perubahan Nilai Uang)	189
C.	Dampak Lingkungan Ekonomi	194
a.	Tumbuhnya Investasi	197
b.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	201
c.	Peningkatan Pembangunan Infra Struktur	205
d.	Perubahan Pendapatan	206
BAB VI	FUNGSI DAN DISFUNGSI LEMBAGA PERTANIAN	214
A.	Lembaga Kelompok Tani/Gapoktan	215
a.	Kelompok Tani/Gapoktan dan Dampak Tambang Emas	215
b.	Deskripsi Kelompok Tani/Gapoktan	219
c.	Fungsi Sebelum Ada Dampak Tambang Emas	220
d.	Fungsi Sesudah Ada Dampak Tambang Emas	226

e.	Perubahan Fungsi	236
B.	Lembaga Pengairan	239
a.	Kelompok Tani Pemakai Air, Upacara Penjemputan Air dan Dampak Tambang Emas	239
b.	Deskripsi Lembaga Pengairan	242
c.	Fungsi Sebelum Ada Dampak Tambang Emas	244
d.	Fungsi Sesudah Ada Dampak Tambang Emas	246
e.	Perubahan Fungsi	248
C.	Lembaga Kredit	249
a.	Tengkulak, Koperasi dan Dampak Tambang Emas	249
b.	Deskripsi Tengkulak dan Koperasi	251
c.	Fungsi Sebelum Ada Dampak Tambang Emas	253
d.	Fungsi Sesudah Ada Dampak Tambang Emas	254
e.	Perubahan Fungsi	256
D.	Lumbung Pangan	258
a.	Lumbung Pangan dan Dampak Tambang Emas	258
b.	Lumbung Pangan Mitra Karya Muda	259
c.	Lumbung Pangan Lomba Rejeki	261
d.	Perubahan Fungsi	264
E.	Kelompok Ternak	266
a.	Kelompok Ternak dan Dampak Pertambangan Emas	266
b.	Deskripsi Kelompok Ternak	267
c.	Fungsi Sebelum Ada Dampak Tambang Emas	268
d.	Fungsi Sesudah Ada Dampak Tambang Emas	270
e.	Perubahan Fungsi	271
F.	Mutasi Fungsi pada Lembaga Pertanian	272
BAB VII	STRATEGI PENGHIDUPAN PETANI DALAM MERESPON PERUBAHAN FUNGSI LEMBAGA PERTANIAN	276
A.	Strategi Mencari Pekerjaan Lain	279
B.	Strategi Penghematan	283
C.	Strategi Menjual Aset	284
D.	Strategi Menerima Transfer	286
E.	Strategi Melakukan Pinjaman	290
BAB VIII	PENUTUP	292
A.	Kesimpulan	293
B.	Implikasi Teoritik	299
C.	Implikasi Kebijakan	310
DAFTAR PUSTAKA		313

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1	Jumlah IUP, Kontrak Migas dan Persentase Penduduk Miskin	9
2	Distribusi PDRB Kabupaten Bombana Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Sebelum dan Sesudah Penemuan Emas (Jutaan Rupiah)	17
3	Matriks Keterkaitan Tujuan dengan Metode Penelitian	76
4	Desa dan Kecamatan di Wilayah Daratan Pulau Sulawesi dan Wilayah Kepulauan	79
5	Rata-Rata Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan di Wilayah Penelitian	83
6	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Jumlah Rumah Tangga Kabupaten, Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya Tahun 2010/2011	86
7	Luas lahan Sawah dan Bukan Lahan Sawah Tahun 2010 di Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya dan Kabupaten Bombana	91
8	Jenis Ternak dan Jumlah Populasinya di Kabupaten Bombana	93
9	Jumlah pemilik Ternak Sapi di Kabupaten Bombana, Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya Tahun 2010	94
10	Produksi Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2010	95
11	Perkiraan Penduduk di Kabupaten Bombana Tahun 2009 Akibat Pertambangan Rakyat	107
12	Data Jumlah Penduduk dan Pertambahan Jumlah Penduduk per Tahun di Kabupaten Bombana Periode 2005-2013 dari Berbagai Sumber	110
13	Data Perusahaan yang Mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Bombana 2009-2013	115
14	Data Royalti Hasil Produksi Emas (Rupiah) di Kabupaten Bombana	116
15	Persentase Pembagian Hasil Pertambangan Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	117
16	Data Royalti Hasil Produksi Pertambangan Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam di Kabupaten Bombana	118
17	Irigasi Semi Teknis dan Irigasi Desa	124
18	Dampak Terhadap Air, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh	137
19	Dampak Lumpur, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh	141

20	Dampak Puso, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh	145
21	Dampak Terhadap Perubahan Bentang Alam (Bentuk Fisik Tanah), Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh	151
22	Dampak Pencemaran Udara, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh	153
23	Dampak Lingkungan Fisik, Kegiatan Penyebab Dampak Pertambangan dan Kelembagaan yang Disfungsi	154
24	Dampak Pertambahan Penduduk, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh	159
25	Perubahan Pelapisan Sosial Masyarakat Sebelum Adanya Pertambangan Emas	165
26	Dampak Interaksi Sosial Masyarakat, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh	178
27	Dampak Psikososial Masyarakat, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh	189
28	Dampak Dampak Perubahan Budaya (Nilai), Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh	191
29	Dampak Lingkungan Sosial, Kegiatan Penyebab Dampak dan Kelembagaan yang Disfungsi	192
30	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bombana Tahun 2008-2013 (%)	195
31	Dampak Tumbuhnya Investasi, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh	201
32	Dampak Peningkatan PAD, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang	204
33	Dampak Perubahan Pendapatan, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh	211
34	Dampak Lingkungan Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian yang Disfungsi	212
35	Bentuk dan Proses Disfungsi Kelembagaan Kelompok Tani/Gapoktan	238
36	Kelompok Petani Pemakai Air di Kecamatan Iantari Jaya dan Rarowatu Utara	240
37	Perubahan Fungsi Kelembagaan Pengairan	249
38	Perubahan Fungsi Kelembagaan Kredit	257
39	Perubahan Fungsi Kelembagaan Lumbung Pangan	265
40	Perubahan Fungsi Kelembagaan Kelompok Ternak	272
41	Strategi Penghidupan Petani Oleh Perubahan Fungsi Lembaga Pertanian	277

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
1	Alih Fungsi Lahan oleh Tambang	15
2	Skema Tingkatan dan Fungsi Pengembangan Kelembagaan	45
3	Diversifikasi <i>Rural Livelihood</i>	57
4	Kerangka Analisis Strategi Livelihood Petani dan Level Penghidupannya Berdasarkan Adopsi dari Ellis (2000:30)	58
5	Bagan Penelitian Disertasi	61
6	Peta Wilayah Kabupaten Bombana	81
7	Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan Tahun 2009-2012 di Wilayah Penelitian	84
8	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bombana	92
9	Perkembangan Penduduk Kabupaten Bombana 2005-2012 (orang)	111
10	Bendungan Langkowala di Kecamatan Lantari Jaya Pada Musim Kemarau	126
11	Bendungan Langkowala di Kecamatan Lantari Jaya Pada Musim Hujan	127
12	Embung La Aho di Kecamatan Rarowatu Utara Pada Musim Hujan	129
13	Sungai La Sangi di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara	130
14	Irigasi Mertasari di Kecamatan rarowatu Utara	131
15	Raksa yang Digunakan Pekerja Tambang Emas Dalam Proses Penambangan	134
16	Proses Pertambangan Emas di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya	135
17	Kondisi Sawah dan Lingkungan setelah adanya Pertambangan emas di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara	146
18	Piramida Pelapisan Sosial di daerah penelitian, diadopsi dari pemikiran Aristoteles dalam Deliarinov	163

DAFTAR BOX

Box	Uraian	Halaman
1	Gambaran Keadaan Ketika Pertambangan Emas Secara Tradisional Berlangsung di Kabupaten Bombana	109
2	Keadaan Pada Awal Pertambangan Dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) di Kabupaten Bombana	113
3	Dampak Fisik Kegiatan Tambang Terhadap Air	136
4	Dampak Lumpur dari Kegiatan Pertambangan Emas oleh Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Bombana	140
5	Puso Akibat Kekeringan dan Penyaluran Bantuan Puso dari Pemerintah	144
6	Kerusakan Bentang Alam Akibat Pertambangan Tradisional	147
7	Kerjasama Penambang Emas Sebagai Mitra Perusahaan PT. Panca Logam Makmur (PLM)	148
8	Interaksi Sosial Masyarakat Setelah Ada Pertambangan Emas	177
9	Kejadian Yang Menimbulkan Rasa Tidak Aman Akibat Adanya Pertambangan	181
10	Kecemasan Masyarakat Akibat Pertambangan Emas	184
11	Kekecewaan Warga Terhadap Pemerintah Kabupaten Bombana	185
12	Kekecewaan Warga Terhadap Perusahaan Pertambangan	187
13	Perubahan Pendapatan Sebagai Dampak Pertambangan	209
14	Fungsi Manajemen kelompok Tani Sebelum ada Tambang Emas	222
15	Fungsi Gapoktan Sebelum Ada Tambang Emas	225
16	Perubahan Fungsi manajemen pada Kelompok Tani	229
17	Kegiatan Pertanian Padi Sawah dalam Kelompok Tani Setelah Ada Tambang Emas	231
18	Strategi Mencari Pekerjaan Lain	280
19	Strategi Penghematan	283
20	Strategi Menjual aset	285
21	Strategi Menerima Transfer	288
22	Strategi Melakukan Pinjaman	290

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
1	Identifikasi Kelembagaan Petani Kelompk Tani 2014	320
2	Data Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tahun 2014	324
3	Daftar Nama Kelompok Tani Usaha Peternakan Sapi Potong Kecamatan Rarowatu Utara dan Lantari Jaya 2013	327

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Studi dan penelitian mengenai pertambangan telah banyak dilakukan. Terutama yang mengkaji dampak-dampak pertambangan baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, pencemaran bahkan strategi penanggulangannya serta konflik akibat pertambangan. Walaupun demikian, studi tersebut baik di dunia maupun di Indonesia sejauh ini belum ada yang memusatkan perhatian secara dalam mengenai perubahan fungsi kelembagaan pertanian pada masyarakat tani sebagai dampak pertambangan. Meskipun penelitian mengenai perubahan-perubahan sosial telah dikaji oleh beberapa peneliti, akan tetapi kajian-kajian tersebut umumnya dilakukan dengan lokus ke komunitas masyarakat lokal secara keseluruhan, bukan spesifik pada masyarakat tani dan kelembagaannya.

Penelitian Akabzaa & Darimani (2001) yang melakukan studi dampak pertambangan emas di Ghana mengkaji perubahan kebijakan pemerintah, dampak pertambangan pada wilayah, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak lingkungan dan kesehatan serta dampak terhadap perempuan. Selanjutnya, Hilson (2002) yang juga meneliti di Ghana, lebih melihat dampak pertambangan atas lingkungan dimana dihasilkan sebuah solusi

penanganan masalah pencemaran oleh stakeholder (pemerintah, universitas dan lembaga terkait) melalui CP (*Cleaner Production*) yang dapat meminimalkan limbah merkuri untuk industri kecil pada pertambangan setempat. Sedangkan Wilson (2004) mengkaji kecenderungan ketenagakerjaan pada komunitas pekerja-pekerja tambang di pertambangan yang berbeda-beda di Amerika. The Senate (2009) membahas potensi dampak pertambangan berdasarkan hasil penelitian para ahli di Murray Darling Basin (MDB) Australia yang menjelaskan bukti-bukti yang berkaitan dengan dampak pertambangan terhadap ketahanan pangan saat ini dan masa depan Australia. Laporan ini fokus pada potensi dampak pertambangan pada *surficial*, arus air tanah dan kualitas di dataran banjir aluvial di hulu Lembah Namoi Dalam dan DAS Darling Downs. Senate mengakui kegiatan penambangan dilakukan di Murray Darling Basin (MDB), terutama mineral pasir di selatan MDB menarik perhatian publik atas dampak pertambangan batubara dan ekstraksi lapisan metana pada tambang Batu Bara di Lembah Namoi Dalam dan daerah tangkapan Darling Downs.

Penelitian Latorre *et al.* (2001) dan Dougherty (2011) telah melibatkan komunitas tani tetapi belum menyentuh perubahan fungsi kelembagaan pertanian. Dimana Latorre *et al.* (2001) menganalisis hubungan antara aktivitas manusia dengan lingkungan dari abad 16 hingga abad 20 yang fokus pada pertanian, pertambangan dan demografi di

tenggara Spanyol. Ia meneliti pada wilayah berpopulasi rendah yang dihuni oleh komunitas petani muslim dimana pertanian mereka berbasis irigasi pada wilayah yang kecil dan sistem agroforestry. Hasil penelitiannya adalah kegiatan pertambangan yang disertai konsumsi yang besar atas kayu, ekspansi pertanian dan ledakan demografi telah merusak hutan-hutan dan mengubah ekosistem secara total. Sedangkan Daugherty (2011) membahas konflik pertambangan yang melibatkan komunitas tani, perusahaan tambang, pemerintah dan aktivis transnasional.

Dari penelitian-penelitian tersebut, kegiatan pertambangan memiliki tendensi rawan konflik. Beberapa diantaranya malah telah menimbulkan konflik, baik di dunia maupun di Indonesia. Pertambangan emas di Guatemala yaitu Marline Mine yang beroperasi sejak tahun 2005 bahkan telah ditutup oleh presiden Guatemala tanggal 23 Juni 2010. Hal ini disebabkan sepanjang berdirinya, Marline Mine selalu memicu konflik. Penentang pertambangan menganggap bahwa pertambangan adalah bentuk serangan neoliberal terhadap negara miskin dunia ketiga yang menawarkan kemajuan yang dianggap egois dan tidak tulus. Aktifis anti pertambangan menyerang bus-bus pekerja tambang, menculik teknisi-teknisi ahli, sementara pihak perusahaan Canada yang memiliki tambang mengerahkan penegak hukum termasuk polisi sipil dan angkatan darat untuk menjerat penentang. Akibatnya terjadi konflik yang mengorbankan keluarga dan

komunitas. Konflik pertambangan secara luas di dunia diteliti oleh Kemp, *et al.* (2011), dimana berbagai masalah konflik perusahaan pertambangan dengan komunitas masyarakat lokal disebabkan oleh ketidakadilan, dampak-dampak pertambangan, dan keuntungan perusahaan.

Di Indonesia, kegiatan pertambangan membawa dampak positif maupun negatif. Di daerah Teluk Buyat, Sulawesi Utara, hadirnya pertambangan emas membawa konflik dengan masyarakat setempat oleh tercemarnya ekosistem laut akibat pembuangan limbah lumpur batuan tambang (tailing) ke laut oleh PT. Newmont Minahasa Raya (NMR). Berdasarkan catatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), setiap hari PT NMR membuang sekitar 2.000 metrik ton limbah tambang ke perairan Teluk Buyat. Dampak pertambangan menghancurkan kehidupan laut yang menjadi penopang kehidupan masyarakat setempat. Lebih parah lagi karena hal ini akan berlangsung dalam jangka panjang, bukan hanya sesaat lalu hilang.¹ Masyarakat di sekitar Teluk Buyat khawatir jika tragedi penyakit Minamata² akibat pertambangan di Jepang akan terulang di Buyat.

¹ HuMa, SumberBerita. Suara Pembaruan Daily, 13 Oktober 2004. Konflik Akibat Pertambangan. <http://www.huma.or.id>. Diakses 2 Januari 2012

² Pada tanggal 1 Mei 1956, Sebuah pusat kesehatan masyarakat setempat di Minamata yaitu Kumamoto Prefecture, melaporkan sebuah "penyakit asing" pada empat orang yang menunjukkan gejala-gejala kecacauan otak yang tidak dapat diterangkan. Penyakit Minamata secara resmi muncul hari itu. Penyakit ini disebabkan oleh bahan kimia *methyl mercury* yang dibuat oleh Shon-Nippon Chisso Hiryo KK, pendahulu perusahaan Chisso, yang dilepaskan ke dalam ke teluk Minamata. Banyak orang di Kumamoto Prefecture dan Kagoshima Prefecture mengkonsumsi ikan yang terkontaminasi oleh merkuri terkena penyakit. Bahkan beberapa orang terlahir membawa penyakit. Di tahun 1965, orang dengan

Di Papua, konflik antara perusahaan pertambangan Freeport dan penduduk asli diteliti oleh Sethi *et al.* (2011) yang menghasilkan sebuah kode etik sukarela inovatif untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), peluang kerja dan pengembangan ekonomi penduduk asli. Penelitian ini membahas secara multidimensi berbagai aspek terkait, antara lain eratnya hubungan degradasi lingkungan dan ekstraksi industri, dampak pencemaran pada sumber daya air, udara dan tanah, kontrol perusahaan atas regulasi-regulasi, penguasaan tanah adat, perlakuan ketidakadilan pekerja, pelanggaran HAM, penyuapan dan korupsi yang melibatkan pejabat lokal dan pemimpin politik.

Berbeda dengan kondisi tersebut, penelitian Pasaribu (2010) mengenai “Analisis Dampak Pertambangan Emas terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan” menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan emas justru berdampak positif terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Batang Toru. Kegiatan pertambangan emas telah meningkatkan kondisi sosial melalui peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, sedangkan terhadap perekonomian masyarakat adalah meningkatkan pendapatan dan peluang usaha. Hasil analisis menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat

gejala-gejala yang sama ditemukan di sepanjang sungai Agano oleh Niigata Prefecture (Penyakit Minamata kedua), itu adalah lebih dari 10 tahun sebelum pemerintah mengenal bahwa penyebab penyakit Minamata adalah polusi industri. (sumber: *Minamata's Latest Chapter*. Tuesday Oct.3, 2006. Editorial The Japan Times Online. Diakses tanggal 30 Januari 2012)

sebesar 26,56%. Peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dampak kegiatan pertambangan emas, selanjutnya berpengaruh terhadap pengembangan wilayah di Kecamatan Batang Toru.

Ekspansi tambang terhadap wilayah-wilayah pertanian di pedesaan seluruh Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), hal ini semakin luas sejak pemerintahan SBY dimana pada bulan Januari 2012, jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 9.662. Dari jumlah tersebut lebih dari 75 persen tumpang tindih dengan peruntukan lainnya, bahkan dengan hutan lindung dan Taman Nasional. Selain daratan, pulau-pulau semakin banyak yang terekspansi tambang. Sebagai contoh, pulau Kabaena di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, 55 % dari total luasnya telah dikapling oleh Pertambangan, 27 % dari luas Pulau Bangka telah di kapling oleh Perusahaan PT. Mikgro Metal Perdana Seluas 1,300 Ha dari Luas Pulau Bangka 4,800 Ha. Selain itu, 72,32% luas pulau Lembata dikapling akan ditambang oleh PT. Merukh Enterprise. Pulau Sebuku yang luasnya 24.555 ha telah di kapling oleh PT. Bahari Cakrawala Sebuku seluas 18.000 ha dan PT. Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) seluas 8.000 ha. Pulau Gag Konsesi PT. Gag Nikel Melebihi Luas Pulau Gag. Luas PT. Gag Nikel 7,727 Ha Sedangkan Luas Pulau Gag Hanya 6,500 Ha.

Dari kondisi semacam ini, banyak yang berakhir dengan konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan. Hal ini dapat dimaklumi karena daerah yang menghasilkan tambang justru merupakan kantong-kantong penyumbang orang miskin terbesar di Indonesia. Di Morowali, konflik kepentingan lahan oleh berbagai korporasi terjadi terutama seputar Bahodopi. Wilayah ini adalah daerah yang paling sering diributkan oleh berbagai perusahaan tambang terutama Rio Tinto dan Inco. Selain itu terdapat 43 IUP yang diterbitkan oleh Bupati Morowali Anwar Hafid juga kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat. Kasus lainnya adalah Kasus Bima dimana warga Desa Sumi, Rato dan lainnya dikecamatan Sape dan Lambu tidak pernah tahu jika wilayah hidup mereka sudah dikapling untuk pertambangan. Bupati melalui SK bernomor 188/45/357/004/2010 memberikan izin bagi PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN). Saat PT SMN melakukan aktivitas eksplorasi di lokasi seluas 24.980 Ha barulah warga mengetahui. Akibatnya berakhir dengan kemarahan penduduk yang dilampiaskan secara anarki kepada pemerintah setempat (Bupati). Sebulan setelah Kasus Bima, kemarahan massa juga terjadi di Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara yang juga diakibatkan pertambangan.

Berikut data beberapa propinsi di Indonesia yang memiliki cukup banyak IUP dan juga kontrak kerjasama migas yang disertai persentase penduduk miskin.

Tabel 1. Jumlah IUP, Kontrak Migas dan Persentase Penduduk Miskin

Propinsi	Jumlah Izin Tambang*	Jumlah Kontrak Migas	Prosentase Penduduk Miskin**	
Sumatera Selatan	189	29	16,73	14,67
Bangka Belitung	303	-	4,39	8,45
Jawa Timur	209	24	10,58	19,74
Kalimantan Timur	788	25	4,02	13,66
Kalimantan Selatan	261	2	4,54	5,69
NAD	75	4	14,65	23,54
NTT	56	1	13,57	25,10
Papua	9	22	5,55	46,02

Sumber: Jatam, Februari 2012

Dari berbagai penelitian di atas, perubahan fungsi kelembagaan pertanian belum tersentuh secara jelas dalam interaksi antara stakeholder terkait. Hasil penelitian baik di dunia maupun di Indonesia yang mengkaji perubahan fungsi kelembagaan pertanian pada masyarakat tani akibat pertambangan emas belum ditemukan penulis sejak melakukan studi pustaka. Untuk alasan tersebut maka penelitian mengenai perubahan fungsi

kelembagaan pertanian pada masyarakat tani menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh oleh penulis.

Penemuan emas di Kabupaten Bombana pada bulan September tahun 2008 telah membawa perubahan pada kehidupan masyarakat lokal baik dari aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, politik dan keamanan. Sejak dibukanya areal pertambangan, puluhan perusahaan pertambangan telah hadir melakukan eksplorasi dan produksi atas ijin pemerintah setempat.³ Kegiatan ini membuat terjadinya multiplier efek pada berbagai aspek kehidupan. Meskipun milyaran uang dipanen setiap hari dari tanah Bombana selama hampir lima tahun⁴, tetapi kontribusi positif terhadap pembangunan sosio ekonomi di tingkat akar-akar rumput masyarakat lokal hampir tidak terlihat. Terutama pada masyarakat tani sebagai masyarakat lokal terbesar yang terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan.

³ Pemberian ijin melakukan eksplorasi dan produksi kepada perusahaan-perusahaan pertambangan diatur dalam UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan kekuasaan Bupati yang sangat besar dalam mengatur pertambangan dikuatkan oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana hanya 6 urusan yang tidak diurus oleh Pemerintah Daerah dan tetap berada pada kewenangan Pemerintah Pusat yaitu urusan luar negeri, pertahanan keamanan, agama, pertanahan, moneter dan kehakiman peradilan.

⁴ Perputaran uang di SP-8 dan Desa Raurau bisa mencapai miliaran rupiah per hari. Sebab, setiap pendulang rata-rata mendapatkan 1 gram emas per hari, maka saat itu juga dia pegang uang kontan Rp 250 ribu. Jika di dua kawasan penambangan terdapat 60 ribu penambang, total uang kontan yang berputar bisa mencapai Rp 15 miliar per hari. [jika dinilai dengan harga emas saat ini yaitu Rp 450.000-500.000 maka perputaran uang meningkat hampir dua kali lipat] Itu dengan asumsi seluruh pendulang menjual emasnya tidak di luar lokasi penambangan (Dampak Tambang Emas Bombana oleh Abdul Saban, 30 September 2009. www.kabarindonesia.com diakses 1 Februari 2012).

Masyarakat lokal di Kabupaten Bombana sebagian besar hidup dari hasil pertanian dan hasil laut. Mereka adalah petani dan nelayan (dalam penelitian ini disebut masyarakat tani) Selebihnya adalah pedagang dan PNS. Sejak awal berdirinya sebagai sebuah Kabupaten tahun 2003, sektor pertanian selalu menjadi penyumbang PAD terbesar, bahkan setahun setelah ditemukannya emas, PAD Bombana dari sektor pertanian masih mencapai lebih 50 persen.

Kegiatan pertanian di Bombana terganggu oleh kegiatan pertambangan yang membuat tanah menjadi kering akibat dibendungnya air sungai yang menjadi sumber air sawah. Kondisi ini diperparah oleh musim kering yang panjang akibat penebangan tanaman-tanaman dan hutan-hutan pada areal pertambangan.⁵ Untuk mempertahankan hidupnya, masyarakat

⁵ Ratusah Hektar Sawah Di Bombana terancam tidak dapat di olah para petani karena mengalami kekeringan. Curah hujan yang terjadi selama ini tidak normal dan mengakibatkan sistem pengairan irigasi tidak mengalir dengan cukup. Kondisi tersebut membuat para petani enggan mengolah persawahan mereka karena takut mengalami kegagalan. Tiga kecamatan yang mengalami kekeringan terparah yakni kecamatan Rarowatu Utara, Lantari Jaya dan Rumbia. Sumber: Curah Hujan Tak Normal, Ratusah Hektar Sawah Bombana Kekeringan, Media Sultra 25-5-2011. Diakses tanggal 17 Oktober 2011.

Inilah Duka dibalik keberadaan tambang Emas di Kabupaten Bombana, kini warga Desa Marga Jaya dan Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara, harus menderita kerugian akibat kerusakan lingkungan, akibat ulah salah satu perusahaan tambang emas. Warga di Dua Desa dan Kelurahan tersebut, sejak tahun 2009 hingga kini, sudah tidak lagi melakukan aktifitas pertanian maupun peternakan karena ribuan hektar sawah milik mereka tidak lagi dialiri air, jika musim hujan terjadi banjir, begitupun ternak mereka, sudah banyak yang mati, ada dugaan dari warga jika perusahaan tambang tersebut menggunakan bahan kimia yang menyebabkan ternak mereka mati. Salah satu penyebab terjadinya kekeringan pada persawahan warga, karena bendungan penampung air untuk persawahan mereka tidak bisa lagi mengairi persawahan, karena telah tertimbun lumpur salurannya, akibat pembuangan dari kegiatan pertambangan dan penggalian yang juga dilakukan di areal sungai. Para Petani mengaku, sejak tahun 2009 sawah mereka mengalami puso, karena

tani yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian melakukan berbagai tindakan adaptasi. Bagi petani yang memiliki cukup modal akan memanfaatkan situasi yang ada dengan menjadi pedagang atau penjual jasa. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah petani kecil yang tidak memiliki modal sehingga hanya satu pilihan yang ada untuk bertahan hidup yaitu beralih menjadi pekerja tambang.

Pencemaran sebagai dampak pertambangan juga telah mengancam jiwa penduduk setempat. Rachim (2009) mengungkapkan bahwa penelitian Emiyarti setahun setelah ditemukannya emas membuktikan terjadinya pencemaran merkuri pada aliran-aliran sungai yang bermuara pada perairan Bombana. Ia meneliti pada 12 titik sampel di empat lokasi berbeda yang menunjukkan pencemaran merkuri jauh di atas ambang toleransi. Bahkan di titik tertinggi yaitu bendungan Langkowala Bombana mencapai 0,98 mg/liter atau 490 kali lipat dari ambang batas tolerir 0,002 mg/liter. Pencemaran ini disebabkan tingginya aktivitas pertambangan rakyat oleh masyarakat setempat dan pendulang pendatang. Bupati Bombana akhirnya memutuskan untuk menutup kegiatan pertambangan rakyat tersebut pada bulan maret

masuknya lumpur ke areal persawahan mereka dan bukan hanya itu, rata-rata sebanyak 6 sampai 12 ekor sapi per kepala keluarga mengalami kematian, bahkan Sapi-sapi ternak warga yang meminum air di sungai tersebut menjadi kurus. Sumber: Armin, <http://id.shvoong.com/society-and-news/environment/2169558-emas-melimpah-petani-di-bombana-menjerit>, diakses 17 Oktober 2011.

tahun 2009. Apalagi pertambangan secara tradisional tidak didahului dengan studi Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Tidak dapat disangkal bahwa hadirnya pertambangan emas membuat geliat ekonomi di daerah Bombana bangkit dengan cepat, akan tetapi pertambangan yang ada hanya memakmurkan kaum kapitalis baru sebagai struktur baru yang terbentuk dalam masyarakat. Kondisi ini oleh Warren & Uphoff (1969) disebut sebagai sebuah perubahan sosial yang terjadi secara tiba-tiba. Kapitalisme pertambangan juga menggeser struktur, nilai-nilai, norma dan peran yang ada. Kelembagaan pertanian tidak berjalan sesuai fungsinya bahkan digantikan oleh fungsi-fungsi baru kegiatan pertambangan yang *disembedded* dengan petani. Peran petani bergeser menjadi penambang atau pedagang menjadikan norma-norma dan nilai-nilai hidup juga berubah. Menambang menjadi jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat, sekalipun petani tidak biasa melakukannya. Bertahan sebagai petani berarti memerlukan waktu yang panjang untuk mendapatkan nafkah sebab ada rentang waktu sejak menanam hingga panen dalam kegiatan pertanian.

Datangnya berbagai penduduk dari seluruh pelosok nusantara juga mempengaruhi interaksi sosial yang ada pada komunitas lokal. Hubungan erat yang saling mengenal antara masyarakat lokal yang ditandai dengan solidaritas yang tinggi, resiprositas yang kuat, redistribusi serta pembagian

kerja yang teratur terutama pada komunitas petani menjadi renggang ataupun berubah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mayo (1962) bahwa industri yang berkembang menyebabkan tingginya mobilitas para pekerja dimana para pekerja merupakan pendatang dari luar membawa kebudayaan masing-masing sehingga mengganggu kebudayaan masyarakat setempat.

Pertambangan emas juga menggeser struktur kepemilikan lahan-lahan pertanian dan perkebunan menjadi milik kuasa pertambangan. UU Agraria yang mengakui tanah ulayat masyarakat adat menjadi tidak berarti dengan adanya UU lain yang lebih baru dan bersifat *Lex Specialis*⁶ yang memberikan wewenang kepada Pemda setempat (Bupati) untuk mengeluarkan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang seringkali mencaplok tanah ulayat.⁷ Keadaan ini meresahkan masyarakat lokal sebab tidak ada aturan jelas mengenai pembagian hasil ataupun keuntungan dengan pemilik lahan. Sebagai contoh, seorang pemilik lahan kebun seluas 10 ha di daerah tambang mengeluhkan bahwa tanah tersebut meskipun milik pribadi namun tidak dapat diolah sebab masuk ke dalam wilayah dari salah satu

⁶ *Lex Spesialis derogat legi Generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

⁷ Pemberian ijin eksplorasi dan produksi kepada kuasa-kuasa pertambangan merupakan wewenang Bupati Bombana yang menurut Gubernur Sultra, Nur Alam memerlukan kontrol dari pemerintah pusat. Akan tetapi UU yang berlaku tidak memberikan ruang kepada Gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat di provinsi untuk melakukan kontrol. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan lima UU yaitu UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Tata Ruang, UU Perhubungan dan UU Pertambangan. (hasil wawancara live Metro TV dengan Gubernur Sultra, tanggal 26 Januari 2012)

perusahaan yang telah memperoleh IUP untuk eksplorasi. Hal ini terjadi pada banyak penduduk Bombana lainnya. Kondisi ini merupakan *Trigger factor* yang dapat menimbulkan konflik. Menurut data dari Jatim, Kasus 'perampasan' tanah oleh pertambangan terjadi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, setidaknya 40% lahan produktif (sawah, kebun dan ladang) dialih fungsi atau bahkan dirusak oleh sektor pertambangan. Di Kutai Kartanegara bahkan mencapai 26.000 ha lahan pertanian yang diambil alih pertambangan. Berikut adalah data alih fungsi lahan oleh kegiatan pertambangan dari Jatim.



Sumber: Jaringan Advokasi Tambang (Januari 2012)

Gambar 1. Alih Fungsi Lahan oleh Tambang

Berbagai fenomena di atas merupakan bentuk dari fungsi-fungsi kelembagaan yang tidak berjalan atau menyimpang dari tujuannya yang dikenal oleh Durkheim dalam Wallace (1969) sebagai anomie (*normlessness*), sedangkan oleh Merton dalam Wilson (1983) disebut sebagai disfungsi sosial. Disfungsi sosial yang dimaksud adalah sebuah pola perilaku yang tidak berjalan sesuai fungsinya (terjadi jika struktur, individu, pranata, dsb tidak berfungsi positif tapi negatif), atau merupakan konsekuensi objektif dari sistem. Sedangkan fungsi menurut Merton adalah konsekuensi teramati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu. Dalam penelitian ini dianalisis lebih dalam sebagai perubahan fungsi kelembagaan pertanian.

Selain perubahan pada tingkat individu dan masyarakat, kegiatan pertambangan juga mengakibatkan terjadinya perubahan pada perencanaan pembangunan pemerintah. Perlahan-lahan titik berat pembangunan di sektor pertanian mulai tergeser. Apalagi dengan adanya rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pertambangan di Sulawesi Tenggara maka sedikit banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung sektor pertanian akan bergeser ke sektor pertambangan. Pertambangan emas juga mempengaruhi berbagai aspek politik yang mengakomodir kepentingan elite tertentu dan elite lokal. Hal ini akan membawa konsekuensi bagi kehidupan penduduk setempat yang sebagian besar adalah petani.

Pada tabel 2 berikut ini terlihat perkembangan distribusi PDRB dari berbagai sektor sejak pembentukan Kabupaten Bombana tahun 2003. Dari tabel tersebut dapat dilihat distribusi PDRB sektor pertanian dan juga sektor pertambangan & penggalian sebelum dan sesudah ditemukannya emas di Bombana.

Tabel 2. Distribusi PDRB Kabupaten Bombana Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Sebelum dan Sesudah Penemuan Emas (Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	T a h u n				
	2006	2007	2008	2009	2010
1. Pertanian	356.624,21	408.535,31	491.062,98	544.612,31	651.907,72
2. Pertambangan dan Penggalian	15.893,47	17.535,85	35.975,54	42.631,70	62.593,43
3. Industri Pengolahan	7.441,96	8.667,53	11.460,56	13.528,35	17.857,84
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	2.071,20	2.255,89	2.472,48	2.804,49	3.684,73
5. Konstruksi / Bangunan	46.499,37	53.020,06	72.395,39	87.484,66	126.004,35
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	67.692,48	88.933,82	107.737,00	132.624,32	169.420,40
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8.436,52	9.545,93	13.227,36	15.758,01	20.604,72
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	25.998,57	28.271,57	36.144,43	42.054,62	51.261,08
9. Jasa-Jasa	74.619,70	81.009,98	107.905,23	130.903,03	160.153,95
PDRB	605.277,49	697.775,97	878.380,98	1.012.401,49	1.263.448,21

Sumber: Bombana Dalam Angka, 2007-2008
PDRB Kabupaten Bombana, 2010

Dari data pada tabel 2 tersebut diketahui bahwa terjadi peningkatan distribusi PDRB untuk sektor pertanian sejak sebelum ada tambang hingga setelah ada tambang emas. Tahun 2007 meningkat 12,71% dari tahun

sebelumnya dan meningkat 16,46% pada tahun 2010. Ini menunjukkan sektor pertanian tetap menjadi sektor yang mendapat perhatian pemerintah dan layak dipertahankan dan dikembangkan. Sementara di sektor pertambangan yang menjadi sumber pedapatan daerah juga terjadi peningkatan distribusi PDRB dari 9,4% tahun 2007 menjadi 31,89% tahun 2010. Ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah kepada sektor pertambangan.

Perusahaan-perusahaan pertambangan sebagai pemegang kuasa pertambangan yang melakukan eksplorasi maupun produksi emas di Kabupaten Bombana dalam melaksanakan fungsinya tidak dapat lepas dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat setempat. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral yang diwujudkan sebagai tanggung jawab sosial sebagaimana diatur dalam UU No.40 tahun 2007. Perusahaan pertambangan yang berorientasi kepada keuntungan dan bersifat kapitalis neoliberalisme memiliki tendensi yang besar untuk konflik dengan masyarakat lokal apabila tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan setempat, hal ini telah terjadi pada wilayah-wilayah pertambangan lain di seluruh dunia.⁸ Bentuk tanggung jawab sosial tidak sekedar bantuan sesaat kepada warga lokal tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk yang berkelanjutan

⁸ Kasus konflik di Ghana, Guatemala, Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dll

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak terjadi *gap* antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat.

Pemerintah, perusahaan pertambangan dan masyarakat adalah pilar-pilar terbentuknya *civil society*⁹ yang merupakan tujuan dari penyelenggaraan kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka harmonisasi dari fungsi-fungsi setiap stakeholder terkait mutlak diperlukan. Wilayah-wilayah Pertambangan secara global dewasa ini hanya menjadi sumber keuntungan (bersifat kapitalis) dan sumber konflik. Puncaknya seperti yang terjadi pada kasus pembakaran kantor Bupati di Nusa Tenggara Barat¹⁰.

Ketidakadilan baik dalam bentuk disparitas, ketidakadilan perlakuan terhadap warga lokal, dampak-dampak pertambangan berupa pencemaran terhadap tanah, air dan udara yang mengancam jiwa umat manusia, maupun keuntungan perusahaan yang hanya dinikmati oleh perusahaan dan kaum elite lokal semuanya merupakan *trigger factor* yang dapat memecah konflik.

⁹ Ife & Tersoriero (2008 : 35-36) menjelaskan tentang civil society sebagai masyarakat madani yaitu istilah yang digunakan untuk struktur-struktur formal atau semi formal yang dibentuk oleh masyarakat secara suka rela dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari pemerintah. Masyarakat Madani mencakup sektor non pemerintah atau sektor ketiga (dua sektor pertama adalah negara dan sektor swasta yang mencari laba), dimana badan-badan non pemerintah yang banyak ragamnya telah dibentuk untuk menolong memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat. Sedangkan Giddens (2000: 91) menambahkan lebih jauh bahwa Negara dan Masyarakat Madani harus bermitra, saling memberikan kemudahan dan saling mengontrol.

¹⁰ Kemarahan rakyat dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah berpuncak pada pembakaran kantor Bupati Bima yang merupakan simbol kekuasaan pemerintah lokal pada tanggal 23 Januari 2012 yang telah mengabaikan tuntutan masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bagaimana masyarakat tani mengalami dinamika-dinamika dalam kehidupannya yang membuat mereka melakukan adaptasi melalui strategi pencarian nafkah untuk bertahan ditengah perubahan fungsi kelembagaan pertanian terutama disfungsi, fungsi laten dan non fungsi akibat hadirnya pertambangan emas. Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji proses perubahan fungsi kelembagaan pertanian akibat tambang emas serta mengkaji strategi *livelihood* petani ditengah disfungsi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Masyarakat tani di Kabupaten Bombana mengalami perubahan sosial oleh kegiatan pertambangan. Aktivitas pertambangan mempengaruhi langsung kondisi alam (tanah, air dan udara) dimana petani selama ini melakukan produksi dan konsumsi di sektor pertanian. Terjadi perubahan fungsi-fungsi kelembagaan pertanian yang sebelumnya telah *acceptable* dengan petani dimana secara tiba-tiba berubah akibat ekspansi tambang. Keadaan ini menuntut komunitas tani untuk melakukan berbagai upaya dan strategi penghidupan yang baru. Apalagi hadirnya pertambangan membawa fungsi-fungsi baru yang belum mengakar sehingga menjadi *disembedded* bagi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana dampak-dampak kegiatan pertambangan emas terhadap lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kelembagaan pertanian di Kabupaten Bombana
2. Bagaimana bentuk dan proses terjadinya perubahan fungsi kelembagaan pertanian akibat perkembangan pertambangan emas di Kabupaten Bombana
3. Bagaimana strategi penghidupan (*livelihood*) yang ditempuh petani dalam merespon perubahan fungsi kelembagaan pertanian dibalik perkembangan pertambangan tersebut

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis dampak-dampak kegiatan pertambangan emas yang mempengaruhi kelembagaan pertanian di Kabupaten Bombana
2. Mengkaji dan menganalisis bentuk dan proses terjadinya perubahan fungsi kelembagaan pertanian akibat perkembangan pertambangan pada Desa-Desa di Kabupaten Bombana

3. Menganalisis strategi penghidupan (*livelihood*) yang ditempuh petani dalam merespon perubahan fungsi kelembagaan pertanian dibalik perkembangan pertambangan di Kabupaten Bombana

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu memberi nilai guna sebagai berikut.

1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai proses kejadian dari perubahan fungsi kelembagaan pertanian akibat perkembangan pertambangan pada Desa-Desa di Kabupaten Bombana
2. Menemukan pengertian yang jelas mengenai fungsi-fungsi (manifest, laten, disfungsi dan non fungsi) pada kelembagaan pertanian masyarakat tani akibat kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Bombana.
3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dan Perusahaan-perusahaan Pertambangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di daerah pertambangan.
4. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini merupakan kajian sosial yang menggunakan Teori Sosiologi Pertanian dengan pendekatan Struktural Fungsional. Teori Sosiologi Pertanian akan melihat bagaimana komunitas tani di area pertambangan emas hidup dan melakukan usahatani sebelum dan sesudah adanya pertambangan. Dimulai dengan membahas dampak-dampak pertambangan baik dampak atas lingkungan fisik, sosial maupun ekonomi. Selanjutnya, mengidentifikasi dampak tambang tersebut yang mempengaruhi kelembagaan pertanian yang ada dan menganalisis fungsi-fungsi kelembagaan pertanian dengan teori struktural fungsional Robert King Merton yang berasal dari pemikiran Talcott Parson. Untuk itu akan dibahas mengenai fungsi manifes, fungsi laten, disfungsi bahkan non fungsi dari Merton. Selanjutnya, fungsi dan disfungsi kelembagaan pertanian membawa dampak bagi kehidupan petani, karena itu dianalisis lebih jauh bagaimana strategi *livelihood* yang ditempuh petani dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya menggunakan kerangka Ellis (2000) yaitu melakukan kegiatan pertanian baik on farm, off farm dan kegiatan di luar pertanian atau non farm melalui pemanfaatan modal alam, modal fisik, modal Sumber Daya Manusia, modal finansial dan modal sosial (Conway dan Chambers, 1992), Selanjutnya strategi penghidupan yang ditempuh

dikategorikan berdasarkan pemikiran White (1991), yaitu akumulasi, konsolidasi dan survive.

A. Dampak Lingkungan Fisik, Lingkungan Sosial dan Lingkungan Ekonomi Kegiatan Pertambangan

Kegiatan pertambangan emas yang mengeksploitasi sumber daya alam berdampak langsung pada lingkungan fisik. Hilson (2001) menjelaskan dampak lingkungan fisik pada kasus pertambangan emas di Ghana. Menurut Hilson, masalah utama kegiatan pertambangan adalah terjadinya pengrusakan lingkungan oleh polusi merkuri dan degradasi tanah yang disebabkan produksi limbah industri pertambangan sebesar lima ton per tahun. Pengerukan menggunakan alat-alat berat menyebabkan kerusakan permukaan tanah. Kerusakan dan pencemaran ini melahirkan suatu institusi masyarakat sipil yang terdiri dari unsur pemerintah dan peneliti akademik yang disebut Komisi Mineral. Selanjutnya hasil kerja dari kolaborasi antara pihak universitas, EPA (*Environmental Protection Agency*) dan pemerintah yang melakukan riset teknologi adalah *Cleaner Production* (CP). Ini merupakan teknologi ramah lingkungan untuk mengatasi pencemaran sehingga dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan sekalipun berlangsung kegiatan industri pertambangan, terutama pada industri kecil. Selain itu, pemerintah Ghana mengadakan pendidikan lingkungan dan

improvisasi teknologi. *Cleaner Production* merupakan salah satu bentuk penyerapan aspirasi yang melahirkan solusi melalui keterlibatan semua unsur.

Dampak pertambangan lainnya yaitu di Murray Darling Basin Australia yang berada pada daerah pertanian dan daerah tangkapan meresahkan masyarakat setempat. Industri pertanian setempat prihatin tentang pertambangan batubara yang menghasilkan gas dan dapat merusak aliran dan kualitas air, merusak lahan pertanian yang mengancam mata pencaharian petani serta industri masyarakat pedesaan. Mereka juga cemas tentang pengolahan dan pembuangan garam yang dihasilkan selama proses ekstraksi gas lapisan batu bara. Komite Batubara mengakui bahwa meskipun pertambangan menghasilkan beberapa manfaat bagi masyarakat melalui manfaat dari kegiatan produksi tetapi banyak kerugian yang juga diterima masyarakat. Untuk itu Komite mengeluarkan beberapa rekomendasi antara lain meminta pemerintah untuk mendukung studi dampak pertambangan dan tidak mengambil keputusan lebih lanjut sehubungan dengan perizinan industri pertambangan dan ekstraktif sampai studi selesai dan dirilis ke publik. Komite juga merekomendasikan Pemerintah Persemakmuran untuk memastikan pencegahan kegiatan ekstraktif pada tambang baru di Murray Darling Basin jika dampaknya pada sumber daya air belum dapat diantisipasi (The Senate, 2009)

Hasil penelitian Sethi, *et al.* (2011) juga menjelaskan Industri Pertambangan Grasberg Papua barat Indonesia dan dampak-dampaknya. Sejak mulai tahun 1972, Tambang Grasberg telah menjadi usaha tambang terbesar FCX (Freeport-McMoRan Copper dan Gold Company, Inc). Tambang Grasberg adalah produsen terbesar emas di dunia dan produsen tembaga kedua terbesar yang juga menghasilkan perak sebagai produk sampingan. Jumlah batu diekstraksi melalui operasi penggilingan Freeport setiap hari adalah sekitar 250.000 ton yang sebagian besar menjadi tailing (limbah tanah) yang diangkut oleh sungai ke area pembuangan. Pembuangan limbah melalui sungai ini menjadi aspek paling kontroversi dari operasi Freeport. Dari segi ekonomi, keuntungan yang diperoleh sangat besar. Tanggal 31 Desember 2009, pendapatan Freeport mencapai \$ 15.040.000.000. Perusahaan ini memiliki sekitar sepertiga dari cadangan tembaga di Indonesia, Freeport Inc. memiliki cadangan pada tahun 2009 mencapai 104.200.000.000 £ tembaga, 37,2 juta ons emas, 2.590.000.000 £ molibdenum, 270,4 juta ons perak, dan 780 juta pon kobalt. Seperti kebanyakan perusahaan pertambangan dan minyak lainnya, Freeport Inc. harus berurusan dengan isu-isu degradasi lingkungan. Selain itu, perusahaan ini juga harus berurusan dengan aspek manusia dari operasi pertambangan yang selalu melibatkan konflik antara kepentingan perusahaan dan hak orang-orang pribumi atas tanah, air, dan sumber daya udara yang telah dibatalkan oleh pemerintah pusat dan atas

pengabaian ekonomi, budaya tradisional dan nilai-nilai lokal. Pada akhir 1994 dan sampai pertengahan 1996, Tambang Grasberg Freeport menjadi fokus serangan LSM. Bahkan OPM (Organisasi Papua Merdeka) terang-terangan menyatakan bahwa sejak awal operasi pertambangan, perusahaan tambang tersebut terlibat dengan tentara Indonesia melakukan penahanan, penyiksaan, tindakan intimidasi dan menyebabkan hilangnya hampir 43.000 masyarakat setempat. Untuk itu perusahaan mengalami tuduhan pelanggaran HAM dan menjadi sorotan dunia internasional.

Untuk mengatasi dampak-dampak pertambangan maka setiap perusahaan pertambangan perlu melakukan studi mengenai dampak pertambangan sebelum melakukan kegiatan pertambangan terutama produksi. Studi tersebut antara lain studi SIA (*Social Impact Assessment*), studi EIA (*Environmental Impact Assessment*) yang di Indonesia dikenal sebagai studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Walaupun studi ini belum menjamin dampak-dampak pertambangan benar-benar menjadi prioritas bagi perusahaan dibanding daya tarik keuntungan yang dihasilkan pertambangan.

Studi SIA telah dilakukan oleh perusahaan tambang Batu Bara Copabella di Queensland Tengah Australia. Menurut Lockie, *et.al* (2009) studi SIA tersebut dilakukan dalam dua periode berbeda yaitu pada tahun 2002-2003 dan 2006-2007. Studi pertama memberikan titik referensi bagi prediksi

penilaian proyek ekstraksi sumber daya yang diusulkan, sedangkan unsur lainnya ditambahkan oleh studi kedua menggambarkan bagaimana dampak yang terkait oleh tambang dapat bervariasi dari waktu ke waktu karena perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Hal penting dari studi ini adalah mengamankan keuntungan ekonomi (termasuk penyerapan tenaga kerja dari masyarakat untuk jaminan pendapatannya) sekaligus menjaga erosi modal sosial (oleh akumulatif dampak tambang) sehingga mampu mengatasi kemerosotan masa depan melalui sektor pertambangan.

Kegiatan industri pertambangan mempunyai dua sisi dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari industri pertambangan antara lain meningkatnya pembangunan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan asli daerah tambang, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan lapangan kerja bagi warga setempat. Sedangkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan adalah pencemaran lingkungan (tanah, air dan udara), hilangnya mata air, sebagian hutan, kebun dan lahan pertanian, kebisingan, kesehatan menurun, dan sebagainya. Pada tahap yang lebih lanjut, dampak pertambangan dapat mengakibatkan perubahan perencanaan pemerintah, konflik kepentingan bahkan kerusuhan yang kadangkala anarkis.

Vanclay (2002) mengungkapkan pentingnya membedakan antara dampak sosial dan proses-proses perubahan sosial. Banyak variabel

diukur dalam pengkajian dampak sosial. Pengkajian dampak sosial berupa perubahan sosial akan mengukur apakah terjadi dampak atau tidak dari situasi yang dihadapi.

Moore (1991) mendefinisikan perubahan sosial signifikan dengan perubahan pada struktur sosial. Dimana arti dari struktur sosial adalah “pola pada aksi dan interaksi sosial”. Dalam definisinya Moore memasukkan berbagai muatan pada struktur : norma, nilai dan fenomena budaya. Jelasnya, sebuah definisi yang luas. Definisi lain yang sama luasnya, menyatakan bahwa perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi dalam aspek pada proses sosial, pola, atau bentuk dan sebagai modifikasi dalam pola yang menentukan hubungan antar manusia dan standar yang berlaku. Selanjutnya Moore membagi level analisis pada perubahan sosial sebagai berikut: (1) Global, (2) peradaban, (3) Budaya, (4) Masyarakat, (5) Komunitas (6) Institusi (7) Organisasi (8) Interaksi dan (9) individual.

Perubahan sosial yang terjadi akibat industri ataupun kegiatan pertambangan juga disebut sebagai dampak lingkungan sosial (dampak sosial) oleh beberapa ahli seperti Armour (1990), Juslen (1995), Taylor et al. (1995), Branch et al. (1984), Gramling and Freudenburg (1992), dan

Vanclay (2002). Armour dalam Vanclay (2002)¹¹. mengklasifikasikan variabel dampak sosial terdiri atas (1) cara hidup manusia yaitu bagaimana mereka bekerja, bermain, berinteraksi satu sama lain pada kehidupannya sehari-hari; (2) budaya, yaitu keyakinan bersama, adat istiadat dan nilai-nilai (3) stabilitas yaitu kohesi, stabilitas, karakter, pelayanan dan fasilitas. Vanclay (2002: 186) menambahkan pendapat Armour yaitu sistem politik, lingkungan, kesehatan, kepemilikan dan hak-hak pribadi, kekhawatiran akan masa depan komunitas dan anak-anaknya. Selanjutnya Juslen (1995) dalam Vanclay (2002) mengidentifikasi enam kategori umum dampak sosial yaitu (1) standar dampak sosial yang sering diributkan yaitu polusi dan sebagainya, (2) dampak psikososial (seperti kohesi komunitas, jaringan sosial yang terganggu), (3) kekhawatiran (4) dampak pada penilaian (5) dampak atas negara dan pelayanan pribadi (6) dampak atas mobilitas (transportasi, keamanan dan rintangan di jalan).

Pertambangan di Kabupaten Bombana membawa dampak bagi perkembangan ekonomi yang sangat luas. Hal ini disebabkan banyaknya uang yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan menjadikan uang menjadi simbol dari kedudukan sosial dalam masyarakat. Menurut Simmel dalam Ritzer (2009), uang memungkinkan orang mereduksi fenomena yang sangat

¹¹ Armour A. *Integrating impact assessment into the planning process*. Impact Assess Bull 1990; 8(1/2):3-14.

berbeda menjadi sejumlah Dollar. Dengan kata lain merelatifkan segalanya. Ekonomi uang menghancurkan kebenaran abadi yang dipercaya sejumlah orang. Keberhasilan orang dalam meningkatkan kebebasan dan melampaui gagasan-gagasan mutlak semakin memakan ongkos. Simmel dalam Ritzer (2009) menyebutkan bahwa alienasi yang menjadi endemi bagi menyebarnya kebudayaan obyektif ekonomi uang modern menjadi ancaman yang lebih berbahaya dari jahatnya absolutisme. Pada akhirnya uang menjadi simbol dan faktor utama dalam perkembangan mode eksistensi relativistik.

Selain dampak lingkungan sosial dan dampak lingkungan ekonomi tersebut, Kemp, *et.al.* (2011) melakukan penelitian yang berkaitan dengan konflik antara perusahaan-perusahaan pertambangan dengan komunitas lokal. Kemp melihat bahwa perusahaan pertambangan selalu berada di bawah tekanan komunitas lokal, kelompok-kelompok masyarakat sipil, NGO, institusi-nstitusi global, lembaga-lembaga sosial penyanggah dana, lembaga-lembaga pemerintah, dan stakeholder lainnya dalam menghadapi konflik perusahaan dan komunitas. Kemp mendefinisikan hal ini sebagai interaksi-interaksi dari pertentangan kecil yang meluas hingga konflik kekerasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil studi literatur dari beberapa hasil penelitian Kemp menyimpulkan bahwa perusahaan pertambangan secara global didakwa menjadi penyebab konflik atau memperburuk kelesuan yang laten

dalam komunitas. Konflik dimotivasi oleh ekonomi atau jaminan sumber mata pencaharian; kepemilikan tanah, akses air, degradasi lingkungan; dampak gender; dampak pada kohesi sosial dan keyakinan kultural; penanganan dan klaim tentang kekerasan HAM dan ketidakadilan, kesenjangan pada distribusi pembagian keuntungan dan resiko-resiko; serta kepentingan pembangunan. Penelitian ini akan mengidentifikasi dampak-dampak tambang berupa dampak atas lingkungan fisik, lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial.

B. Fungsi dan Disfungsi

Fungsi dan disfungsi yang dibicarakan pada tulisan ini didasarkan pada teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Robert King Merton dari teori Struktural Fungsional Parson. Teori Struktural Fungsional Parson bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial yang meliputi empat fungsi yaitu *adaptation, goal attainment, integration and latency* (dalam Turner, 1991). Dari teori ini Dahrendorf kemudian mengembangkan antitesisnya berupa teori konflik dari Marx bahwa konflik memiliki dua wajah yaitu konflik itu sendiri dan konsensus. Sedangkan Merton mengembangkannya dengan menyempurnakan tiga postulat fungsional Parson.

Teori konflik menegaskan dominasi beberapa kelompok sosial tertentu oleh kelompok sosial yang lain, melihat tatanan didasarkan atas manipulasi

dan kontrol oleh kelompok dominan, dan melihat perubahan sosial terjadi secara cepat dan tidak teratur ketika kelompok subordinat menggeser kelompok dominan. Kondisi pada Kabupaten Bombana, pertambangan menyebabkan perubahan sosial yang tiba-tiba dan memunculkan kelompok perusahaan sebagai kelompok baru yang menguasai sumber daya alam, memiliki modal besar dan menguasai pengetahuan teknis sementara masyarakat lokal masih terpola dengan kehidupan sebelum masuknya pertambangan yaitu modal yang terbatas, taraf hidup rendah, pengetahuan dan pendidikan yang terbatas. Penelitian ini lebih memilih teori struktural fungsional Merton dari pada teori konflik Dahrendorf atau Marx disebabkan konflik belum semestinya terjadi melainkan hanya sebuah peluang yang mungkin terjadi apabila tidak terdapat keseimbangan dalam rentang waktu yang lama antara pemerintah, perusahaan pertambangan dan masyarakat setempat (masyarakat tani) dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sedangkan teori struktural fungsional Merton mampu mengkaji fungsi dan disfungsi kelembagaan pertanian yang bertahun-tahun melekat dalam kehidupan masyarakat tani. Perubahan fungsi kelembagaan pertanian selanjutnya menimbulkan upaya petani untuk mempertahankan kehidupannya melalui strategi *livelihood*.

Teori struktural fungsional Merton menjelaskan analisis fungsional dengan menyempurnakan tiga postulat kesatuan fungsional Parson (Poloma,

1987; Turner, 1991). Postulat pertama, Kesatuan Fungsional masyarakat dibatasi sebagai “suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat dibatasi atau di atur”. Menurut Merton dalam Poloma (1987) kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah “bertentangan dengan fakta”. Sebagai contoh dia mengutip beberapa kebiasaan masyarakat yang dapat bersifat fungsional bagi suatu kelompok (menunjang integrasi dan kohesi suatu kelompok) akan tetapi disfungsional (mempercepat kehancuran) bagi kelompok lain. Paradigma merton menegaskan disfungsi elemen (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif (elemen integratif). Ia juga menegaskan bahwa apa yang fungsional bagi suatu kelompok (misalnya masyarakat katolik atau Protestan di Kota Belfast), tidak fungsional bagi keseluruhan (bagi semua masyarakat Kota Belfast). Oleh karena itu batas-batas kelompok yang dianalisa harus diperinci.

Penelitian Burkard (2002) Di Sulawesi Tengah pada tiga desa yang terletak ditepian hutan hujan taman nasional Lore Landu yaitu Desa Situwu, Desa Watumaeta dan Desa Rompo menjelaskan fungsi dan disfungsi kelembagaan. Pada ketiga Desa, berlaku sistem perladangan berpindah yang menyebabkan kepemilikan lahan-lahan yang pernah ditanami

kemudian ditinggalkan menjadi tidak jelas. Dalam perjalanannya terjadi peralihan sistem penanaman berpindah (seperti *Mapandulu* yaitu membuka hutan untuk lahan baru) ke sistem *bera* lahan kering dan pertanian permanen. Kelembagaan *Mapandulu* berfungsi menjamin sekuritas sosial masyarakat tani setempat. Sebab dapat memberikan hasil produksi yang cukup bagi kehidupan petani. Akan tetapi, kelembagaan tersebut disfungsi bagi negara dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam hutan hujan taman nasional Lore Landu. Ini merupakan bukti bahwa apa yang fungsional bagi satu kelompok (petani) tidak fungsional (disfungsi) bagi keseluruhan (negara). Selanjutnya peralihan ke sistem pertanian permanen terjadi bukan karena tekanan penduduk sebagaimana umumnya tetapi disebabkan oleh hadirnya kelembagaan agraria yang mengatur kepemilikan lahan secara hukum (sertifikasi lahan) dan penetrasi insentif pasar (harga kakao yang tinggi). Sebelumnya, konflik klaim hutan antara negara dengan penduduk mengancam keamanan komunitas yang disertai lemahnya penegakan dan sanksi hukum. Keamanan kepemilikan lahan tidak menjadi masalah sepanjang tanah dibudidayakan secara permanen oleh pemiliknya. Hadirnya migran (terutama Bugis dan Sunda) telah meningkatkan jaminan kepemilikan, identifikasi plot serta sertifikasi tanah. Di masa lalu, tidak jelasnya peraturan dan organisasi yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam (hutan) menjadikan pemimpin desa memiliki kekuatan mutlak dalam distribusi sumber daya. Dari kasus ini terlihat bagaimana

kelembagaan baru (kelembagaan agraria dan pertanian permanen) hadir mengganti kelembagaan lama (seperti *Mapandulu*) telah membawa fungsi-fungsi baru yang positif bagi penduduk dan negara. Yaitu jaminan kepemilikan lahan secara hukum bagi penduduk dan perlindungan sumber daya hutan bagi negara.

Postulat kedua, fungsionalisme universal berkaitan dengan postulat pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif”. Merton dalam Poloma (1987) memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional (*net balances of functional consequences*), yang menimbang fungsi positif relatif terhadap fungsi negatif. Seorang fungsionalis harus mencoba mengkaji fungsi positif maupun fungsi negatifnya, dan kemudian menetapkan apakah keseimbangan di antara keduanya lebih menunjuk pada fungsi negatif atau positif. Dalam Turner (1991) Merton menjelaskan bahwa dalam dunia nyata tidak seluruh struktur, adat istiadat, gagasan dan keyakinan, serta lain sebagainya memiliki fungsi positif. Dicontohkan pula dengan struktur sosial dengan adat istiadat yang mengatur individu bertingkah laku terkadang

membuat individu tersebut depresi hingga bunuh diri. Postulat struktural fungsional menjadi bertentangan.

Hasil penelitian Dharma, dkk. (2012) mengenai kelembagaan zakat di Desa Patila Sulawesi Selatan menunjukkan fungsi positif dari kelembagaan tersebut. Melalui zakat maka terjalin interaksi sosial dalam masyarakat yang baik berdasarkan *networking* dan *trust*. Hal ini terlihat dari jaringan yang terbentuk sebagai kelompok penyumbang zakat tidak hanya berasal dari masyarakat lokal yang berdomisili di Patila tetapi juga masyarakat yang telah bermigrasi ke daerah lain. Para penyumbang zakat berasal dari beberapa organisasi yaitu Dewan Pembangunan Masjid dan Pendidikan, Kelompok Tani dan Kelompok Kios Kolektif. Keadaan ini juga menunjukkan adanya *trust* dari masyarakat tersebut kepada pengelola zakat. Dengan demikian tercipta penumpukan modal yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial. Melalui Lembaga Zakat tercipta pembangunan secara swadaya oleh masyarakat Desa terutama dalam membangun infrastruktur sosial dan Pertanian. Keadaan ini menunjukkan fungsi-fungsi positif dalam sebuah kelembagaan zakat.

Postulat ketiga yang melengkapi trio postulat fungsionalisme adalah postulat *indispensability* (tak terhindarkan). Ia menyatakan bahwa “dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus

dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai suatu keseluruhan” Menurut Merton postulat ini masih kabur. Belum jelas apakah fungsi (suatu kebutuhan sosial, seperti reproduksi anggota-anggota baru) atau item (sebuah norma, seperti keluarga, batin), merupakan suatu keharusan. Merton menulis bahwa postulat *indispensability* sebagaimana yang sering dikatakan mengandung dua pertanyaan yang berkaitan, tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Pertama, bahwa ada beberapa fungsi tertentu yang bersifat mutlak dalam pengertian, bahwa kecuali apabila mereka dijalankan, maka masyarakat (atau kelompok maupun individu) tidak akan ada. Hal ini selanjutnya melahirkan prasyarat fungsional atau prakondisi-prakondisi yang secara fungsional perlu bagi eksistensi suatu masyarakat. Kedua, yang merupakan masalah lain yang sama pentingnya menganggap bahwa bentuk-bentuk sosial atau kultural tertentu adalah mutlak untuk memenuhi masing-masing fungsi tersebut (Merton dalam Poloma, 1987)

Didalam menyatakan keberatannya terhadap ketiga postulat itu Merton menyatakan bahwa (1) kita tidak mungkin mengharapkan terjadinya integrasi masyarakat yang benar-benar tuntas, (2) kita harus mengakui bahwa disfungsi maupun konsekuensi fungsional positif dari suatu elemen kultural; dan (3) kemungkinan alternatif fungsional harus diperhitungkan dalam setiap analisa fungsional.

Selain sanggahannya terhadap ketiga postulat di atas, Merton masih mengetengahkan masalah lain dalam fungsionalisme yang mentah itu, khususnya kesimpangsiuran antar "motivasi-motivasi yang disadari" dan "konsekuensi-konsekuensi objektif" Dengan gaya mirip Durkheim, Merton menyatakan bahwa masalah utama bagi para ahli sosiologi adalah konsekuensi objektif, bukannya motivasi. Tetapi konsekuensi yang demikian dapat berupa konsekuensi manifes atau laten : "fungsi manifes adalah konsekuensi objektif yang membantu penyesuaian atau adaptasi dari sistem dan disadari oleh partisipan dalam sistem tersebut, sedang fungsi laten adalah fungsi yang tidak dimaksudkan atau disadari".

Teori Veblen tentang "Konsumsi Mewah" (dimana pengeluaran uang secara liberal untuk hal-hal mewah yang berkaitan dengan seseorang) misalnya menunjukkan pentingnya mengetahui fungsi laten itu. Walaupun fungsi manifes pembelian sebuah mobil adalah sebagai sarana transportasi dari dan ke tempat kerja, tetapi pembelian sebuah mobil mewah memenuhi fungsi laten untuk mempertontonkan kekayaan dan status kepada masyarakat. Setiap praktek kebudayaan dapat dianalisa dari perspektif fungsi laten dan manifes ini. Merton sendiri menggunakan mesin politik sebagai contoh. Mekanisme politik cenderung untuk merintangai keleluasaan pelaksanaan suatu pemeritahan yang demokratis dilihat sebagai disfungsional, dalam arti memberi sumbangan negatif pada pemerintah

setempat dengan menghambat proses demokratis (Merton dalam Poloma, 1987)

Walau mungkin benar dari tingkat manifes, tetapi dalam analisa yang demikian ada fungsi laten yang diabaikan. Sebagai contoh di tahun 1930-an, ketika mesin politik berada dalam kondisi prima ternyata mesin tersebut melayani penduduk lokal yang sedang mengalami depresi yang parah. Pada waktu itu mesin politik banyak menyediakan pelayanan yang dewasa ini dilakukan oleh badan-badan kesejahteraan rakyat (*welfare agency*). Dalam contoh ini fungsi laten secara sosiologis mungkin lebih penting dari fungsi manifes.

Hasil penelitian Salman (2006) menjelaskan fenomena fungsi laten yang terjadi pada komunitas maritim di Sulsel. Dalam buku "Jagad Maritim" dijelaskan bagaimana tiga komunitas nelayan mengalami diferensiasi sosial dan rasionalisasi tindakan yang berlangsung tidak secara linear, berbeda-beda menurut komunitasnya. Kompleksnya perubahan terutama terjadi pada komunitas penangkap ikan. Nilai siri' sebagai unsur lokal yang dijunjung tinggi masyarakat Sulawesi Selatan dalam menjaga 'rasa malu' di tengah masyarakat memiliki fungsi laten dalam menimbulkan motivasi dan etos kerja bagi sawi untuk meningkatkan posisinya menjadi punggawa. Selain itu, naik haji sebagai manifestasi dari nilai agama berfungsi laten menjadi sumber

etos kerja. Keduanya berkomplementasi dalam pencapaian prestasi kerja bagi aktor yang menggerakkan transformasi industri penangkapan ikan yang prakapitalistik menjadi industri penangkapan ikan yang relatif kapitalistik.

Menurut Merton dalam Poloma (1987), kaum fungsionalis harus mengingat bahwa apa yang mungkin fungsional bagi suatu kelompok boleh jadi tidak fungsional bagi kelompok lain. Lebih dari itu juga tidak melupakan fungsi laten ketika sedang terbius oleh fungsi manifes yang lebih jelas terlihat. Oleh karena praktek kebudayaan bisa saja tidak secara total bersifat integratif ataupun disintegratif, maka penilaian fungsionalitasnya harus dilihat dalam konteks keseimbangan konsekuensi-konsekuensinya. Merton merupakan penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awal yang menekankan kesatuan, stabilitas dan harmonis sistem sosial (walaupun konsep Merton dikritik oleh Dahdendroff, tokoh teori konflik yang menyebutkan bahwa fungsionalisme merupakan sebuah studi tentang utopia /khayalan)

Secara logika, Fungsionalisme dapat dikatakan sebagai ide atas sebuah pola tingkah laku yang memungkinkan terjadinya disintegrasi atau disfungsi. Merton menyadari bahwa beberapa struktur mungkin memiliki konsekuensi keduanya yaitu fungsi dan disfungsi. Bagaimanapun para fungsionalis selalu mengasumsikan pola tingkah laku yang tidak bertahan

atau kehilangan banyak fungsinya adalah disfungsi (Parson dalam Wilson, 1983)

Ketika struktur atau institusi dapat memberikan kontribusi pada terpeliharanya bagian lain sistem sosial, merekapun dapat mengandung konsekuensi negatif bagi bagian-bagian lain tersebut atau dikenal sebagai disfungsi. Merton juga menambahkan gagasan non fungsi, yang ia definisikan sebagai konsekuensi yang tidak relevan bagi sistem tersebut. Analisis yang baik dari kaum fungsionalis seharusnya tak hanya mengamati fungsi dan disfungsi, tetapi juga mengamati fungsi laten dan manifes (Merton dalam Ritzer, 2009). Atas dasar tersebut maka penelitian ini menggunakan empat kategori fungsi dari Merton yaitu fungsi manifes, fungsi laten, disfungsi dan non fungsi dalam menganalisis perubahan fungsi kelembagaan pertanian sebagai dampak pertambangan emas di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara.

C. Kelembagaan Pertanian

Secara sederhana Huntington (1965) mendefinisikan Lembaga sebagai pola perilaku yang selalu berulang dan bersifat kokoh serta dihargai oleh masyarakat. Sedangkan Kelembagaan (institusi) adalah sistem organisasi dari hubungan sosial yang terwujud dari beberapa nilai umum dan

mempertemukan beberapa kebutuhan dasar masyarakat. Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang mempunyai arti pola aktivitas yang sudah tersusun baik yang biasanya diikuti adanya asosiasi yang merupakan kelompok-kelompok untuk melaksanakan pola aktivitas tersebut (Widayati, 2003)

Menurut Uphoff (1986) pengertian lembaga dan organisasi seringkali membingungkan, karena itu ia membaginya atas 3 kategori. (i) organisasi yang tidak/bukan lembaga, (b) institusi/lembaga yang tidak organisasi, dan (c) organisasi yang merupakan lembaga (atau sebaliknya, lembaga yang organisasi). Selanjutnya disimpulkan bahwa lembaga adalah sekumpulan norma dan perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu dan digunakan untuk mencapai tujuan kolektif. Kelembagaan juga didefinisikan sebagai suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang atau lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Dalam hal ini Lembaga dapat memiliki struktur yang tegas dan formal, dan lembaga dapat menjalankan satu fungsi kelembagaan atau lebih. Hal ini sejalan pendapat Soekanto (2003) yang mendefinisikan lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan dari norma-norma segala tindakan berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya, Veblen lebih mengartikan kelembagaan tersebut kepada norma-norma, nilai-nilai, tradisi dan budaya (Deliarnov, 2003). Sedangkan North menyatakan kelembagaan itu adalah peraturan perundangundangan

berikut sifat-sifat pemaksaan dari peraturan-peraturan tersebut serta norma-norma perilaku yang membentuk interaksi antara manusia secara berulang-ulang (Deliarnov, 2003).

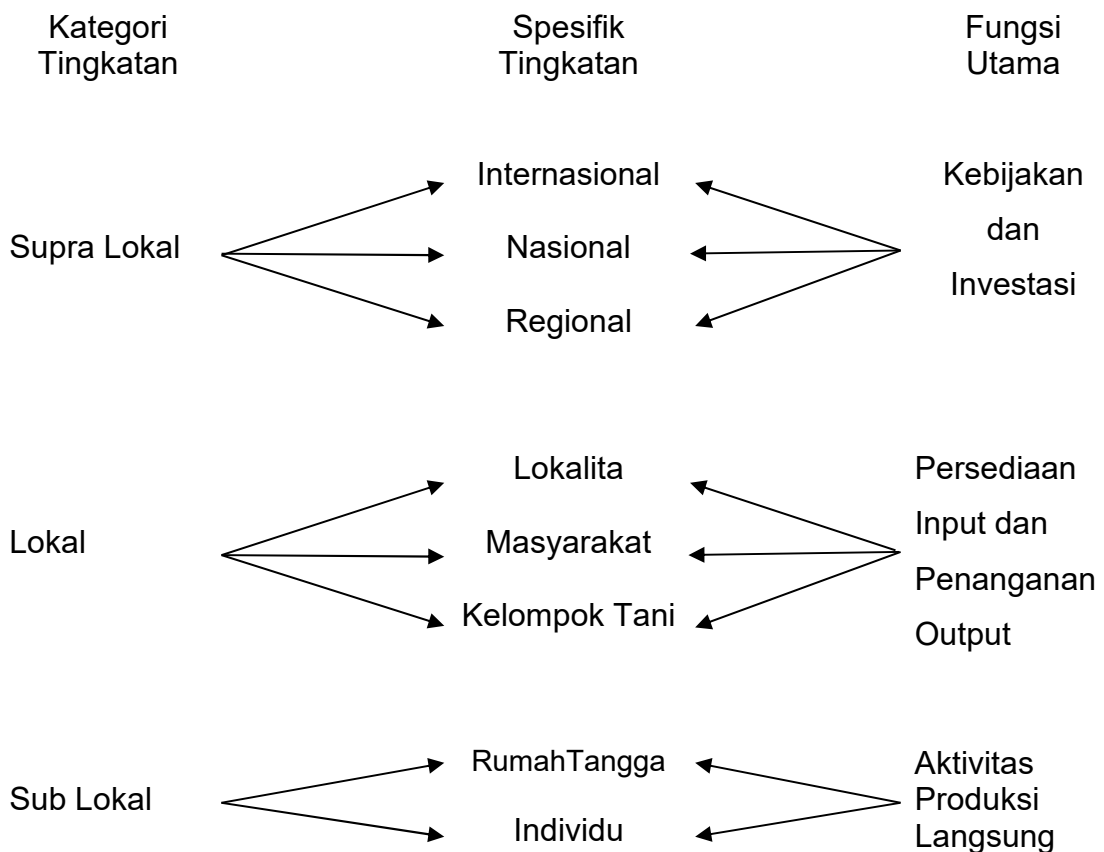
Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa kelembagaan pertanian dalam penelitian ini adalah “norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan”.

Menurut Daryanto (2004), dalam kehidupan nyata, kelembagaan dapat menjadi peubah eksogen dalam proses pembangunan, dengan demikian kelembagaan dianggap sebagai penyebab segala perubahan pembangunan. Namun di pihak lain, kelembagaan bisa juga menjadi peubah endogen, dimana perubahan kelembagaan diakibatkan karena adanya perubahan-perubahan pada sistem sosial masyarakat yang ada. Karena itu akhirnya kelembagaan yang ada dalam masyarakat sudah mengalami dinamika perubahan zaman. Banyak lembaga-lembaga yang hilang, tetapi banyak juga lembaga-lembaga baru yang bermunculan sesuai iklim pembangunan.

Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di Kabupaten Bombana. Kehadiran tambang telah membuat sebagian lembaga-lembaga pertanian mengalami perubahan fungsi baik dari fungsi manifes menjadi fungsi laten, bahkan ada juga yang mengalami disfungsi. Banyak juga lembaga-lembaga yang bermunculan oleh hadirnya tambang. Sebuah

kelembagaan mempunyai tiga aspek penting yaitu (i) Terdapat aturan main (*rule of the game*) dimana komponennya adalah norma-norma, (ii) Memiliki struktur dan tanpa struktur (pranata), dan (iii) Memiliki sifat melembaga (*institutionalized*) atau mengakar di masyarakat.

Kelembagaan pertanian yang dikaji dalam penelitian ini berada pada tingkatan lokal dan sub lokal. Berdasarkan tingkatan dan fungsi utama kelembagaan, maka Uphoff (1986) menjelaskannya melalui skema berikut ini.



Gambar 2. Skema Tingkatan dan Fungsi Pengembangan Kelembagaan

Dalam manajemen pembangunan, kelembagaan tersebut terjelma setidaknya melalui enam kategori lembaga lokal yang dapat diklasifikasi dalam tiga sektor. *Pertama*, lembaga lokal yang termasuk dalam sektor publik (*public sector*), terdiri dari administrasi lokal dan pemerintahan lokal. *Kedua*, lembaga lokal yang termasuk dalam sektor sukarela (*voluntary sector*), terdiri atas organisasi keanggotaan dan koperasi. *Ketiga*, lembaga lokal yang termasuk dalam sektor swasta (*private sector*), terdiri atas organisasi jasa dan bisnis swasta. Kelembagaan lokal tersebut mengelola bidang-bidang pembangunan lokal yang terdiri dari: sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, pertanian dan non-pertanian (Uphoff, 1986).

Masyarakat tani di Kabupaten Bombana adalah masyarakat desa yang dalam melakukan kegiatan pertanian masih bersifat tradisional dan bersahaja. Sebelum masuknya pertambangan, kegiatan ekonomi penduduk lokal belum didominasi sistem ekonomi uang yang terlihat dengan masih kuatnya keterkaitan kegiatan ekonomi dan sosial. Kehidupan gotong royong, resiprositas, redistribusi hasil pertanian masih kental mulai dari proses produksi hingga panen. Dalam perspektif pertanian, lembaga adalah pelaku atau wadah untuk menjalankan satu atau lebih fungsi kelembagaan, yaitu ; fungsi sebagai wadah pembelajaran, fungsi wahana kerjasama, dan fungsi sebagai unit produksi. Akan tetapi, hadirnya pertambangan yang membawa

dampak sosial, ekonomi dan lingkungan telah membuat sistem yang telah berjalan dengan baik mengalami guncangan. Kehadiran tambang secara politik ekonomi telah mempengaruhi kelembagaan pertanian yang ada dan menyebabkan terjadinya perubahan fungsi.

Brinkerhoff dan Goldsmith (1990) memahami kelembagaan sebagai sebuah sistem yang idealnya berkelanjutan oleh adanya daya kontingensi dibawah pengaruh lingkungan politik ekonomi. Teori kontingensi tersebut berdasarkan pada tiga asumsi yaitu (1) Tidak ada prinsip organisasi yang benar untuk semua keadaan, (2) Sukses sebuah organisasi tergantung kebersesuaiannya dengan lingkungan dan (3) Agar bersesuai dengan lingkungan maka sebuah organisasi harus menyajikan struktur, kultur dan sebagainya yang tepat. Pada penelitian ini, kontingensi kelembagaan yang dimaksud adalah kemampuan kelembagaan mempertahankan fungsinya dalam bertahan di bawah pengaruh dampak lingkungan fisik, sosial dan ekonomi akibat adanya pertambangan emas.

Keberlanjutan kelembagaan dapat dilihat pada apa yang terjadi di Cameroon berikut ini. Perubahan kelembagaan pupuk dari sistem monopoli publik ke sistem swasta terjadi di Cameroon melalui reformasi kebijakan subsektor pupuk.¹² Pada awalnya sejak tahun 1972 hingga 1987, pemerintah

¹² Tham V. Truong and S Tjip Walker : *Policy Reform as Institutional Change: Privatizing the Fertilizer Subsector in Cameroon*, dalam buku *Institutional Sustainability in Agriculture and Rural Development, A global Perspective*, edited by Derick W. Brinkerhoff and Arthur A Goldsmith, halaman 115-131.

Cameroon bersandar pada sistem monopoli publik atas keuangan, impor dan distribusi subsidi pupuk. FSSRP (Program Reformasi Subsektor Pupuk) adalah program reformasi kebijakan yang didukung oleh USAID dibawah tanggungjawab pemerintah untuk menciptakan sistem pemasaran pupuk swasta di Cameroon yang bersaing, berkelanjutan, dan bebas subsidi. Pada Tahun 1988, FSSRP membongkar monopoli publik dan menggantinya dengan sistem swasta (privat). Prestasi pertamanya berhasil menyimpan dana anggaran sebesar \$13,3 juta yang menjadi keuntungan bagi negara. Sebagai lembaga baru, FSSRP tidak mudah menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Pengalaman FSSRP menunjukkan proses-proses reformasi kebijakan memerlukan waktu yang panjang. Waktu yang lama dihabiskan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan meluaskannya melalui penelitian, dialog kebijakan untuk mendesain ukuran reformasi. Dalam kasus FSSRP, fase permulaan memakan waktu dua tahun. Untuk FSSRP, reformasi kebijakan tidak berhenti melalui penandatanganan keputusan atau penyebaran kebijakan baru. Kelanjutan selama implementasi program, tidak terpisahkan dari konfrontasi, kelanjutan monitoring serta intervensi untuk dapat menjadi berkelanjutan. Target menyediakan pupuk pada bulan Maret April pada musim tanam 1988 tidak dapat direalisasikan akibat rumitnya merancang pemberlakuan pengaturan kelembagaan baru.

Dengan demikian, penghapusan sistem monopoli publik ke sistem privat memerlukan perubahan pada berbagai komponen pendukungnya

seperti sektor keuangan (kredit, subsidi dana, dll) bahkan prosedur perubahan harus diterima secara politis. Kebijakan reformasi pupuk di Cameron adalah proses atas pergantian satu set susunan kelembagaan dengan yang baru, dimana susunan kelembagaan dipahami untuk menunjukkan secara penuh formal dan non formal baik aturan, regulasi, prosedur, dan insentif dalam ekonomi, politik dan lingkup sosial yang menjadi pedoman interaksi manusia. Secara alami, reformasi pupuk di Cameron harus menghadapi penyokong atau stakeholder dalam rezim lama kebijakan yang berlaku (sistem monopoli publik) yang selama ini memperoleh manfaat menentang perubahan disebabkan ketakutan kehilangan beberapa atau semua manfaat yang selama ini diperolehnya.

D. Pertanian dan Strategi Penghidupan Petani (*Livelihood Strategy*)

Tani dan pertanian tidak bisa lagi sepenuhnya dilihat dalam perspektif simplisitas (*simplicity*) dan keteraturan (*order*) sebagaimana dalam pembangunan pertanian/revolusi hijau di masa lalu. Saat ini, dibalik simplisitas dan keteraturan tani, dalam realitanya terdapat kompleksitas (*complexity*) dan ketidakteraturan (*disorder*) yang menyertainya. Lalu dibaliknya lagi, kekacauan (*chaos*) telah mendampingi kejelasan arah (*linearity*) dalam perspektif perubahannya (Salman, 2012). Pada Kabupaten Bombana, kelembagaan pertanian dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuannya berada pada suatu sistem yang kompleks (oleh

hadirnya tambang). Perubahan ekonomi pertanian ke ekonomi pertambangan dan hadirnya kelembagaan tambang dengan fungsi-fungsi baru membuat kelembagaan pertanian mengalami perubahan dari fungsi-fungsi manifestasinya menjadi laten, disfungsi bahkan non fungsi.

Hal yang sama dijelaskan oleh Kauffman dalam Berreby (1996) bahwa semua sistem di dunia beradaptasi kompleks dalam berkembang secara alami diantara keteraturan (order) dan kekacauan(chaos), dan terdapat kompromi besar antara struktur dan kejutan. Dalam perkembangan pertanian, hal yang sama juga dilihat oleh Gamst (1974) yang menyatakan bahwa masyarakat agraris adalah masyarakat yang kompleks. Evolusi budaya telah membawa perubahan peradaban pertanian atau masyarakat agraris yang akan bertransformasi secara terus menerus hingga menjadi peradaban kota industri. Dalam hal ini, masyarakat tani Bombana menghadapi tambang sebagai sebuah peradaban baru ditengah kehidupan agrarisnya.

Air sebagai Sumberdaya alam bagi masyarakat tani yang sederhana bukanlah semata-mata sebagai alat produksi, akan tetapi sumberdaya alam secara eksplisit mengandung keterkaitan esensi kehidupan dan eksistensi manusia. Pertambangan pada wilayah pertanian merusak tatanan ekosistem alam pada akhirnya menjadi musuh dan bencana bagi manusia itu sendiri. Sementara alam semestinya memberi fungsi dukungan penghidupan bagi manusia. Akibatnya, kelembagaan pertanian yang semula *acceptable* pada

sistem pertanian di wilayah ini mengalami perubahan-perubahan fungsi, misalnya perubahan fungsi manifes menjadi fungsi laten ataupun menjadi disfungsi karena berubahnya kondisi lingkungan fisik, sosial dan ekonomi oleh hadirnya tambang.

Kelembagaan pertanian di Kabupaten Bombana mengalami disfungsi yang akan berujung pada transisi antara chaos dan order. Yang terjadi sekarang di Bombana adalah chaos kelembagaan. Sebagai contoh adalah Upacara Penjemputan Air. Lembaga ini adalah sebuah institusi sosial yang berlaku diantara masyarakat setempat dimana terdapat kegiatan penjemputan air yang dilakukan bersama-sama oleh lima suku yang berdiam di wilayah ini (Bali, Bugis, NTB, Moronene dan Jawa). Penjemputan air dilakukan secara serentak oleh kelima suku besar setiap masa akan menanam tiba melalui upacara penyembelihan hewan (ayam, kambing bahkan sapi) dan makan bersama sebagai perwujudan rasa syukur atas adanya air yang akan digunakan untuk menanam sawah. Institusi lokal ini mengalami perubahan setelah kegiatan tambang membuat debit air irigasi berkurang drastis sehingga masyarakat tidak dapat mengolah sawahnya. Pada awalnya hanya mempengaruhi waktu penjemputan air yang tidak bersamaan antara kelima suku, akan tetapi sejak tahun 2011 upacara penjemputan air ini tidak lagi dilakukan kecuali oleh orang Bali. Kasus ini menunjukkan kondisi yang dulunya 'order' bagi petani mengalami guncangan

yang menyebabkan 'disorder' yang mengarah pada chaos bagi lembaga penjemputan air tersebut.

Kasus yang terjadi pada pertambangan batu bara di Muray Darling Basin Australia, telah memberikan kompleksitas yang tidak saja mempengaruhi petani, nelayan tetapi juga berdampak secara luas kepada ketahanan pangan negara. Kepentingan ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan-keputusan politis menyangkut keberlanjutan pertambangan. Di satu sisi, uang menjadi penarik utama kegiatan tambang terus dilakukan, di sisi lain petani harus berkompetisi dalam memperebutkan sumber daya air yang semakin langka untuk berusaha. Dampak lain adalah sungai mengalami sedimentasi oleh pembuangan limbah industri tambang (kotoran, mineral dan logam) yang pada akhirnya bermuara ke laut yang menjadi wilayah tangkap bagi nelayan-nelayan setempat. Kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan ini membuat Pemerintah mendapat tekanan dari penduduk setempat untuk menghentikan kegiatan pertambangan. Sementara Dewan Senat didesak untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kompleksnya permasalahan yang mengancam keberlanjutan Murai Darling Basin dapat bertahan hidup.

Kompleksnya permasalahan di daerah tambang juga terjadi di Bombana. Daya tarik emas yang menghasilkan milyaran rupiah setiap hari tidak dapat dibendung menghadapi permasalahan hidup yang dialami petani sebagai penduduk lokal di wilayah itu. Rambo (1981) dalam Rahmadani

(2013) mengemukakan bahwa manusia akan melakukan strategi yang sesuai dengan pengetahuan budayanya untuk menghadapi perubahan. Manusia yang mempunyai strategi yang tepat akan berhasil, yang tidak mempunyai strategi yang tepat akan gagal dan pada akhirnya akan punah (*process of natural selection*). Dampak-dampak tambang baik atas lingkungan fisik, sosial dan ekonomi telah membuat kehidupan pertanian terguncang dan petani harus bertindak untuk *survive*. Ellis (2000) menyebutnya dengan istilah ' *livelihood strategies*' di mana rumah tangga sebagai unit sosial diamati untuk mengubah aktivitasnya berdasarkan posisi aset dalam menghadapi keadaan pada desa atau tingkatan masyarakat. Strategi setiap rumah tangga berbeda menurut aset dan status aset yang dimilikinya. Karena itu, dalam keadaan sulit, rumah tangga pedesaan melakukan strategi penghidupan dengan memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya melalui serangkaian kegiatan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Diantaranya, melakukan kegiatan seperti pertanian baik on farm maupun off farm dan kegiatan di luar pertanian atau non farm. Semua kegiatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini sesuai konsep Chamber & Conway (1992), Reardon & Vosty (1995), Carney (1998), Ali (2000) dan Ellis (1998), Manule et. al. (2006).

Penelitian Sherbinin et.al. (2008) atas demografi rumah tangga pedesaan, strategi pencaharian dan lingkungan di Amazon Basin menemukan bahwa setiap rumah tangga memiliki fungsi dari investasi masa

lalu dan akumulasi strategi yang dibentuk oleh sosial, budaya, politik dan ekonomi peluang dan kendala. Terdapat hubungan rumah tangga dengan lingkungannya. Perluasan dampak terhadap lingkungan, dimediasi oleh mobilisasinya dari lima bentuk modal. Kemampuan rumah tangga untuk mengumpulkan dan memanfaatkan bentuk-bentuk modal lebih lanjut dimediasi oleh sejumlah faktor. Ini termasuk faktor-faktor kelembagaan (misalnya fungsi pasar dan sistem hukum, hak untuk mengatur, rezim properti umum, pengaturan kepemilikan tanah), faktor budaya (status perempuan, budaya peran pria dan wanita, nilai anak, hubungan rohani dengan tanah), faktor ekonomi (nasional dan pasar global untuk barang produksi lokal), dan global perubahan yang mempengaruhi lingkungan setempat (iklim dan samudera polusi). Dengan demikian, rumah tangga, asset, dan bahkan lingkungan lokal semua tertanam dalam kontekstual faktor.

Livelihood didefinisikan sebagai aset-aset, aktivitas dan akses yang mencerminkan tambahan pendapatan oleh individu atau rumah tangga (Ellis, 2000). Chambers dan Conway (1992) menyatakan *livelihood* terdiri dari kapabilitas, aset-aset (simpanan, sumberdaya, kepemilikan dan akses).

Demikian juga dengan masyarakat tani di Bombana yang mengalami shock oleh aktivitas pertambangan yang mempengaruhi ekosistem lingkungan alam dimana selama ini petani melakukan kegiatan usaha

taninya. Keberagaman strategi *livelihood* yang ditempuh petani tergantung dari kondisi sosio-ekologi dan sumberdaya petani. Ellis (2000) menjelaskan bahwa keanekaragaman *livelihood* pedesaan didefinisikan sebagai suatu proses dimana rumah tangga pedesaan membentuk sebaran peningkatan pendapatan dari aktivitas-aktivitas dan aset-aset untuk bertahan hidup dan meningkatkan standar hidup.

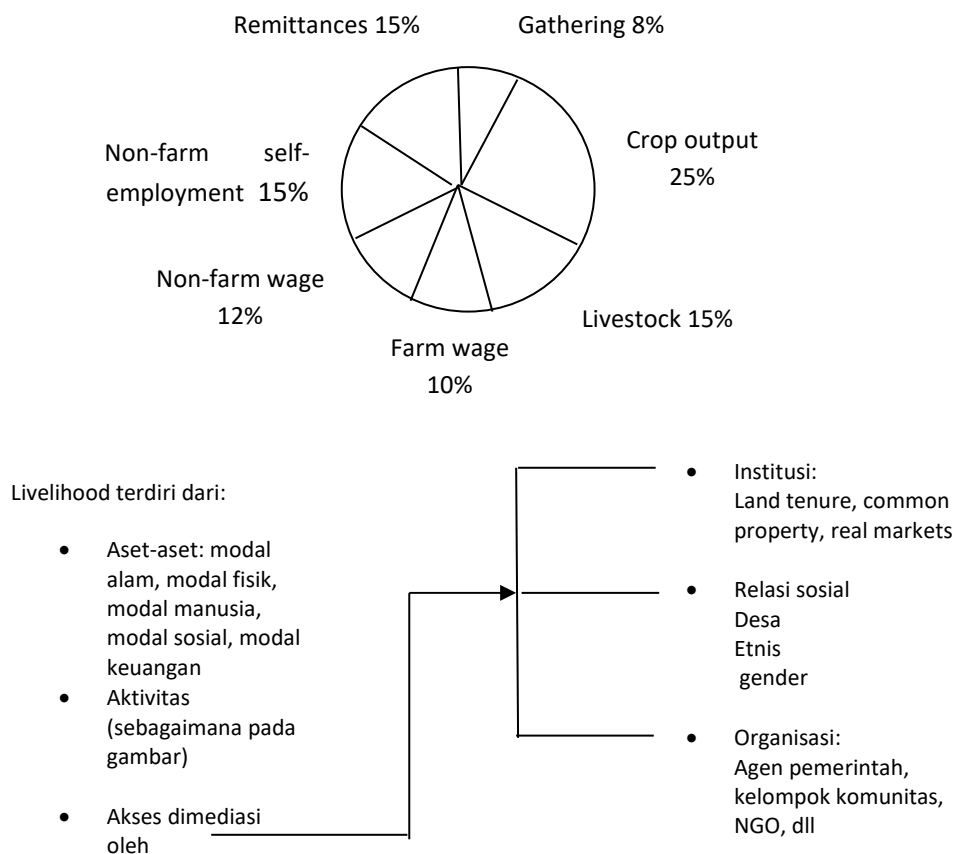
White (1991) mengemukakan bahwa dalam prakteknya terdapat tiga level kategori strategi penghidupan rumah tangga yaitu:

1. strategi akumulasi : merupakan strategi yang dinamis oleh petani dan pengusaha kaya yang memiliki sumberdaya yang lebih banyak, sehingga mampu memupuk modal dan melakukan diversifikasi penghidupan ke tingkat yang lebih tinggi.
2. strategi konsolidasi : merupakan strategi bagi kelompok menengah yang mengutamakan keamanan dan stabilitas pendapatan dari pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Bila berhasil melakukan konsolidasi pada aset sumberdayanya dan mampu meningkatkan produksi, maka secara bertahap akan bisa memasuki kelompok yang mampu melakukan strategi akumulasi, tetapi bila mengalami kegagalan dalam melakukan strategi konsolidasi maka bisa jadi merosot untuk melakukan strategi survival.

3. strategi survival : merupakan strategi yang hanya dilakukan untuk bertahan hidup. Kelompok ini hanya bisa mengolah sumberdaya dan lahan yang terbatas, bahkan tidak memiliki modal penghidupan tetapi bekerja untuk mengolah modal penghidupan orang lain untuk mendapatkan jasa yang hanya digunakan untuk sekedar menyambung hidup.

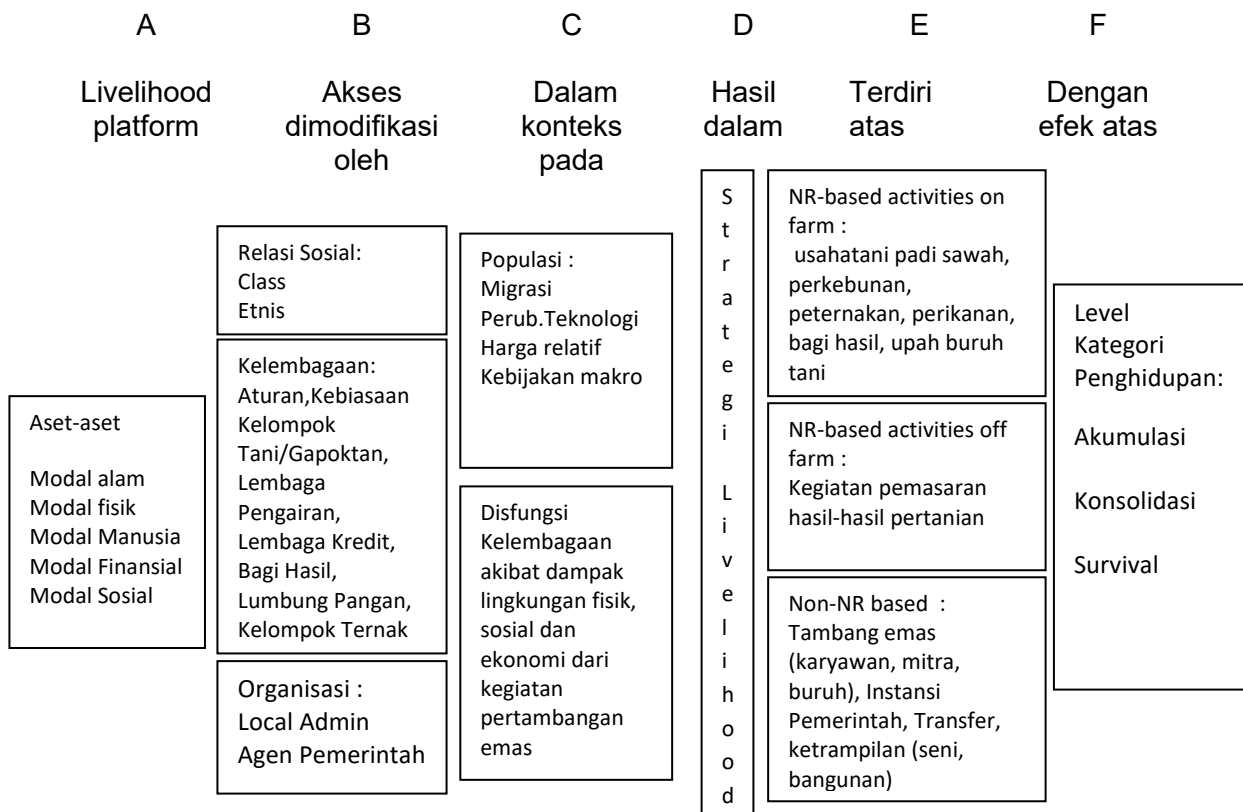
Selanjutnya, beberapa kategori modal yang dimiliki oleh petani dalam melakukan strategi penghidupan di pedesaan terdiri atas modal sumber daya alam atau lokal lingkungan abadi (termasuk air, tanah angin, sumber daya hutan), Modal sosial (sumber daya sosial, seperti antar pribadi, jaringan, keanggotaan dalam kelompok, hubungan kepercayaan, akses ke lembaga yang lebih luas dari masyarakat), Modal manusia (pendidikan formal dan informal, ekologi pengetahuan lokal, kemampuan untuk bekerja, kesehatan), Modal fisik (termasuk aset produktif yang dimiliki oleh rumah tangga seperti tanah, peralatan, lembu/sapi serta aset komunal yang mereka miliki akses yaitu jalan, komunikasi, infrastruktur seperti siaran radio, televisi dan Modal Keuangan/finansial, umumnya adalah aset termasuk penghematan kas, persediaan kredit, kiriman uang dan pensiun; kekayaan rumah tangga terdiri beberapa kombinasi dari aset tersebut (Salman, 2012; Chambers dan Conway, 1992)

Strategi *livelihood* petani yang akan dikaji dalam penelitian ini berpijak pada kerangka Ellis (2000) yang diadopsi dari Chambers dan Conway (1992) yaitu livelihoods, diversification and agrarian change sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3. Diversifikasi *Rural Livelihood*

Berdasarkan pemikiran pada gambar 3 maka kerangka analisis strategi livelihood yang ditempuh petani-petani yang terkena dampak tambang dan mengalami disfungsi kelembagaan di Kabupaten Bombana digambarkan pada gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Kerangka Analisis Strategi Penghidupan Petani dan Level Kategori Penghidupannya Berdasarkan Adopsi dari Ellis (2000), Chambers dan Conway (1992), White (1991)

E. Kerangka Pemikiran

Adanya tambang emas di tengah-tengah masyarakat tani yang selama ini hidup secara tradisional dari sektor pertanian membawa dampak pada lingkungan fisik, sosial dan ekonomi dalam kehidupan petani. Perubahan-perubahan secara cepat terjadi pada berbagai aspek, terutama pada sektor pertanian dimana terjadi perubahan pada kondisi tanah dan air yang merupakan faktor utama kegiatan pertanian.

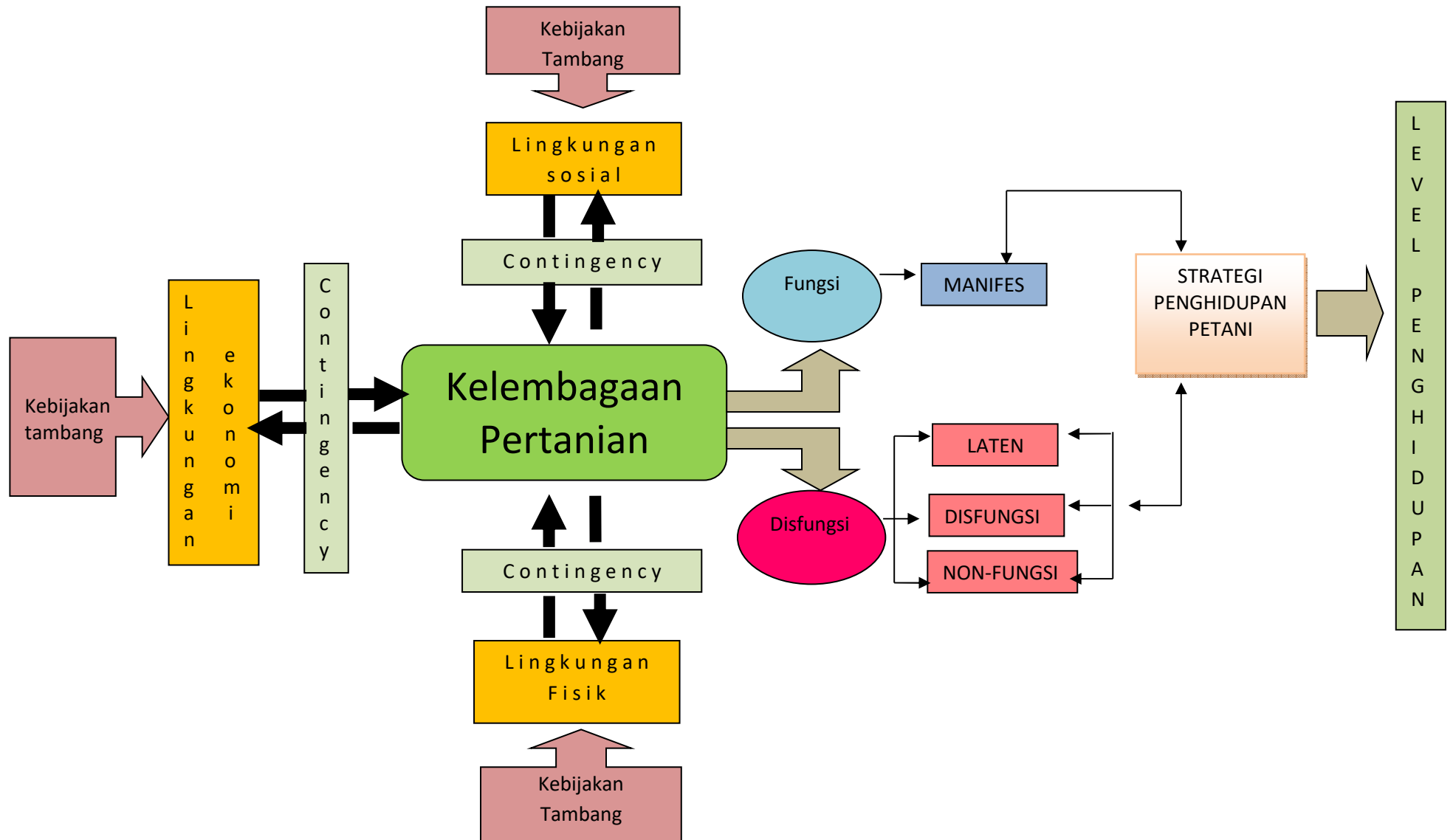
Warren & Uphoff (1969) menggambarkannya sebagai sebuah perubahan sosial yang terjadi secara tiba-tiba. Dalam sebuah studinya dijelaskan bahwa perubahan sosial yang terjadi secara tiba-tiba berlangsung dalam dua fase penting. Pertama, fase utama yang secara langsung berhubungan dengan penemuan-penemuan baru pada penduduk yang menyebabkan migrasi atau imigrasi, misalnya pembukaan dan eksploitasi sumber daya baru dan perusahaan-perusahaan baru. Fase kedua adalah kegagalan beradaptasi akibat kemajuan fase pertama.

Penemuan emas yang diikuti oleh kegiatan pertambangan emas di wilayah Bombana dalam waktu singkat telah merubah banyak hal. Dampak-dampak tambang mempengaruhi kelembagaan-kelembagaan yang ada khususnya kelembagaan pertanian, bahkan tambang telah membawa kelembagaan-kelembagaan baru yang merespon kegiatan pertambangan. Dalam situasi yang kompleks, kelembagaan pertanian melakukan adaptasi.

Terjadi perubahan fungsi kelembagaan pertanian dimana beberapa fungsi yang mampu bertahan akan tetap berjalan sesuai dengan fungsi manifestasinya sedangkan fungsi lainnya akan mengalami perubahan menjadi fungsi laten, disfungsi, ataupun non fungsi.

Hadirnya tambang di wilayah yang selama ini hidup secara bersahaja dari sektor pertanian, utamanya tanaman pangan (padi) telah membawa guncangan pada kehidupan rumah tangga tani. Ditengah fungsi dan disfungsi kelembagaan pertanian, petani melakukan berbagai upaya untuk kelangsungan hidup keluarganya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada padanya. Menurut Ellis (2000) rumah tangga sebagai unit sosial yang diamati telah mengubah aktivitasnya berdasarkan posisi aset untuk menghadapi keadaan pada desa atau tingkatan masyarakat dalam bertahan hidup. Strategi *livelihood* setiap rumah tangga berbeda menurut aset dan status aset yang dimilikinya. Karena itu, dalam keadaan sulit, rumah tangga pedesaan melakukan strategi penghidupan dengan memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya melalui serangkaian kegiatan yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Dari uraian tersebut, maka kerangka pikir yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 5 . Bagan Penelitian Disertasi

F. Definisi Operasional

1. Dampak lingkungan fisik tambang adalah akibat negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Bombana pada lingkungan berupa pencemaran dan rusaknya tanah, rusaknya aliran dan menurunnya kualitas air (tercemar), rusaknya lahan pertanian, dan meningkatnya penebangan hutan.
2. Dampak lingkungan sosial tambang adalah akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Bombana menyangkut aspek-aspek sosial seperti perubahan budaya (nilai-nilai), meningkatnya mobilitas (migrasi penduduk), meningkatnya penyakit sosial (kriminalitas, prostitusi), dan timbulnya kelas-kelas sosial baru.
3. Dampak lingkungan ekonomi tambang adalah akibat positif dan negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan emas seperti naiknya harga barang, meningkatnya ekonomi uang, tingginya perputaran uang, bertambahnya berbagai fasilitas (hotel, rumah makan, rumah hiburan), meningkatnya jumlah kendaraan dan frekuensi angkutan transportasi (darat, laut dan udara) serta meningkatnya pendapatan.
4. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di Kabupaten Bombana.

5. Kelembagaan pertanian pada tingkat sub lokal adalah rumah tangga tani di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara.
6. Kelembagaan pertanian pada tingkat lokal adalah semua institusi pertanian yang ada di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara.
7. Kelembagaan pertanian yang dianalisis adalah yang mengalami perubahan fungsi akibat dampak-dampak tambang atas lingkungan fisik, sosial dan ekonomi oleh adanya kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Bombana.
8. Lumbung Pangan adalah Lembaga Pertanian yang berfungsi sebagai penyimpanan gabah/beras yang dibeli dari anggota dan bukan anggota dan dijual kembali kepada anggotanya dan bukan anggota, didirikan oleh Pemerintah Desa.
9. Fungsi kelembagaan adalah keadaan dimana struktur ataupun proses dari kelembagaan mampu terus mempertahankan fungsinya (memiliki daya *contingency*) pada lingkungan strategisnya.
10. Disfungsi kelembagaan adalah keadaan dimana struktur ataupun proses dari kelembagaan tidak mampu mempertahankan fungsinya pada lingkungan strategisnya ataupun secara struktur ataupun proses kelembagaan ada tetapi berfungsi bukan yang dimaksudkan.
11. Fungsi manifes adalah fungsi kelembagaan yang berjalan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh kelembagaan tersebut.

12. Fungsi laten adalah fungsi kelembagaan yang tidak muncul dari adanya kelembagaan meskipun secara struktur kelembagaan tersebut ada.
13. Non fungsi adalah kelembagaan yang tidak berfungsi sama sekali.
14. Masyarakat lokal adalah masyarakat petani dari berbagai suku yang hidup dan telah tinggal bersama di Kecamatan Rarowatu Utara selama lebih dari 20 tahun sebelum ditemukannya tambang emas.
15. Proses adalah aktifitas mengolah input (bahan material, dana, orang, informasi dan pengetahuan) untuk menghasilkan output (*income, benefit, outcomes*) pada kelembagaan pertanian.
16. Struktur adalah peran dari elemen-elemen kelembagaan yang menjalankan fungsinya masing-masing.
17. Sumber Pencarian Hidup adalah kegiatan yang dilakukan oleh petani yang dapat menghasilkan materi (uang/benda) untuk memenuhi kebutuhan keluarga (pangan, sandang dan papan).
18. Strategi *Livelihood* adalah strategi yang ditempuh rumah tangga tani dalam mencari nafkah alternatif berdasarkan *Natural based activities* dan *non-Natural based activities* guna mengatasi disfungsi kelembagaan pertanian yang beresiko terhadap kelangsungan hidup keluarganya.
19. Level pencapaian *livelihood* adalah keadaan dimana rumah tangga tani dapat hidup secara layak, pas-pasan, atau miskin yang diukur berdasarkan kategori White (1991) yaitu level *survive*, konsolidasi dan akumulasi.

BAB III.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang jenisnya adalah *deskriptif* (menggambarkan) dan *eksplanatif* (menjelaskan). Menurut Moleong pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian (perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain) secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan menurut Saunders, dkk. (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam *setting* dan konteks naturalnya dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dilakukan guna menggali dan memahami proses perubahan dan pergeseran yang dimulai dengan pembahasan dampak-dampak tambang baik dampak atas lingkungan fisik, sosial maupun ekonomi. Selanjutnya membahas bentuk dan proses terjadinya disfungsi kelembagaan pertanian akibat dampak-dampak tambang oleh perkembangan pertambangan pada Desa-Desa di Kabupaten

Bombana. Selain itu, menggali respon rumah tangga tani dalam menghadapi disfungsi kelembagaan yang terjadi dibalik perkembangan pertambangan, yaitu dengan menganalisis strategi penghidupan (*livelihood*) yang ditempuh rumah tangga tani. Selanjutnya strategi-strategi tersebut dikelompokkan ke level strategi penghidupan yang dicapai masyarakat tani.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Case study* (studi kasus) pada komunitas tani di area pertambangan emas Kabupaten Bombana. Nasir (1988:66-67) menjelaskan bahwa studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat atau karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Hasil dari penelitian kasus ini merupakan suatu generalisasi dari pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya. Tergantung dari tujuannya, ruang lingkup dari studi dapat mencakup segmen atau bagian tertentu atau mencakup siklus kehidupan individu, kelompok dan sebagainya baik dengan penekanan terhadap faktor-faktor kasus tertentu, ataupun meliputi keseluruhan faktor-faktor. Selanjutnya Thomas (2011) dalam Sarosa (2012), menambahkan dalam *Case study* peneliti melakukan analisis secara intensif pada satu unit analisis yang diteliti (*case*). Sebuah *case* dapat berupa satu individu, satu organisasi, satu peristiwa, satu

keputusan, satu periode atau satu sistem yang dapat dipelajari secara menyeluruh dan holistik.

Dalam penelitian ini, unit analisis kasus meliputi rumah tangga petani dan sistem kelembagaan pertanian di Kabupaten Bombana. Sedangkan periode kasusnya yaitu sejak ditemukannya emas pada pertengahan tahun 2008 yang melahirkan industri-industri pertambangan hingga tahun 2013.

B. Pengelolaan Peran Sebagai Peneliti

Dalam melakukan penelitian, peneliti bertindak sebagai penyelidik yang terlibat langsung (*participant observer*) dalam mengamati sepenuhnya semua fenomena yang terjadi pada individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya. Dalam proses penyelidikan tersebut, peneliti sekaligus bertindak sebagai pewawancara (*interviewer*). Dengan demikian terjadi interaksi dan hubungan timbal-balik (*reciprocal*) antara *interviewer/observer* dengan subjek yang diamati (diselidiki). Dalam kondisi demikian peneliti berusaha sepenuhnya bersikap objektif (*value free*) meskipun *value laden* pada penelitian kualitatif sulit dihindari. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan konteks dan *setting* apa adanya atau alamiah (*naturalistic*), bukan melakukan eksperimen yang dikontrol secara ketat atau memanipulasi variabel (Guba, et.al. 1998)

Kehadiran peneliti dapat diketahui maupun tidak diketahui oleh informan disebabkan ada hal-hal peka menyangkut kebijakan dan dampak-dampak pertambangan (secara politis dan ekonomi) yang tidak dapat diselidiki secara terang terangan karena dapat menimbulkan penolakan dari berbagai pihak yang akan mempersulit perolehan data dan informasi yang dibutuhkan. Untuk hal-hal tersebut peneliti melakukan investigasi.

C. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, tepatnya di area pertanian yang juga menjadi wilayah pertambangan emas. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan berikut. Pertama, daerah ini merupakan daerah pertanian yang mengalami kemunduran dalam produksi pertanian terutama tanaman padi sawah sejak adanya tambang emas. Kedua, daerah ini juga menjadi lokasi penambangan emas, sekaligus menjadi wilayah operasi beberapa perusahaan pertambangan yang mendapatkan IUP. Dengan demikian terdapat dualisme sektor pertanian dan pertambangan yang unik untuk dikaji. Hadirnya pertambangan di wilayah pertanian menuntut masyarakat untuk beradaptasi terlebih kepada tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi (*livelihood strategy*).

Unit analisis studi ini adalah kelembagaan-kelembagaan pertanian dan rumah tangga tani di Kabupaten Bombana. Pada level kelembagaan pertanian, fokus utamanya adalah petani, aktor-aktor dalam struktur dan proses pada sistem kelembagaan pertanian pada tingkat sub lokal dan lokal. Pada level rumah tangga, fokusnya adalah petani.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden (informan kunci) yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui instansi ataupun lembaga-lembaga terkait, seperti BPS, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pertanian, Dinas PU, BPN, Jatam, Kantor Desa dan Kantor Kecamatan.

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi yaitu wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi lapang. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan (kepala rumah tangga tani, aktor-aktor kelembagaan pertanian, pejabat lokal dari Pemerintah, Dinas terkait, Perusahaan Pertambangan, anggota DPRD dan tokoh masyarakat/agama).

Hasil wawancara mendalam dengan para informan kemudian dicatat dalam catatan harian lapangan yang direkam oleh peneliti. Studi literatur dilakukan sebagai upaya penggalian informasi secara sekunder melalui data berupa laporan dan surat resmi dari aparat pemerintah sebagai pendukung dan memperkuat data hasil wawancara mendalam. Sedangkan observasi lapang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terkait kondisi faktual yang terjadi di Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara.

Pemilihan rumah tangga tani ditentukan berdasarkan pendekatan tipologi, yaitu mereka yang memiliki pendapatan dan aset dalam rumah tangga tani berbeda. Pada konteks ini menganalisis strategi *livelihood* rumah tangga tani dalam merespon perubahan fungsi kelembagaan pertanian oleh adanya kegiatan pertambangan.

Berbagai jenis data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah mengenai beberapa aspek berikut.

- a. Identifikasi dampak-dampak lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi dari kegiatan pertambangan emas yang mempengaruhi kelembagaan pertanian
- b. Identifikasi dampak-dampak lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi dari kegiatan pertambangan emas yang menyebabkan perubahan fungsi pada kelembagaan pertanian.
- c. Identifikasi keberlanjutan fungsi kelembagaan yaitu :

- kelembagaan pertanian yang bertahan dan berjalan sesuai fungsi manifestasinya setelah adanya kegiatan pertambangan dan
 - identifikasi disfungsi kelembagaan yang meliputi: Fungsi laten (kelembagaan ada tetapi fungsinya tidak muncul, namun fungsi laten ini kemudian muncul setelah ada dampak-dampak tambang), Disfungsi (kelembagaan ada tetapi fungsinya berjalan bukan yang fungsi yang dimaksudkan) dan Non fungsi (kelembagaan menjadi tidak berfungsi sama sekali).
- d. Strategi *Livelihood* Petani, meliputi identifikasi aset-aset yang dimiliki dan strategi yang dipilih petani dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya setelah adanya perubahan fungsi kelembagaan pertanian akibat dampak tambang.

E. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data primer dikumpulkan melalui informan kunci. Informan kunci adalah pelaku (aktor) yang berasal dari rumah tangga petani dan berbagai lembaga-lembaga pertanian yang berada di wilayah penelitian yaitu di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Artinya, sampel yang dipilih disesuaikan dengan tujuan

dan kebutuhan penelitian (Daymon dan Halloway :2008). Jumlah informan kunci seluruhnya adalah 37 orang.

Pemilihan informan kunci pada penelitian ini sebagai berikut.

- a. Pada level kelembagaan pertanian, informan yang dipilih adalah aktor-aktor dari kelembagaan pertanian yang terlibat secara langsung baik dalam struktur maupun dalam proses kelembagaan. Termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pejabat dan staf dari Dinas terkait.
- b. Pada level rumah tangga, informan yang dipilih adalah kepala rumah tangga dari setiap tipe rumah tangga yang dipilih sebagai sampel penelitian.

Selanjutnya untuk informasi yang lebih dalam akan ditelusuri melalui sumber-sumber lain pada lokasi penelitian dan dokumen-dokumen pendukung yang tersedia.

F. Analisis Data

Analisis data pada penelitian dengan pendekatan kualitatif memiliki tahapan dalam pengolahan dan analisis data. Miles dan Huberman (1992) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

- a. Reduksi data, yaitu penghilangan data yang tidak diperlukan serta penambahan data apabila dibutuhkan melalui penyusunan kembali fakta-fakta menurut urutan sejarah dan waktunya. Secara teknis reduksi data yang dilakukan adalah berupa catatan harian yang kemudian dianalisis menurut urutan kejadian.
- b. Tahapan kedua adalah penyajian data yang dimaksudkan untuk menyusun sekumpulan informasi. Data yang mengalami proses reduksi, kemudian ditampilkan dalam bentuk lebih ringkas dan sederhana dengan menggunakan tabel atau gambar untuk memudahkan pembaca.
- c. Tahapan ketiga adalah penarikan kesimpulan.

Dimulai dengan menganalisis dampak-dampak tambang baik atas lingkungan fisik, sosial dan ekonomi. Selanjutnya dari dampak-dampak tambang tersebut diidentifikasi dampak yang mempengaruhi kelembagaan pertanian dan menyebabkan terjadinya perubahan fungsi pada kelembagaan tersebut.

Untuk menganalisis bentuk dan proses terjadinya perubahan fungsi kelembagaan pertanian maka digunakan analisis struktural fungsional dari pemikiran Robert King Merton yang dikembangkan dari teori Parson. Menurut Merton, ketika struktur atau institusi dapat memberikan kontribusi pada terpeliharanya bagian lain sistem sosial, merekapun dapat mengandung konsekuensi negatif bagi bagian-bagian lain tersebut atau

dikenal sebagai disfungsi. Merton juga menambahkan gagasan non fungsi, yang ia definisikan sebagai konsekuensi yang tidak relevan bagi sistem tersebut. Analisis fungsional tidak hanya mengamati fungsi dan disfungsi, tetapi juga mengamati fungsi laten dan manifes. Karena itu empat kategori fungsi dari Merton yaitu fungsi manifes, fungsi laten, disfungsi dan non fungsi menjadi dasar dalam analisis struktural fungsional kelembagaan pertanian.

Selanjutnya untuk menganalisis strategi penghidupan (*livelihood strategy*) yang ditempuh masyarakat tani dalam merespon disfungsi kelembagaan pertanian maka digunakan kerangka Ellis (2000). Strategi yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu strategi bertahan hidup (*survive*), strategi konsolidasi dan strategi akumulasi. (White, 1991)

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 14 (empat belas) bulan, dimulai sejak bulan September 2012 – Oktober 2013.

H. Keterkaitan Tujuan dengan Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dilakukan pengumpulan informasi lengkap di lapangan. Data informasi tersebut selanjutnya dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian yang mampu menjelaskan fakta-fakta lapangan secara ilmiah. Berikut matriks keterkaitan Tujuan dengan metode penelitian.

Tabel 3. Matriks Keterkaitan Tujuan dengan Metode Penelitian

Tujuan	Aspek/Informasi yang dikumpulkan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Analisis Data
Menganalisis dampak-dampak kegiatan pertambangan emas yang mempengaruhi kelembagaan pertanian	Identifikasi Dampak Lingkungan Fisik, Lingkungan Sosial dan Lingkungan Ekonomi Tambang	-Rumah tangga Tani - Tokoh Masyarakat - Aparat Desa -Anggota DPR -Pejabat Daerah -Pejabat Perusahaan Tambang	- observasi - Dokumentasi - Wawancara Mendalam	Analisis dampak, melihat sebelum dan sesudah adanya tambang
Menganalisis bentuk dan proses terjadinya perubahan fungsi kelembagaan pertanian	Identifikasi Kelembagaan: -Fungsi : manifes -Disfungsi: - laten - disfungsi - non fungsi	Kelompok Tani, Kelembagaan Pengairan (Kelompok Tani Pemakai Air, Upacara Penjemputan Air), Kelembagaan Kredit (Tengkulak, Koperasi), Lumbung Pangan, Kelompok Ternak	- observasi - Dokumentasi - Wawancara Mendalam	Analisis perubahan fungsi kelembagaan dengan analisis struktural fungsional Merton
Menganalisis strategi penghidupan (<i>livelihood</i>) masyarakat Desa	Identifikasi sumber penghidupan: Berdasarkan NR Berdasarkan Non NR	-Rumah tangga petani	- Observasi - Wawancara mendalam	Analisis Strategi Penghidupan Ellis (2000)

BAB IV

GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN

A. Kondisi Geografi dan Iklim Wilayah Penelitian

Kabupaten Bombana berada di bagian Selatan garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan diantara $4^{\circ}22'59,4''$ - $5^{\circ}28'26,7''$ LS (sepanjang ± 180 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara $121^{\circ}27'46,7''$ - $122^{\circ}11'9,4''$ BT (sepanjang ± 154 km).

Kabupaten Bombana merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton dan menjadi daerah otonom pada tahun 2003. Wilayah Kabupaten Bombana berbatasan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan di sebelah Utara, berbatasan Laut Flores di sebelah Selatan, berbatasan Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna di sebelah Timur, serta berbatasan Teluk Bone propinsi Sulawesi Selatan di sebelah Barat.

Kabupaten Bombana terdiri atas wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Luas daerah daratan $\pm 3.316,16$ km² atau 331.616 ha sedangkan daerah perairan laut $\pm 11.837,31$ km². Secara administratif, kabupaten Bombana terdiri atas 22 kecamatan dan 139 desa yang tersebar pada wilayah daratan pulau Sulawesi dan kecamatan pada wilayah kepulauan sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4. Desa dan Kecamatan di Wilayah Daratan Pulau Sulawesi dan Wilayah Kepulauan

Kecamatan di Wilayah Daratan Pulau Sulawesi	Desa
1. Kecamatan Rumbia	Doule, Kasipute, Lameroro, Lampopala, Lanto Wonua
2. Kecamatan Mata Oleo	Batusame Indah, Hambawa Indah, Laloa, Liano, Lora, Mawar, Pemontoro, Pulau Tambako, Tajuncu, Toli-toli
3. Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya	Batu Lamburi, Masaloka, Masaloka Barat (Tengah), Masaloka Selatan, Masaloka Timur
4. Kecamatan Rumbia Tengah	Kampung Baru, Lampata, Lauru, Poea, Tapuhahi
5. Kecamatan Rarowatu	Ladumpi, Lakomea, Lampeantani, Pangkuri, Rarowatu, Rau-rau, Taubonto, Watu Kalangkari
6. Kecamatan Rarowatu Utara	Aneka Marga, Hukaea, Lantowua, Marga Jaya, Tembe, Tunas Baru, Watementade, Wumbubangka
7. Kecamatan Lantari Jaya	Lantari, Pasare Apua, Lombakasih, Langkowala, Rarongkeu, Watu-Watu, Kalaero, Tinabite, Anugrah
8. Kecamatan Mata Usu	Morengke, Lamuru, Kolombi, Matausu, Totole, Wia-wia
9. Kecamatan Poleang Timur	Bambaea, Biru, Mambo, Puu Lemo, Teppoe
10. Kecamatan Poleang Utara	Karya Baru, Lawatu Ea, Rompuromppu, Tampawulu, Tanah Poleang, Toburi, Wambarema, Pulau Ea,
11. Kecamatan Poleang Selatan	Akacipong, Batu Putih, Kali Baru, La Ea, Waemputang

12. Kecamatan Poleang Tenggara	Lamoare, Larete, Marampuka, Terapung
13. Kecamatan Poleang	Barangga, Boeara, Boepinang, Boepinang Barat, Kasabolo, Kastarib, Matirowalie, Pallimae, Pokurumba, Salosa
14. Kecamatan Poleang Barat	Baba Molingku, Balasari, Lameong-meong, Pabiring, Raka Dua, Ranokomea, Timbala, Toari Buton, Bulumanai
15. Kecamatan Poleang Tengah	Lebo Ea, Paria, Po leondro, Mulaeno
16. Kecamatan Tontonunu	Puu Wonua, Tete Haka, Tongkoseng, Toatonunu, Watu Melomba
Kecamatan di Wilayah Kepulauan	Desa
17. Kecamatan Kabaena	Rahadopi, Rahampuu, Teomokole, Tirongkotua
18. Kecamatan Kabaena Utara	Eemokolo, Larolanu, Mapila, Tedubara, Wumbulasa, Sangia Makmur, Lampangi
19. Kecamatan Kabaena Selatan	Batuawu, Langkema, Pongkalaero, Puu Nunu
20. Kecamatan Kabaena Barat	Baliara, Baliara Kepulauan, Baliara Selatan, Lahantari, Sikeli
21. Kecamatan Kabaena Timur	Balo, Bungi-bungi, Dongkala, Lambale, Tapuhaka, Toli-toli, Wumbubura
22. Kecamatan Kabaena Tengah	Enano, Lamonggi, Lengora, Lengora Pantai, Lengora Selatan, Tangkeno, Ulungkura

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka, 2011

Kecamatan yang paling luas daerahnya adalah Kecamatan Mata Usu dengan luas 456,17 km² atau 13,76 persen terhadap total luas daerah Kabupaten Bombana. Sedangkan Kecamatan yang paling kecil daerahnya adalah Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya dengan luas hanya 2,66 km² atau 0,08 persen dari total luas Kabupaten Bombana.

Secara geologi, sebagian besar kawasan ini ditutupi oleh batuan malihan atau metamorfosa yang pembentukannya tidak terkait dengan proses mineralisasi atau pengendapan mineral emas. Oleh karena itu, fenomena ditemukannya emas di wilayah ini merupakan suatu hal yang tidak lazim. Emas di Bombana dikategorikan sebagai endapan emas sekunder atau letakan (*placer*) yang terdapat di dalam endapan sungai purba¹⁴ yang biasanya terkonsentrasi pada bagian-bagian tertentu alur sungai purba tersebut. Dengan demikian penggalian yang dilakukan oleh masyarakat selalu diarahkan untuk mencari pasir endapan sungai purba yang biasanya terdapat pada kedalaman yang relatif dangkal, 3-6 meter (Zukarnain, 2010)

Penelitian ini berlokasi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara. Kedua wilayah ini berada berdampingan pada bagian Utara Kabupaten Bombana. Luas wilayah Kecamatan Lantari Jaya adalah 285,01 km² yang terdiri atas 9 (Sembilan) Desa yaitu Lantari, Pasare Apua, Anugerah, Lombakasih, Langkowala, Rarongkeu, Kalaero, Watu-watu dan Tinabite. Sedangkan luas wilayah Kecamatan Rarowatu Utara adalah 239,40 km² yang terdiri atas 8 Desa yaitu Aneka Marga, Tunas Baru, Tembe, Marga Jaya, Hukaea, Wumbubangka, Lantowua dan Watumentade.

¹⁴ Sungai Purba adalah sungai yang telah terbentuk sejak ribuan tahun yang lalu

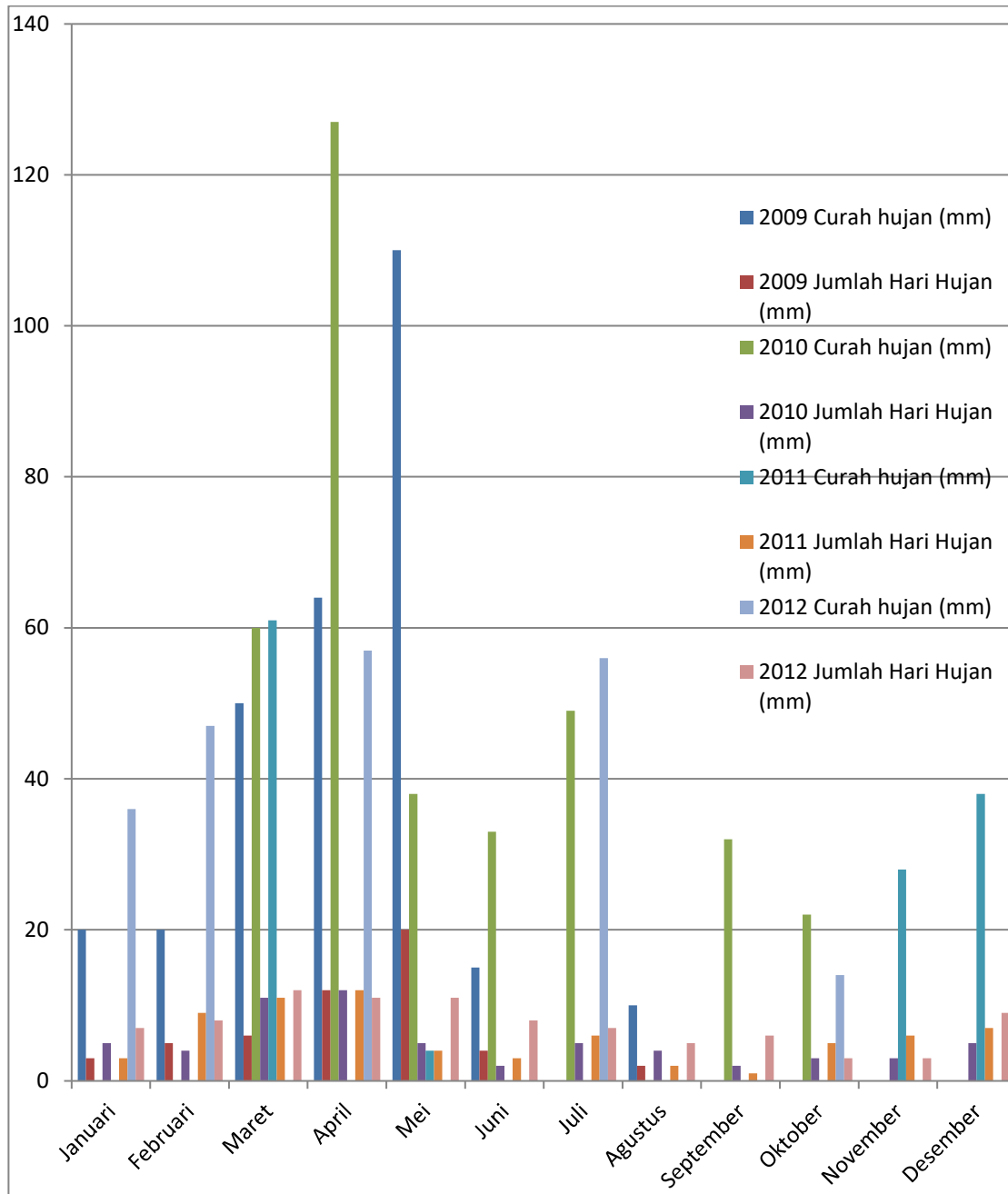
Iklim wilayah penelitian secara umum dapat dilihat melalui besarnya curah hujan dan hari hujan yang diamati pada pos pencatat curah hujan di Kecamatan Rarowatu Utara. Data curah hujan sejak tahun 2010 diperoleh langsung dari pos pencatat hujan di Kecamatan Rarowatu Utara. Hal ini disebabkan data curah hujan di BPS Bombana hanya tersedia sampai tahun 2009. Data curah hujan dan hari hujan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-Rata Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan di Wilayah Penelitian

BULAN	T A H U N							
	2009		2010		2011		2012	
	Curah hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Curah hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Curah hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan	Curah hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan
Januari	20	3	20,5	5	9,5	3	36	7
Februari	20	5	22,5	4	70,5	9	47	8
Maret	50	6	60	11	61	11	96,5	12
April	64	12	127	12	135,5	12	57	11
Mei	110	20	38	5	4	4	93,5	11
Juni	15	4	33	2	34,5	3	54,5	8
Juli	-	-	49	5	31,5	6	56	7
Agustus	10	2	17,5	4	8,5	2	5,5	5
September	-	-	32	2	0,5	1	37,5	6
Oktober	-	-	22	3	27,5	5	14	3
November	-	-	10,5	3	28	6	43,5	3
Desember	-	-	20,5	5	38	7	27,5	9
	698	52	452,5	61	449	69	568,5	90

Sumber: Data Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2009 (BPS Bombana, 2010), Data Curah Hujan dan Hari Hujan Tahun 2010-2012, Hasil Penelitian

Dalam bentuk diagram terlihat pada Gambar 7



Gambar 7. Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan Tahun 2009-2012 di Wilayah Penelitian

Sejak ada pertambangan emas, terjadi perubahan musim. Pada tahun 2007 sebelum ada pertambangan emas, hujan dimulai pada bulan November, tetapi sejak tahun 2009 musim hujan baru terjadi pada bulan Maret, ditandai dengan lebih 10 hari hujan. Bahkan tahun 2009 jumlah hari hujan di atas 10 hari terjadi pada bulan April. Pertambangan juga mempengaruhi jumlah curah hujan dimana sebelum ada tambang, curah hujan pada tahun 2007 berjumlah 1.706 mm (BPS Bombana, 2008) sedangkan setelah ada tambang curah hujan tahunan terbanyak terjadi pada tahun 2009 yaitu 698 mm, hanya 40% dari curah hujan sebelum ada pertambangan emas tahun 2007. Keadaan ini sangat mempengaruhi pertanian di Kabupaten Bombana.

B. Penduduk dan Sumber Pencarian Hidup

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Bombana tahun 2010 berjumlah 139.235 jiwa yang terdiri dari 70.367 jiwa laki-laki dan 68.868 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga di Kabupaten Bombana adalah 27.871 dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 5 orang setiap keluarga. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Rarowatu Utara adalah 7.359 jiwa terdiri atas 4.338 jiwa laki-laki dan 3.021 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga sebanyak 1.154 dengan rata-rata

anggota rumah tangga sebanyak 6 orang. Sedangkan di Kecamatan Lantari Jaya terdapat penduduk sebanyak 7.520 jiwa yang terdiri atas 4.003 jiwa laki-laki dan 3.517 jiwa perempuan. Jumlah rumah tangga adalah 1.488 dan rata-rata anggota rumah tangga adalah 5 orang. Kepadatan penduduk kabupaten Bombana 42 jiwa per km². Sedangkan kepadatan penduduk Kecamatan Rarowatu Utara adalah 31 jiwa per km² dan kepadatan penduduk Kecamatan Lantari Jaya adalah 26 jiwa per km². Perincian ini dapat dilihat secara jelas pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Jumlah Rumah Tangga Kabupaten, Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya Tahun 2010/2011

No	Uraian	Kab. Bombana	Kec. Rarowatu Utara	Kec. Lantari Jaya
1.	Jumlah Penduduk (Jiwa) Laki-laki Perempuan	139.235 70.367 68.868	7.359 4.338 3.021	7.520 4.003 3.517
2.	Kepadatan Penduduk (jiwa/ km ²)	42	31	26
3.	Jumlah Rumah Tangga (KK) -Rata-rata anggota keluarga/ rumah tangga	27.871 5	1.154 6	1.488 5

Sumber : Kabupaten Bombana Dalam Angka, 2011.

Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2013, jumlah rumah tangga tani di Kecamatan Rarowatu Utara adalah 1.070 RTP sedangkan di Kecamatan Lantari Jaya berjumlah 1.491 RTP. Ini menunjukkan bahwa lebih

dari 95% rumah tangga yang ada mempunyai sumber pencarian hidup sebagai petani.

Penduduk asli Kabupaten Bombana adalah suku Moronene. Akan tetapi saat ini, penduduk Kabupaten Bombana telah sangat heterogen dengan datang dan membaurnya berbagai suku dari berbagai pelosok Nusantara. Pada lokasi penelitian di Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya, terdapat 5 suku besar yang hidup berdampingan yaitu suku asli Moronene, Bugis-Makassar, Jawa, Bali dan Lombok. Pada mulanya hanya ada suku Moronene dan suku Bugis, tetapi adanya program transmigrasi pemerintah tahun 1982, maka bertambahlah penduduk yang berasal dari Jawa, Bali dan Lombok.

Penduduk di Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya hidup dari hasil pertanian. Kalaupun ada sumber pendapatan lain, maka mata pencaharian utama tetaplah dari hasil pertanian. Sebelum ada tambang, penduduk di kedua kecamatan ini hidup dengan memanfaatkan alam sekitarnya. Untuk kebutuhan sehari-hari selalu mengambil dari alam, misalnya mengambil rotan, bambu dan kayu bakar dari hutan. Meskipun mengambil dari alam, namun penduduk tidak melakukan eksploitasi untuk tujuan komersil tetapi semata-mata untuk kebutuhan hidupnya. Pola hidup petani semacam ini telah diamati oleh Scott (1994) yang mengungkapkan bahwa petani selalu bertindak berdasarkan etika subsistensi dimana petani

hanya mengambil dari alam sesuai kebutuhan subsistennya yang diyakininya sebagai sebuah tindakan moral yang benar. Hal ini diperkuat oleh Polanyi (1957) dimana bukti-bukti historis menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional atau masyarakat primitif lebih manusiawi dibandingkan masyarakat modern atau kapitalis. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat di lokasi penelitian, baik pada suku lokal Moronene maupun pada suku pendatang. Situasi ini dapat dilihat dari ungkapan Sardin (28 tahun) warga lokal suku Moronene dan Kadek Wiyarta (45 tahun) pendatang dari suku Bali.

Sardin adalah Ketua Kelompok Tani Tumbun Tonea dari Desa Watu-Watu mengungkapkan bahwa dirinya dahulu adalah pengumpul rotan di hutan sekitar Desa yang hasilnya cukup untuk sekedar makan. Walaupun hasil rotan di hutan masih banyak, ia dan pengumpul rotan lainnya tidak lagi menjadi pengumpul rotan sebab sekarang ini tidak ada lagi yang mau mengolah rotan tersebut. Untuk makan daging biasanya penduduk suku Moronene ke hutan dan berburu 'jonga'. Namun sejak TNRAW di lindungi, aktivitas berburu tidak dilakukan lagi karena takut tertangkap petugas.

Sejak keberhasilan petani transmigran di daerah penelitian dalam usahatani padi sawah oleh adanya bendungan irigasi Langkowala, maka penduduk dari suku Moronene yang berdiam di Desa Watu-watu seperti Sardin mulai ikut menanam padi sawah. Kegiatan mengumpulkan rotan

ditinggalkan begitu saja sekalipun hutan masih menyediakan rotan yang banyak. Kehidupan subsisten yang hanya mengambil secukupnya dari alam juga terjadi pada petani asal Bali yaitu Kadek Wiyarta (45 tahun) dari Desa Lombakasih. Kadek Wiyarta dan juga petani-petani asal Bali lainnya mengumpulkan bambu dari hutan di sekitar Desa untuk kebutuhan sendiri, yaitu untuk membuat kandang dan pagar. Pengumpulan bambu ini bukan untuk tujuan komersil.

Transmigran yang berasal dari Jawa, Bali dan Lombok adalah petani yang datang dengan membawa pengetahuan dan ketrampilan mengenai pertanian. Suku Bali bahkan unggul dalam pengaturan air sistem Subak yang nantinya di terapkan di daerah ini. Sementara Suku Bugis adalah pendatang yang merantau sebagai petani dan juga pedagang. Semua pengetahuan dan ketrampilan dari berbagai suku ini akhirnya berbaur dalam kehidupan mereka sebagai petani.

C. Potensi Pertanian

a. Tanaman Padi Sawah

Pertanian andalan di Kabupaten Bombana adalah padi sawah, bahkan oleh produksinya yang melimpah, Bombana menjadi lumbung beras di Sulawesi Tenggara. Luas lahan sawah di Kabupaten Bombana sebesar

11.047 Ha, sedangkan di Kecamatan Rarowatu Utara sebesar 1.707 Ha atau 15,45%, dan di Kecamatan Lantari Jaya sebesar 2.774 atau 25,11%. Hal ini menunjukkan kedua kecamatan ini merupakan sentra produksi tanaman padi sawah sebab lebih dari 40% luas areal tanaman padi sawah Kabupaten Bombana berada di kedua kecamatan ini, selebihnya tersebar pada 20 kecamatan lainnya. Pada tahun 2010 tanah sawah di Kabupaten Bombana yang ditanami padi lebih dari dua kali setahun seluas 4.838 Ha dan hanya ditanami satu kali seluas 3.329 Ha, sedangkan yang sementara tidak diusahakan seluas 2.880 Ha akibat kekeringan. Khusus daerah penelitian, yaitu kecamatan Rarowatu utara dan kecamatan Lantari Jaya, penanaman padi hanya berlangsung satu kali setahun. Sebelum ada tambang, penanaman dapat berlangsung dua kali setahun. Potensi lahan di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Luas lahan Sawah dan Bukan Lahan Sawah Tahun 2010 di Kecamatan Rarowatu Utara, Kecamatan Lantari Jaya dan Kabupaten Bombana.

Wilayah	Lahan Sawah (Ha)	Bukan Lahan Sawah (Ha)	
		Lahan Kering	Penggunaan lainnya
Kabupaten Bombana	11.047	290.752	25.008
Kec. Rarowatu Utara	1.707	12.936	351
Kec. Lantari Jaya	2.774	240	250

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka, 2011.

b. Tanaman Perkebunan

Selain lahan sawah, juga terdapat lahan pekarangan dan lahan kering. Luas lahan pekarangan Kabupaten Bombana adalah 2.789 Ha dan luas lahan kering sebesar 290.752 Ha. Lahan kering digunakan untuk tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput, dan lainnya.

Tanaman perkebunan utama di Kabupaten Bombana adalah jambu mete, kelapa dalam, aren, kakao dan kopi. Berikut produksi tanaman perkebunan rakyat Kabupaten Bombana tahun 2009 dan 2010 yang ditampilkan dalam bentuk grafik.

Gambar 8. Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bombana



Sumber: BPS Kabupaten Bombana, 2011

Keterangan: ■ 2009, ■ 2010

Di lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Rarowatu utara dan kecamatan Lantari Jaya, produksi perkebunan utamanya adalah jambu mete. Ada beberapa daerah yang ditanami kelapa dalam dan kakao tetapi jumlahnya tidak banyak. Juga ada beberapa petani yang mengusahakan tanaman jati tapi tidak luas, hanya beberapa hektar saja.

Tanaman mete sebagai tanaman perkebunan utama hampir tidak berproduksi lagi selama beberapa tahun terakhir disebabkan curah hujan yang tidak menentu (Tabel 5). Musim panas yang panjang membuat tanaman mete kekeringan dan hujan pada saat pembuahan membuat tanaman mete gagal panen.

c. Peternakan

Kabupaten Bombana juga memiliki potensi ternak, hal ini ditunjang oleh luasnya padang penggembalaan ternak yang tersedia untuk ternak besar. Berikut ini adalah potensi ternak besar, ternak kecil dan unggas di Kabupaten Bombana tahun 2010.

Tabel 8. Jenis Ternak dan Jumlah Populasinya di Kabupaten Bombana

No.	Jenis Ternak	Jumlah Populasi
1	Sapi	26.047
2	Kerbau	1.269
3	Kuda	1.474
4	Kambing	13.897
5	Domba	161
6	Babi	1.677
7	Ayam Buras	23.591
8	Ayam Ras Petelur	1.393.267
9	Ayam Ras Pedaging	1.091
10	Itik	15.525

Sumber: Data BPS 2011.

Di lokasi penelitian, potensi ternak utama adalah ternak besar yaitu sapi. Meskipun demikian, ada juga petani yang memelihara ayam ataupun itik yang sebagian besar untuk konsumsi sendiri. Selain itu terdapat petani asal Bali yang memelihara babi. Potensi ternak sapi di Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Jumlah pemilik Ternak Sapi di Kabupaten Bombana, Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya Tahun 2010

Wilayah	Jumlah Pemilik Sapi (KK)	Sapi Dewasa		Anak Sapi	
		Jantan	Betina	Jantan	Betina
Kabupaten	5698	2.596	16.525	3.545	3.381
Kec. Rarowatu Utara	783	389	1.929	397	346
Kec. Lantari Jaya	982	294	2.114	346	312

Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka, 2011.

Jumlah yang tercantum di atas telah mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Adanya program pemerintah yang menyalurkan bantuan ternak sapi kepada peternak dalam rangka swasembada daging tahun 2014 telah menumbuhkan kelompok-kelompok ternak yang menjadi wadah penyaluran bantuan tersebut. Program nasional swasembada daging tahun 2014, menjadikan wilayah ini menjadi salah satu daerah sasaran program tersebut disebabkan terdapatnya wilayah hamparan yang cukup luas untuk penggembalaan ternak. Menurut sensus pertanian tahun 2013, Kecamatan Lantari Jaya berada pada urutan pertama di Kabupaten Bombana yang memiliki populasi ternak besar (sapi dan kerbau) terbanyak yaitu 5.716 ekor, sedangkan Kecamatan Rarowatu Utara berada pada urutan ketiga yaitu 3.301 ekor.

d. Perikanan

Kabupaten Bombana mempunyai potensi perikanan yang cukup besar. Ini disebabkan oleh letak wilayah Kabupaten Bombana yang berada pada wilayah pesisir dan sebagian lagi adalah wilayah kepulauan. Potensi perikanan yang terdapat di Kabupaten Bombana terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Produksi Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2010

Jenis Ikan	Perikanan Laut	Perairan Umum	Budidaya Laut	Budidaya Tambak
Ikan	14.705,40	857,60	-	7.875,47
Binatang Berkulit keras (Crustacea)	1.052,40	0,40	-	514,97
Bintang Berkulit Lunak (Molusca)	646,80	-	-	-
Binatang air lainnya	268,10	-	-	-
Tumbuhan/ Rumput laut	26,40	-	234,75	-

Sumber: BPS 2011.

Di lokasi penelitian yaitu di kecamatan Lantari Jaya terdapat dua Desa yang berbatasan laut dan menjadi penghasil ikan dan udang yaitu Desa Anugerah dan Desa Rarongkeu. Selain sebagai petani, penduduknya juga berprofesi sebagai penambak. Kabupaten Bombana dikenal sebagai penghasil udang yang menjadi suplier pada pasar-pasar di Kota Kendari. Hasil wawancara dengan *ina-ina*¹⁵, pedagang udang di Pelelangan ikan Kota Kendari mengungkapkan bahwa udang yang dijualnya berasal dari Kabupaten Bombana.

¹⁵ Panggilan umum di Kota Kendari untuk perempuan tua yang menjual ikan/sayur di pasar

D. Kelembagaan Pertanian (Era Mokole – 2014)

Kelembagaan pertanian telah ada sejak era Mokole di Kabupaten Bombana. Kehidupan pertanian telah menumbuhkan aturan-aturan yang melembaga dalam masyarakat dan ditaati oleh suku asli Kabupaten Bombana yaitu Moronene. Kelembagaan pertanian merupakan norma ataupun kebiasaan terstruktur dan terpola yang mengatur kehidupan masyarakat dalam pertanian sehingga setiap tindakan masyarakat melekat dengan lembaga-lembaga tersebut.

Suku asli yang hidup di Kabupaten Bombana adalah suku Moronene. Kata Moronene adalah gabungan kata *Moro* (serupa) dan *Nene* (pohon rasam¹⁶). Karena tinggal di antara pohon rasam yang serupa, maka keturunan rumpun Melayu tua ini dikenal sebagai suku Moronene. Suku Moronene datang ke jazirah Sulawesi Tenggara sekitar 2000 tahun SM dan hidup dekat dengan sumber air di pegunungan sebagai petani, peramu dan pemburu. Dari sebuah peta Belanda tahun 1820, salah satu Desa di Kecamatan Rarowatu Utara yaitu Hukaea Laea dikenal sebagai kampung terbesar orang Moronene. Mereka hidup di sekitar wilayah Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Suku Moronene hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut rumpun yang mendiami tobu (wilayah adat). Setiap rumpun dipimpin oleh seorang Mokole.

¹⁶Pohon rasam (*Dicranopteris linearis* syn. *Gleichenia linearis*) merupakan jenis paku yang besar yang biasa tumbuh pada tebing-tebing di tepi jalan di pegunungan.

Pada awalnya suku Moronene juga melakukan perladangan berpindah, akan tetapi dipimpin oleh Mokole mereka akhirnya hidup menetap dan mengklaim wilayah bagi rumpunnya pada semua tempat dimana mereka pernah melakukan aktivitas pertanian. Areal penggembalaan kerbau dan bekas perladangan suku Moronene disebut dengan *walaka* dan *waworaha*. Kehidupan suku Moronene diatur menurut hukum adat. Suku Moronene dikenal cinta damai dan sangat menjaga kehidupan ekosistem di sekitarnya. Berikut wawancara dengan Israwan, salah seorang keturunan suku Moronene yang tinggal di Desa Tembe.

“...Dari cerita-cerita orangtua, suku kita Moronene dulunya petani yang suka pindah-pindah. Setelah dipimpin Mokole akhirnya berhenti berpindah dan tinggal pada satu tempat bersama rumpunnya. Tanah-tanah tempat mereka berladang dan memelihara kerbau itulah yang menjadi tanah adat. Daerah Walaka dan Waworaha. Semua hidup rukun dan cinta damai. Orang Moronene tidak suka ribut, makanya seringkali jika ada kejadian mereka menyingkir ke gunung-gunung walaupun jika sudah aman akan kembali ke tempat asalnya. Sekarang banyak yang dipakai tambang, makanya ada 9 rumpun di sini mendapat kompensasi tiap bulan dari perusahaan, saya salah satu keturunan rumpun itu, namanya rumpun Kapita...” (Wawancara di Desa Tembe, 7 Januari 2013)

Hukum adat mengatur penggunaan tanah-tanah baik untuk pertanian maupun tempat tinggal. Hal ini dikuatkan oleh penelitian Sugiswati (2012) yang menjelaskan pengaturan penggunaan lahan adalah selain sebagai perkampungan, lahan digunakan untuk kebun, lahan penggembalaan kerbau dan kuda, kebun jati, tambak bersama pada muara-muara sungai, kuburan

dan lain-lain. Suku Moronene sangat menjunjung tinggi hukum adat dalam kehidupannya.

Hukum adat Moronene secara tertulis telah sulit diperoleh catatannya akan tetapi aturan tidak tertulis itu hidup dan menjadi nilai yang dijalankan oleh masyarakat Moronene. Hasrul (2009) memberi contoh nilai yang masih hidup tersebut dapat dilihat pada masyarakat di sekitar kawasan mangrove sepanjang muara sungai Lanowulu, sejak jaman dahulu telah ditetapkan beberapa aturan adat yang tidak memperbolehkan siapapun menebang mangrove dalam kawasan tersebut dan tidak boleh ada penambahan Togo (alat penangkap udang) disekitar muara sungai tersebut. Pelarangan ini perlu dilakukan, karena bagi mereka, mangrove yang lestari adalah syarat mutlak bagi tersedianya sumber kehidupan mereka. Sedangkan penambahan Togo juga tidak diperbolehkan karena mereka sadar bahwa dengan semakin banyaknya Togo maka pendapatan mereka akan semakin menurun, dan bila menurun maka tekanan terhadap sumber daya alam akan semakin besar. Contoh lain di Desa Aopa, masyarakat membatasi jumlah tangkapan mereka dari Rawa agar ikan tidak habis dan masih tersisa untuk hari esok. Masyarakat di desa ini juga mengeramatkan Gunung Tiga Cabang yaitu Gunung Mendoke dari segala macam gangguan, yang bila dipahami lebih dalam ini adalah cara mereka menjaga daerah tangkapan air bagi kawasan rawa Aopa.

Indonesia adalah Negara yang mengakui hukum adat, sebagaimana diatur dalam berbagai UU dan peraturan pemerintah. Masyarakat adat Moronene adalah salah satu masyarakat adat yang terpinggirkan hak-haknya oleh Negara dengan berbagai ketidakadilan yang terjadi, sedangkan UU sangat jelas mengakui adanya hak masyarakat adat akan tanah ulayat. Pengaturan hak ulayat bukan pada adanya UU tertulis tetapi lebih pada hidupnya tradisi dan adat istiadat yang menjadi bukti keberadaan masyarakat adat tersebut. Tanah ulayat dapat dibuktikan dengan bukti-bukti fisik seperti adanya bekas perkampungan, bekas lahan-lahan pertanian, bekas penggembalaan ternak, kuburan nenek moyang ataupun juga melalui cerita dan penunjukan tempat oleh tokoh-tokoh adat yang masih hidup.

Masyarakat suku Moronene di wilayah penelitian dalam sejarahnya telah beberapa kali terusir dari tanahnya. Pada tahun 1953, masyarakat di wilayah distrik Rumbia termasuk Hukaea-Laea mengungsi ke daerah-daerah aman disebabkan pasukan DI/TI menjadikan kampung-kampung mereka sebagai basis penyediaan logistiknya. Tahun 1962, setelah kondisi kampung telah cukup aman, suku Moronene kemudian kembali bermukim dan membangun rumah-rumah mereka serta memulai kehidupan sosial-ekonomi dan budayanya seperti sedia kala. Pada tahun 1965 orang-orang Bugis mulai datang dan menetap di wilayah penelitian. Mereka membaaur dengan suku Moronene sebagai petani padi ladang, nelayan sekaligus pedagang. Kedua etnis ini hidup rukun dan damai.

Pada tahun 1968 pemerintah kembali memindahkan perkampungan mereka ke daerah Langkowala tanpa alasan yang jelas. Tetapi mereka tidak bertahan tinggal di Langkowala, dan berangsur-angsur masyarakat kembali bermukim di Hukae-Laea. Akses masyarakat adat tersebut atas kebun dan usaha tani serta padang penggembalaan telah mulai dibatasi dengan ditetapkannya daerah Taman Buru pada tahun 1972. Tahun 1977, kehidupan tenang dan damai di kampung Hukaea Laea tiba-tiba harus buyar lagi karena Pemerintah kembali memindahkan mereka ke daerah Tembe dengan alasan kampung Hukaea-Laea sangat sulit dijangkau oleh sarana transportasi dan komunikasi. Pada tahun 1980 wilayah tersebut menjadi calon Taman Nasional, kemudian pada tahun 1990 ditunjuk sebagai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Proses pengambilalihan lahan di dalam kawasan hutan tersebut berlangsung tanpa melalui proses musyawarah. (Anonymous (2001); Bediona dkk (1999) dalam Sugiswati, 2009)

Selain pengambilalihan sepihak Negara terhadap tanah ulayat suku Moronene, wilayah adat mereka juga di kuasai PT. Barito Pasifik Timber seluas 37.000 Ha untuk dijadikan lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI).

Tahun 1980, ketika wilayah tanah adat suku Moronene ditetapkan sebagai calon Taman Nasional, pemerintah juga menempatkan transmigran asal Jawa, Bali dan Lombok di daerah ini termasuk di Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara. Transmigran ini diberikan lahan-lahan oleh pemerintah untuk diolah sebagai lahan pertanian. Sebagaimana masyarakat

suku Moronene dan Bugis yang telah lebih dahulu tinggal di situ, transmigran ini datang dan hidup sebagai petani. Tahun 1982 pertanian di daerah ini didominasi tanaman palawija, yaitu ubi, jagung dan padi ladang. Pertanian padi sawah dimulai tahun 1987 dengan mengandalkan air hujan. Pertanian padi sawah berkembang dan berhasil panen raya sejak dibangunnya bendungan tahun 1991. Pertanian tanaman padi ini pada akhirnya berhasil membawa Kabupaten Bombana sebagai penghasil beras utama bagi Sulawesi Tenggara.

Berhasilnya pertanian di wilayah ini tidak lepas dari peran kelembagaan pertanian yang ada. Kelembagaan pertanian yang ada di Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya. Pertanian padi sawah selanjutnya mengalami guncangan akibat dampak lingkungan fisik, sosial dan ekonomi sejak adanya tambang emas. Guncangan ini mempengaruhi kelembagaan pertanian yang selama ini melekat dalam kehidupan petani. Hal ini ditandai dengan terjadinya perubahan fungsi-fungsi pada kelembagaan pertanian baik fungsi manifest, fungsi laten, disfungsi dan non fungsi.

E. Keadaan Pertambangan

Berdasarkan UU No 4 tahun 2009, kegiatan pertambangan terdiri atas pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral terbagi empat

jenis bahan galian yaitu mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan radioaktif. Sedangkan yang dikenal umum dan masih digunakan pada data BPS Kabupaten Bombana adalah Pertambangan yang terbagi atas tiga golongan yaitu Golongan A, B dan C.¹⁷

Pada awal terbentuknya Kabupaten Bombana tahun 2003, sektor pertambangan yang dimiliki hanya tipe galian C meliputi jenis bahan galian batuan yang terdiri atas pasir, batu kali/kerikil, tanah urug dan batu gunung. Meskipun telah ada perubahan jenis pertambangan di luar batuan akan tetapi pemerintah daerah hanya mendapatkan PAD dari golongan batuan atau tipe C. Seperti pada data BPS Kabupaten Bombana. PAD dari golongan mineral logam dan mineral bukan logam tidak tercatat dalam data BPS Bombana.

Pendapatan dari pertambangan mineral logam (emas, pasir besi, nikel dan krom) tidak diterima langsung. Hal ini diatur oleh UU no 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pendapatan hasil tambang dari mineral logam diterima dalam bentuk *land rent*¹⁸ dan royalti¹⁹

¹⁷ UU No. 11 tahun 1967, membagi bahan galian tambang atas tiga Golongan, yakni Golongan A, B dan C yang mengklasifikasikan minyak bumi, gas alam, aspal, batubara, nikel, timah putih dan uranium sebagai bahan galian strategis yang disebut Golongan A, sedangkan besi, bauksit, tembaga, seng, emas, platina, perak dan intan dimasukkan ke dalam Golongan B sebagai bahan galian vital dan Golongan C disebut sebagai mineral industri dan terdiri dari batu permata, pasir kuarsa, marmer, granit, tanah liat dan pasir.

¹⁸ *Land rent* adalah iuran tetap yang terdiri atas iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi. Besarnya *land rent* bergantung pada luas wilayah tambang dikali dengan tetapan yang sudah diatur pemerintah.

yang dibayarkan perusahaan-perusahaan pertambangan langsung ke pemerintah pusat. Berbeda dengan ijin pertambangan yang diserahkan ke pemerintah daerah (Bupati), pendapatan berupa royalti diserahkan ke pemerintah pusat. Royalti dibayar setiap ada produksi sedangkan iuran *land rent* dibayar setiap tahun.

Pertambangan emas di Kabupaten Bombana terdiri atas dua fase, yaitu fase pertambangan yang dikelola masyarakat atau pertambangan rakyat dan fase pertambangan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

a. Pertambangan Rakyat/ Pertambangan Tradisional

Kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Bombana diawali oleh pertambangan rakyat²⁰ atau dalam penelitian ini disebut juga sebagai pertambangan tradisional²¹ yang dilakukan masyarakat setelah penemuan emas di sungai Tahi Ite Kecamatan Rarowatu akhir bulan September tahun 2008. Sejak itu, masyarakat mulai mencoba untuk menambang emas di

¹⁹ Royalti adalah iuran penjualan dari mineral yang dikenal sebagai iuran eksploitasi. Besarnya royalti dihitung berdasarkan penghasilan perusahaan dari pengambilan material tersebut.

²⁰ Pemerintah Kabupaten Bombana menggunakan istilah Pertambangan Rakyat kepada kegiatan pertambangan yang dilegalkan untuk masyarakat Bombana pada tanggal 1 November 2008 hingga 17 Maret 2009. Pertambangan Rakyat dalam UU No.11 tahun 1967 didefinisikan sebagai suatu kegiatan penggalian atau penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan atau teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam istilah lain disebut Tambang Skala Kecil (TSK).

²¹ Penulis menggunakan istilah pertambangan tradisional karena rakyat ataupun pendatang yang melakukan pertambangan melakukannya dalam skala kecil, baik perorangan maupun kelompok kecil dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, tali dan wajan.

sungai-sungai lainnya dan ternyata di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara lebih banyak lagi emas ditemukan. Bahkan semua sungai di wilayah tersebut mengandung emas yang tidak sedikit. Menurut Rahardjo (2010), Pemerintah Kabupaten Bombana menaksir kandungan emas di wilayahnya 165.000 ton. Pada permulaan demam emas di Bombana, setiap penambang bisa mendapatkan sedikitnya 5 gram emas hanya dengan bermodalkan alat sederhana yaitu wajan dan cangkul tanpa keahlian ataupun pengalaman menambang. Setelah banyak yang menambang mereka memperoleh 2 gram sehari. Akan tetapi setelah orang-orang mulai menggunakan mesin maka pendapatan penambang tradisional menurun hingga 1 gram sehari. Penambang tradisional selalu pulang dengan mengantongi hasil, bahkan jika beruntung dapat membawa hingga jutaan rupiah sehari.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana melegalkan Pertambangan Rakyat pada tanggal 1 November 2008. Tujuannya agar masyarakat Bombana dapat memanfaatkan berkah emas dan hidup lebih sejahtera. Namun bukan masyarakat Bombana saja yang berburu emas, tetapi juga penambang dari berbagai daerah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, Kalimantan, Papua bahkan Sumatera.

Penduduk Kabupaten Bombana khususnya di wilayah tambang meningkat tiga kali lipat. Menurut hasil wawancara dengan Hasdin Ratta, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan tahun 2009-2012, jumlah penduduk kabupaten Bombana saat itu (tahun 2009) adalah 134.000 jiwa. Sedangkan penambang yang datang dan penduduk lokal mencapai 250.000 jiwa. Data di BPS menunjukkan jumlah penduduk Bombana tahun 2009 adalah 111.481 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk yang terdata oleh pemerintah sangat kecil. Menurut Pudjiastuti (2010), data di kabupaten Bombana menunjukkan bahwa para penambang yang terdaftar berjumlah lebih dari 63 ribu orang dengan perincian 59.826 orang merupakan warga kabupaten Bombana, sedangkan 4.034 orang dari luar Bombana. Hal ini sesuai data Sawabi (2009) yang mengemukakan bahwa sejak dibukanya pertambangan rakyat tercatat 64.000 pemegang ijin menambang. Perbedaan data yang tercatat dan data hasil wawancara dengan beberapa informan kunci cukup jauh selisihnya. Ini menunjukkan jauh lebih besar pendatang yang tidak tercatat, yaitu masuk sebagai penambang ilegal dan tidak mempunyai Kartu Ijin Masuk Pertambangan (KIMP) dibanding penambang yang mempunyai KIMP. Hal ini wajar mengingat persyaratan untuk memiliki KIMP tidak mampu dipenuhi oleh pendatang dari berbagai daerah. KIMP hanya diberikan kepada penduduk Bombana yang mempunyai KTP, dan kepada penduduk se-Sulawesi Tenggara dengan jumlah maksimal 250 orang per Kabupaten yang juga dibuktikan dengan KTP dari daerah asalnya.

Peneliti menduga perbedaan juga disebabkan data 250.000 penduduk yang dikemukakan Hasdin Ratta termasuk jumlah penduduk yang tinggal sesaat, datang dan terlibat pertambangan selama beberapa hari, mencoba nasibnya dengan ikut menambang kemudian pergi kembali. Sebagian dari penduduk ini datang dan pergi selama pertambangan rakyat berlangsung.

Migrasi penduduk yang terjadi di Kabupaten Bombana pada era Pertambangan Rakyat terbagi atas: Pertama, Migran Tetap yaitu penduduk yang datang untuk menambang atau bekerja di sektor pendukung pertambangan, merasa nyaman dan sukses di lokasi sehingga memutuskan untuk menetap. Contohnya adalah pedagang-pedagang asal Sulawesi Selatan yang banyak tinggal dan menetap permanen di Kabupaten Bombana. Kedua, Migran Musiman yaitu penduduk yang datang karena terbukanya peluang kerja (menambang) dan menetap selama hasil dari pekerjaan barunya mampu menghidupi keluarganya. Migran ini umumnya datang dari daerah yang jauh seperti Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua dan Sumatera. Mereka adalah para penambang di daerah asalnya yang datang berkelompok untuk memperbaiki kesejahteraannya. Ketiga, Migran Pulang Pergi, yaitu penambang-penambang dadakan dari daerah sekitar (dari Pulau Sulawesi) yang datang mencari peruntungan dari emas, biasanya tidak mempunyai keahlian menambang. Mereka datang dan tinggal beberapa hari kemudian kembali lagi ke daerah asalnya dan datang kembali beberapa waktu kemudian. Ada juga yang tidak kembali lagi disebabkan beberapa

alasan. Pendetang ini tidak tahan dengan pekerjaan menambang karena tidak biasa menambang, tidak tahan dengan suasana lokasi yang ramai, semrawut dan kotor, terkena penyakit ataupun kehabisan modal (biaya hidup di lokasi sangat mahal sedangkan emas yang diperolehnya sedikit karena menambang bukan keahliannya).

Peraturan Bupati yang membatasi jumlah penambang dengan KIMP tidak mampu menghalangi puluhan ribu orang yang berusaha masuk ke areal pertambangan. Berikut adalah data penduduk ketika terbukanya Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bombana yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Tabel 11. Penduduk di Kabupaten Bombana Tahun 2009 Ketika Pertambangan Rakyat di Legalkan

No	Kriteria	Jumlah (jiwa)	Sumber
1	Penduduk Bombana	111.481	BPS, 2010
2	Penduduk Lokal yang Menambang	59.806	Pudjiastuti, 2010
		60.000	Sawabi, 2009
3	Pendetang yang Menambang dengan KIMP	4.034	Pudjiastuti, 2010
		4.000	Sawabi, 2009
4	Penambang di Lokasi Setiap Hari	120.000	Abu Bakar (Kades Lombokasih)
5	Penduduk di Kabupaten Bombana	250.000	Hasdin Ratta (Kabag Ekonomi dan Pembangunan)

Sumber: Hasil Penelitian

Pendatang berusaha memperoleh KTP Bombana agar dapat memperoleh KIMP untuk melakukan kegiatan pertambangan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintah dan aparat di lapangan untuk mencari keuntungan. Secara resmi biaya retribusi untuk memperoleh Kartu KIMP bagi warga Bombana adalah Rp. 100.000,- sedangkan untuk bukan warga Bombana adalah Rp 300.000,-. Akan tetapi dalam kenyataannya KIMP dijual tiga sampai lima kali lipat di lapangan. Bahkan dipalsukan kemudian dijual dengan harga tinggi.

Banyaknya penduduk menimbulkan berbagai persoalan pelik yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah, karena itu pada tanggal 17 Maret 2009 pemerintah mencabut ijin dan menutup pertambangan rakyat di Bombana. Pertambangan rakyat hanya bertahan empat bulan lebih atau sekitar enam bulan sejak ditemukannya emas. Berikut hasil wawancara yang menggambarkan keadaan ketika pertambangan tradisional berlangsung pada awal ditemukannya emas di Kabupaten Bombana.

Box 1. Gambaran Keadaan Ketika Pertambangan Emas Secara Tradisional Berlangsung di Kabupaten Bombana

Hasdin Ratta (Kabag Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Bombana)

“Sewaktu ada tambang akhir tahun 2008, semua pekerja di sektor informal kosong, baik pekerja infra struktur, petani, nelayan, tenaga harian lepas, semua masuk ke tambang. Akibatnya terjadi biaya ekonomi tinggi (high cost) pada semua sektor. Hal ini karena dengan menambang, tenaga yang keluar sedikit dan cepat dapat uang. Akibatnya sawah ditinggalkan begitu saja, biaya-biaya mahal, malah pekerjaan konstruksi terhenti oleh mahalnya biaya, mandor yang biasanya digaji Rp 75.000,- menjadi 250.000,- perhari, buruh yang waktu itu upahnya Rp 30.000,- sehari menjadi Rp 150.000,-. Otomatis pembangunan berhenti oleh tingginya ongkos kerja. Semua hal diukur dengan harga emas. Waktu itu ada pembuatan kartu penambang, kebetulan di meja saya di bikin. Sebenarnya kartu itu kita keluarkan dengan harga Rp100.000,- per kartu dengan persyaratan penduduk asli Bombana. Akan tetapi kenyataannya semua bermain, aparat bermain, polisi, tentara, semuanya main. Kartu yang kita cetak, diluar sana mereka scan dan jual. Harga kartu yang Rp100.000 diluar dijual hingga Rp 1.000.000,-. Orang ambil saja karena mereka pikir uang satu juta hanya satu dua hari saja bisa dikembalikan. Kita coba tertibkan penambang liar, pada akhirnya tidak bisa kita halang dan bedakan orang luar dan orang lokal yang masuk. Biar kita pasang palang disetiap jalan masuk, tetap banyak jalan lain. Karena wilayah tambang ini adalah kawasan padang yang luas sehingga susah sekali melakukan pengawasan.” (Wawancara pada tanggal 9 September 2012)

Abu Bakar (Kepala Desa Lombakasi)

“Pada awal tambang tradisional dan emas belum ditangani perusahaan, memang lumayan keadaannya bagi masyarakat lokal. Daerah di sini seperti kota, baik perdagangan, transportasi semua jalan. Waktu itu harga emas masih murah sekitar 150 ribu per gram. Untuk satu hari saja ada yang dapat 2 gram bahkan ada yang dapat sampai 27 gram yang saya temukan. Kebetulan saya selalu jalan keliling memantau masyarakat. Ibu saja (istri) yang menambang dapat 2 gr hanya dengan ambil di kali. Pemerintah pada waktu itu membuat kartu penambang supaya tertib. Jadi dibentuklah kelompok-kelompok dengan wilayah-wilayah masing-masing, tapi pelaksanaannya kacau, aturan waktu itu yang bisa dapat kartu hanya yang punya kartu penduduk (KTP), jadi pendatang yang banyak itu mengurus KTP sementara. Pemerintah buka pendaftaran 250 orang tiap kabupaten, ternyata yang datang tidak bisa diukur lagi, tidak terkendali, asal bawa pengantar dari Bupati semua boleh masuk. Akhirnya pemerintah membuat portal lagi untuk mengatasi orang-orang yang mau masuk. Karena padatnya terjadi banyak korban dan anarkis. Akhirnya pemerintah melarang dan menyisir wilayah” (Wawancara pada tanggal 14 Desember 2012)

Dewa Made Merta (Tokoh Masyarakat/ Petani Desa Kalaero)

Saya pernah menambang selama 5 hari, saya dapat 24 gram, hanya 2 hari saya fokus. Harga emas saat itu 180 rb. Saya dapat 4 juta. Saya bawa ponakan dia sakit, gemetar disitu kena malaria makanya saya pulang dan berhenti. Keadaan di sana itu parah, kita kan terendam terus main di air. Kalau di lubang saya tidak berani, banyak yang mati. Apalagi lingkungan kotor. Makan, minum buang air di situ semua. Saya tidak mampu. (Wawancara pada tanggal 7 Januari 2013)

Dinamika pertambahan penduduk sebelum dan sesudah adanya pertambangan emas dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 12. Data Jumlah Penduduk dan Pertambahan Jumlah Penduduk per Tahun di Kabupaten Bombana Periode 2005-2013 dari Berbagai Sumber.

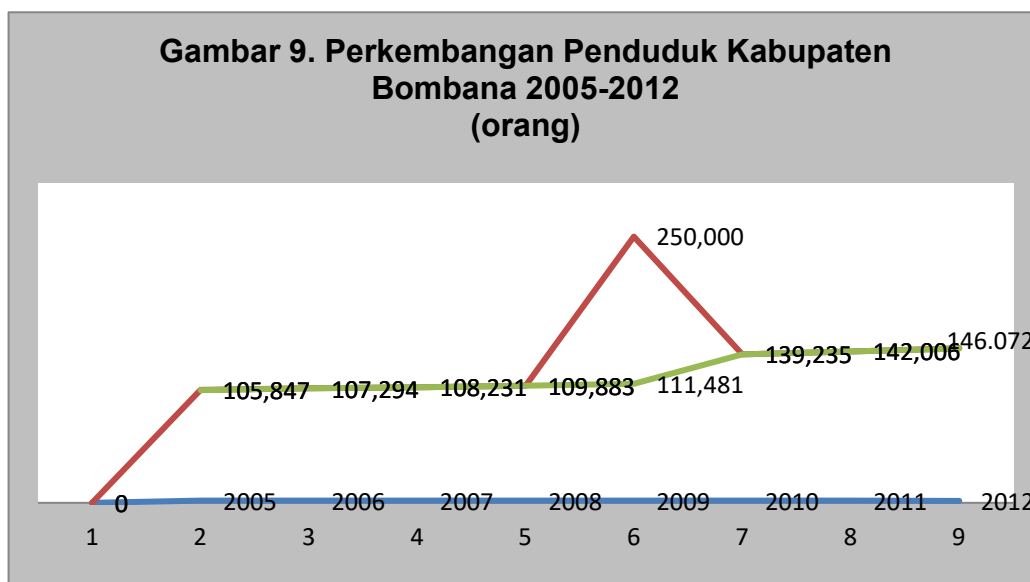
No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertambahan Penduduk dari Tahun Sebelumnya (jiwa)
1	2005	105.847*	
2	2006	107.294*	1.447
3	2007	108.231*	937
4	2008	109.883*	1.652
5	2009	111.481**	1.598
6	2010	139.235***	27.754
7	2011	142.006****	2.771
8	2012	146.072*****	4.066
9	2013	150.186*****	4.114

Sumber: *Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2009
 **BPS Kab. Bombana, 2010
 ***BPS Kab. Bombana, 2011
 ****BPS Kab. Bombana, 2012
 *****BPS Kab. Bombana, 2013
 ***** BPS Kab. Bombana, 2014

Dari data tersebut diketahui pada tahun 2010 terjadi pertambahan jumlah penduduk yang tidak normal. Sejak tahun 2005 penduduk hanya bertambah tidak lebih dari 1.652 jiwa setiap tahun, tetapi pada tahun 2010 pertambahan penduduk mencapai 27.754 jiwa yang terjadi sepanjang tahun 2009/2010. Hal ini disebabkan pertambangan rakyat membawa migrasi

penduduk yang tinggal menetap. Setelah tahun 2010 penambahan penduduk kembali normal sekitar 2700-2900-an jiwa setiap tahun. Ini disebabkan pertambahan rakyat dihentikan pemerintah dan diganti oleh investor yang melakukan pertambangan dengan IUP.

Perbandingan penduduk yang tercatat pada BPS dan penduduk yang diperkirakan datang untuk menambang dapat dilihat dalam grafik pada gambar 9 berikut.



Keterangan Gambar:

Perkiraan Informan
 Data BPS
 Tahun

Dari Gambar 9 terlihat adanya lonjakan penduduk tahun 2008-2010. Pada perkiraan informan mencapai 250.000 sedangkan data BPS adalah 139.235. Meski demikian, peneliti menduga tingginya jumlah perkiraan

informan (Hasdin Ratta) karena jumlah tersebut termasuk pendatang yang pulang pergi Bombana dan daerah asalnya sehingga terdata beberapa kali selama periode waktu tersebut.

b. Pertambangan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan

Berakhirnya pertambangan emas tradisional membuat Bupati Bombana mulai mengeluarkan Ijin Usaha Pertambangan kepada investor-investor yang datang. Semula ijin tersebut hanya diberikan kepada dua perusahaan pertambangan di bulan Desember tahun 2008 ketika pertambangan rakyat masih berlangsung, yaitu kepada PT Panca Logam Makmur dan PT Tiram. Akan tetapi, ditutupnya pertambangan rakyat, membuka peluang sebesar-besarnya kepada perusahaan-perusahaan tambang untuk mendapatkan ijin eksplorasi maupun produksi.

Mudahnya ijin pertambangan dari Bupati menyebabkan tumpang tindihnya ijin tersebut, terutama tumpang tindih wilayah Kuasa Pertambangan (KP). Bupati Atikurrahman menghadapi berbagai pihak dengan kepentingan luar biasa yang membuatnya menandatangani setiap permohonan IUP.

Berikut hasil wawancara yang menggambarkan keadaan ketika pertambangan dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) di mulai di Kabupaten Bombana.

Box 2. Keadaan Pada Awal Pertambangan Dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) di Kabupaten Bombana.

Ir. Cecep Trisnadjayady., M.Si. (Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana)

*“....Semua IUP dikeluarkan masih pada jaman bupati Atikurrahman. Ijin yang keluar saat itu memang dapat dikatakan mudah karena yang datang adalah **orang-orang penting**, umumnya datang dari pusat (Jakarta). Mudahnya ijin tersebut ditandatangani Bupati membuat wilayah perijinan yang tumpang tindih. Tapi saat ini sudah mulai ditertibkan oleh Bupati baru yaitu Pak Tafdil..” (Wawancara kedua, 7 Januari 2013)*

Hasdin Ratta (Kabag Pembangunan dan Ekonomi Kabupaten Bombana)

*“Bikin ijin usaha pertambangan itu di meja Bupati. Ijin yang ditandatangani banyak tumpang tindih karena kepentingan yang ada luar biasa. Pertama yang datang **bintang dua**, keluar itu masuk **bintang empat**, Bupati tanda tangan saja. Belum lagi Haikal, anak Bupati yang ikut bermain dengan membawa investor,” (Wawancara pada tanggal 9 September 2012)*

Mahyuddin, S.Sos, MSi. Kepala Badan Kesbang, mantan Pejabat Inspektorat Daerah

*“....Adanya emas menimbulkan eforia pengeluaran IUP juga terjadi. Meskipun harusnya prosedural tapi kan pengeluaran IUP itu memang kadang ditunggangi. Gubernur sendiri sudah katakan sulit melakukan penegakan aturan sebenarnya terhadap kawasan pertambangan. Sulit melawan itu, banyak **bintang** di belakangnya. Sudah bukan rahasia lagi banyak back up–back up an di tambang sana...” (Wawancara 7 September 2012)*

Sahrin Gaus (Anggota DPRD Kabupaten Bombana, 2009-2014)

“..Ijin tambang terbanyak dibuat oleh Atikurrahman. biar sehari dia mau berhenti masih juga dia tandatangani ijin. Ada 108 IUP baik ijin eksplorasi maupun produksi pada semua jenis hasil tambang yang ada. Dari jumlah tersebut 60 perusahaan memperoleh ijin pertambangan emas...” (Wawancara 16 Januari 2013)

Banyaknya IUP yang dikeluarkan Bupati Aktikurrahman akhirnya menjadi tidak efektif. Kebanyakan perusahaan-perusahaan pertambangan

yang memiliki ijin eksplorasi hanya mengkapling wilayah saja, tetapi tidak melakukan kegiatan eksplorasi. Akibatnya ijin yang telah diberikan menjadi sia-sia

Pada akhir tahun 2011, Hakkul Wahab (Bupati *caretaker*) dengan dukungan DPRD mencabut sementara ijin terhadap 21 perusahaan pertambangan dengan alasan perusahaan tidak melakukan kegiatan apa-apa sejak ijin dikeluarkan. Pencabutan sementara tersebut diharapkan menjadi pencabutan tetap. Sejak pencabutan sementara tersebut, Bupati terpilih (pemerintahan sekarang) yaitu Tafdil belum pernah mengeluarkan ijin pertambangan. Hingga tahun 2013 masih terdapat 87 perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Dinas Pertambangan baik yang memperoleh ijin eksplorasi maupun produksi di Kabupaten Bombana. Dari 87 perusahaan terdapat 52 perusahaan yang mendapat IUP emas di Kabupaten Bombana.

Tabel 13. Data Perusahaan yang Mempunyai Ijin Usaha Pertambangan Emas di Kabupaten Bombana 2009-2013

No	Nama Perusahaan	Ijin Eksplorasi		Ijin Produksi		Keterangan
		No. Ijin	Tahun Keluar	No. Ijin	Tahun Keluar	
1	PT. Panca Logam Makmur	353	2008	91	2010	Aktif ada royalti
2	PT. Anugrah Alam Indonesia	242.a	2008	26	2011	
3	PT. Sultra Utama Nikel	166	2009	27	2010	Aktif ada royalti
4	PT. Bahtera Sultra Mining	177	2009	355	2010	Aktif ada royalti
5	PT. Maju Mulya Agung Tama	168	2009	235	2010	
6	PT. Cahaya Gemilang Sentosa	118.a	2009	236	2010	
7	PT. Ganesha Delta Permata	167	2009	234	2010	
8	PT. Dinasti Thamier Dwi Jaya	243	2009	237	2010	Aktif ada royalti
9	PT. Niagatama Makmursembada	366.A	2009	173 A	2010	
10	PT. Karya Cipta Pratama	206.A	2009	28	2010	
11	PT. Terang Guna Sentosa	154.A	2009	40	2010	
12	PT. Tambang Bumi Sulawesi	123.A	2009			
13	PT. Daya Utama Sakti	238	2009	325	2010	
14	PT. Panca Logam Nusantara	408	2008	7	2010	
15	PT. Tiran Indonesia	05	2009	92	2010	Aktif ada royalti
16	PT. Lamora Trading Company	135.A	2009	215	2010	
17	PT. Mitracom Prima (I)	123.C	2009	216	2010	
18	PT. Sentral Maxindo selaras	270.A	2009	323	2010	
19	PT. Multi Garmindo	205.A	2009	324	2010	
20	PT. Putra Mahkota Andalas	141.A	2009	326	2010	
21	PT. Tri Sasana Kencana	198	2009	369	2010	
22	PT. Sumber Alam Megakarya	381	2008	370	2010	
23	PT. Talenta Bina Persada	402	2008	371	2010	
24	PT. Dian Anugrah Persada	406	2008	372	2010	
25	PT. Mitracom Prima (II)	142	2009	400	2010	
26	PT. Sun Indo Bahana	145	2009	401	2010	
27	PT. Yobel Pratama	232.a	2009	402	2010	
28	PT. Manunggal Sarana Surya Pratama (I)	241.A	2009	409	2010	
29	PT. Cakrawala Bumi Asri Timur	385	2008	404	2010	
30	PT. Citra Nuansa Selaras	387	2008	405	2010	
31	PT. Megacipta Kharisma Alam	389	2008	406	2010	
32	PT. Talenta Sena Mulia	157.A	2009	407	2010	
33	PT. Manunggal Sarana Surya Pratama (II)	237.A	2009	403	2010	
34	PT. Satria Lima Utama	135.B	2009	461	2010	
35	PT. Eka Panca Reksa	131.B	2009	462	2010	
36	PT. Leigerindo Utama	118	2010	184	2011	
37	PT. Tambang Bumi Sulawesi	252.c	2009			
38	PT. Ketapang Inti Mineral	287.A	2009			
39	PT. Hasilindo Sukses	141.b	2009			
40	PT. Prakarsa Utama Sejahtera	130	2009			
41	PT. Diva Dunia International	126	2009			
42	PT. Mutiara Sakti	279.A	2009			
43	PT. Catur Buawana Artha Investama	251	2011			
44	PT. Kabaena Listari Utama	127	2009			
45	PT. Ayuta Mitra Sentosa	123.b	2009			
46	PT. Tiran Indonesia	05	2009			
47	PT. Tunas Jaya Tamamas	281.A	2009			
48	PT. Tunas Jaya Tamamas	383.A	2009			
49	PT. Trisasana Kencana II	199	2009			
50	PT. Lamora Trading Company II	121	2009			
51	PT. Nawaksara	164.B	2009			
52	PT. Mars Mazmur Mandiri	25	2009			

Sumber: Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana, 2013

Dari tabel di atas diketahui terdapat 17 perusahaan pertambangan yang memperoleh ijin eksplorasi dan semuanya aktif. Selebihnya yaitu 35 perusahaan memperoleh ijin produksi. Dari 35 perusahaan yang mempunyai ijin produksi, terdapat 5 perusahaan yang telah berproduksi yaitu PT Bahtera Sultra Mining, PT Sultra Utama Nikel, PT Panca Logam Makmur, PT Dinasti Thamier Dwi Jaya dan PT Tiran Indonesia.

Pertambangan emas memberikan pendapatan bagi Negara berupa royalti yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan produksi. Royalti tersebut dibayar ke pemerintah pusat melalui kas Negara. Berikut adalah royalti dari perusahaan-perusahaan pertambangan emas di Kabupaten Bombana.

Tabel 14. Data Royalti Hasil Produksi Emas (Rupiah) di Kabupaten Bombana

Perusahaan Tahun	PT BAHTERA SULTRA MINING	PT SULTRA UTAMA NIKEL	PT PANCA LOGAM MAKMUR	PT DINASTI THAMIER DWI JAYA	PT TIRAN INDONESIA
2009	-	-	286.483.553	-	Belum ada data Royalti yang masuk ke Dinas Pertambangan
	-	-	541.108.710	-	
2010	-	-	723.524.030	-	
	-	-	636.062.700	-	
	-	-	441.483.900	-	
	-	-	499.299.700	-	
2011	24.926.038	-	567.553.200	Ada laporan produksi 0,28602kg tapi belum bayar royalti ke Negara	
	55.000.000	-	693.251.100		
	-	-	502.803.650		
	-	-	436.903.960		
2012	10.067.000	Produksi 0,0745kg, kemungkinan sudah bayar royalti tapi laporannya belum masuk	605.411.020	31.785.469	
	14.469.925		1.833.193.244	-	
	-		1.306.802.417	-	

Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana, 2013

Hasil pembayaran Royalti ke pemerintah pusat dibagikan ke daerah penghasil berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pembagian itu adalah: 20% Royalti diserahkan ke pemerintah pusat, 32 % diserahkan ke daerah penghasil (Kabupaten penghasil), 32% untuk Kabupaten se-propinsi daerah penghasil dan 16 % untuk Propinsi daerah penghasil. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pembagian hasil dari pemanfaatan SDA pertambangan sebagai berikut.

Tabel 15. Persentase Pembagian Hasil Pertambangan Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

No	Penerimaan	Pusat	Propinsi	Kab/Kota Penghasil	Kab/Kota se Propinsi	Total
1	Izin Usaha Pertambangan (IUP)					
	a. Kab/Kota Penghasil					
	- Iuran Tetap	20	16	64	-	100
	- Iuran Produksi	20	16	32	32	100
	b. Propinsi Sebagai Daerah Penghasil					
- Iuran Tetap	20	80	-	-	100	
- Iuran Produksi	20	26	-	54	100	
2	Kontrak Karya					
	- Iuran Tetap	20	16	64	-	100
	- Iuran Produksi	20	16	32	32	100
3	BKP2B					
	- Iuran Tetap	20	16	64	-	100
	- Dana hasil produksi Batu Bara (13,5%)					
	1. Royalti (3-7%)	20	16	32	32	100
2. Penjualan Hasil Tambang (13,5%)-(3-7%)	100	-	-	-	100	

Pemerintah daerah mendapatkan hasil tambang dari wilayahnya hanya dalam bentuk pembagian royalti sebesar 32%. Pemerintah daerah tidak dibenarkan untuk memungut pajak ataupun retribusi lainnya dari kegiatan pertambangan. Hal ini diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana, ketidaktahuan masyarakat akan peraturan tersebut seringkali membuat mereka menuntut pendapatan daerah dari hasil tambang. Sementara pendapatan tersebut tidak dikelola daerah tetapi langsung masuk ke pemerintah pusat melalui kas Negara. Hanya kewenangan pengurusan dan perijinan saja yang diserahkan ke daerah melalui Bupati tetapi pendapatan masih dipegang pemerintah pusat.

Royalti hasil pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dari Kabupaten Bombana cukup besar. Selain emas, ada juga nikel dan krom yang menyumbang royalti ke kas negara dalam jumlah yang cukup besar. Berikut ini adalah data royalti hasil produksi pertambangan mineral Kabupaten Bombana yang terkumpul dalam rupiah maupun US Dollar.

Tabel 16. Data Royalti Hasil Produksi Pertambangan Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam di Kabupaten Bombana

TAHUN	RUPIAH	\$ USD	KETERANGAN
2008	7.153.159.669		NIKEL
2009	5.589.612.340		NIKEL, EMAS
2010	2.824.650.178	64.231,10	NIKEL, EMAS, KROM
2011	2.609.454.555	1.873.839,90	NIKEL, EMAS, KROM
2012	6.922.032.315	3.344.407,16	NIKEL, EMAS, KROM

Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana, 2013

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa sektor pertambangan dari mineral logam (emas) dan mineral bukan logam (nikel dan krom) adalah sektor baru yang cukup menjanjikan bagi pemerintah daerah untuk dimanfaatkan dalam pembangunan Kabupaten Bombana. Bupati terpilih yaitu Muhammad Tafdil bahkan merangkul semua investor di pulau Kabaena (pulau penghasil krom dan nikel) dan meminta mereka membangun jalan sebagai salah satu bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk masyarakat setempat. Setiap perusahaan mendapat tugas memperbaiki/membangun 10 km jalan dengan lebar 10 m. Hasilnya, jalan yang semula lebarnya 4 m sekarang telah menjadi 10 meter dan telah selesai sepanjang 70 km. Dari perubahan ini Bupati menganggarkan 3 Milyar Rupiah untuk pengaspalan dan Gubernur pun akan menambah dana 4 Milyar rupiah untuk pengaspalan. Dengan demikian akan terjadi perubahan infrastruktur jalan di pulau Kabaena oleh hadirnya perusahaan pertambangan.

Dari penjelasan di atas, kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Bombana membawa dampak yang dikategorikan atas tiga yaitu dampak atas lingkungan fisik, sosial dan ekonomi.

BAB V

DAMPAK LINGKUNGAN FISIK, SOSIAL DAN EKONOMI KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS PADA KOMUNITAS TANI

Pertambangan emas di Kabupaten Bombana membawa dampak yang dikategorikan atas tiga yaitu dampak lingkungan fisik, sosial dan ekonomi.

A. Dampak Lingkungan Fisik

Kegiatan pertambangan selalu membawa dampak pada lingkungan fisik disebabkan kegiatan ini dilakukan bersentuhan langsung dengan alam. Pertambangan emas dilakukan dengan membongkar tanah dan mengambil isinya baik di sungai, gunung, hutan bahkan di wilayah perkebunan. Dampak fisik tersebut terdiri atas dampak terhadap air, dampak lumpur, puso/kekeringan, terjadinya perubahan bentang alam atau rusaknya alam akibat lubang yang ditinggalkan oleh penambang, dan pencemaran terhadap udara.

a. Dampak Terhadap Air

Dampak terhadap air adalah dampak tambang emas yang mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat tani di sekitar wilayah tambang disebabkan kegiatan pertanian bersentuhan langsung

dengan alam. Dampak terhadap air meliputi berkurangnya debit (ketersediaan) air dan pencemaran terhadap air.

Berkurangnya Debit Air

Pertambangan rakyat tahun 2008-2009 dilakukan oleh ribuan penambang tradisional pada semua aliran sungai di daerah ini. Pohon-pohon disekitar sungai dihabisi, bahkan hutan juga ditebang. Di setiap bagian sungai, jarak antar penambang melakukan pendulangan hanya satu meter. Air sungai dibendung dimana-mana, kegiatan tambang menggali dan menimbun sungai telah menghilangkan batang-batang sungai. Akibatnya sungai tercemar, rusak dan ekosistem terganggu. Beberapa waktu kemudian, kondisi alam yang rusak terutama hilangnya hutan-hutan mempengaruhi curah hujan. Setelah pertambangan tradisional berakhir, perusahaan pertambangan yang memperoleh IUP yaitu PT PLM membendung sungai di daerah gunung yang merupakan sumber aliran air irigasi untuk kegiatan pertambangan sehingga air yang mengalir ke bendungan irigasi tidak cukup untuk mengairi sawah-sawah petani. Bahkan di desa Wumbubangka tidak ada lagi pertanian padi sawah akibat dibendungnya air (batang sungai La Sangi ditimbun tanah).

Berkurangnya debit air pada bendungan terutama terjadi pada musim kemarau, sedangkan pada musim hujan, sekalipun air tersedia cukup, tetapi

kondisinya keruh bercampur limbah lumpur. Ini disebabkan kegiatan pertambangan di gunung membuang limbah tambang (tailing) di sungai sehingga akan terbawa bersama aliran air.

Status irigasi terdiri atas 3 (tiga) yaitu irigasi teknis, semi teknis dan irigasi Desa. Di Lokasi penelitian dibedakan atas dua yaitu semi teknis dan irigasi Desa. Berikut adalah Irigasi semi teknis dan irigasi Desa yang ada di daerah penelitian menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bombana.

Tabel 17. Irigasi Semi Teknis dan Irigasi Desa

Kecamatan/ Desa	Irigasi Semi Teknis	Irigasi Desa	Tahun Pembuatan	Potensi (ha)	Fungsional (ha)
Rarowatu Utara					
Tembe		D.i. Tembe	1996	175	-
Tembe		D.i. Puulore	1997	200	-
Wumbubangka	Embung La Aho	-	2006	600	50
Wumbubangka		D.i. Lampobulu	1996	157	-
Wumbubangka		D.i. Lasangi	1997	200	-
Aneka Marga		D.i. La Aho	1997	300	200
Aneka Marga		D.i. Mertasari	1997	200	150
Marga Jaya		D.i. Lantari Kanan	1998	200	150
Marga Jaya		D.i. Lampadena	1998	200	150
Lantari Jaya					
Langkowala	Bendungan Langkowala	-	1992	684	625
Langkowala		D.i. Lebo	1998	40	40
Anugrah		D.i. Lantari	1996	200	200
Lantari		D.i. Puuroda	1997	150	100
Lantari		D.i. Wice	1997	200	40
Pasare Apua		D.i. Swakarsa	1997	150	100
Tinabite	Embung La Usu	-	2006	400	180

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bombana, 2014

Irigasi teknis yang ada di lokasi penelitian ada 3 yaitu Embung La Aho di Kecamatan Rarowatu utara, Bendungan Langkowala dan Embung Lausu di Kecamatan Lantari Jaya. Dari data pada Tabel 17 terlihat terjadinya penurunan fungsi dari irigasi-irigasi yang ada. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak tambang emas yang mempengaruhi debit air. Berikut ini adalah gambaran irigasi semi teknis yang berada di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara.

Bendungan Langkowala, Irigasi Semi Teknis di Kecamatan Lantari Jaya

Bendungan Langkowala berdiri pada tahun 1992 di Desa Langkowala Kecamatan Lantari Jaya. Sumber air berasal dari sungai Langkowala. Menurut data Dinas PU, bendungan Langkowala mampu mengairi 684 ha sawah yang masuk melalui saluran sekunder BL1-BL9. Tetapi jika dihitung secara keseluruhan, menurut Mustari, PPL yang sudah 25 tahun tinggal di Desa Lombakasih, bendungan ini mampu mengairi sekitar 1500 Ha lahan sawah, termasuk air yang melalui irigasi desa yang asalnya dari sungai Langkowala dan melewati bendungan Langkowala. Ada 5 (lima) Desa yang mendapat air langsung dari bendungan Langkowala yaitu Desa Langkowala, Anugrah, Lantari, Lombakasih dan Kalaero pada kecamatan Lantari Jaya. Desa Watu-watu juga memperoleh air dari bendungan ini tetapi untuk

mendapatkan air, petani menggunakan pompa air disebabkan letak Desa Watu-watu memiliki topografi lebih tinggi dari bendungan Langkowala.

Dari potensi yang dimiliki Bendungan Langkowala, terjadi penurunan kemampuan mengairi sawah selama periode 2009-2013. Pada musim tanam Maret-Oktober 2013 bendungan Langkowala hanya mampu mengairi 1.189 Ha (data lapangan) atau hanya 625 ha yang langsung mendapatkan dari irigasi sekunder. Pada musim kemarau bendungan ini nyaris kering dengan tanah yang pecah-pecah. Jika demikian, bendungan Langkowala tidak akan mampu mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Seperti yang terjadi pada kekeringan tahun 2009 dan 2011. Kondisi bendungan dapat dilihat pada Gambar 11 dan 12. Sementara pada musim hujan, ketika debit air besar, bendungan tidak mampu menampung air oleh tingginya endapan sehingga air mengalir keluar dan meluap ke mana-mana termasuk ke lahan-lahan petani. Bendungan Langkowala mendapat lumpur dari kegiatan pertambangan yang dilakukan PT PLM. Limbah tailing pertambangan dibuang melalui sungai dan masuk ke percabangan sungai Langkowala. Berikut gambar bendungan Langkowala pada musim kemarau dan musim hujan.

Gambar 10. Bendungan Langkowala di Kecamatan Lantari Jaya pada musim kemarau



(Foto: Agustus 2011)

Gambar 11. Bendungan Langkowala di Kecamatan Lantari Jaya pada musim hujan



(Foto : April 2013)

Dari kedua gambar tersebut terlihat bahwa baik pada musim hujan maupun musim kemarau, debit air sudah sangat berkurang dan lumpur yang memenuhi bendungan juga semakin tinggi. Bendungan Langkowala mempunyai kedalaman 6 meter, akan tetapi pertambangan yang dilakukan PT PLM membawa limbah lumpur ke bendungan Langkowala sehingga kedalaman bendungan ini tinggal 0,5 meter.

Embung Lausu

Selain Bendungan Langkowala terdapat Embung La Usu yang merupakan irigasi semi teknis di Kecamatan Lantari Jaya. Embung La Usu dibangun tahun 2006 dengan memanfaatkan air dari sungai La Usu. Embung ini adalah satu-satunya pengairan semi teknis di lokasi penelitian yang relative lebih aman dari dampak tambang karena sungai La Usu mendapat air dari daerah TNRAW (Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai) yang dilindungi. Letaknya juga cukup jauh dari daerah pertambangan, sekitar 25 km. Meski demikian, dari saluran sekundernya embung La Usu hanya mampu mengairi 180 ha sawah. Embung La Usu juga mengalirkan air ke irigasi Desa Lababo dan mampu mengairi sawah seluas 150 ha. Dengan demikian, embung la Usu masih memiliki potensi air sebanyak 70 ha yang belum terfungsikan.

Embung La Aho

Embung La Aho dibangun tahun 2006 di desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara. Meski berada di desa Wumbubangka, embung La Aho tidak mengairi sawah-sawah di Desa tersebut karena letak sawah di desa ini lebih tinggi dari embung La Aho. Karena itu, embung La Aho mengairi sawah-sawah di daerah bawah yaitu desa Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara. Sumber air embung La Aho berasal dari sungai La Aho dan mempunyai potensi mengairi sawah seluas 600 ha. Sejak ada tambang emas, embung La Aho hanya mampu mengairi sawah seluas 50 ha saja. Kegiatan pertambangan dari PT SUN menyebabkan embung La Aho mengalami pengendapan lumpur pada penampungan airnya dan menjadi keruh (lihat gambar 12). Lumpur ini adalah lumpur tailing yang dibuang ke sungai La Aho oleh PT SUN. Selain embung menjadi keruh, saluran-saluran irigasi sekunder dari embung La Aho juga mengalami kerusakan. Sebagian pecah dan terputus alirannya. Ini karena lumpur yang mengalir ke saluran sekunder menumpuk dan menimbun saluran air. Berikut ini adalah gambar embung La Aho yang keruh.

Gambar 12. Embung La Aho di Kecamatan Rarowatu Utara pada musim hujan



(Foto: November 2012)

Selain ketiga irigasi semi teknis, irigasi-irigasi desa juga mengalami penurunan debit air. Berikut adalah gambaran kondisi irigasi desa akibat adanya dampak tambang emas yaitu irigasi La Sangi dan irigasi Mertasari di Kecamatan Rarowatu Utara serta Irigasi Puuroda di Kecamatan Lantari Jaya. Ketiganya mengalami dampak fisik tambang berupa dampak terhadap air.

Irigasi La Sangi

Irigasi La Sangi dibangun pada tahun 1997 di desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara. Irigasi La Sangi mendapat air dari sungai La Sangi dan mampu mangairi sawah seluas 200 ha di Desa Wumbubangka.

Setelah ada tambang emas, irigasi La Sangi tidak lagi mendapat pasokan air dari sungai La Sangi. Hal ini disebabkan sungai La Sangi telah ditimbun oleh PT PLM untuk kegiatan pertambangan. Karena itu, sejak tahun 2009 pertanian padi sawah tidak lagi dilakukan oleh petani. Berikut adalah kondisi sungai La Sangi yang ditimbun oleh PT PLM.

Gambar 13. Sungai La Sangi di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara



(Foto: Juli 2013)

Irigasi Mertasari

Irigasi Mertasari terletak di Desa Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara dan mampu mengairi sawah seluas 200 ha pada desa tersebut. Irigasi ini mengalami penurunan kemampuan mengairi sawah akibat

tambang. Menurut Data dari Bidang Pengairan PU, irigasi Mertasari dapat mengairi 150 ha sawah sedangkan hasil temuan di lapangan irigasi Mertasari hanya dapat mengairi sawah-sawah yang berada pada sebelah timur dan barat poros jalan, yaitu hanya sekitar 96 ha pada musim tanam Maret – Oktober 2013. Berikut adalah gambar Irigasi Mertasari yang di ambil pada awal bulan Oktober 2012, ketika itu intensitas dan curah hujan cukup meskipun bukan musim hujan.

Gambar 14. Irigasi Mertasari di Kecamatan Rarowatu Utara



(Foto: Oktober 2012)

Irigasi Puuroda

Irigasi ini dibangun tahun 1997 di desa Lantari. Irigasi Puuroda mampu mengairi 150 ha sawah yang berada pada desa Lantari dan Rarongkeu. Irigasi Puuroda 'menangkap' air buangan dari sungai Langkowala di daerah bawah dan air hujan kemudian menampungnya. Setelah ada pertambangan emas, air yang dapat ditangkap oleh irigasi Puuroda berkurang tajam dan berupa air yang keruh oleh limbah tambang. Irigasi Puuroda pada musim tanam tahun 2013 hanya mampu mengairi 100 ha sawah petani.

Irigasi Desa lainnya baik yang berada di kecamatan Lantari Jaya maupun Kecamatan Rarowatu Utara juga mengalami dampak tambang, mulai dari penurunan debit air hingga pencemaran air. Irigasi Desa yang berada di Desa Marga Jaya hanya terkena dampak tambang berupa air keruh dan tidak/belum mengalami penurunan debit air. Ini karena irigasi-irigasi tersebut mendapat air dari sungai Flore yang mengalir dari Desa Wumbubangka ke Desa Tembe, dimana sungai Flore ini tidak berada di lokasi pertambangan yang sudah diolah. Sedangkan irigasi yang berada di Desa Anugrah dan Pasareapua di Kecamatan Lantari Jaya, mengalami kekurangan debit air sebab irigasi ini menerima pasokan air buangan dari sungai Langkowala. Akibatnya, petani di kedua Desa ini mendirikan sumur-sumur bor untuk mengatasi kekurangan air agar dapat terus bersawah.

Pencemaran Air.

Pencemaran terhadap air disebabkan proses pertambangan emas di daerah ini menggunakan zat kimia berbahaya seperti *mercury* untuk memisahkan emas dari unsur-unsur logam lainnya. Penduduk setempat mengenalnya sebagai 'raksa' dengan warna perak mengkilat. Walaupun pihak perusahaan secara terang-terangan membantah tidak menggunakan merkuri, bahkan memasang papan bertuliskan "Dilarang keras menggunakan merkuri" namun kenyataan di lapangan, para pekerja tambang tetap memakai zat ini.

Gambar 15. Raksa yang digunakan pekerja tambang emas dalam proses penambangan



(Foto: April 2013)

Akibat zat pencemar, kehidupan ekosistem di wilayah tambang terancam bahaya oleh larutnya unsur-unsur logam berat yang dibawa oleh limbah tailing²² ke bendungan irigasi. Zat pencemar ini telah menyebabkan sapi-sapi yang di pelihara petani banyak yang mati karena minum air dari saluran irigasi. Pada jangka panjang akan mengancam jiwa manusia yang hidup dari alam di sekitar tambang emas. Berikut adalah gambar proses pertambangan tradisional yang terus berlangsung.

Gambar 16. Proses Pertambangan Emas Secara Tradisional Di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya



(Foto: April 2013)

Dari gambar di atas terlihat proses pertambangan tradisional di Desa Watu-watu dimana kegiatan ini selalu melibatkan anak-anak. Setelah

²² Limbah tailing adalah limbah pertambangan berupa tanah berlumpur hasil dari sisa-sisa pengerusan dan pemisahan mineral logam (emas) dengan bahan tambang lainnya.

penambang selesai melakukan proses pemisahan emas, anak-anak ini akan mengolah kembali sisa-sisa tanah/pasir tersebut dan jika beruntung biasanya akan mendapatkan emas sebesar satu atau dua kaca.

Dampak fisik kegiatan tambang emas terhadap air di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada hasil wawancara berikut.

Box 3. Dampak Fisik Kegiatan Tambang Terhadap Air

Sumo Sumar (Ketua Kelompok Tani dari Desa Wumbubangka)

“sumber air sawah sudah tidak ada lagi, bendung La Sangi sudah ditimbun. Sekitar 200 meter dari sini terpotongnya sungai yang ditimbun. Itu untuk keperluan perusahaan. Makanya sejak tahun 2009, sejak ada tambang tidak ada lagi petani yang bersawah. Desa Wumbubangka ini sudah dikapling perusahaan. Perusahaan itu adalah PT PLM, PT SUN, PT Btr, PT BS” (wawancara kedua pada tanggal 13 Desember 2012)

Gusti Oka (Keamanan Rakyat/Keamanan Pasar SP2)

“Adanya tambang disini bikin hancur, masyarakat mengeluh. Saya pernah pemantauan di atas, sudah hilang semua kali-kali besar, tidak ada lagi saluran air di atas sana. Ada 6 perusahaan di atas, sekarang mulai berkurang. Sekarang semua di rusak, itukan mereka cari barangnya (emas) di sana. kalau hujan terhambur air karena tidak ada salurannya...” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2013)

Abu Bakar (Kepala Desa Lombakasi)

“Setahu saya semua penambang pakai raksa. Baik manual maupun mesin, semua pakai. Itu gunanya untuk mempercepat pengumpulan emas. Saya tidak tau apakah itu merkuri, kami sebutnya air raksa. Seperti logam cair warna perak terang. Kalau ada yang bilang tidak pakai. Itu bohong. Cairan itu ada pemasoknya di Desa Watu-watu” (Wawancara ketiga, 7 Juli 2013)

Supardi (petani dan buruh tambang dari Desa Langkowala)

“Kalau lagi tidak menanam saya bekerja sebagai buruh tambang. Saya ikut pada mitra PT PLM dan juga PT SUN. Sekarang ini saya ikut bos di desa Watu-watu. Bos menyediakan eskavator dan mesin. Lahannya milik pewaris. Kita mengumpulkan emas pasti menggunakan raksa. Kalau tidak pakai raksa, emasnya susah menyatu..” (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2013)

Saradi (mantan Kepala Desa Marga Jaya)

“Waktu itu (pertambangan rakyat) banyak sapi yang mati, terutama anak-anaknya, induk juga, jumlahnya mencapai ratusan. Kemungkinan karena sapi minum dari sumber air di situ (yang ada tambang) kulitnya hitam seperti kerbau kena lumpur, bulunya habis. Jadi dampak itu kami rasakan, punya hewan mati, punya tanaman tidak beres.” (wawancara pada tanggal 14 Desember 2012)

Berikut adalah perbedaan kondisi air sebelum dan sesudah adanya kegiatan pertambangan emas yang berdampak pada lingkungan fisik (dampak terhadap air).

Tabel 18. Dampak Terhadap Air, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh

No	Dampak Terhadap Air	Keadaan		Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh
		Sebelum Tambang	Sesudah tambang	
1	Berkurangnya debit air	Air selalu tersedia sepanjang tahun walaupun pada musim kemarau tidak sebanyak pada musim hujan tetapi selalu mampu memenuhi kebutuhan air petani	Air berkurang tajam. Pada musim hujan sering air tidak mencukupi karena hari hujan dan curah hujan berkurang (lihat Tabel 5). Pada musim kemarau air di bendungan bahkan menjadi kering	Kelembagaan Pengairan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak
2	Pencemaran terhadap air	Air pada bendungan /embung/ irigasi desa dan saluran irigasi bersih dan jernih, dapat dipakai untuk minum ternak	Air pada bendungan /embung/ irigasi desa dan saluran irigasi kotor berwarna coklat, keruh bercampur lumpur, gatal bila terkena tubuh,	

b. Dampak Lumpur

Lumpur adalah salah satu dampak langsung kegiatan pertambangan yang sangat merugikan petani karena menyebabkan lahan sawah petani menjadi rusak. Bahkan jika banjir lumpur datang pada saat petani sedang menanam padi maka akan terjadi kegagalan panen. Lahan yang dibanjiri lumpur akan menjadi liat dan sulit untuk diolah.

Pada bulan Mei 2011, ketika tanaman padi petani berumur 2 bulan, banjir lumpur melanda 5 Desa di Kecamatan Lantari Jaya. Desa tersebut adalah Lombakasih, Langkowala, Kalaero, Lantari dan Anugrah. Banjir lumpur ini berasal dari hasil kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT PLM. Jumlah lahan yang terkena dampak ini adalah 620 ha dan gagal panen, bahkan 15 ha (20 kapling) dari lahan tersebut bukan hanya gagal panen tetapi tenggelam dan rusak parah sehingga tidak dapat ditanami lagi. PT PLM sebagai perusahaan penyebab dampak lumpur tidak mau bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Menurut petani, PT PLM menganggap kegagalan panen bukan karena lumpur tetapi disebabkan oleh lahan puso akibat kekeringan yang datang tepat setelah banjir lumpur melanda lahan petani. Kejadian ini merupakan salah satu potensi konflik yang dapat terjadi antara masyarakat tani dengan pihak perusahaan. Beruntung karena pemerintah memberikan ganti rugi puso sehingga kekesalan masyarakat yang lahannya terkena banjir lumpur dapat teredam.

Potensi konflik ini menurut Dahrendorf (1959) bersifat laten sepanjang waktu dan tidak harus berlangsung secara sadar. Tekanan yang terus menerus pada kelompok subordinat (petani) oleh kelompok superordinat (PT PLM) akan membuka peluang konflik lebih besar.

Pada bulan Agustus 2011, banjir lumpur juga terjadi di Desa Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara. Sebanyak 13,5 hektar sawah (18 kapling) tanaman yang siap panen tertimbun lumpur PT SUN. Dari jumlah tersebut terdapat 8 hektar yang gagal panen sama sekali. Pihak PT SUN memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- per kapling kepada 18 petani pemilik lahan yang gagal panen. Tujuan pemberian ganti rugi ini agar lahan milik petani dapat digunakan kembali melalui 'normalisasi'²³. Ganti rugi tersebut menurut petani tidak sebanding dengan nilai uang yang dikeluarkan untuk menanam padi. Dari hasil wawancara dengan salah seorang penyuluh setempat, pemberian ganti rugi ini juga menimbulkan masalah sebab pengurus yang memfasilitasi petani dengan perusahaan tidak menyampaikan ganti rugi sejumlah itu kepada petani dengan alasan adanya biaya-biaya yang dikeluarkan pengurus untuk memperjuangkan ganti rugi itu kepada pihak perusahaan.

²³ Normalisasi adalah istilah yang digunakan oleh penyuluh dan petani di lapangan dalam memperbaiki kembali tanah yang rusak oleh lumpur limbah tailing melalui proses pengolahan dan pemupukan.

Berikut hasil wawancara dengan petani-petani yang sawahnya terkena lumpur akibat pertambangan.

Box 4. Dampak Lumpur dari Kegiatan Pertambangan Emas oleh Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Bombana

Wayan Rake (Petani dari Desa Kalaero)

“Setelah ada tambang, kami hidup susah. Air tidak lagi mencukupi karena air digunakan perusahaan tambang di atas. Sekarang lingkungan rusak karena air berasal dari hasil tambang yang berlumpur. Di sawah saya sampai satu jengkal endapan yang ada. Saya tidak bisa dikeluarkan karena jumlahnya sangat banyak, satu petak. Sewaktu datang lumpur, dalamnya sampai satu meter. Sawah itu sekarang tidak lagi dapat ditanami.” (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2013)

Ketut Sudarma (Petani dari Desa Langkowala)

“Dulu saya menaman di dua lahan, sekarang lahan dua saya tidak bisa lagi digunakan, dulunya sampai 5 kali pernah ditanami, sekarang sudah tertimbun lumpur di sana. Sudah rata penuh lumpur. Ada satu meter tertimbun. Lokasinya dekat sungai Langkowala.” (Wawancara pada tanggal 4 Januari 2013)

Dewa Made Merta (50) dari Desa Kalaero.

“Sekarang kalau mau bersawah harus membajak agak dalam. Setiap bajak lumpurnya akan turun. Sekarang tidak bisa bajak 1 kali, harus 2 kali. Biar 10 kali putaran tanahnya tidak mau pecah. Tanahnya alot sekali. (Wawancara pada tanggal 7 Januari 2013)

Berikut perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan pertambangan emas yang berdampak pada lingkungan fisik (dampak lumpur)

Tabel 19. Dampak Lumpur, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh

No	Dampak Lumpur	Keadaan		Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh
		Sebelum Tambang	Sesudah tambang	
1	Limbah Lumpur di bendungan irigasi	Air dari sungai yang masuk ke saluran irigasi bersih, jernih dan tidak berlumpur	Irigasi bukan hanya berisi air dari sungai tapi juga lumpur hasil pertambangan yang dibuang perusahaan ke sungai yang selanjutnya masuk ke bendungan	Kelembagaan Pengairan, Kelompok Tani, Lumbung Pangan, Kelompok Ternak
2	Banjir Lumpur	Kondisi alam baik dan terjaga, tidak pernah terjadi banjir lumpur. Lahan petani mudah diolah	Kondisi alam rusak, terjadi banjir lumpur yang bercampur limbah tambang pada lahan-lahan pertanian, saluran irigasi dan lingkungan petani. Akibatnya lahan rusak dan tidak dapat ditanami	

c. Puso akibat Kekeringan

Kegiatan pertambangan yang merusak alam terutama pertambangan tradisional pada tahun 2009 menyebabkan kerusakan ekosistem. Tanaman-tanaman ditebang untuk pertambangan, bahkan kawasan HTI (Hutan

Tanaman Industri) juga sudah hilang. Keadaan ini mempengaruhi penguapan air yang berdampak pada curah hujan yang tidak teratur. Sebelum ada tambang, curah hujan teratur sehingga musim tanam petani terjadwal baik. Akan tetapi sejak adanya pertambangan, tahun 2009 terjadi kekeringan. Meskipun pada Tabel 8 jumlah curah hujan tahunan cukup besar yaitu 698 mm selama tahun 2009, akan tetapi sejak bulan Juni hingga Desember, hanya terjadi 6 hari hujan dengan jumlah curah hujan selama 7 bulan itu hanya 25 mm. Inilah yang menyebabkan terjadi kekeringan. Hal ini semakin parah oleh dibendungnya beberapa titik-titik aliran sungai yang kemudian dibelokkan ke kolam-kolam penampungan air milik perusahaan (PT PLM) sehingga air sungai yang seharusnya mengalir ke bendungan tidak mengalir lagi.

Sebelum ada tambang, kekeringan pernah terjadi pada tahun 1997 dimana banyak petani yang gagal panen akibat adanya el nino yang melanda Sulawesi Tenggara. Hal ini diungkapkan oleh Sahri (65), mantan Kepala Desa Aneka Marga yang menyatakan bahwa pada tahun 1997 banyak petani gagal panen berturut-turut oleh kondisi alam (cuaca ekstrim) yaitu el nino. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya selalu berhasil baik bahkan panen raya.

Setelah ada tambang, kekeringan terjadi tahun 2009 diakibatkan rusaknya ekosistem akibat pertambangan tradisional. Selanjutnya Pada

pertengahan tahun 2011 juga terjadi puso akibat kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah pertanian padi sawah di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara. Hal ini dapat dilihat dari jumlah hari hujan dan curah hujan pada pertengahan tahun yang rendah dan tidak merata. Puso yang terjadi tahun 2011 mendapatkan ganti rugi dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.

Jumlah bantuan yang disalurkan adalah Rp 3,5 M untuk 950 ha lahan yang terkena puso di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara. Besarnya dana bantuan per hektar adalah Rp. 3.700.000,- yang terdiri atas Rp 300.000,- harga bibit, Rp 1.100.000,- harga pupuk dan Rp 2.300.000,- biaya pengolahan lahan.

Terdapat empat Desa di Kecamatan Rarowatu utara yang menerima bantuan yaitu Desa Tembe, Hukaea, Aneka Marga dan Marga Jaya dengan jumlah bantuan Rp 1.221.000.000 untuk 330 ha lahan. Sedangkan di Kecamatan Lantari Jaya bantuan puso diberikan kepada 5 Desa yaitu 620 ha lahan di desa Lombakasih, Langkowala, Kalaero, Lantari dan Anugrah. Besarnya bantuan di Kecamatan Lantari Jaya adalah Rp 2.294.000.000.

Meskipun terdapat bantuan puso akan tetapi beberapa petani merasa tidak puas dengan bantuan tersebut. Berikut hasil wawancara tentang puso akibat kekeringan dan penyaluran bantuan puso tersebut pada tahun 2012.

Box 5. Puso Akibat Kekeringan dan Penyaluran Bantuan Puso dari Pemerintah

H. Muliadi (Petani Desa Lombokasi)

“... Saya selalu menanam padi setiap tahun. Tahun 2008 berhasil panen ketika ada penemuan emas, tahun 2009 gagal oleh kekeringan karena tidak ada air, semua terpakai ditambang, tahun 2010 dapat hasil tapi beras berwarna kuning, tahun 2011 gagal oleh kekeringan/puso, tahun 2012 berhasil panen tetapi hanya kembali modal, itupun jika tidak hitung ongkos kerja, hanya hitung biaya pupuk dan benih saja,” (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2013)

Wayan Sudiana (Petani Desa Lombokasi)

“Waktu tanah puso saya sama sekali tidak dapat bantuan, padahal saya ketua kelompok. Apalagi 4 ha dari 6 ha lahan saya puso semua. Lahan orang yang saya kerjakan juga puso. Sementara teman-teman semua dapat.” (Wawancara pada tanggal 5 Januari 2013)

Arsi (Kepala Kantor Penyuluh Kecamatan Lantari Jaya)

“Memang ada petani yang tidak memperoleh bantuan sesuai lahannya. Misalnya dari 4 ha lahannya terkena puso, hanya diganti diganti 2 ha. Itu disebabkan hanya 2 ha lahannya saja yang terdata dalam kelompok tani, sementara 2 ha lainnya tidak terdaftar. Petani di sini memang ada yang tidak mendaftarkan semua lahannya di kelompok taninya, alasannya takut bayar PBB, jadi wajar tidak dapat bantuan karena memang tidak terdaftar. Sementara pembayaran bantuan puso berdasarkan data yang ada pada kelompok tani.” (Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2013)

Kahar (Ketua KT Kacipong Desa Watu-Watu)

“Di kelompok saya ada 20 ha lahan yang ditanam bersama. Waktu puso saya juga kena dan dapat bantuan untuk sebagian sawah yang puso, waktu itu saya kerja 6 ha dan gagal tetapi hanya dapat bantuan untuk 3 ha. Bantuan itu tidak merata pada semua anggota kelompok. Sebagian anggota kelompok saya tidak dapat sama sekali. Karena itu, saya bagi saja bantuan itu dengan teman-teman supaya merata, sebab kan kasihan kita ini senasib, Saya toh tidak bisa juga kerja kalau sendirian di sana” (Wawancara pada tanggal 4 Januari 2013).

Mustari, PPL Senior di Kecamatan Lantari Jaya

“Tahun 2011 itu gagal panen karena puso kita dapat bantuan dari Dirjen Tanaman Pangan yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Sekalipun kita sudah berusaha berlaku adil tapi masih saja ada petani yang tidak dapat bantuan karena data-data yang mereka masukkan di kelompoknya tidak lengkap secara administrasi, sehingga tidak mendapatkan bantuan sekalipun lahannya kena puso. “ (Wawancara pada tanggal 6 September 2012)

Berikut perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan pertambangan emas yang berdampak pada lingkungan fisik (terjadinya puso).

Tabel 20. Dampak Puso, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh

No	Dampak Puso	Keadaan		Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh
		Sebelum Tambang	Sesudah tambang	
1	Kekeringan lahan pertanian sehingga tanaman padi gagal panen	Kekeringan hanya pernah terjadi di wilayah ini oleh adanya 'el nino' tahun 1997. Selain itu selalu panen raya sejak dibangunnya bendungan tahun 1991.	Kekeringan terjadi tahun 2009 dan yang lebih parah terjadi tahun 2011 dimana lahan menjadi puso, tanaman gagal panen, produksi beras menurun tajam	Kelembagaan Pengairan, Kelompok Tani, Lumbung Pangan, Kelompok Ternak
2	Lahan pecah-pecah tidak dapat di Tanami	Setelah elnino tahun 1997, lahan kembali dapat digunakan untuk penanaman padi	Sebagian lahan tidak dapat ditanami yaitu yang mengalami kerusakan sangat parah	

d. Perubahan Bentang Alam (Bentuk Fisik Tanah)

Pertambangan emas di wilayah penelitian telah merusak alam. Terjadi perubahan pada bentuk fisik tanah di daerah yang diolah untuk kegiatan tambang (semula hijau menjadi tandus, semula rata menjadi bukit-bukit berlubang dan berair seperti danau kecil, batang-batang sungai hilang dan rusak) terutama akibat pertambangan rakyat tahun 2008/2009. Kondisi sawah dan lingkungan setelah hadirnya pertambangan dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 17. Kondisi Sawah dan Lingkungan Setelah Adanya Pertambangan Emas di Kecamatan Lantari Jaya dan kecamatan Rarowatu Utara



(Foto: Desember 2012)

(Foto: September 2011)

Kerusakan akibat pertambangan bukan hal yang mudah untuk diatasi. Karena itu, ijin pertambangan emas rakyat ditutup dan Pemerintah Kabupaten Bombana hanya memberikan ijin kepada perusahaan yang mampu menjamin perbaikan lingkungan setelah kegiatan eksploitasi

berlangsung. Untuk itu perusahaan pertambangan wajib menyimpan dana reklamasi tanah di Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana sebagai jaminan perbaikan lahan bekas tambang. Dana ini disimpan bersama oleh perusahaan pertambangan dan pemerintah daerah Kabupaten Bombana seluas wilayah yang akan dieksploitasi. Dana reklamasi ini berkisar antara Rp120 juta hingga Rp 200 juta per hektar.

Pertambangan rakyat yang ditutup pemerintah tahun 2009 hingga kini masih diharapkan oleh masyarakat lokal untuk dibuka kembali demi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, menurut Kadis Pertambangan Bombana, pemerintah daerah tidak berani mengambil resiko kerusakan lingkungan yang semakin parah dengan membuka tambang rakyat. Sebab tidak ada masyarakat yang mau menanggung biaya reklamasi lahan bekas tambang. Masyarakat yang menambang biasanya akan meninggalkan begitu saja lahan bekas tambangnya setelah melakukan eksploitasi pada lahan tersebut.

Box 6. Kerusakan Bentang Alam Akibat Pertambangan Tradisional

Subandi (Petai penggarap dari Desa Lombakasi)

“Kegiatan pertambangan telah merusak hutan dan tanaman-tanaman yang merupakan sumber air di atas. Bahkan hutan tanaman industri di sepanjang sungai sekarang sudah tidak ada lagi. Ratusan bahkan ribuan hektar hutan sudah habis, bahkan bambu-bambu sekarang sudah habis, tinggal padang saja yang tersisa. Saya tahu persis sebab saya dulu ikut menanam pada kawasan HTI itu, ketika PT Barito mendapat proyek penanaman hutan. Penyebabnya adalah pertambangan tradisional dan juga mesin milik perusahaan tambang.”
(Wawancara pada tanggal 5 Januari 2013).

Sardin (Ketua KT Tumbun Tonea Desa Watu-Watu)

“Memang Desa ini dulu banyak korbannya. Pertambangan rakyat dulu membuat lubang di sana-sini, sampai sapi-sapi masyarakat tidak jarang terperosok ke dalamnya. Sampai sekarang bekas-bekas lubang itu dibiarkan saja, menjadi tanah yang menggunung dengan kawah-kawah kubangan...” (Wawancara pada tanggal 4 Januari 2013)

Karena kerusakan yang parah maka pemerintah mengarahkan masyarakat yang ingin menambang untuk bergabung menjadi mitra pada perusahaan-perusahaan pertambangan, sehingga nantinya perusahaanlah yang akan bertanggung jawab atas lahan yang dieksploitasi oleh mitra perusahaan. Menjadi mitra perusahaan mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati.

Box 7. Kerjasama Penambang Emas Sebagai Mitra Perusahaan PT. PLM

Tuga (Bos Mitra Perusahaan PT PLM)

“Saya adalah petani dari Moramo, Kabupaten Konawe Selatan, datang ke Bombana untuk mencari hidup yang lebih baik. Saya menjual semua hasil panen di Moramo dan membeli sebuah mesin untuk menggali seharga 26 juta rupiah. Agar tidak menambang sembunyi-sembunyi saya menjadi mitra perusahaan. Karena memiliki modal mesin, saya diangkat menjadi ketua kelompok. Saat ini saya membawahi 100 orang pekerja tambang. Perusahaan menyediakan mesin dan alat-alat. Saya dapat 10 mesin dari perusahaan. Tidak ada ikatan kontrak secara resmi antara mitra dengan PT PLM, yang ada hanya kepercayaan. Pembagiannya adalah 50 persen hasil yang saya peroleh menjadi bagian perusahaan, sisanya 50 persen untuk saya dan saya bagikan kepada para pekerja tambang bawahan saya dengan aturan sendiri. Semua emas tidak boleh dijual ke luar, semua dibeli oleh perusahaan. Dalam melakukan eksploitasi kami mitra tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, tetapi perusahaan yang bertanggung jawab memperbaiki lahan bekas tambang” (Wawancara pada tanggal 13 Desember 2012)

Dirman (Humas PT PLM)

“... mitra berkewajiban menyetor 1,5 gram emas setiap hari dari satu unit mesin yang dipinjamkan kepadanya. Hal ini karena Perusahaan memberikan bendera kepada mitra dan menanggung pajak serta biaya reklamasi. Apabila dalam satu hari mitra mendapat 10 gram emas dari satu unit mesin, maka setelah mengeluarkan 1,5 gram kewajibannya kepada perusahaan, maka 8,5 gram emas tersebut akan dibeli perusahaan sesuai harga berlaku dan selanjutnya mitra akan membaginya dengan anggotanya tanpa campur tangan perusahaan...” (Wawancara pada tanggal 13 Desember 2012)

Supardi (Petani/Kadus Langkowala/Buruh Tambang)

“Kalau tidak menanam, saya bekerja sebagai buruh tambang. Saya ikut mitra PT PLM ataupun PT SUN. Satu kelompok terdiri dari 7 orang. Kami dapat 15% dari hasil dibagi rata sama semua anggota kelompok. Bos kami sendiri yang tanggung. Hari ini saya mendapat 15 gram emas. Paling banyak saya dan teman-teman pernah dapat di Panca Logam yaitu 23 gram sehari. Kalau diuangkan saya paling banyak mendapat tujuh ratus ribu seminggu” (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2013)

Dari hasil wawancara di atas, Tuga adalah salah satu mitra yang dipercaya PT PLM. Kelompoknya diberikan peralatan lengkap untuk melakukan eksploitasi emas di wilayah IUP PT PLM. Persyaratan utamanya adalah menghasilkan emas sesuai target perusahaan dan menjual emas hanya kepada PT PLM. Ikatan antara Tuga dan Perusahaan hanyalah kepercayaan, tidak ada kontrak diantara kedua pihak. Tuga akan memperoleh 50 persen dari emas yang dihasilkan kelompoknya dalam bentuk uang dari perusahaan sesuai harga emas yang berlaku saat itu. Hasil tersebut selanjutnya dibagi oleh Tuga dengan anggota kelompoknya berdasarkan kesepakatan dengan mereka tanpa campur tangan perusahaan. Tanggung jawab Tuga adalah menghasilkan emas dan

menjualnya ke perusahaan. Dari hasil wawancara dengan beberapa petani yang pernah ikut menjadi buruh tambang, Bos Mitra tidak harus mendapatkan hasil 50 persen seperti Tuga. Asalkan sudah menyeter 1,5 gram sehari per mesin yang dipinjamkan maka sisanya menjadi hak Bos Mitra. Semua hasil wajib dijual ke Perusahaan. Selanjutnya Bos Mitra membagi hasil penjualan emas ke anggota (buruh-buruh tambang) yang membantunya. Jumlahnya tergantung kesepakatan diantara mereka. Supardi dari Langkowala hanya mendapat 15% yang dibagi tujuh. Dengan demikian, Bos Mitra memperoleh hasil jauh lebih besar dibanding anggotanya yaitu 85%.

Berikut perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan pertambangan emas yang berdampak pada lingkungan fisik (terjadinya perubahan bentang alam)

Tabel 21. Dampak terhadap Perubahan Bentang Alam (bentuk fisik tanah), Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh

No	Dampak Perubahan Bentang Alam (Bentuk Fisik Tanah)	Keadaan		Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh
		Sebelum Tambang	Sesudah tambang	
1	Perubahan Fisik Alam	Lingkungan alam hijau oleh pepohonan	Lingkungan alam berupa tanah tandus tanpa pohon	Kelembagaan Pengairan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak
2	Keadaan tanah (kebun, padang)	Rata	Bukit-bukit berlubang dan berair membentuk danau-danau kecil akibat penggalian tambang	
3	Batang-batang sugai	Dalam dan mengalir air dengan baik	Hilang tertimbun sehingga air sungai keluar jalur mengalir ke mana-mana/ terbentuk jalur baru	

e. Pencemaran Udara

Kerusakan fisik lainnya dari kegiatan pertambangan adalah terjadinya pencemaran udara berupa debu, asap hitam dan suara bising. Sejak pertambangan emas dimulai, wilayah ini yang dulunya terpencil dan sepi berubah menjadi ramai. Akses jalan mulai dibangun, sayangnya jalan yang dibangun tidak diikuti dengan pengaspalan. Akibatnya jalanan menjadi

sumber debu yang menyengsarakan masyarakat setempat. Kendaraan-kendaraan tambang yang keluar masuk sepanjang lebih dari 10 km dari jalan poros adalah kendaraan berat yang menyebabkan jalanan berlubang. Jika musim kemarau, kendaraan tersebut menjadi penyumbang debu di jalanan dan jika musim hujan tiba, jalanan akan menjadi kubangan-kubangan kecil yang berlumpur. Masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan akan merasakan ketidaknyamanan dan rawan terkena penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas). Sementara itu, mesin-mesin yang beroperasi di wilayah tambang mengeluarkan suara bising dan asap. Asap hitam berasal dari mesin generator berefisiensi rendah yang digunakan penambang. Jumlah mesin-mesin yang beroperasi mencapai ribuan menghasilkan suara bising yang mengganggu ketenangan masyarakat yang terbiasa hidup tenang sebelum ditemukannya emas.

Pencemaran udara yang berdampak pada kelembagaan pertanian adalah suara bising yang mempengaruhi kelompok ternak. Petani/penggaduh sapi tidak lagi dapat melepas sapi di daerah yang terdapat aktivitas pertambangan (walaupun dulunya merupakan padang penggembalaan ternak mereka). Sapi-sapi akan gelisah oleh suara bising yang dihasilkan oleh mesin-mesin pekerja tambang.

Berikut perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan pertambangan emas yang berdampak pada lingkungan fisik (terjadinya pencemaran udara)

Tabel 22. Dampak Pencemaran Udara, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh

No	Dampak Pencemaran Udara	Keadaan		Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh
		Sebelum Tambang	Sesudah tambang	
1	Debu	Tidak ada debu sebab nyaris tidak ada kendaraan yang lewat	Jalanan berdebu bahkan tanaman di dekat jalan juga tertutup debu yang dihasilkan mobil-mobil tambang	Kelompok Ternak
2	Asap	Bebas polusi asap	Polusi udara yang dihasilkan oleh mesin generator pencucian emas berefisiensi rendah	
3	Suara bising	Suasana pedesaan yang tenang jauh dari keributan	Suara bising ribuan mesin-mesin pekerja tambang, dan suara mesin kendaraan pengangkut yang lalu lalang	

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa dampak lingkungan fisik akibat kegiatan pertambangan emas ada lima yaitu dampak terhadap air, dampak lumpur, dampak puso/kekeringan, perubahan bentang alam atau dampak fisik pada tanah, dan dampak pencemaran udara. Dari dampak-dampak tersebut, berikut ini adalah dampak lingkungan fisik yang mempengaruhi kelembagaan pertanian.

Tabel 23. Dampak Lingkungan Fisik, Kegiatan Penyebab Dampak Pertambangan dan Kelembagaan yang Disfungsi

No	Dampak Lingkungan Fisik	Kegiatan Penyebab Dampak	Kelembagaan Yang Disfungsi
1	<p>Dampak Terhadap Air</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya debit air - Pencemaran terhadap air 	<p>Dibendungnya aliran sungai untuk proses pendulangan emas dan penebangan pohon-pohon dan hutan pada ribuan hektar lahan untuk kegiatan pertambangan emas.</p> <p>Proses pertambangan emas menggunakan zat kimia (<i>mercury</i>) atau disebut raksa oleh penduduk setempat untuk memisahkan emas dari unsur-unsur logam lainnya.</p>	<p>Kelembagaan Pengairan Kelompok Tani Lumbung Pangan Kelompok Ternak</p>
2	Dampak Lumpur	<p>Proses pendulangan emas menghasilkan limbah tailing berupa lumpur yang dibuang ke sungai, masuk ke saluran irigasi dan lahan-lahan pertanian.</p>	<p>Kelembagaan Pengairan Kelompok Tani Lumbung Pangan Kelompok Ternak</p>
3	Puso/ Kekeringan	<p>Penebangan ribuan hektar hutan untuk pertambangan membuat penguapan air terganggu, selanjutnya mempengaruhi iklim dan terjadi musim kemarau panjang tanpa hujan.</p>	<p>Kelembagaan Pengairan Kelompok Tani Lumbung Pangan</p>
4	<p>Perubahan Bentang Alam/ Bentuk Fisik Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - semula hijau menjadi tandus - semula rata menjadi bukit-bukit, berlubang, dan berair - batang-batang sungai hilang dan rusak 	<p>Penebangan pohon-pohon untuk lahan tambang</p> <p>Penggunaan mesin-mesin berat yang menggali tanah untuk menemukan emas ataupun penggalian manual menggunakan cangkul yang dilakukan penambang tradisional</p> <p>Pendulangan di sungai dimana penambang menggali dan menimbun sungai dengan sisa-sisa pendulangan</p>	<p>Kelembagaan Pengairan, Kelompok Tani, Kelompok Ternak</p>
5	<p>Pencemaran Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Debu Asap - Suara Bising 	<p>Mobil-mobil tambang keluar masuk melalui jalan masyarakat menimbulkan debu yang membahayakan kesehatan</p> <p>Berasal dari mesin yang digunakan penambang, umumnya berefisiensi rendah sehingga menjadi penyumbang asap</p> <p>Suara mesin-mesin yang melakukan penggalian dan kendaraan pengangkut (bahan makanan, alat-alat berat dan keperluan perusahaan) yang keluar masuk melalui jalan masyarakat.</p>	<p>Kelompok Ternak</p>

B. Dampak Lingkungan Sosial

Dampak lingkungan sosial akibat tambang di Kabupaten Bombana diidentifikasi menggunakan tiga kategori umum meliputi perubahan sosial (Pertambahan penduduk, struktur sosial dan interaksi sosial), psikososial (keamanan, kecemasan, kepercayaan/trust, penyakit sosial), dan budaya (perubahan nilai).

a. Perubahan Sosial (Pertambahan Penduduk, Struktur Sosial dan Interaksi Sosial)

Warren dan Uphoff (1969) dalam sebuah studinya menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terjadi secara tiba-tiba yang berlangsung dalam dua fase penting. Pertama, fase utama yang secara langsung berhubungan dengan penemuan-penemuan baru pada penduduk yang menyebabkan migrasi atau imigrasi, misalnya pembukaan dan eksploitasi sumber daya baru dan perusahaan-perusahaan baru. Fase kedua adalah kegagalan beradaptasi akibat kemajuan fase pertama. Di daerah penelitian, penemuan emas di Bombana menjadi penyebab terjadinya migrasi penduduk ke Bombana. Bahkan ketika tambang rakyat ditutup, hadirnya perusahaan-perusahaan pertambangan menjadi peluang kerja bagi para pendatang. Inilah yang menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk. Fase kedua dari studi Warren dan Uphoff (1969) menunjukkan terjadinya

kegagalan adaptasi dari penemuan emas dalam bentuk disfungsi pada beberapa kelembagaan pertanian yang telah *embedded* dengan masyarakat tani sebelum hadirnya tambang.

Pertambahan Penduduk

Keinginan manusia untuk hidup sejahtera dengan cara cepat membawa migrasi penduduk ke Kabupaten Bombana untuk mendulang emas. Akibatnya terjadi pertambahan penduduk di Kabupaten Bombana. Periode pertambahan rakyat tahun 2008-2009 diperkirakan jumlah penduduk Bombana dan pendatang mencapai 250.000 jiwa (Gambar 9). Jumlah ini berkurang jauh semenjak pertambangan rakyat ditutup. Penduduk pendatang yang tinggal menetap hanya sekitar 20 % atau 28.000 jiwa dari total migran yang datang akibat adanya tambang emas. Ini sesuai dengan data BPS tahun 2011 yang mencatat jumlah penduduk tahun 2010 adalah 139.235 jiwa atau meningkat sebesar 29.352 jiwa dari data penduduk tahun 2008 yaitu 108.231 jiwa (Tabel 12)

Penduduk yang menetap tersebut adalah para pekerja dari perusahaan-perusahaan pertambangan baik karyawan, buruh maupun mitra perusahaan. Selain itu, juga menetap para pendatang (terutama dari Sulawesi Selatan) yang membuka usaha seperti berdagang emas, toko

sembako, air mineral, rumah makan, penginapan, angkutan umum, hiburan (kafe, bilyard), dan pengusaha barang ataupun jasa lainnya.

Berikut perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan pertambangan emas yang berdampak pada lingkungan sosial (terjadinya penambahan penduduk)

Tabel 24. Dampak Pertambahan Penduduk, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang

No	Dampak Pertambahan Penduduk	Keadaan	
		Sebelum Tambang	Sesudah tambang
1	Datangnya migran	Tahun 2008, jumlah penduduk Bombana 108.231 jiwa (BPS)	Tahun 2009 penduduk mencapai 250.000 jiwa (perkiraan), 111.481 jiwa (BPS) Tahun 2010 penduduk berjumlah 139.235 jiwa (BPS)
2	Masyarakat Semakin Heterogen	Terdapat 5 suku besar yaitu Jawa, Bali, Lombok, Bugis, Moronene	Selain suku Jawa, Bali, Lombok, Bugis dan Moronene telah ada Betawi, Sunda, Sumatera dan Maluku

Struktur Sosial

Struktur sosial yang berubah oleh adanya tambang adalah pergeseran struktur kepemilikan lahan pertanian menjadi wilayah IUP. Terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan. Tanah secara sah adalah milik petani yang selama ini melakukan kegiatan pertanian di atasnya, akan tetapi tanah tersebut menjadi wilayah IUP dimana perusahaan pertambangan dapat melakukan

ekplorasi ataupun produksi pada hasil tambang yang ada di bawah permukaan tanah. Meminjam istilah Marx yang menganalisis kapitalisme ekonomi modern dalam Ritzer dan Goodman (2008) maka pertambangan di Kabupaten Bombana adalah sebuah bentuk kapitalisme baru dimana pengusaha tambang disebut sebagai Kaum Borjuis dan petani adalah kaum ploreariat. Perusahaan tambang melakukan eksploitasi atas tanah dengan mengambil emas yang berada di bawah permukaan tanah pada wilayah pertanian yang menjadi sumber pencarian hidup petani (kaum ploreariat). Eksploitasi yang dilakukan kaum borjuis pertambangan telah mereduksi sumber nafkah hidup petani melalui penguasaan tanah dan degradasi lingkungan. Marx memprediksi keadaan semacam ini akan menjadi ledakan dan depresi yang akan berbuah konflik oleh sikap kaum borjuis yang meningkatkan keuntungannya tanpa memperhatikan kepentingan petani yang semakin termarginalkan. Dahrendorf (1959) menyebutnya sebagai potensi konflik yang bersifat laten dan oleh Merton dikenal sebagai konsekuensi negatif dari fungsi atau disfungsi.

Hadirnya tambang juga menghadirkan *civil society* yang membawa nilai-nilai demokratis (*freedom, equality, liberty*) sebagai struktur baru yang berkembang dalam masyarakat. Struktur masyarakat sipil antara lain LSM (Jaringan Advokasi Tambang), Media Cetak/elektronik, Ormas (Pemuda Pancasila) dan lainnya yang sebelumnya tidak ada. Berkembangnya struktur

masyarakat sipil didasarkan atas fungsinya sebagai lembaga yang menjadi pengontrol dan penyeimbang dalam kehidupan masyarakat (*check and balance*). Organisasi seperti LSM dan media cetak/elektronik mengontrol kebijakan pemerintah dan perusahaan dalam melakukan eksploitasi terhadap alam agar tidak 'kebablasan'. Sedangkan Pemuda Pancasila sebagai sebuah ormas yang seharusnya independen dimanfaatkan jasanya oleh Perusahaan pertambangan PT PLM sebagai security perusahaan bersama-sama dengan aparat TNI dan POLRI yang secara "informal" juga digunakan oleh perusahaan.

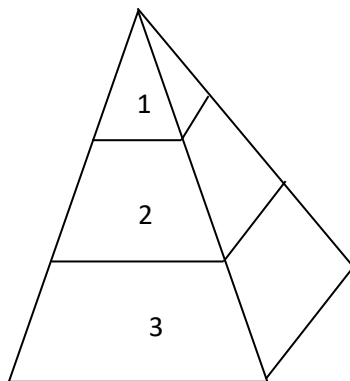
Struktur sosial masyarakat menurut Ralph Linton (1936) terdiri atas dua konsep utama yaitu status dan peran. Status sosial merupakan kedudukan atau posisi sosial seseorang dalam masyarakat sedangkan peran merupakan seperangkat harapan terhadap seseorang yang menempati posisi atau status sosial tertentu. Berdasarkan status dan peran tersebut dalam masyarakat terbentuk pembagian/pelapisan sosial yang dikenal sebagai strata (kelas-kelas yang tersusun secara hirarki).

Strata atau pelapisan sosial dalam masyarakat sangat variatif berdasarkan berbagai kriteria antara lain kriteria politik, kasta, ekonomi (kekayaan), kekuasaan dan sebagainya. Misalnya terjadi perbedaan pelapisan sosial masyarakat kota dan desa, masyarakat petani dan nelayan, masyarakat Sulawesi Selatan dan Bali. Dalam menentukan kriteria ini, tidak

harus terus konsisten pada kondisi yang berbeda. Johnson (1981) menjelaskan bahwa Marx menganalisis kelas sosial masyarakat juga tidak konsisten, dimana pada bukunya *Das Capital* jilid 3 yang disusun oleh Engels membedakan tiga kelas sosial masyarakat di Inggris yaitu buruh upahan, kapitalis dan pemilik tanah. Sedangkan dalam buku *The Communist Manifesto*, Marx membedakan kelas sosial ke dalam dua kelompok besar yang saling bermusuhan dan berhadapan secara langsung yaitu borjuis dan proletariat.

Strata (pelapisan) sosial di daerah penelitian dibedakan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Ini diadopsi dari pemikiran Rogers et al. (1988) yang menjelaskan stratifikasi sosial sebagai proses dimana posisi di masyarakat dibedakan menjadi lapisan dan kesenjangan yang dihasilkan. Strata sosial dalam masyarakat diatur berdasarkan status dan peran. Sebuah lapisan masyarakat termasuk individu menduduki status yang berhubungan dengan sekitar tingkat yang sama dari kekayaan, kekuasaan dan prestise. Penelitian ini membedakan atas kekayaan dan kekuasaan saja sebagaimana kondisi yang paling tepat di lapangan.

Strata sosial di daerah penelitian terbentuk karena adanya status ekonomi (kekayaan) dan kekuasaan yang dibedakan atas tiga golongan yaitu strata atas, strata tengah dan strata rendah. Berikut adalah gambar piramida pelapisan sosial dalam masyarakat tani di daerah penelitian.



- 1 = Strata Atas, merupakan kelompok terkecil yang ada dalam masyarakat baik berdasarkan kriteria ekonomi maupun kekuasaan.
- 2 = Strata Tengah, merupakan kelompok yang cukup banyak terdapat dalam masyarakat baik berdasarkan kriteria ekonomi maupun kekuasaan.
- 3 = Strata Rendah, merupakan kelompok terbanyak baik berdasarkan kriteria ekonomi maupun kekuasaan.

Gambar. 18. Piramida Pelapisan Sosial di Daerah Penelitian, diadopsi dari Pemikiran Aristoteles dalam Deliarnov (1995)

Dari Gambar 18 dapat diidentifikasi pelapisan sosial masyarakat yang mengalami perubahan sebelum dan sesudah adanya tambang. Strata atas berdasarkan kriteria ekonomi diisi oleh kaum elit desa yang memiliki cadangan pangan dan pengembangan usaha sedangkan berdasarkan kekuasaan diisi oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang serta akses pada berbagai fasilitas dan kapital. Strata tengah berdasarkan kriteria ekonomi diisi oleh orang-orang yang memiliki cadangan pangan saja sedangkan berdasarkan kekuasaan terdiri dari orang-orang dengan kewenangan dan akses capital yang terbatas . Sedangkan strata rendah adalah orang-orang yang tidak memiliki cadangan pangan dan cadangan usaha dan mereka bekerja untuk bertahan hidup sedangkan berdasarkan

kekuasaan terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan/wewenang atas capital.

Berikut adalah strata masyarakat sebelum dan sesudah adanya tambang emas.

Tabel 25. Perubahan Pelapisan Sosial Masyarakat Sebelum dan Sesudah Ada Tambang Emas.

No	Strata	Berdasar Atas	Sebelum ada Tambang Emas	Sesudah ada Tambang Emas
1	Atas	Kriteria Ekonomi	Petani kaya (punya lahan, ternak, dan usaha lain seperti pabrik penggilingan padi), Pengusaha pupuk,	Petani kaya (punya lahan, ternak, dan usaha lain seperti pabrik penggilingan padi), Pengusaha pupuk, Pengusaha Tambang
		Kekuasaan	Pejabat pemerintah (camat, kepala desa), Tokoh Adat (bangsawan Moronene/Mokole), Tokoh Agama (Imam Masjid, Kepala Pura), Tokoh Masyarakat	Pejabat pemerintah (camat, kepala desa), Tokoh Adat (bangsawan Moronene/Mokole), Tokoh Agama (Imam Masjid, Kepala Pura), Tokoh Masyarakat, Elit Perusahaan
2	Tengah	Kriteria Ekonomi	Petani pemilik lahan, Pedagang (sembako, rumah makan, pedagang di pasar)	Petani pemilik lahan, Pedagang (sembako, rumah makan, pedagang di pasar, pedagang emas, air mineral isi ulang, pemilik penginapan/ rumah kos, pemilik kafe, bilyard, pengusaha bengkel)
		Kekuasaan	PNS, TNI, POLRI, Penyuluh Lapangan, Kepala Dusun, P3N, Kepala Tukang (memiliki ketrampilan khusus)	PNS, TNI, POLRI, Penyuluh Lapangan, Kepala Dusun, P3N, Kepala Tukang (memiliki ketrampilan khusus) Bos/ Mitra Perusahaan, pegawai perusahaan tambang
3	Rendah	Kriteria Ekonomi	Petani miskin (petani penyakap tidak punya lahan, penggaduh sapi)	Petani miskin (petani penyakap tidak punya lahan, penggaduh sapi), penambang illegal
		Kekuasaan	Buruh tani, pekerja serabutan, buruh tukang batu, buruh tukang kayu	Buruh tani, pekerja serabutan, buruh tukang batu, buruh tukang kayu, buruh tambang

Sumber: Hasil Penelitian

Perubahan Strata berdasarkan Kriteria Ekonomi (Kekayaan)

Berdasarkan kriteria ekonomi, terdapat tiga kelas petani dalam masyarakat yaitu petani kaya, petani pemilik lahan dan petani miskin. Ketiganya mengisi kelas sosial masyarakat baik sebelum maupun sesudah ada tambang emas.

Petani kaya adalah petani yang memiliki lahan (biasanya lebih dari 3 ha), mempunyai ternak (biasanya lebih dari sepuluh ekor baik yang dipelihara sendiri maupun digaduhkan orang lain), mempunyai satu atau lebih usaha lain di luar tanaman padi sawah dan ternak sapi seperti menyewakan alat-alat pertanian (dompok/mesin bajak), berperan sebagai tengkulak, memiliki pabrik penggilingan padi, berusahatani tanaman jati dan pekerjaan pengolahan kayu serta pekerjaan lain di luar pertanian. Setelah ada tambang emas, sebagian petani kaya juga menjadi pemilik usaha rumah sewa/kos.

Selain petani kaya terdapat seorang pengusaha pupuk yang skala usahanya cukup luas, meliputi beberapa Kecamatan termasuk kedua kecamatan di daerah penelitian. Selain menjadi suplier pupuk bersubsidi yang ditunjuk pemerintah, ia juga mempunyai pabrik penggilingan padi, berperan sebagai tengkulak bahkan setelah ada tambang meluaskan usahanya dengan mempunyai mobil panen.

Setelah ada tambang emas, hadir pengusaha tambang sebagai kelompok baru dalam strata atas berdasarkan kriteria ekonomi (kekayaan). Pengusaha tambang ini adalah orang-orang yang memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan mendirikan kantor perusahaan di daerah IUPnya.

Strata tengah dalam kriteria ekonomi diisi oleh petani pemilik lahan (mengusahakan tanaman padi pada lahan <3ha sehingga selalu mempunyai cadangan pangan beras untuk kebutuhan keluarganya), umumnya mempunyai ternak sendiri satu atau dua ekor. Setelah ada tambang emas, petani strata tengah ini menambah cadangan pangannya dengan menggaduhkan ternak milik petani kaya, biasanya dilakukan oleh istri atau anaknya. Ini dilakukan karena produksi tanaman padi menurun oleh adanya dampak tambang atas lingkungan fisik. Selain itu terdapat juga pedagang sembako kecil-kecilan yang menyediakan kebutuhan pokok petani di daerah penelitian dan juga seorang pemilik rumah makan (warung bakso) yang dikelola oleh orang Jawa di Kecamatan Rarowatu Utara. Ada juga pedagang keliling yang mengisi pasar SP2 dan SP3 setiap hari pasar (2 kali seminggu pada setiap pasar). Terdapat juga pedagang dari luar yang masuk membeli udang/ikan bandeng (ikan bolu) yang diusahakan petani penambak di daerah pesisir (Desa Anugrah dan Desa Rarongkeu).

Setelah ada tambang emas, kedua kelompok ini tetap menduduki strata tengah dalam kriteria ekonomi tetapi pada kelompok pedagang terjadi

penambahan jenis usaha yang berkembang seiring dengan hadirnya tambang yang membawa pergeseran kehidupan masyarakat tani tradisional ke masyarakat pra-industrialisme. Setelah ada tambang kelas ini dilengkapi oleh pedagang emas, pedagang air mineral isi ulang, pemilik penginapan/ rumah kos, pengusaha kafe, pengusaha bilyard, pengusaha bengkel dan pedagang makanan. Pedagang ini didominasi oleh etnis Bugis Makassar yang pada awalnya datang menambang dan kemudian melihat peluang usaha sehingga ketika tambang rakyat ditutup, mereka memutuskan untuk menetap dan menjadi pengusaha di daerah tambang. Pergeseran ke masyarakat pra-industri dapat dilihat dari semakin dekatnya masyarakat setempat dengan kehidupan kota. Ada usaha kafe dan bilyard di sekitar lokasi tambang. Makanan yang dulunya hanya ada di perkotaan dengan mudah ditemukan di daerah ini. Buah-buahan seperti apel dan pear tersedia di pasar lokal. Rumah makan 'Aulia' menyediakan ayam goreng Ala KFC, dimana pemiliknya pernah tujuh tahun bekerja di KFC Makassar. Ada rumah makan yang menyediakan Coto Makassar, Sop Saudara dan Ikan Bakar. Pedagang air mineral, pedagang emas dan bengkel ada di setiap desa.

Strata rendah berdasarkan kriteria ekonomi diisi oleh petani miskin, yaitu petani yang tidak mempunyai lahan sama sekali sehingga tidak mempunyai cadangan makanan kecuali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Biasanya bekerja sebagai penyakap pada petani

kaya dan mendapatkan bagian hasil setelah panen sesuai kesepakatan. Umumnya hanya menyakap lahan seluas 1 ha sehingga tergolong petani miskin. Selain itu juga menggaduhkan sapi milik petani kaya. Kadang petani miskin ini juga bekerja serabutan sebagai kuli bangunan ataupun pekerjaan kasar lainnya untuk bertahan hidup.

Setelah ada tambang emas, kelas ini diisi oleh penambang ilegal yang bekerja menambang secara diam-diam di wilayah IUP perusahaan dengan menempuh resiko ketahuan dan tertangkap oleh aparat perusahaan.

Perubahan Strata berdasarkan Kriteria Kekuasaan

Berdasarkan kriteria kekuasaan maka sebelum ada tambang emas, strata atas yang ada pada masyarakat di daerah penelitian terdiri atas pejabat pemerintah (camat, kepala desa), tokoh adat (bangsawan Moronene/ Mokole), tokoh agama (imam masjid, kepala pura) dan tokoh masyarakat. Setelah ada tambang, terjadi penambahan dari kelompok elit perusahaan.

Pejabat pemerintah yang ada di daerah penelitian adalah camat dan kepala desa. Pejabat ini memiliki kekuasaan dan wewenang serta akses pada berbagai fasilitas pemerintah, mereka berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan administrasi pemerintahan dan menjadi fasilitator masyarakat dan lembaga pemerintah/swasta.

Tokoh adat masyarakat suku asli Moronene sebelum ada tambang sebagian tidak menetap di lokasi tetapi mempunyai tanah-tanah adat yang luas, dimiliki sebagai warisan dari sembilan rumpun Mokole (raja kecil yang menduduki distrik/wilayah tertentu). Setelah ada tambang, terjadi konflik lahan atas IUP yang menduduki tanah-tanah adat milik para keturunan Mokole. Daerah penelitian merupakan pusat peradaban Moronene Hukaea-Laea. Secara historis, suku Moronene yang masih menetap di lokasi adalah petani yang terikat pengaturan penggunaan tanah yang diawasi secara turun temurun berdasarkan sumpah adat (*tanduale*). Sehingga hadirnya pertambangan yang dilakukan di atas tanah adat menimbulkan konflik antara PT PLM dan 9 rumpun yang ada. Agar dapat melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi, PT PLM selanjutnya berkompromi dengan membayar bagi hasil kepada 9 rumpun Mokole melalui sebuah lembaga adat yang dibentuk yaitu *Puu Wonua*. Pembayaran ini merupakan kompensasi perusahaan yang telah merusak ekologi tanah adat yang juga sumber ekonomi keturunan suku Moronene. Sejak melakukan kegiatannya tahun 2009, PT PLM setiap bulan membayar Rp 100.000.000,- kepada lembaga adat Puu Wonua, bahkan sejak tahun 2012 hingga sekarang, PT PLM membayar sebesar Rp 250.000.000,- setiap bulan kepada lembaga adat ini.

Kelompok elit perusahaan yang masuk ke dalam strata atas masyarakat terdiri dari orang-orang perusahaan yang bertanggungjawab

terhadap operasional perusahaan pertambangan emas, berperan menjaga hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal.

Berdasarkan kriteria kekuasaan, strata tengah sebelum ada tambang diisi oleh PNS, TNI, POLRI, Penyuluh Lapangan, Kepala Dusun, P3N (Petugas Pencatat Nikah) dan Kepala Tukang (memiliki ketrampilan khusus). Setelah ada tambang, terdapat penambahan dari kelompok Bos/ Mitra Perusahaan dan pegawai perusahaan tambang emas. PNS adalah orang-orang yang melakukan tugas/fungsinya seperti guru mengajar, pegawai kesehatan melayani kesehatan masyarakat. TNI/POLRI menjadi abdi Negara, penyuluh pertanian mendampingi petani dalam berusahatani. Kepala Dusun, P3N adalah orang yang langsung terlibat dalam urusan tertentu dengan masyarakat. Sedangkan kepala tukang, mempunyai tempat tersendiri dalam strata tengah karena kekuasaan dan ketrampilannya yang khusus. Dengan demikian, kelompok yang tergolong ke dalam strata tengah dihormati masyarakat karena status dan perannya.

Setelah ada tambang, muncul Bos/ mitra perusahaan yang mempekerjakan buruh-buruh tambang dalam kegiatan pertambangan emas. Dengan modal dari dirinya sendiri ataupun perusahaan, Bos/mitra mempunyai kekuasaan atas buruh/pekerjanya.

Strata rendah berdasarkan kekuasaan, sebelum ada tambang diisi oleh para pekerja rendahan yang terdiri atas buruh tani, pekerja serabutan,

buruh tukang batu, buruh tukang kayu. Setelah ada tambang emas terjadi penambahan dari buruh tambang baik yang bekerja di perusahaan melalui mitra-mitra maupun yang bekerja pada Bos di pertambangan illegal di Desa Watu-watu. Buruh tani adalah orang yang bekerja di lahan-lahan petani pada kegiatan mengolah lahan, menanam dan panen dengan sistem upah. Umumnya tidak memiliki ketrampilan lain sehingga jika kekurangan pendapatan akan bekerja serabutan dalam pekerjaan kasar seperti kuli bangunan, kuli di pabrik penggilingan. Sedangkan buruh tukang batu dan buruh tukang kayu adalah pekerja yang telah mempunyai ketrampilan /pengalaman dibidangnya. Dipekerjakan oleh kepala tukang jika ada proyek yang akan dilaksanakan. Sehingga upah yang diterimanya tidak menentu dan pada waktu senggang biasanya bekerja serabutan untuk bertahan hidup.

Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Simmel (1950) dalam Johnson (1981) memahami interaksi sosial dalam dua konsep yang dibedakan atas bentuk dan isi dimana hubungan antara bentuk dan isi bersifat dinamis. Isi dari interaksi sangat beragam dapat berupa insting erotic, kepentingan objektif, dorongan agama, tujuan

membela dan menyerang, bermain, keuntungan, bantuan atau instruksi dan tidak terbilang lainnya yang menyebabkan orang hidup bersama dengan lainnya, bertindak terhadap mereka, bertindak bersama mereka, mempengaruhi atau dipengaruhi mereka. Sedangkan bentuk-bentuk interaksi dapat berupa superioritas dan subordinasi, kompetisi, pembagian kerja, pembentukan partai, perwakilan, solidaritas ke dalam disertai sifat menutup diri terhadap orang luar, dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini oleh Simmel dapat dimanifestasikan dalam Negara, dalam satu komunitas agama, dalam komplotan, dalam asosiasi ekonomi, dalam sekolah, dalam keluarga.

Berdasarkan pemikiran Simmel tersebut maka pada penelitian ini, interaksi sosial berlangsung dalam suatu komunitas tani yang berisikan kepentingan-kepentingan bersama dari petani-petani yang dimanifestasikan dalam bentuk yang beragam. Interaksi dalam suatu silaturahmi seperti pada acara-acara sosial kemasyarakatan diantara petani adalah suatu bentuk hubungan sosiabilita (bersifat sosial). Sedangkan hubungan petani dalam kelompok tani seperti kegiatan pembersihan saluran irigasi, perbaikan alat-alat pertanian yang digunakan bersama, proses penanaman dan panen adalah interaksi dalam bentuk pembagian kerja. Interaksi petani penyakap dengan pemilik lahan ataupun hubungan petani kecil dengan petani pemilik modal adalah bentuk superordinat dan subordinat. Interaksi antar anggota

kelompok tani pada hamparan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya air yang terbatas adalah bentuk kompetisi.

Untuk melihat perbedaan interaksi sosial sebelum dan sesudah ada dampak tambang emas maka dibedakan atas tiga kategori interaksi yaitu pertama dari sifatnya yaitu langsung dan tidak langsung (melalui media seperti surat, handphone), kedua intensitas interaksi dan ketiga adalah perubahan pihak yang berinteraksi.

Sebelum pertambangan emas interaksi langsung terjadi lebih sering. Interaksi ini dapat terjadi antar masyarakat di mana saja. Di lahan, pasar, masjid/pura dan pada acara-acara sosial kemasyarakatan dalam bentuk interaksi langsung (*face to face*). Jika ada yang akan mengadakan hajatan, maka pihak yang melaksanakan hajatan akan mengundang tetangga atau kerabatnya dengan mendatangnya secara langsung ke rumah masing-masing. Cara ini dianggap lebih sopan dan menghormati pihak terundang sehingga mereka akan merasa berat hati jika tidak menghadiri undangan tersebut. Setelah ada tambang emas, cara seperti ini masih berlaku tetapi hanya pada orang-orang terdekat (tetangga dekat dan keluarga) atau orang-orang tertentu (tokoh masyarakat/ tokoh agama). Sementara warga atau teman satu desa biasanya menggunakan surat undangan ataupun melalui handphone. Sejak ada tambang, handphone telah menjadi barang yang dimiliki oleh hampir semua keluarga tani di daerah penelitian dan digunakan

untuk berhubungan dengan masyarakat lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

Interaksi sosial diantara masyarakat tani setelah ada tambang tidak banyak berubah. Hubungan resiprositas tetap kental dalam acara-acara sosial kemasyarakatan seperti perkawinan, syukuran dan kematian.

Sebuah bentuk resiprositas yang terjadi pada suku Jawa di Kecamatan Lantari Jaya adalah jika ada yang melaksanakan pesta perkawinan maka tetangga atau kerabat yang mampu akan memberikan bantuan yang nantinya akan dibalas sebesar pemberian tersebut ketika orang yang memberi bantuan mengadakan pesta yang sama. Biasanya orang yang melaksanakan pesta akan mencatat asal sumbangan dan jumlah sumbangan yang masuk agar kelak dapat membayarnya kembali.

Pada suku Bali, resiprositas yang terjadi memiliki aturan main berupa sanksi. Jika ada masyarakat yang tidak menghadiri acara sosial seperti gotong royong, hajatan, upacara keagamaan maka akan dikenakan sanksi berupa pembayaran denda dalam bentuk uang sesuai kesepakatan masyarakat. Adanya sanksi ini menjaga resiprositas yang terjadi dalam masyarakat dan interaksi sosial yang tetap intens.

Hadirnya tambang bagaimanapun membawa dampak pada interaksi diantara masyarakat lokal. Hubungan antar masyarakat ada yang semakin

intens dan ada juga yang menjadi renggang pada kegiatan tertentu. Masalah bersama yang dihadapi sejak ada tambang adalah air irigasi sudah tercemar, keruh bercampur limbah tailing dari kegiatan pertambangan emas. Akibatnya, petani harus semakin sering membersihkan saluran irigasi. Sejak ada tambang, gotong royong membersihkan saluran irigasi dilakukan 2 kali seminggu, terutama pada saat menanam padi. Sedangkan hubungan yang renggang dapat dilihat pada hilangnya kebersamaan antar suku dan antar agama pada kegiatan upacara penjemputan air yang tidak lagi dilakukan sejak adanya tambang.

Setelah ada tambang emas, pihak-pihak yang melakukan interaksi juga berubah. Dulunya hanya ada masyarakat setempat yang hidup sebagai petani. Akan tetapi, dengan adanya tambang terdapat pendatang yang terdiri dari berbagai tipe masyarakat dengan berbagai sumber penghidupan. Pola hubungan yang terjadi antara penduduk lama dan pendatang bersifat simbiosis mutualisme. Pendatang yang melihat peluang usaha membuka usaha, membangun rumah dan menetap permanen. Mereka menyediakan kebutuhan warga lokal, sehingga untuk berbagai keperluan warga tidak perlu lagi ke Kasipute (ibukota Bombana) apalagi ke Kendari. Sebagian pendatang menjadi pekerja tambang pada mitra perusahaan yang ada tinggal dengan menyewa lahan milik masyarakat lokal dan mendirikan bangunan semi permanen. Sebagian lagi menyewa kamar-kamar yang disediakan oleh

warga setempat. Dengan demikian terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara masyarakat lokal dengan warga pendatang. Khusus dengan elit perusahaan, terjadi hubungan eksploitasi dari perusahaan kepada masyarakat. Interaksi bersifat superordinat dan subordinat yang kurang harmonis disebabkan masyarakat lokal merasa kehilangan hak atas tanahnya setelah masuknya perusahaan pertambangan.

Box.8 Interaksi Sosial Masyarakat Setelah Ada Pertambangan Emas

Wayan Suidiana, Petani Desa Lombakasih

“Kegiatan Kelompok tani sebelum tambang kita ada musyawarah penentuan waktu tanam, tapi sekarang paling lewat sms ajak teman untuk menanam,” (Wawancara pada tanggal 5 Januari 2013)

Abu Bakar, Kepala Desa Lombakasih

“..Baik orang Bali, Bugis dan Lombok, kalau ada kesusahan atau ada yang mengadakan hajatan kita akan datang dan membantu. Hanya saja pada orang Bali ada aturan main, dimana warga yang tidak datang akan dikenakan denda. Kalau orang Bugis, jika kita mau bawakan orang Bugis yang kaya, malah dia menolak dibawakan sesuatu karena mereka tinggi malunya. Tapi pada kebanyakan warga, hubungan balas membalas seperti itu terjadi.” (Wawancara kedua pada tanggal 14 Desember 2012)

Berikut perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan pertambangan emas yang berdampak pada lingkungan sosial (Interaksi sosial masyarakat)

Tabel 26. Dampak Interaksi Sosial Masyarakat, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh

No	Dampak Interaksi Sosial Masyarakat	Keadaan		Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh
		Sebelum Tambang	Sesudah tambang	
1	Langsung/ tidak langsung	Interaksi langsung lebih sering terjadi di lahan, pasar, masjid/pura, acara-acara sosial kemasyarakatan, termasuk ketika mengundang hajatan dilakukan secara langsung atau media surat	Interaksi langsung masih terjadi di lahan, pasar, masjid/pura, acara-acara sosial kemasyarakatan, tetapi untuk mengundang pertemuan atau acara tertentu dilakukan melalui handphone/surat	Kelompok Tani
2	Intensitas Interaksi	Lebih intens melalui pertemuan Kelompok Tani secara teratur, kegiatan gotong royong	Kurang intens melalui Kelompok Tani tetapi gotong royong pembersian saluran irigasi lebih intens	
3	Perubahan pihak yang berinteraksi	Interaksi antar Masyarakat setempat	Interaksi antar Masyarakat setempat dan antar masyarakat dengan pihak luar (pendatang, perusahaan, DPR, pemerintah)	

b. Psikososial (Keamanan, Kecemasan, Kepercayaan dan Penyakit Sosial)

Salah satu dampak sosial hadirnya pertambangan emas adalah psikososial yang pada penelitian ini dibagi atas empat yaitu keamanan kecemasan, kepercayaan dan penyakit sosial.

Keamanan

Sebelum ada tambang masyarakat hidup dalam rasa aman. Hampir tidak terdengar ada kasus kecelakaan apalagi kejahatan. Setelah ada tambang, keadaan berubah jauh. Nilai ekonomi emas yang tinggi telah mengundang kerawanan sosial. Tahun 2008/2009 ketika pertambangan tradisional dibuka, penambang yang datang melakukan penggalian dengan membuat lubang-lubang tikus di dalam tanah, akibatnya banyak penambang yang mati tertimbun tanah.

Meski pertambangan tradisional sudah di tutup sejak Maret 2009, tetapi masih saja ada yang menambang sembunyi-sembunyi di tanah milik pewaris. Akibatnya masih selalu ada kejadian orang tertimbun tanah. Seperti yang terjadi pada kasus tewasnya empat penambang liar di Desa Watu-Watu pada 1 November 2013.

Selain kasus tertimbun tanah longsor akibat galian emas, tingkat kriminalitas dan prostitusi juga meningkat setelah adanya tambang emas. Kasus perampokan terjadi baik di lokasi penambangan, rumah, pasar

maupun di jalanan. Perampokan yang terjadi bernilai ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Perampok juga tidak segan-segan menganiaya korbannya. Seperti yang terjadi pada bulan Mei 2010. Sepuluh orang perampok bersenjata berhasil membawa kabur 10 kg emas bernilai 3,8 Milyar rupiah dan menganiaya pemiliknya di ruas jalan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yang tergolong cukup sepi. Kasus lain adalah perampokan yang dilakukan tujuh perampok bulan Mei tahun 2013 yang berhasil membawa 2,6 kg emas dan uang tunai 200 juta rupiah yang juga melukai pemilik rumah (Kendari Pos, 2013). Kejadian semacam ini jelas menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat yang dulunya hidup tenang dan damai.

Masyarakat juga kehilangan rasa aman akibat perilaku aparat keamanan perusahaan yang seringkali melakukan kekerasan terhadap warga. Salah satu perusahaan pertambangan yaitu PT PLM menggunakan polisi, tentara dan LSM Pemuda Pancasila sebagai petugas keamanannya dengan tujuan agar masyarakat takut dan jera memasuki dan menambang liar di areal IUPnya, Oknum petugas keamanan bahkan tidak segan mengusir dan memukul masyarakat yang kedapatan masuk ke wilayah IUP perusahaan. Sekalipun wilayah tersebut adalah hutan ataupun areal perkebunan masyarakat

Box 9. Kejadian Yang Menimbulkan Rasa Tidak Aman Akibat Adanya Pertambangan

Sardin (Petani dari Desa Watu-Watu)

“...Dulu disinilah banyak orang yang mati tertimbun. Setiap lubang bekas adanya korban pasti tanahnya berisi emas. Pernah malah saya dapat rambut, yang lain dapat mayat ataupun tulang-tulang orang yang tertimbun. Setiap hari dulu disini pasti ada yang meninggal. Mobil ambulans siap selalu. Kalau sudah tertimbun maka lepas sudah. Tidak akan digali lagi. Kan sangat dalam, paling-paling ditancapkan bendera putih diatasnya sebagai tanda disitu ada korban.” (Wawancara pada tanggal 4 Januari 2013)

Gusti Oka (Keamanan Rakyat, Kepala keamanan pasar SP2)

“waktu pertama ada emas, kacau di sini, terlalu banyak orang. Di dalam itu seperti kota, tidur dimana saja, makan dimana saja, bahkan buang airpun juga dimana saja. Bau dimana-mana. Banyak yang mati tertimbun, setiap hari pasti ada kejadian. Banyak di dalam itu orang mati yang dibiarkan saja, mau diapa lagi kan sudah tertimbun.” (Wawancara pada tanggal 3 Januari 2013)

Fajaruddin (Ulu-ulu, Ketua Gapoktan Kowala dari Desa Langkowala)

“Saya sekarang sejak ada perusahaan saya tidak mau lagi mendulang karena tidak mau diusir apalagi dipukul petugasnya perusahaan. Pernah terjadi ada seorang anak disini dipukul oleh Brimob Panca logam (sekitar tahun 2010). Waktu itu kita secara keseluruhan bergerak serentak ke atas. Tapi saat itu ada tokoh disini yang juga dipandang masyarakat menenangkan warga dan menyuruh kita menunggu dulu, kalau kita naik secara serentak begini tanpa ijin jangan sampai kita disana dihadang ribuan brimob kan konyol juga kita, jadi kalau bisa kita tunda dan cari cara untuk naik. padahal saat itu kita sudah siap dengan parang dan segala macam senjata. Kita memang niat mau balas itu Brimob, rencananya kita mau cari ke posnya masing-masing. Hal ini diketahui Panca Logam dan akhirnya mereka yang justru turun ke sini meminta maaf. Bagaimana kita tidak marah, anak itu ditinju, dipukuli dan didorong ke beling-beling sampai luka-luka. Dia tidak mau bilang-bilang tapi temannya yang cerita dia dipukuli Brimob. Masyarakat marah dan membawa parang panjang, karena kan yang akan dihadapi adalah pistol. Panca logam datang dan bertanggung jawab meminta maaf, mengobati luka-lukanya, komandan Brimob juga datang turun tangan. Tapi oknum Brimob itu tidak tau dikemanakan” (Wawancara pada tanggal 3 Januari 2013)

Kecemasan

Selain rasa aman yang hilang, adanya tambang juga menimbulkan kecemasan pada masyarakat tani. Pertama, kecemasan menyangkut lahannya. Petani cemas lahan yang menjadi sumber penghidupannya tidak akan dapat digunakan lagi baik karena banjir lumpur ataupun kekeringan. Petani juga cemas saat menanam tidak turun hujan sehingga petani seringkali memutuskan tidak jadi menanam apabila ragu curah hujan mampu mencukupi kebutuhan tanaman padinya.

Kedua, masyarakat cemas akan kesehatan diri dan lingkungannya dimana sejak ada tambang, terjadi banyak sapi yang mati akibat minum air²⁴. Masyarakat khawatir tambang berdampak juga pada manusia. Untuk masyarakat tani yang kaya mereka bahkan tidak mau mengkonsumsi beras yang dihasilkan di daerahnya, tetapi bagi petani kecil mereka tetap mengkonsumsi beras yang dihasilkannya.

Penyakit akibat pencemaran lingkungan telah mulai dirasakan terutama penyakit kulit dimana kaki menjadi gatal-gatal, luka dan menjadi borok yang tidak sembuh-sembuh setelah mencuci kaki dari air yang mengalir dari gunung, daerah tempat eksploitasi emas.

Ketiga, masyarakat cemas hasil panen tanaman padi menjadi rendah kualitasnya. Seperti yang terjadi pada panen tahun 2010. Ketika itu 70% dari

²⁴ Lihat pada catatan kaki 5

petani di Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara sudah kembali menanam padi, akan tetapi hasil panen mengecewakan. Berasnya berwarna merah sehingga harganya jatuh.

Box 10. Kecemasan Masyarakat Akibat Pertambangan Emas

Arsi (PPL Kecamatan Lantari Jaya)

“...Biarpun masih menanam tapi petani sekarang tidak lagi seperti dulu, meski lahannya belum kena lumpur tapi sudah kuatir suatu saat akan terkena, apalagi rata-rata sudah pernah kena puso. Cepat atau lambat lahan di sini pasti akan kena dampak juga,” (Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2013)

Haji Ahmading/ Haji Medding (Pemilik Pabrik Penggilingan/ Distributor Pupuk Bersubsidi)

“Sejak ada tambang, terus terang saya makan beras dari Selatan (Sulawesi Selatan). Lebih enak rasanya dan terasa lebih aman, namanya beras dari daerah sini, siapa tau sudah tercemar” (Wawancara pada tanggal 14 Desember 2012)

Fajaruddin (Ulu-ulu, Petani dari Desa Langkowala)

“Saya pernah ikut mendulang pada awal adanya tambang, kaki terasa gatal-gatal dan luka-luka. Sejak itu saya berhenti dan tidak pernah lagi mendulang” (Wawancara pada tanggal 3 Januari 2013)

Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan (*trust*) adalah salah satu hal yang berubah pada masyarakat tani di sekitar tambang. Masyarakat menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, DPRD maupun perusahaan untuk hal-hal yang bersentuhan dengan tambang dan lingkungan. Masyarakat lokal masih mengharapkan kembali dibukanya pertambangan tradisional sebagaimana yang dijanjikan Pemerintah sebab tambang dianggap jalan keluar untuk

memperoleh pendapatan. Di sisi lain, masyarakat kembali ke kehidupan pertanian sementara lingkungan telah rusak dan mempengaruhi usahatani padi sawah. Pemerintah dianggap kurang peduli pada pertanian yang merupakan sumber penghidupan masyarakat dan lebih mementingkan pertambangan yang menghasilkan banyak keuntungan dibanding pertanian. Janji pemerintah untuk memperbaiki saluran-saluran irigasi yang rusak oleh lumpur tidak terealisasi. Demikian juga dengan janji untuk membuatkan irigasi baru dari sumber air yang belum tercemar tidak pernah terwujud.

Box 11. Kekecewaan Warga Terhadap Pemerintah Kabupaten Bombana

Abu Bakar, Kepala Desa Lombakasih

“Kita telah dijanji Perusda. Ada lahan yang telah disiapkan pemerintah. Awalnya dikatakan setiap perusahaan mengeluarkan lahannya 1 ha dari 100 ha, jadi sekitar 100 ha tiap KP yang dimilikinya untuk masyarakat. Tapi kenyataannya, perusahaan ternyata mau memberikan tanah untuk diolah masyarakat tapi tanah yang letaknya berbatasan dengan perusahaan lain, batasnya adalah kali. Jadi tanah di pinggir kali. Jadi seandainya itu yang boleh dikelola masyarakat maka masyarakat kena merusak lingkungan. Kan kita ini petani yang butuh sungai untuk air sawah. Bisa-bisa kita yang dibaliki lagi sebagai perusak lingkungan hidup. Padahal sebagai masyarakat lokal, mubazir ada emas, kami tidak terlibat mengolahnya.” (Wawancara ketiga pada tanggal 7 Juli 2013)

Jumateg (Petani dari Desa Langkowala)

“Ibu Wabup pernah datang tahun 2011, meninjau, melihat dan berjanji akan memperbaiki saluran dan irigasi tapi sampai sekarang belum pernah datang lagi” (Wawancara pada tanggal 11 Desember 2012)

Nyoman Damiyo (Petani dari Desa Aneka Marga)

“kita minta bantuan DPR untuk dikeruk. Dan sempat dilaksanakan setelah kunjungan Dewan. Yang dikeruk adalah saluran sekunder. Sekarang sudah berlumpur lagi. Bagaimanapun selama masih pakai air dari bendungan Langkowala pasti masih akan berlumpur. Mestinya pemerintah membuatkan bendungan baru dari air sungai Lausu. (Wawancara tanggal 15 Desember 2013)

H. Muliadi (Petani/Pedagang dari Desa Lombakasih)

Ada pemerintah tapi tidak mengurus masyarakat yang banyak, yang dipentingkan dijaga malah orang besar (perusahaan tambang). Orang miskin tidak diperhatikan, semestinya yang diperhatikan kehidupannya adalah orang miskin seperti kita ini. Orang kaya diperhatikan dan dilindungi padahal mereka merusak. Buktinya lingkungan hidup itu coba periksa, limbah-limbahnya mau diapa. Apakah pemerintah ini berfungsi atau tidak? Pelanggaran ini sudah terlalu jauh, hak asasi manusia dikemanakan. Saya bingung, pemerintah disini lain-lain. Lumpuh. Orang kecil apa yang mereka ketahui. Aturan hukum mereka mana tahu. Kita disini serba salah. (Wawancara tanggal 6 anuari 2013)

Wayan Suidiana (Ketua Kelompok Tani Pupuk Sari dan Ketua Kelompok Ternak Tunas Mekar dari Desa Lombakasih)

“..Tambang ini sangat berpengaruh pada kita sebagai petani. Bendungan sudah tidak berfungsi betul, dangkal dan berlumpur. Tapi kalau mengadu tidak ada gunanya. Saya sudah beberapa kali mengadu sama haji Ama yang di pasar tapi sudah tidak dihiraukan karena orang besar kan jelas duit saja yang dia pakai, begitu juga petugas-petugas kalau saya bahasakan dia perlu duit” (wawancara tanggal 5 Januari 2013)

Dewa Made Merta (Petani dari Desa Kalaero)

“Sejak ada tambang tidak ada lagi pengaturan. Bahkan kepala desa yang sekarang, sejak dia menjabat tidak pernah mengadakan pertemuan, Pak Ramli Kades Kalaero tidak pernah menyampaikan pertanggungjawaban setiap Desember. Masyarakat buta, program apa yang ada turun ke desa masyarakat tidak tahu, penggunaannya ke mana dana yang ada tidak tahu, masyarakat masa bodoh sekarang, urus perut sendiri. (wawancara tanggal 7 Januari 2013).

Terhadap perusahaan warga masyarakat juga kehilangan kepercayaannya, perusahaan dianggap hanya mengeruk emas dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Berbagai kekecewaan terhadap perusahaan dialami masyarakat. Kehadiran perusahaan yang mengeksploitasi emas di sekitar masyarakat lokal yang hidupnya bertani tidak

disukai oleh arogansi pihak perusahaan terhadap masyarakat lokal. Keadaan ini berpotensi konflik.

Box 12. Kekecewaan Warga Terhadap Perusahaan Pertambangan

Sumo Sumar (Ketua Kelompok Tani dari Desa Wumbubangka)

“Mereka (perusahaan tambang) datang dan lihat emas langsung gali, ada janji-janji tapi tidak ada yang terbukti. Katanya 60% warga lokal akan dipekerjakan nyatanya cuma janji. Bahkan PT SUN diminta membuat jalan sendiri agar tidak mengganggu warga setempat, toh mereka tetap saja pakai jalan warga sehigga jalan makin hancur..” (Wawancara kedua tanggal 13 Desember 2012)

Kahar (Ketua KT Kacipong Desa Watu-Watu)

“Petani tidak senang ada tambang, justru merasa tersiksa. Bayangkan kita masuk saja ke lahan ambil kayu, ditanya dan dilarang. Mau ambil kayu tidak boleh. Padahal kita ini datang bukan datang mencuri. Kita inikan warga lokal, masa cuma ambil kayu tidak boleh. Perusahaan ijinnya menambang, bukan ijin melarang kita masuk. Sebenarnya areal pertanian banyak masuk wilayah tambang. Jadi susah juga.” (Wawancara tanggal 4 Januari 2013)

Gusti Oka (Keamanan Rakyat, Kepala keamanan pasar SP2)

“Lahan kita kena lumpur dari tambangnya Panca Logam, mereka tidak mau ganti, katanya disini bukan wilayah kaplingannya. Memang bukan tapi limbahnya turun ke lahan-lahan kita. Air kan mengalir ke bawah” (wawancara tanggal 3 Januari 2013)

Penyakit Sosial

Salah satu dampak sosial yang negatif dari tambang adalah timbulnya penyakit sosial yaitu prostitusi yang ditandai dengan berkembangnya kehidupan malam di daerah penelitian. Terjadi perubahan kehidupan “Kota di tengah Desa” dimana kafe-kafe, karaoke dan bilyard berdiri dan prostitusi

menjadi bagian didalamnya. Berikut penuturan Mahyuddin (50), Kepala Badan Kebangpol Kabupaten Bombana.

“Eforia munculnya tambang itu antara lain prostitusi (tapi itu impor, datang dari luar), malah bayarnya konon pakai emas, bukan rupiah. Ada pengelolaan kafe, pokoknya di atas sana lengkap waktu itu.” (wawancara tanggal 7 September 2012)

Transaksi dalam praktik prostitusi tidak saja terjadi di kafe-kafe, menurut pengakuan petani yang menambang, transaksi juga terjadi di tempat-tempat menambang dan pembayarannya dengan emas seberat 1 gram bahkan lebih mahal lagi jika lebih ‘cantik’ wanitanya. Kehidupan semacam itu membuat masyarakat tani sebagai masyarakat lokal yang terbiasa dengan kehidupan sederhana dan bersahaja menjadi kurang nyaman. Untuk itu, setelah tambang tradisional ditutup dan pendatang mulai berkurang maka perlahan kehidupan kembali membaik, sekalipun belum hilang sama sekali. Sampai sekarang masih ada kafe dan karaoke. Sedangkan prostitusi sudah jauh berkurang, walaupun ada sudah dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan seperti dulu.

Berikut perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan pertambangan emas yang berdampak pada lingkungan sosial (Psikososial).

Tabel 27. Dampak Psikososial Masyarakat, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh

No	Dampak Psikososial Masyarakat	Keadaan		Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh
		Sebelum Tambang	Sesudah tambang	
1	Keamanan	Rasa aman masyarakat tanpa adanya perampokan, ancaman pembunuhan, ancaman keselamatan kerja dan intimidasi aparat	Rasa tidak aman masyarakat oleh adanya kejadian perampokan, ancaman pembunuhan, ancaman keselamatan kerja (terjadi kecelakaan kerja) dan intimidasi aparat	Kelompok Ternak
2	Kecemasan	Tidak ada kecemasan sebab petani selalu berhasil dalam melakukan UT	Ada kecemasan Kehilangan sumber penghidupan, ancaman kesehatan, keberlanjutan lingkungan, penurunan produksi (kualitas dan kuantitas hasil)	Lambung Pangan
3	Kepercayaan	Kepercayaan kepada pemerintah dan DPRD baik	Kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, DPRD dan perusahaan	Kelembagaan Pengairan,
4	Penyakit Sosial	Tidak ada kehidupan malam dan penyakit sosial	Terjadi kehidupan malam dan prostitusi pada saat tambang tradisional akibat mudahnya memperoleh uang dan banyaknya uang beredar. Namun sekarang sudah berkurang tajam	

c. Budaya (Perubahan Nilai Uang)

Budaya meliputi aspek material dan non material dalam cara hidup yang dibagi yang dibagi dan ditularkan di antara anggota masyarakat. Budaya meliputi produk material masyarakat, budaya termasuk keyakinan, nilai, norma, sikap dan perilaku anggotanya (Rogers et al., 1988).

Sebelum ada tambang emas, kehidupan yang sederhana dan akrab menjadi ciri khas masyarakat tani di wilayah penelitian. Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat adalah tolong menolong dalam setiap kegiatan sosial. Misalnya pada saat menanam, olah lahan di kerjakan bersama dan bergilir dengan teman-teman yang berdampingan lahan. Nilai ini berubah sejak ada tambang emas. Mudah-mudahan mendapatkan emas dan tingginya harga emas dibanding hasil pertanian membawa perubahan nilai pada masyarakat tani. Uang menjadi ukuran segalanya. Mengolah lahan tidak lagi gratis saling bantu tetapi dibayar dengan uang. Demikian juga dalam panen, buruh yang melakukan tebasan juga dibayar dengan uang, walaupun sebagian masih menerima bagi hasil berupa gabah. Keadaan ini oleh Simmel (1907) dalam Ritzer & Goodman (2009) dilihat sebagai dampak ekonomi uang terhadap kebebasan individu. Dalam hal ini petani tidak lagi terikat pada suatu kelompok dalam pekerjaan menanam dan panen tetapi berdiri sendiri. Sehingga hubungan impersonal semakin merebak. Uang juga mereduksi manusia menjadi sejumlah Dollar. Ini terlihat ketika ada anggota

masyarakat yang melaksanakan hajatan, sudah jarang yang memberi bantuan dalam bentuk barang seperti gula dan beras, tetapi berubah menjadi uang dalam amplop. Nilai uang dalam amplop juga menjadi ukuran untuk dibayar kembali ketika pemberi amplop juga melakukan hajatan. Bahkan sistem pinjam modal pada tengkulak dengan sistem ijon juga bergeser dengan agunan yang memiliki nilai rupiah tinggi. Pertambangan membawa nilai materialisme dalam kehidupan masyarakat Desa.

Tabel 28. Dampak Perubahan Budaya (nilai), Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh

Dampak Perubahan Budaya (nilai)	Keadaan		Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh
	Sebelum Tambang	Sesudah tambang	
Saling bantu, gotong royong, resiprositas berubah menjadi nilai materi (uang)	Saling bantu, gotong royong dan resiprositas menjadi nilai hubungan antar masyarakat	Uang menjadi ukuran dalam hubungan sosial dimana segala hal diukur dengan besarnya rupiah. Mulai olah lahan, menanam, panen, dan hubungan sosial	Kelompok Tani Kelembagaan Kredit
Sistem pinjam	Dibayar dengan gabah, agunan tanaman padi	Dibayar dengan uang, agunan barang berharga	

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dampak lingkungan sosial akibat tambang emas ada tiga dampak yaitu perubahan sosial (struktur sosial dan interaksi sosial), psikososial (keamanan, kecemasan, kepercayaan, penyakit sosial) dan budaya (perubahan nilai uang).

Tabel 29. Dampak Lingkungan Sosial , Kegiatan Penyebab Dampak dan Kelembagaan yang Disfungsi

No	Dampak Lingkungan Sosial	Kegiatan Penyebab Dampak	Kelembagaan Yang Berubah fungsi
1.	<p>Perubahan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Struktur sosial</u> dalam masyarakat didasarkan atas status dan peran yang membentuk strata. Strata sosial di daerah penelitian terbentuk berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan pendidikan. - <u>Interaksi Sosial</u> terbagi tiga yaitu pertama sifatnya langsung (face to face) dan tidak langsung (melalui media seperti surat, handphone), kedua adalah intensitas interaksi dan ketiga adalah perubahan pihak yang berinteraksi. 	<p>Datangnya penduduk dari berbagai tempat oleh daya tarik emas.</p>	<p>Kelompok Tani</p>
2.	<p>Psikososial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keamanan: Kerawanan sosial (perampokan, ancaman pembunuhan, keselamatan kerja, intimidasi aparat - Kecemasan: Kehilangan sumber penghidupan, ancaman kesehatan, keberlanjutan lingkungan, penurunan produksi (kualitas dan kuantitas hasil) - Kepercayaan: Hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, DPRD dan perusahaan - Penyakit Sosial Berkembang dalam lingkungan kehidupan Desa 	<p>Emas yang dimiliki penduduk/pedagang menjadi daya tarik bagi kejahatan</p> <p>Pencemaran lingkungan oleh pembuangan limbah tambang ke sungai-sungai</p> <p>Kurangnya kepedulian pemerintah/DPRD/Perusahaan terhadap pertanian dan nasib petani</p> <p>Menjamurnya kehidupan malam dan prostitusi pada awal terbentuknya tambang</p>	<p>Kelembagaan Pengairan Kelompok Tani</p>
3.	<p>Budaya (Perubahan Nilai) Dimana uang menjadi ukuran, meningkatnya sifat materialistik</p>	<p>Mudahnya memperoleh uang dari tambang dan banyaknya uang beredar terutama pada masa pertambangan tradisional</p>	<p>Kelompok Tani Kelembagaan Kredit</p>

Sumber: Hasil Penelitian

C. Dampak Lingkungan Ekonomi

Selain dampak terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial, hadirnya pertambangan emas di daerah pertanian Kecamatan Rarowatu Utara dan Kecamatan Lantari Jaya membawa dampak terhadap lingkungan ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi tersebut adalah tumbuhnya investasi, peningkatan PAD, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan perubahan pendapatan. Secara keseluruhan, pertambangan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana. Sumbangan PDRB dari sektor pertanian masih mengalami peningkatan meskipun besarnya peningkatan itu menurun dari tahun ke tahun setelah ada tambang (the law of diminishing return). Sementara PDRB dari sektor pertambangan dan penggalian terus meningkat dari tahun ke tahun. (Lihat tabel 2).

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bombana selalu di atas rata-rata Nasional. Pada tahun 2013 ketika pertumbuhan ekonomi Nasional hanya 6% maka Kabupaten Bombana mencapai 8,86%. Bahkan di tahun sebelumnya hampir mencapai dua digit yaitu 9,76%.

Berikut pertumbuhan ekonomi sektoral di Kabupaten Bombana tahun 2007 hingga tahun 2013 atas dasar Harga Konstan tahun 2000.

Tabel 30. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Bombana Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2008– 2013 (%)

Sektor	2007*	2008**	2009**	2010**	2011***	2012***	2013***
Pertanian	6,70	5,98	4,35	3,83	2,20	5,55	5,40
Pertambangan dan Penggalian	7,90	36,50	14,33	21,21	17,22	34,49	30,02
Industri Pengolahan	9,74	10,77	11,87	14,55	14,94	9,07	8,61
Listrik, Gas dan air bersih	4,21	4,39	6,84	13,81	12,35	21,06	10,45
Konstruksi/bangunan	8,60	8,66	13,19	23,97	20,42	11,84	12,27
Perdagangan, hotel dan restaurant	6,23	9,70	13,40	12,06	7,81	9,98	8,30
Pengangkutan dan komunikasi	7,22	15,12	17,91	15,42	11,00	8,30	9,00
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	7,06	7,05	7,58	9,50	25,34	23,75	11,41
Jasa-jasa	8,01	8,19	8,49	1,56	2,77	5,93	5,31
PDRB	7,14	8,24	7,74	8,04	7,49	9,76	8,86

Sumber: * Bombana Dalam Angka 2007
 ** PDRB Bombana 2010
 ***PDRB Bombana 2013

Dari data di atas terlihat pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan meningkat signifikan dengan banyaknya IUP yang ada di Kabupaten Bombana. Tahun 2008 ketika emas ditemukan dan tambang rakyat dibuka, mencapai 36,50 %. Tahun 2009 menurun setelah tambang rakyat ditutup di awal tahun. Sedangkan tahun-tahun berikutnya mengalami fluktuatif namun cenderung meningkat cukup tinggi. Sebaliknya sektor pertanian mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi sejak ada tambang emas yang puncaknya terjadi pada tahun 2011 yaitu ketika bencana puso melanda tanah-tanah pertanian padi sawah di Kabupaten Bombana, terutama di

daerah penelitian. Tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan sekalipun kenaikan itu belum mencapai pertumbuhan ekonomi sebelum ada tambang emas.

Sektor-sektor lainnya meningkat fluktuatif sebagai dampak domino dari adanya pertambangan emas, kecuali sektor jasa-jasa yang hanya naik tipis ketika tambang rakyat diberlakukan dan akhirnya menurun dibanding sebelum ada tambang emas.

a. Tumbuhnya Investasi

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatannya menghasilkan barang dan jasa. Adanya sumber daya mineral termasuk emas di Kabupaten Bombana telah mendorong terjadinya investasi di sektor pertambangan. Tahun 2013 terdapat 87 perusahaan pertambangan dari berbagai jenis tambang yang menanamkan investasinya di Kabupaten Bombana. Selain investasi yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan pertambangan, investasi dalam sektor pendukung tambang juga ikut berkembang yaitu sektor perhubungan, perdagangan dan perbankan.

Pada sektor perhubungan, Kabupaten Bombana yang dulunya sulit untuk dijangkau, sekarang ini dapat dijangkau dengan mudah. Usaha

angkutan mobil luar kota berkembang pesat. Data pada tabel 33 menunjukkan PDRB dari sektor ini hingga tahun 2011 selalu di atas 10%, bahkan tahun 2009 pada awal ditemukannya emas mencapai 17,91%. Mobil angkutan umum dengan jalur Bombana-Kendari, Bombana-Kolaka, hampir 24 jam. Intensitas mobil angkutan setiap hari adalah dua kali yaitu pergi dan pulang dari Kasipute (ibu kota Bombana) ke Kendari (ibu kota Sulawesi Tenggara). Demikian juga dengan rute Kasipute-Kolaka.

Angkutan kapal juga berkembang. Baik dari bertambahnya jalur pelayaran maupun intensitas keberangkatan kapal dalam sehari ataupun seminggu. Kapal dari Kasipute ke kecamatan-kecamatan di pulau Kabaena berlayar setiap hari dengan rute pergi dan pulang dengan lama pelayaran sekitar 4 jam. Akses lain ke wilayah tersebut dapat juga melalui pelabuhan Boepinang (ibu kota Kecamatan Poleang) dan dari pelabuhan Bambaena (ibu kota kecamatan Poleang Timur) dengan lama pelayaran 2-3 jam. Pelabuhan juga terdapat di Teomokole (Kecamatan Kabaena) yang merupakan pelabuhan transit barang dan jasa maupun komoditas hasil pertanian dan kehutanan dari dan ke daerah lainnya. Sedangkan di Dongkala (ibu kota Kecamatan Kabaena Timur) terdapat dermaga penyebrangan kapal ferry dengan rute Dongkala Mawasangka (Kabupaten Buton) dengan frekuensi pelayaran dua kali sehari. Dari sektor perhubungan yang berkembang di Bombana juga membawa multiplier effect pada peningkatan rute dan jadwal

penerbangan di Kota Kendari (ibu Kota Propinsi). Armada pesawat bertambah sehingga penerbangan yang dulunya dua hingga tiga kali sehari dari Kendari menjadi 12 kali bahkan lebih. Penerbangan langsung ke Jakarta juga dibuka oleh Lion Air sebanyak dua kali sehari sehingga tidak perlu lagi transit melalui Makassar.

Selain itu, jaringan telekomunikasi yang tersedia di wilayah penelitian adalah Telkomsel dan XL. Sedangkan untuk Kabupaten Bombana secara keseluruhan selain telkomsel dan XL juga tersedia jaringan Indosat dan Telkom. Di sektor pelistrikan, di wilayah penelitian telah dialiri listrik dari PLN kecuali di desa Watu-watu kecamatan Lantari Jaya.

Investasi di sektor perdagangan ikut berkembang pesat. Tahun 2009 PDRB dari sektor perdagangan mencapai 13,40 %. Pada waktu itu terbangun pasar utama di Kecamatan Lantari Jaya yang buka hingga 24 jam. Pasar-pasar lokal di sekitarnya juga ikut maju dan jenis barang yang diperdagangkan semakin bervariasi. Kebutuhan pakaian, makanan bahkan sampai buah-buahan yang dulunya langka dan harus beli di Kendari, telah tersedia di pasar lokal. Toko-toko emas bermunculan dan bertahan hingga sekarang. Toko-toko emas ini berdiri dari Desa paling terpencil hingga ibu Kota Kabupaten. Penjual emas datang dari Selatan (Bugis Makassar). Usaha jasa seperti rumah kos, hotel dan penginapan tumbuh bagaikan jamur.

Rumah makan pada tahun 2007 hanya berjumlah 52 buah maka tahun 2011 meningkat lima kali menjadi 240. (Bombana Dalam Angka, 2012).

Investasi di sektor perhubungan dan perdagangan di atas adalah geliat pembangunan ekonomi yang menjadi dampak ekonomi pertambangan emas di Kabupaten Bombana. Investasi tersebut juga membangkitkan perkembangan perbankan yang mendirikan cabang-cabangnya untuk mendukung perputaran uang akibat tumbuhnya sektor perhubungan dan perdagangan. Ketika Kabupaten Bombana terbentuk tahun 2003, sampai tahun 2008 hanya ada dua Bank yang ada yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Pembangunan Daerah. Namun sejak tahun 2009 hingga tahun 2013 berdiri juga Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Bahtera Mas, Bank Negara Indonesia sedangkan anjungan ATM selain dimiliki Bank tersebut juga terdapat milik Bank Mandiri dan Bank Bukopin. Adanya Bank-Bank itu menunjukkan terjadi investasi yang sehat di sektor Riil di Kabupaten Bombana.

Berikut adalah perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan pertambangan emas yang berdampak pada lingkungan ekonomi (tumbuhnya investasi).

Tabel 31. Dampak Tumbuhnya Investasi, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh

No	Dampak Tumbuhnya investasi	Keadaan		Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh
		Sebelum Tambang	Sesudah tambang	
1	Sektor Perhubungan	<p>Angkutan mobil Bombana Kendari, Bombana Kolaka terjadi sekali sehari</p> <p>Angkutan Kapal antar pulau terbatas dari pelabuhan² yang ada dan jadwalnya satu kali seminggu hingga sekali sehari untuk rute Kasipute-Kabaena. Berupa kapal kayu</p> <p>Penerbangan pesawat di Kendari 2-3 kali sehari dengan armada merpati dan lion air.</p> <p>Jaringan telekomunikasi handphone belum ada, kecuali PT Telkom di daerah Kasipute Rumbia</p>	<p>Angkutan mobil dari Bombana ke kendari atau Kolaka minimal 2 kali sehari (pergi pulang) bahkan tiga kali jika musim penumpang.</p> <p>Angkutan Kapal antar pulau dari pelabuhan² yang ada meningkat menjadi dua kali seminggu hingga dua kali sehari (pergi pulang) untuk rute Kasipute Kabaena. Selain kapal kayu sudah ada kapal cepat/jet.</p> <p>Multiplier efek pada penerbangan pesawat di Kendari dari 2-3 kali menjadi 12 kali sehari dengan armada Garuda Indonesia, Lion/wings air, merpati dan Sriwijaya</p> <p>Telah ada jaringan telepon seluler hampir di semua wilayah termasuk di pulau-pulau. Telkomsel dan XL berkembang di lokasi penelitian</p>	
2	Sektor Perdagangan	Toko di Pasar lokal SP2 dan SP3 yang buka sesuai hari pasar (2 kali seminggu), satu warung makan (bakso) di kecamatan Rarowatu Utara dan kios sembako skala kecil	Pasar Lokal berkembang lebih luas, bangunan lebih baik dan lengkap, beroperasi menjadi 24 jam, pasar basah masih 2 kali seminggu, terbangun kos/rumah sewa/penginapan / hotel. Rumah makan berbagai jenis terbuka, salon, bilyard, toko emas.usaha mobil panen	Kelompok Tani
3	Sektor Perbankan	BRI dan BPD	BRI, BPD, BNI, Muamalat Danamon, Bahtera Mas, telah ada ATM dari Bank tersebut dan ATM Bank Mandiri	

Sumber: Hasil Penelitian

b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana diperoleh dari beberapa jenis penerimaan antara lain pajak-pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah/ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Setelah ada tambang emas, terjadi peningkatan pendapatan yang berasal pengelolaan kekayaan daerah terutama tambang. Pendapatan dari pertambangan Mineral dan batubara diatur UU no.4 tahun 2009 dalam bentuk land rent dan royalty yang dibayar ke pemerintah pusat. Sedangkan pembagiannya diatur oleh UU No.33 Tahun 2004 seperti pada Tabel 16.

Pertambangan emas membawa *multiplier effect*. Pertambangan emas membawa migrasi penduduk ke Bombana untuk menjadi pekerja tambang ataupun mendirikan usaha (melakukan investasi) di bidang perdagangan barang dan jasa. Peluang dan kesempatan kerja terbuka bagi masyarakat lokal dan pendatang membuat terjadinya perputaran uang yang besar. Hasil dari pekerjaan tambang, perdagangan barang dan jasa adalah pendapatan bagi daerah dalam bentuk PAD.

PAD dari Pertambangan Rakyat

Menurut Hasdin Ratta, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan tahun 2009-2012, ketika pertambangan rakyat dibuka, PAD yang diperoleh

dari kartu penambang mencapai milyaran rupiah. Jika dalam sehari kartu penambang keluar sebanyak 500 buah maka pemerintah akan memperoleh lima puluh juta rupiah. Pendapatan pemerintah ini tidak masuk ke dalam kas pemerintah daerah karena digunakan untuk membiayai keadaan yang kacau ketika itu. Berikut adalah wawancara dengan Hasdin Ratta (40), Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Bombana tahun 2009-2012.

“Saat itu keamanan rawan, kita panggil dan datangkan polisi, ribuan aparat keamanan disini untuk mengamankan ratusan ribu orang yang mendulang. Itu semua mau dibiayai, sedangkan tidak ada anggarannya di APBD. Untuk kasih makan saja berapa setiap hari, mereka bertugas 24 jam. Makanya uang kartu itu yang kita pakai. Jadi tidak masuk juga di PAD. Langsung menjadi dana darurat. Akibatnya kita diperiksa karena kita menggunakan uang langsung, bukan masuk ke PAD baru digunakan, masalahnya saat itu keadaan kacau. Kita tidak melihat jalan lain kecuali menggunakan uang tersebut. Saya lihat ini darurat.” (wawancara tanggal 6 September 2012)

PAD dari Perusahaan Pertambangan dengan IUP

Kekacauan yang ada membuat Bupati menutup pertambangan rakyat dan mengeluarkan ijin kepada perusahaan-perusahaan pertambangan untuk melakukan eksplorasi dan produksi. Dari kegiatan pertambangan yang berlangsung terjadi peningkatan PAD di Kabupaten Bombana. Berikut adalah perbandingan PAD sebelum dan sesudah ada tambang tahun 2007 dan 2012.

Tabel 32. Dampak Peningkatan PAD, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang

No	Dampak Ekonomi Peningkatan PAD	Keadaan (Realisasi)	
		Sebelum Tambang (2007)*	Sesudah Tambang (2012)**
1	Pendapatan Asli Daerah:	2.170.710.189	22.710.060.254
	a.Pajak Daerah	617.602.060	2.083.245.535
	b.Retribusi Daerah	861.180.478	2.988.214.972
	c. Bagian Laba Usaha Daerah/ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.433.000.000	11.582.432.893
	d.Lain-lain PAD	691.927.651	6.056.166.854
2	Dana Perimbangan:	268.756.978.761	456.730.700.268
	a.Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	15.305.883.973	42.708.427.869
	b.Dana Alokasi Umum	193.896.000.000	328.634.006.000
	c.Dana Alokasi Khusus	57.708.944.788	49.693.380.000
	d.Dana Ad Hoc Penyesuaian Gaji		26.131.240.000
	e.DBH Pajak dari Provinsi	1.786.750.000	9.563.646.399
3	Pendapatan yang Sah	829.289.811	2.345.618.195
	Jumlah Pendapatan	271.756.978.761	481.786.378.717

Sumber: * Kabupaten Bombana Dalam Angka 2007/2008

** Kabupaten Bombana Dalam Angka 2013

Dari data di atas diketahui bahwa pertambangan membawa peningkatan PAD yang cukup besar yaitu lebih dari 57% atau dari Rp 271.756.978.761,- menjadi Rp 481.786.378.717,-

c. Peningkatan Pembangunan Infra Struktur

Selain pertumbuhan investasi, pertambangan emas juga meningkatkan pembangunan infra struktur di Kabupaten Bombana yaitu meningkatnya pembangunan jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana ibadah.

Pembangunan infra struktur di Kecamatan Rarowatu Utara berupa jalan, sekolah dan rumah ibadah adalah salah satu bentuk CSR perusahaan PT PLM yang telah melakukan produksi sejak tahun 2009. Jalan sepanjang 10 km mulai dari poros jalan provinsi di Desa Tembe kecamatan Rarowatu Utara hingga Desa Wumbubangka telah diperlebar, ditimbun dan dikeraskan oleh perusahaan PT PLM hingga layak untuk digunakan. Sekalipun belum pengaspalan, jalan ini dapat dilewati oleh pengendara jalan. Sekolah Dasar dan masjid di Desa Wumbubangka tempat perusahaan tersebut berada juga dibenahi PT PLM. Berikut wawancara dengan Dirman (50), Kepala Bagian Humas PT PLM.

“CSR yang nyata adalah membenahi infrastruktur jalan. Jalan sepanjang 10 km yang masuk dari Desa Tembe, telah pengerasan berupa jalan tanah adalah hasil kerja PT PLM. Bahkan Sekolah Dasar di Desa Wumbubangka adalah hasil CSR PT PLM. Semoga di masa depan bila produksi bagus maka akan dilanjutkan dengan pengaspalan untuk masyarakat. Sebelum ada jalan 10 km itu, jika kita naik mobil jam 3 sore maka subuh baru tiba di desa Tembe. CSR lainnya adalah adanya dana-dana yang diserahkan berupa bantuan kepada kepala-kepala Desa sebanyak 2 juta setiap bulan, bahkan kepada Kepala Kecamatan juga ada. Bahkan ada bantuan pembangunan masjid, tapi sampai sekarang tidak terlihat masjid terbangun, entah uangnya

kemana, karena itu mulai tahun anggaran 2012 bantuan pembangunan masjid ataupun sekolah tidak lagi dalam bentuk uang tetapi langsung dalam bentuk drop bahan bangunan. Sekarang sudah mulai terlihat ada masjid yang dibangun di Desa Wumbubangka” (wawancara tanggal 13 Desember 2012)

Pembangunan infrastruktur memang mengalami peningkatan tetapi jika dibandingkan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh daerah dari hasil tambang (emas, nikel dan krom) maka pembangunan di daerah ini belum sesuai dengan banyaknya sumberdaya alam yang dieksploitasi. Pembangunan jalan hanya dari CSR perusahaan di daerah tambang, sementara jalan propinsi dari daerah tambang (daerah penelitian) ke ibu Kota Bombana sepanjang ± 15 km masih berdebu dan berlubang. Bahkan sarana-sarana public lainnya yang vital seperti air bersih masih sulit diperoleh. Listrik juga masih belum dapat dinikmati dengan baik oleh masyarakat yang daerahnya dilimpahi kekayaan alam yang begitu besar.

d. Perubahan Pendapatan

Sejak ada tambang emas, terjadi perubahan pendapatan di wilayah penelitian. Penduduk yang hampir semuanya adalah petani mengalami perubahan pendapatan akibat tambang emas. Pada awal ditemukannya emas, penduduk (petani) ikut-ikutan melakukan penambangan emas, bahkan meninggalkan tanaman padinya yang sedang siap panen. Mudah-mudahan memperoleh emas membuat petani bersemangat dalam menambang. Tiba-

tiba petani memiliki sumber pendapatan yang tinggi. Emas mudah diperoleh di setiap tanah terutama di daerah gunung sekitar aliran sungai. Terjadi perubahan kondisi hidup, petani mampu memperbaiki rumahnya, membeli perabot, barang elektronik bahkan kendaraan. Petani banyak yang memiliki motor baru. Namun keadaan ini tidak berlangsung lama, tanah Bombana didatangi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari adanya emas. Pertambangan tradisional dilegalkan pemerintah Bombana. Akibatnya, emas tidak lagi mudah diperoleh, petani harus bersaing dengan pendatang yang kebanyakan memiliki ketrampilan menambang dan pengalaman menambang sebelumnya di tempat lain. Pendapatan petani dari menambang emas mulai berkurang. Kondisi lingkungan yang makin parah membuat petani banyak yang tidak tahan dan berhenti melakukan penambangan. Apalagi banyak yang sakit diantara mereka.

Sejak akhir tahun 2008 hingga tahun 2009 pertanian ditinggalkan oleh petani yang beralih ke tambang. Setelah pertambangan tradisional ditutup oleh pemerintah, petani mulai kembali ke tanah pertaniannya. Akan tetapi keadaan lingkungan sudah tidak karuan akibat tambang. Tahun 2010 sekitar 70% petani mulai menanam tetapi kurang berhasil, petani mengalami penurunan pendapatan. Demikian pula dengan tahun 2011 dimana terjadi bencana puso yang membuat 950 ha sawah di daerah penelitian gagal panen. Penurunan pendapatan ini disebabkan dampak lingkungan fisik oleh

kegiatan pertambangan emas. Berikut wawancara dengan Haji Ahmading alias Haji Medding (38), pemilik pabrik penggilingan padi sekaligus distributor pupuk bersubsidi.

“Seingat saya, tahun 2008 hanya sebagian petani yang sempat panen karena lari untuk mengolah tambang. Pendapatan mereka dari tambang lumayan, rata-rata bisa beli kendaraan atau perbaiki rumahnya. Tahun 2009 sama sekali tidak ada yang menanam karena tidak ada yang bersawah, semua menambang. Itu saya lihat karena tidak ada petani yang datang mengambil pupuk seperti sebelumnya. Artinya pendapatan dari pertanian padi sawah tidak ada. Tahun 2010 sekitar 70% petani kembali menanam, waktu itu curah hujan bagus tetapi produksi padi saat itu rusak, rata-rata berasnya merah. Akibatnya harga jatuh sehingga pendapatan petani turun sesuai kualitas beras. Tahun 2011 petani kembali menanam tetapi banyak yang tanahnya puso. Ada sekitar 50% petani yang menanam dan mengalami puso. Mereka menanam dan mengambil pupuk disini, hanya kasian mereka gagal panen akibat puso. Tahun 2011 itu petani yang menanam tidak sebanyak 2010 karena curah hujan tahun 2011 itu tidak menentu, setiap hujan petani membajak tapi selesai membajak kering lagi. Lama-lama hujan petani membajak ulang, tapi setelah membajak kembali musim kering, akibatnya petani banyak juga yang gagal menanam. Memang sejak ada tambang musim disini menjadi tidak menentu. Pendapatan petani dari tanaman padinya juga tidak menentu” (Wawancara pada tanggal 14 Desember 2012)

Untuk menutupi kebutuhannya hidupnya sebagian petani menambang secara sembunyi-sembunyi. Hasil wawancara dengan petani yang berada di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, semuanya mengakui terjadi penurunan produksi tanaman padi sejak ada pertambangan emas. Penurunan tersebut bervariasi dari tiga puluh persen (30%) hingga enam puluh persen (60%). Akibatnya terjadi penurunan pendapatan petani

dan juga pendapatan pemilik pabrik penggilingan padi. Intensitas penanaman padi juga berkurang karena tidak menentunya curah hujan.

Sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, petani hanya menanam padi satu kali dalam setahun, sementara sebelum ada tambang, dapat dilakukan hingga dua kali setahun. Lebih parah lagi karena sejak ada tambang, biaya produksi ikut meningkat. Jumlah pupuk yang digunakan menjadi dua kali lebih banyak. Selain membutuhkan biaya lebih besar karena lebih banyak pupuk, biaya pengolahan juga meningkat karena tanah menjadi alot oleh lumpur. Tidak jarang petani juga gagal dalam melakukan usaha tani padi. Tahun 2009 terjadi kekeringan, tahun 2010 meskipun berhasil panen, tetapi beras yang dihasilkan berwarna buram kemerahan sehingga harganya jatuh dan tahun 2011 terjadi banjir lumpur dan kekeringan. Keadaan tersebut membuat pendapatan petani dari hasil pertanian menurun.

Box 13. Perubahan Pendapatan Sebagai Dampak Pertambangan

Supardi (35) dari Desa Langkowala

“Sebelum ada tambang saya dapat 50 karung. Setelah ada tambang paling banyak dapat 30 karung. Itu karena pengaruh air yang tidak ada, saya dapat air dari BL 1, dekat dengan sumber air bendungan. Sebelum tambang saya malah biasa 2 kali menanam setahun,” (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2013)

H. Muliadi (42), petani dari Desa Lombakasi

“Sebelum ada tambang, saya bisa panen 50-60 karung setiap hektar. Kalau sekarang paling dapat 25 karung-30 karung” (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2013)

Musaham (32) petani dari Desa Lombakasi

“Lahan saya 1 ha, sejak ada tambang, tanaman padi kerdil, dari daun sampai leher rusak oleh lumpur yang masuk, bahkan mengganggu anakan padi. Kami butuh lebih banyak benih. Seperti menghambur, butuh 1 karung. Sebelum ada tambang saya hanya pakai 1 karung pupuk urea saja. Sekarang selain pupuk sampai 6 karung juga sudah harus pakai pestisida. Setiap minggu saya nyemprot, kalau tidak akan gagal panen, makanya banyak yang mundur menanam. Nyaris tidak ada hasil yang diperoleh dari panen.” (wawancara 5 Januari 2013)

Dewa Made Merta (50) petani dari Desa Kalaero

“.... Yang jelas sebelum ada tambang saya dapat 150 karung untuk 3 ha, tapi barusan saya dapat Cuma 60 karung untuk 3 ha. Jadi pendapatan dari sawah tidak ada, bahkan merugi. Sejak ada tambang kita harus pandai manajemen pengeluaran supaya tidak kebobolan. Teman ada yang dapat 48 karung dijual semua ternyata belum menutupi biaya operasional. Saya pernah punya beras hasil produksi yang berwarna merah sebanyak 100 karung tahun 2010, tapi saya rasa itu karena tidak bisa jemur oleh cuaca yang selalu hujan sehingga saya merugi”(Wawancara 7 Januari 2013)

Berbeda dengan pendapatan petani yang turun tajam dari sektor pertanian, dari sektor perdagangan terjadi peningkatan pendapatan. Contohnya adalah H. Abdullah (H. Beddu) petani dan pemilik toko di Kecamatan Lantari Jaya sejak ada tambang memilih hidup dari hasil penjualan toko sembako miliknya. Bahkan ia mampu membuka penginapan Tamsir Indah dan juga usaha rumah sewa. Pendapatan H. Beddu berubah menjadi lebih tinggi. Berikut adalah perbedaan kondisi sebelum dan sesudah adanya kegiatan pertambangan emas yang berdampak pada lingkungan ekonomi (perubahan pendapatan pada petani/penduduk lokal).

Tabel 33. Dampak Perubahan Pendapatan, Keadaan Sebelum dan Sesudah Tambang serta Kelembagaan yang Terpengaruh

No	Dampak Perubahan Pendapatan	Keadaan		Kelembagaan Pertanian yang Terpengaruh
		Sebelum Tambang	Sesudah tambang	
1	Berkurangnya Panen dalam Satu Tahun	Penanaman dua kali setahun	Penanaman padi rata-rata hanya satu kali setahun	Kelembagaan Kredit/ Modal
2	Hasil Produksi Padi Rendah	Produksi padi per hektar, dapat mencapai 6 ton	Produksi padi menurun 30 - 60 % per hektar.	
3	Pendapatan dari tambang	Tidak ada pendapatan	Pendapatan besar di awal adanya emas dan hilang setelah tambang tradisional ditutup (kecuali yang menambang secara illegal)	
4	Penyewaan tanah/rumah	Tidak ada sebelum tambang	Penyewaan tanah/kamar/ rumah kepada pendatang	

Dari penjelasan di atas maka dampak lingkungan ekonomi akibat tambang, kegiatan penyebab dampak dan perubahan fungsi kelembagaan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34. Dampak Lingkungan Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian yang Disfungsi

No	Dampak Lingkungan Ekonomi	Kegiatan Penyebab Dampak	Kelembagaan yang Berubah Fungsi
1.	Tumbuhnya investasi	Adanya tambang membangkitkan perusahaan angkutan untuk berkembang (mobil, kapal dan pesawat di ibukota propinsi) untuk melayani mobilitas penduduk datang dan pergi. Terbangunnya pasar untuk melayani kebutuhan penduduk yang meningkat tajam, menjamurnya toko emas untuk menampung hasil tambang penduduk, berkembangnya usaha property (penyewaan tanah, kamar kos, rumah sewa dan hotel), berkembangnya perbankan	Kelompok Tani
2.	Peningkatan PAD	Perdagangan barang dan jasa menghasilkan PAD, adanya pendapatan dari hasil tambang, dihasilkan royalty tambang ke Daerah penghasil sebesar 32% dari total royalty perusahaan ke Negara.	
3.	Peningkatan Pembangunan	Adanya perusahaan yang melakukan CSR dengan pembangunan sarana pendidikan (renovasi gedung sekolah) dan pembangunan/perbaikan sarana ibadah (masjid)	
4	Perubahan Pendapatan	Kegiatan tambang (terutama tradisional) menyebabkan peningkatan pendapatan petani dari sektor tambang bagi mereka yang berani melakukan penambangan emas sehingga masyarakat mampu memperbaiki rumahnya dan membeli kendaraan (motor). Pada awal adanya emas. Dari sektor pertanian terjadi penurunan hasil pertanian oleh berkurangnya ketersediaan air dan adanya lumpur sehingga pendapatan petani menurun.	Kelembagaan Kredit yaitu Tengkulak

BAB VI

FUNGSI DAN DISFUNGSI KELEMBAGAAN PERTANIAN

Penelitian ini mengkaji perubahan fungsi kelembagaan pertanian pada struktur dan proses akibat hadirnya tambang. Dari dampak-dampak tambang yang dijelaskan pada Bab V, terdapat beberapa dampak yang mempengaruhi kelembagaan pertanian dan menyebabkan terjadinya perubahan fungsi pada lembaga tersebut. Analisis perubahan fungsi di penelitian ini menggunakan Teori Structural Fungsional Merton yang dikembangkan dari pemikiran Parson dimana Merton melahirkan tiga postulat sebagai kritik atas Pemikiran Parson. Jika Parson menitikberatkan pemikirannya pada fungsi yang terjadi maka Merton lebih melihat pada disfungsi sebagai konsekuensi sosial obyektif dari tindakan individu/masyarakat. Karena itu analisis penelitian ini adalah analisis structural fungsional Merton yang dibedakan atas fungsi teramati (fungsi manifest) dan konsekuensi objektif fungsi (fungsi laten, disfungsi dan non fungsi) pada kelembagaan pertanian sebagai dampak kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Bombana.

Berikut adalah hasil identifikasi kelembagaan pertanian yang dipengaruhi oleh dampak-dampak tambang atas lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang dianalisis lebih lanjut untuk melihat bagaimana fungsi dan perubahan fungsi yang terjadi pada bentuk maupun prosesnya.

A. Kelembagaan Kelompok Tani/ Gapoktan

a. Kelompok Tani/Gapoktan dan Dampak Tambang Emas

Kelompok tani di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara mulai dibentuk tahun 1982, yaitu ketika petani-petani transmigran dari Jawa, Lombok dan Bali yang ditempatkan di daerah ini mulai melakukan usaha tani. Saat itu Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara masih menjadi bagian dari Kabupaten Buton. Gapoktan mulai dibentuk pada tahun 2004 di Kecamatan Rarowatu Utara dan tahun 2007 di Kecamatan Lantari Jaya. Sebelum ada tambang emas, keberhasilan pertanian padi sawah di wilayah penelitian tidak lepas dari peran kelembagaan pertanian termasuk Kelompok Tani/Gapoktan.

Pembentukan Kelompok Tani didasarkan pada letak hamparan sawah yang sama sehingga memungkinkan seorang petani masuk ke lebih dari satu kelompok tani. Berikut penuturan Wayan Suidana (48) dari Desa Lombakasih.

“Saya masuk kelompok tani Pupuk Sari dan Tunas Maju. Ini karena lahan kami ada pada dua hamparan. Saya malah pernah menjadi ketua Tunas Maju ketika masih bagus air.” (Wawancara 5 Januari 2013 di Desa Lombakasih)

Sejak terbentuk lebih dari 30 tahun lalu, kelompok tani mengalami beberapa kali pemekaran. Pemekaran kelompok terutama disebabkan pada

hamparan yang sama terjadi penambahan anggota melalui pemecahan lahan oleh sistem waris dan jual beli tanah. Selain itu juga terjadi karena pemekaran wilayah administratif (perubahan Bombana menjadi Kabupaten, pemekaran Kecamatan dan pemekaran Desa). Hingga tahun 2014, jumlah kelompok tani di Kecamatan Rarowatu Utara adalah 35 buah dan 22 diantaranya tergabung ke dalam 5 Gapoktan. Pada Kecamatan Lantari Jaya terdapat 68 buah kelompok tani dan 48 diantaranya tergabung ke dalam 9 Gapoktan. Data kelompok tani dan Gapoktan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan lampiran 2.

Kelompok Tani/Gapoktan adalah institusi yang dibentuk atas kepentingan yang sama, bersifat formal, terorganisir secara rapi dan teratur (Almond dan Powel Jr., 1968). Kelompok Tani dibentuk atas dasar adanya kepentingan yang sama diantara petani dalam melakukan usahatani untuk tujuan yang sama yaitu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan hasil produksi tanaman padi. Sedangkan Gapoktan dibentuk tahun 2007 oleh adanya kepentingan untuk memperoleh dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian) dari Kementrian Pertanian. Berikut wawancara dengan Kusaeri, PPL dari Kecamatan Rarowatu Utara mengenai pembentukan Gapoktan di daerah penelitian.

“Pembentukan Gapoktan dimulai tahun 2007 karena ada Program Pemerintah dari Kementerian yang akan menyalurkan dana PUAP. Karena itu penyuluh-penyuluh di sini membentuk Gapoktan sebagai persyaratan untuk memperoleh dana tersebut.” (Wawancara pada tanggal September 2013)

Selanjutnya, Kelompok Tani berfungsi sebagai wahana pembelajaran bagi petani dalam meningkatkan pengetahuan usaha taninya, menentukan keputusan-keputusan penting menyangkut segala kegiatan dalam pertanian padi sawah mulai dari penentuan masa tanam dan waktu panen, distribusi saprodi dan hasil panen. Sedangkan Gapoktan berfungsi sebagai wadah penyaluran bantuan modal PUAP dan penyelesaian masalah-masalah bersama seperti, serangan hama/penyakit tanaman, serangan babi dari hutan.

Setelah ada tambang emas, Kelompok Tani/Gapoktan mengalami guncangan oleh kegiatan pertambangan emas yang berdampak atas lingkungan fisik. Dampak terhadap air menyebabkan debit air berkurang dan tercemar sementara perubahan bentang alam oleh penggalian tambang menyebabkan bentuk fisik tanah berlubang dan tidak rata pada sawah dan kebun serta tertimbunnya batang-batang sungai. Akibatnya ketiadaan air merubah pola waktu tanam dan waktu panen dalam Kelompok Tani. Sebagian petani membuat sumur bor untuk terus menanam padi. Terjadi banjir lumpur, tanah puso dan kekeringan yang mengakibatkan gagal panen dan mahalnya ongkos untuk memperbaiki kerusakan lahan akibat dampak tambang tersebut.

Dampak lingkungan sosial yaitu pertama, menurunnya kepercayaan petani kepada pemerintah/DPRD/Perusahaan atas janji-janji yang tidak terealisasi untuk perbaikan fisik lingkungan yang tercemar (sungai, irigasi

dan salurannya serta lahan-lahan rusak akibat tambang). Hal ini menyebabkan petani terpaksa berhenti bersawah oleh kondisi lingkungan (terutama di desa Wumbubangka) sehingga Kelompok Tani menjadi tidak aktif. Fungsi-fungsi Kelompok Tani menjadi hilang. Dampak lingkungan sosial kedua adalah intensitas interaksi sosial yang berkurang dimana pertemuan-pertemuan dalam kelompok tani semakin jarang dilakukan. Dampak lingkungan sosial ketiga yang mempengaruhi Kelompok tani adalah budaya (perubahan nilai uang), dimana hadirnya tambang mengubah uang menjadi ukuran transaksi dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem panen dan bagi hasil dalam kelompok tani.

Dampak lingkungan ekonomi yaitu tumbuhnya investasi termasuk dalam bidang pertanian. Tumbuh usaha mobil panen yang menggeser sistem dross menjadi panen “sistem jahit” oleh jasa mobil panen.

b. Deskripsi Kelompok Tani/Gapoktan

Kelompok tani/Gapoktan di daerah penelitian merupakan organisasi bentukan pemerintah (difasilitasi oleh penyuluh) dan mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi Kelompok Tani adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Kelompok. Perekrutan anggota kelompok tani berdasarkan letak hamparan sawah, ini memungkinkan seorang petani menjadi anggota lebih dari satu kelompok tani. Sedangkan struktur

organisasi Gapoktan sama dengan kelompok tani, hanya saja anggota Gapoktan adalah semua anggota kelompok tani yang bergabung.

Kelompok Tani/Gapoktan di wilayah penelitian terdiri atas petani-petani yang sangat heterogen. Berasal dari 5 (lima) suku yaitu Jawa, Bali, Lombok, Bugis dan Moronene (penjelasan di bab IV halaman 85-87).

Sumber daya alam di daerah penelitian sangat mendukung pertanian. Tanah yang subur dan sumber air (sungai dan curah hujan) tersedia untuk kegiatan pertanian. Letak sawah pada hamparan yang sama membuat anggota kelompok mudah bekerjasama. Peralatan seperti traktor yang dimiliki anggota kelompok disewakan bergilir kepada anggota lainnya. Sedangkan peralatan sederhana seperti cangkul dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Sumberdaya finansial kelompok berasal dari iuran tetap anggota setiap habis panen dan iuran lainnya untuk kegiatan bersama.

Dalam kelompok tani, norma atau aturan yang berlaku adalah ADRT dan hasil musyawarah melalui rapat. Rapat Kelompok dilaksanakan sebelum melakukan penanaman, sebelum panen dan setiap ada kegiatan yang akan dilaksanakan. Segala keputusan-keputusan penting menyangkut kegiatan kelompok dibicarakan dalam rapat. Ada juga aturan-aturan yang sudah melekat dan berlaku universal di daerah penelitian, contohnya aturan bagi hasil dalam kegiatan panen. Dalam kelompok tani terdapat nilai-nilai kebersamaan dalam bentuk gotong royong berupa pembersihan saluran

irigasi setiap akan menanam. Ada juga nilai resiprositas dalam kegiatan kelompok yang terlihat pada kegiatan menanam dan panen.

c. Fungsi Sebelum Ada Dampak Tambang Emas

Sebelum ada pertambangan emas, terdapat fungsi organisasi yang dilaksanakan pengurus dan anggota pada Kelompok tani/Gapoktan. Pemilihan pengurus dilakukan sesuai ADRT Kelompok Tani/Gapoktan. Pemilihan dilakukan melalui rapat bersama dengan mekanisme yang disepakati, umumnya adalah pemilihan langsung. Untuk pergantian pengurus maka pengurus yang berhenti akan mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam rapat kelompok.

Ketua kelompok bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelompok, yaitu memimpin rapat pengurus, memimpin rapat anggota, menandatangani surat menyurat, mewakili kelompok dalam pertemuan dengan pihak lain dan memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi kelompok lainnya. Sekretaris bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi kegiatan non keuangan yaitu mencatat dan mengarsipkan keputusan rapat, surat menyurat dan membuat laporan-laporan. Sedangkan Bendahara bertanggung jawab atas seluruh kegiatan administrasi keuangan kelompok yaitu menerima pembayaran iuran/pinjaman anggota dan menyimpannya, melakukan transaksi keuangan dengan pihak lain (menerima/membayar) dan mencatat, menyusun administrasi/laporan keuangan kelompok. Anggota

Kelompok mempunyai hak dan kewajiban. Anggota kelompok menyampaikan usul/saran/pendapat kepada pengurus baik dalam rapat maupun diluar forum rapat, memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok, mematuhi aturan-aturan, kesepakatan dan keputusan kelompok, hadir dan aktif pada setiap rapat/kegiatan di lapangan, aktif membayar iuran-iuran untuk kepentingan kelompok.

Fungsi manajemen Kelompok Tani adalah menentukan keputusan-keputusan penting secara bersama-sama, meliputi waktu tanam, jenis bibit dan penggunaan traktor ataupun sarana produksi lainnya (pupuk dan pestisida) melalui rapat kelompok.

Pada beberapa kelompok, penggunaan traktor diatur sesuai giliran yang ditetapkan Ketua Kelompok (misalnya di Kelompok Tani Kacipong Desa Watu-Watu). Dengan demikian, jika traktor rusak, maka semua anggota kelompok bersama-sama akan memperbaikinya. Tetapi pada kebanyakan kelompok, penggunaan traktor milik anggota dilakukan dengan sistem sewa gilir. Ongkos sewa dan giliran penyewa ditentukan oleh pemilik traktor. Karena sistemnya disewakan maka jika ada kerusakan, traktor akan diperbaiki sendiri oleh pemiliknya, tidak menjadi tanggungjawab bersama dalam kelompok tani.

Box.14. Fungsi Manajemen Kelompok Tani Sebelum Ada Tambang Emas

Abu Bakar (42)

“Kelompok tani di sini terbentuk berdasarkan wilayah hamparan. Biasanya mereka menentukan masa tanam bersama, penentuan bibit bersama sehingga panennya akan bersama-sama juga.” (Wawancara pada tanggal 14 Desember 2012)

Kahar (42)

“Di kelompok saya ada 20 ha semua ditanam bersama, saya sendiri ada 3 ha. Biasanya pakai traktor saya, kita tentukan dan gilir sampai selesai. Setiap lahan yang dikerjakan tinggal belikan solar. Menanam harusnya sama-sama tapi karena dompeng [traktor] cuma satu sering ada yang terlambat menanam. Apalagi lahan itu ada di seberang kali. Kalau banjir besar tidak bisa menyebrang ke sana karena belum ada jembatan. Kalau ada banjir saat berada di seberang ya harus bertahan di sana” (Wawancara pada tanggal 4 Januari 2013)

Kelompok Tani juga memiliki fungsi distribusi dan jaringan. Fungsi distribusi yaitu menyalurkan sarana dan prasarana seperti bibit, pupuk dan bantuan-bantuan kepada semua anggota kelompok. Fungsi jaringan adalah menguatkan interaksi antar petani dalam Kelompok Tani, antar petani dengan pihak-pihak luar (pemerintah, pasar dan lembaga lainnya).

Pada beberapa Kelompok Tani terdapat fungsi laten yaitu fungsi modal. Kelompok Tani memberikan pinjaman modal untuk melakukan usahatani bagi anggota yang memerlukan, bunga yang dikenakan sebesar 5% per bulan. Modal tersebut berasal dari iuran anggota kelompok setiap habis panen. Besarnya iuran bervariasi 5-10 kg per/ha pada setiap Kelompok Tani. Sesungguhnya uang hasil iuran digunakan untuk kegiatan kelompok tani namun menjadi fungsi laten oleh kebutuhan anggota kelompok. Berikut pengakuan Ketut Lastri (42) dari Desa Langkowala.

“Kelompok tani juga berfungsi memberikan pinjaman uang. Bunganya 5% perbulan. Waktu saya menjadi ketua uang 4 juta itu dibungakan dan sudah saya serahkan ke pak Ketut Wirjana” (Wawancara pada tanggal 7 Januari 2013)

Nilai gotong royong dan resiprositas terdapat pada kegiatan menanam dan panen. Biasanya pada satu hamparan yang sama, petani saling bantu dalam mengolah lahan dan ketika panen. Tidak ada perhitungan luasan lahan dalam kerjasama ini. Terdapat kesadaran dan kepercayaan dalam diri masing-masing petani bahwa pada gilirannya ia pun akan dibantu (ada resiprositas) dan mendapatkan keuntungan oleh kerjasama itu. Tidak ada pembayaran dalam bentuk apapun. Hanya sekedar menyiapkan makan minum sebagai rasa terima kasih dari petani yang dibantu. Kerjasama semacam ini menguntungkan semua pihak yang terlibat sebab tidak perlu mengeluarkan uang untuk membayar buruh tani.

Sebagian petani melakukan panen dengan sistem dross. Mereka menggunakan petani setempat lainnya sebagai buruh dalam kegiatan panen. Mulai dari menyabit, mendross hingga memasukkan gabah yang dihasilkan ke dalam karung-karung. Setelah pekerjaan selesai, buruh tani akan dibayar dengan bagi hasil. Petani pemilik padi mendapat enam bagian (6 karung) dan buruh tani satu bagian (1 karung).

Setelah kegiatan panen, gabah yang dihasilkan sebagian akan disimpan oleh petani dan sebagian lagi digiling ke pabrik penggilingan padi. Gabah yang disimpan adalah cadangan pangan keluarga tani dan menjadi

aset yang dijual ketika petani memerlukan uang untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan gabah yang digiling menjadi beras adalah yang akan dikonsumsi segera ataupun dijual petani. Dalam menggiling gabahnya, tidak ada pembayaran dalam bentuk uang tetapi dengan sistem bagi hasil. Aturan ini juga berlaku umum di semua pabrik penggilingan padi. Petani pemilik gabah memperoleh 10 (sepuluh) bagian dan pemilik penggilingan sebesar 1(satu) bagian.

Jika tanah yang diolah dikerjakan oleh petani penggarap maka keanggotaan kelompok tani jatuh pada petani penggarap bukan petani pemilik lahan. Beberapa anggota kelompok tani di lokasi penelitian adalah petani yang menggarap sawah milik petani lainnya dengan sistem bagi hasil. Jika modal usahatani dari pemilik lahan maka hasilnya dibagi dua sama rata antara petani penggarap dan petani pemilik, namun jika petani pemilik hanya bermodalkan lahan saja sedangkan modal usahatani dan tenaga kerja berasal dari penggarap maka petani pemilik hanya mendapat sepertiga bagian dan petani penggarap mendapat duapertiga bagian dari hasil yang diperoleh. Sebagai anggota kelompok tani, petani penggarap harus mengikuti segala aturan kelompok yang berlaku seperti mengikuti rapat kelompok, kegiatan-kegiatan kelompok termasuk membayar iuran-iuran kelompok.

Fungsi Gapoktan adalah memfasilitasi anggotanya (kelompok-kelompok tani) dalam memecahkan masalah-masalah bersama seperti permodalan dalam usahatani, menyalurkan bantuan-bantuan baik berupa modal usaha tani, sarana produksi (benih, pupuk, pestisida dan obat-obatan) kepada anggotanya secara adil dan merata dan penanggulangan hama/penyakit tanaman serta memfasilitasi anggotanya dalam mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan melalui pelatihan-pelatihan. Berikut hasil wawancara dengan Fajaruddin, Ketua Gapoktan Kowala dan Arsi, KKP di Kecamatan Lantari Jaya.

Box 15. Fungsi Gakpoktan Sebelum Ada Tambang Emas

Fajaruddin (42), Ketua Gapoktan Kowala

“Gapoktan berdiri ketika pemekaran Desa tahun 2007, terdiri dari 5 KT, yaitu Karya Bakti, Tunas Baru, Kejar Usaha, Sumber Rejeki, dan Priuk Padamara. Gapoktannya adalah Kowala. Struktur organisasi. Ketua, saya Fajarudin, Sekertaris Alif Sumarto dan bendahara pak Murjana. Anggotanya semua KT yang bergabung sekitar 100 lebih. Fungsi Gapoktan, memfasilitasi kelompok2 tani dalam program-program kelompok, memfasilitasi anggota KT dalam urusan-urusan ke pemerintah dan menjadi wadah bimbingan teknis tanaman pangan dari propinsi.” (Wawancara pada tanggal 3 Januari 2013)

Arsi (42), KKP Kecamatan Lantari Jaya

“Dulu dibentuk Gapoktan Kowala tahun 2007, itu Gapoktan pertama di sini. Dibentuk karena ada dana yang akan turun dari pemerintah dan atas saran dari Dinas Pertanian, dibentuklah Gapoktan Kowala untuk merespon turunnya dana tersebut. (Wawancara pada tanggal 8 Agustus 2013)

d. Fungsi Sesudah Ada Dampak Tambang Emas

Setelah ada dampak pertambangan emas, fungsi Kelompok Tani terganggu. Kelompok tani mulai disfungsi karena pertemuan dalam bentuk rapat teratur tidak ada lagi. Rapat diadakan jika ada program dari pemerintah. Misalnya akan turun bantuan. Rapat dilakukan secara informal oleh pengurus dan anggota tertentu. Tidak ada undangan rapat, hanya saling mengabarkan secara langsung atau melalui sms/telepon. Fungsi utama kelompok tani berubah menjadi wadah penyaluran bantuan kepada anggota-anggotanya.

Di Desa Wumbubangka terdapat Gapoktan Winua Sangkula yang beranggotakan empat Kelompok tani yaitu Koenantou, Tumbuntonia, Tetetari dan Sumber Sejati. Menurut Sumo Sumar, Kelompok-kelompok Tani ini dimekarkan tahun 1999, dari kelompok tani asal yaitu Tetetari yang dibentuk tahun 1992. Hadirnya tambang emas membuat usahatani padi sawah tidak dapat dilakukan akibat tidak adanya air oleh dampak kegiatan tambang. Akibatnya, kelompok tani dan Gapoktan Winua Sangkula menjadi disfungsi (non fungsi). Merton melihat ini sebagai sebuah konsekuensi objektif dari adanya tambang emas yang membawa fungsi-fungsi baru. Petani yang semula bergantung hidup pada hasil pertanian, berubah menjadi penambang, sekalipun kehidupan dari tambang bukanlah pilihan petani namun dilakoni untuk melanjutkan hidup. Setelah menjadi non fungsi, pemerintah menawarkan program bantuan kepada petani melalui dana

PUAP. Gapoktan Winua Sangkula kemudian diaktifkan kembali untuk merespon dana tersebut dan lahir membawa fungsi-fungsi baru dalam bentuk dan proses yang sangat berbeda pada awal pembentukan Gapoktan ini. Winua Sangkula berhasil mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 100.000.000,- dari dana PUAP. Dana tersebut diperoleh atas usulan Ketua Gapoktan yang dibantu oleh penyuluh dari BP3K setempat (Badan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan). Akan tetapi, Winua Sangkula yang aktif bukan lagi Kelompok Tani yang berfungsi dalam peningkatan produksi tanaman padi tetapi menjadi Kelompok Tani yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Uang yang diterima di Kelompok didistribusikan kepada anggotanya untuk digunakan sesuai kepentingan masing-masing dengan bunga 5% sebulan. Berikut wawancara dengan Sumo Sumar (59), Ketua Gapoktan Winua Sangkula.

“Kelompok Tani di sini sudah tidak berfungsi lagi sejak tahun 2009, tepatnya setelah tidak ada lagi pertanian padi sawah karena ada tambang. Atas dukungan dari BP3K, Gapoktan kemudian mengusulkan bantuan dana dan berhasil memperolehnya tahun 2011 dari dana PUAP. Uang itu kita bagikan ke anggota yang membutuhkan dan digunakan sesuai keperluannya. Yang penting dananya tidak habis, supaya bergulir kita kenakan bunga 5 % sebulan. Ada yang gunakan untuk kebunnya, ada yang menanam palawija. Karena sawah tidak mungkin lagi sebab tidak ada air.”(Wawancara pada tanggal 10 Juli 2013 di Desa Wumbubangka)

Fenomena Winua Sangkula di atas tidak dijelaskan lebih jauh oleh teori Merton, karena itu penulis menamainya sebagai “*Mutasi Fungsi*” karena

lahir dalam bentuk dan fungsi yang berbeda. (Penjelasan lebih lanjut dibahas khusus pada bagian akhir bab VI)

Secara struktural, Kelompok Tani mempunyai fungsi pada setiap pengurus, baik Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Setelah ada tambang, ketidakaktifan kelompok tani dalam pertemuan-pertemuan membuat Ketua mengambil alih fungsi-fungsi yang ada (terjadi disfungsi). Pada beberapa Kelompok Tani/Gapoktan, Ketua berfungsi juga sebagai bendahara sekaligus sekretaris. Misalnya pada Kelompok Tani Tunas Baru, Ketuanya yaitu Ketut Wirdjana menjadi pemegang uang simpanan anggota, sekalipun ada Bendahara. Ia juga menyimpan inventaris Kelompok seperti tangki penyemprot hama. Sehingga ketika diganti, baik uang maupun tangki tidak ada yang jelas keberadaannya.

Pada beberapa kelompok tani, Ketua yang membuat proposal dana bantuan dibantu oleh penyuluh. Bahkan pencairan dana juga melalui rekening Gapoktan yang dipegang oleh Ketua bukan Bendahara, dengan demikian fungsi kepengurusan hanya ada di tangan Ketua saja.

ADRT tidak lagi berjalan baik, pergantian kepengurusan tidak melalui mekanisme yang ada dalam ADRT. Pengurus lama seharusnya melakukan pertanggungjawaban kelompok melalui rapat anggota tidak berjalan lagi. Contohnya pada Kelompok Tunas Baru yang diketuai oleh Ketut Wirdjana. Pada saat Ketut Wirdjana mengundurkan diri, ia tidak mempertanggungjawabkan apapun, bahkan uang kelompok yang

dipegangnya tidak jelas adanya. Pemilihan pengurus baru juga tidak dilaksanakan melalui Rapat Kelompok. Ketua baru langsung diangkat tanpa ada pemilihan.

Penentuan masa tanam tidak dilaksanakan Kelompok Tani sebab dampak tambang terhadap air menyebabkan petani memutuskan sendiri waktu tanam yang tepat sesuai kondisi air, dengan demikian waktu panen juga berbeda-beda. Beberapa petani mendirikan sumur bor untuk mengatasi kurangnya air dari irigasi. Karena itu, petani yang mempunyai sumur bor umumnya dapat terus menanam sementara yang hanya mengandalkan air irigasi atau curah hujan, harus menunggu kondisi air benar-benar cukup untuk tanaman padi. Kesalahan menentukan waktu tanam akan membawa kegagalan yang berarti kerugian besar bagi petani.

Box 16. Perubahan Fungsi Manajemen pada Kelompok Tani

Wayan Suidana (48)

“Kegiatan Kelompok tani sebelum tambang kita ada musyawarah penentuan waktu tanam, tapi sekarang paling lewat sms ajak teman, Kalau kita lihat air hujan banyak maka kita langsung saja menanam. Tidak menunggu lagi.”(Wawancara pada tanggal 5 Januari 2013 di Desa Lombakasih)

Saradi (65)

“Pertanian disini tahun 2008-2010 nyaris tidak ada Waktu itu kelompok tani nyaris tidak berfungsi. Tidak ada penentuan waktu tanam, saling menunggu, bahan pangan datangnya dari luar semua”(Wawancara pada tanggal 14 Desember 2012 di desa Marga Jaya)

Gotong royong dalam Kelompok Tani masih berjalan baik oleh kepentingan yang sama yaitu melakukan pembersihan saluran irigasi, bahkan lebih intens. Gotong royong pembersihan saluran irigasi yang dulunya hanya sekali sebelum menanam menjadi berkali-kali setiap saluran penuh lumpur. Sebab irigasi yang berlumpur akan mempengaruhi tanaman padi yang menggunakan air dari saluran irigasi. Tahun 2013 petani yang tergabung dalam Gapoktan Kowala bahkan melakukan iuran sebesar Rp50.000,- setiap orang untuk menyewa alat berat dalam upaya membersihkan bendungan Langkowala dan saluran irigasi.

Air yang sedikit membuat petani merubah sistem penanaman padi dari bibit menjadi tanam benih langsung. Menanam dengan bibit memerlukan air yang selalu cukup dalam jangka waktu lebih panjang, sehingga resiko gagal lebih besar dibanding menanam benih secara langsung. Akibatnya, hasil padi berbeda-beda jenisnya karena benih yang digunakan petani juga bervariasi. Kekurangan sistem tabela adalah banyaknya benih yang harus digunakan untuk berhasil karena kondisi tanah yang kurang baik. Berikut wawancara dengan beberapa petani.

Box 17. Kegiatan Pertanian Padi Sawah dalam Kelompok Tani Setelah Ada Tambang Emas

Abu Bakar (42)

“...sekarang orang tidak lagi menanam bibit, tapi langsung tanam benih (tabela), itu ditarik saja, lebih praktis, mempercepat proses, kalau bibit juga kan ada umurnya dan masih harus dipindahkan.” (Wawancara di Desa Lombakasih, 14 Desember 2012)

Ketut Wirdjana (63)

“Kalau ada air bulan 3 kita menanam, tapi tidak ada arahan. Semua sendiri-sendiri. Benih yang dipakai disini adalah padi jangka panjang, umur 4 bulan. Dari pertanian maunya yang cepat panen tapi saya pelajari hasilnya tidak bagus” (Wawancara di Desa Langkowala, 5 Januari 2013)

Musaham(38)

“Sejak ada tambang, tanaman padi kerdil, dari daun sampai leher rusak oleh lumpur yang masuk, bahkan mengganggu anakan padi. Kami butuh lebih banyak benih. Seperti menghambur, butuh 1 karung untuk 1 ha lahan (Wawancara di Desa Lombakasih, 5 Januari 2013)

Wayan Suidiana (48)

“Kebutuhan benih dengan sistem tabela paling tidak 80kg/ha. Kalau tanam tiga paling keluar anakan 1. Makanya kita menghambur 15-20 bibit tiap lubang supaya anakan yang keluar cukup. (Wawancara di desa Lombakasih, 5 Januari 2013)

Setelah ada tambang, fungsi distribusi dalam Kelompok Tani tetap berjalan. Misalnya penyaluran bantuan puso tahun 2011 yang diberikan tahun 2012 disalurkan melalui Kelompok Tani kepada anggotanya dalam bentuk pupuk dan uang tunai. Sementara itu fungsi jaringan Kelompok Tani semakin kuat. Fungsi jaringan menguatkan interaksi petani dalam Kelompok Tani dengan pihak-pihak luar (pemerintah, pasar dan lembaga lainnya) dilakukan untuk kepentingan bersama. Jika ada yang diperjuangkan, maka

gerakan/usaha bersama lebih efektif dilakukan melalui Gapoktan dari pada Kelompok Tani.

Fungsi jaringan ini menjadi kuat ketika terjadi puso tahun 2011 dimana petani dari semua Kelompok Tani di beberapa Kecamatan berjuang mendapatkan ganti rugi puso yang berhasil diterima pada tahun 2012. Tahun 2011 ketika banjir lumpur melanda, Kelompok Tani gagal mendapatkan bantuan bagi petani di Kecamatan Lantari Jaya dari PT Panca Logam Makmur, tetapi berhasil memperoleh bantuan bagi petani di Kecamatan Rarowatu Utara dari PT SUN. Perusahaan PT Panca Logam Makmur menolak ganti rugi dengan dalih bahwa wilayah IUPnya tidak berada di Kecamatan Lantari Jaya tetapi di Kecamatan Rarowatu Utara, walaupun limbah buangan perusahaan berupa lumpur mengalir melalui sungai dan merusak lahan-lahan petani di Kecamatan Lantari Jaya.

Setelah ada tambang emas, sejak tahun 2012 sebagian petani lebih menyukai panen dengan menggunakan mobil panen, meskipun sebagian masih menggunakan buruh tani setempat dengan sistem dross. Sementara kegiatan panen dengan gotong royong hampir tidak dilakukan lagi. Panen dengan mobil dikenal sebagai 'sistem jahit'. Artinya, mulai padi ditebas, digiling menjadi gabah hingga masuk ke karung semua dilakukan oleh pemilik mobil panen. Pembayarannya dapat dengan bagi hasil dapat juga dengan uang tunai. Aturan bagi hasil sama saja dengan sebelum ada tambang yaitu pemilik tanaman mendapat enam bagian, pemilik mobil panen

satu bagian. Karena panen dengan sistem jahit dianggap praktis dan cepat (hanya setengah hari untuk 1 ha lahan), maka petani lebih menyukai sistem ini. Apalagi pembayarannya juga sama dengan sistem dross menggunakan buruh tani setempat. Walaupun menggunakan buruh tani setempat itu dilakukan oleh dua alasan, pertama petani belum terbiasa menggunakan mobil panen sehingga khawatir teknologi baru ini membuat gabah banyak terbang. Kedua, petani merasa tidak enak hati dan kasihan dengan buruh tani yang telah bertahun-tahun membantunya setiap panen, disingkirkan begitu saja dan kehilangan kesempatan mendapatkan pembagian hasil.

Pergeseran sistem panen di daerah penelitian karena kemajuan teknologi dan datangnya penduduk dari luar oleh Simmel disebut sebagai tragedi kebudayaan. Sistem jahit oleh mobil panen merupakan kebudayaan baru yang berkembang dan menggeser sistem panen dross yang telah cukup melekat dalam kehidupan petani. Sistem ini membawa tragedi bagi buruh tani yang kehilangan pekerjaannya. Merton memandangnya sebagai disfungsi. Panen yang dulunya membawa nilai-nilai resiprositas, saling berbagi keuntungan dari tanaman yang dihasilkan oleh kerjasama petani pemilik dan buruh tani setempat menjadi hilang.

Hal semacam ini hampir sama dengan pergeseran sistem panen yang diamati Hayami dan Kikuchi (1987) pada Desa-desa di Jawa Barat. Tekanan penduduk dan kemajuan teknologi adalah faktor utama yang mengubah panen sistem bawon sebagai sekuritas pangan masyarakat desa ke sistem

tebasan yang menghasilkan keuntungan lebih banyak bagi pemilik lahan karena tidak perlu membagi hasil tanamannya kepada semua petani yang terlibat dalam kegiatan panen.

Sementara itu terjadi perubahan pembayaran dari sistem bagi hasil menjadi pembayaran dengan uang pada kegiatan panen dengan menggunakan buruh. Waktu tanam yang berbeda membuat petani seringkali panen sendiri-sendiri, sebagian masih berusaha panen bersama dan saling bantu. Jika panen tidak bersamaan dengan teman sekelompok (sehamparan) maka petani menggunakan buruh tani dari luar untuk panen. Buruh dari luar berbeda dengan buruh tani setempat yang dibayar dengan bagi hasil. Pembayaran buruh tani luar berubah menjadi sistem upah yaitu biaya tebas Rp 1.000.000,- per ha lahan dan biaya dross Rp20.000 per karung. Sistem upah ini sangat memberatkan petani, karena itu petani mengusahakan untuk panen bersamaan dengan teman lainnya. Kalau terpaksa tidak panen bersamaan maka petani yang tidak mampu akan menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Sekalipun memerlukan waktu yang lama dalam prosesnya.

Sejak ada tambang, fungsi modal yang diberikan kelompok tani kepada anggotanya tidak lagi berjalan sebab modal kelompok tani telah habis (tidak ada lagi iuran kelompok setiap habis panen), modal kelompok yang dipinjamkan ke anggota dengan bunga 5% sebulan juga tidak mampu dikembalikan anggota (macet) oleh penurunan produksi/kegagalan panen.

Misalnya yang terjadi pada Kelompok Tani Tunas Baru. Uang yang digulirkan tidak ada yang kembali dan juga tidak dipertanggungjawabkan oleh Ketua Kelompoknya yang diganti yaitu Ketut Wirdjana.

Fungsi utama Gapoktan berubah menjadi wadah perjuangan petani mendapat bantuan-bantuan pertanian. Di Kecamatan Lantari Jaya, dampak tambang emas menyebabkan Kelompok-Kelompok Tani yang tergabung dalam Gapoktan Kowala (Karya Bakti, Tunas Baru, Kejar Usaha, Sumber Rejeki, dan Priuk Padamara) mengalami kesulitan modal untuk melakukan usahatani padi sawah seperti mendirikan sumur bor dalam mengantisipasi dampak tambang terhadap air irigasi, memperoleh benih unggul yang tahan terhadap kurangnya air. Karena itu Gapoktan memfasilitasi anggota (kelompok-kelompok yang tergabung) untuk mendapatkan bantuan. Memanfaatkan jaringan dengan BP4K dan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Fajaruddin Ketua Gapoktan Kowala akhirnya berhasil memperoleh bantuan hibah senilai Rp 250 juta pada tahun 2012 dari Kementerian Pertanian. Jaringan sosial dalam Internal Gapoktan dan eksternal Gapoktan menjadi kuat ketika ada 'sesuatu' yang diperjuangkan bersama. Selanjutnya Gapoktan Kowala mendistribusikan bantuan tersebut kepada anggotanya.

e. Perubahan Fungsi

Dari penjelasan di atas dapat diidentifikasi perubahan fungsi yang terjadi pada Kelompok Tani/Gapoktan akibat dampak tambang emas di Kabupaten Bombana. Terjadi fungsi baru yang menjadi fungsi utama kelompok tani yaitu sebagai wadah penyaluran (fungsi distribusi) bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya akibat kerusakan lingkungan/kegagalan pertanian oleh dampak lingkungan fisik pertambangan (Disfungsi). Sedangkan Gapoktan memunculkan fungsi laten menjadi fungsi utama yaitu sebagai wadah perjuangan bagi petani memperoleh bantuan-bantuan akibat adanya dampak-dampak tambang emas (fungsi jaringan).

Norma atau aturan-aturan dalam Kelompok Tani yaitu ADRT dan hasil keputusan rapat mengalami disfungsi. Struktur organisasi Kelompok Tani/Gapoktan tetap ada dan sama seperti sebelum ada tambang. Dari fungsi struktural organisasi terjadi perubahan pada beberapa fungsi yaitu: Ketua tidak lagi memimpin rapat teratur yang dihadiri oleh pengurus dan anggota, Sekretaris tidak lagi mengurus administrasi non keuangan dengan baik dan Bendahara tidak membuat laporan keuangan secara berkala. Ketua bahkan mengambil alih fungsi Sekretaris dan bendahara, dengan membuat proposal, laporan-laporan dan memegang uang Kelompok.

Proses pergantian pengurus mengalami disfungsi dan pembentukan pengurus baru juga tidak sesuai mekanisme pemilihan tetapi langsung

penetapan (non fungsi). Pengurus lama yang diganti tidak melakukan pertanggungjawaban dalam rapat kelompok. Sebagian besar KT tidak lagi melakukan musyawarah dalam penentuan waktu tanam, penggunaan saprodi (bibit/benih, pupuk, peralatan) penentuan waktu tanam menjadi keputusan perorangan, hanya melihat air atau curah hujan, paling jauh saling mengajak dengan tetangga dekat satu hamparan atau melalui sms. Pengadaan saprodi dilakukan perorangan bukan melalui kelompok dan penggunaan saprodi (bibit, pupuk dan pestisida tersebut) disesuaikan dengan kemampuan petani (disfungsi). Sistem penanaman dengan bibit diganti menjadi sistem tabela (disfungsi). Penentuan waktu panen menjadi keputusan perorangan (disfungsi). Penentuan panen dengan membayar mobil panen bersama anggota kelompok tani atau terjadi perubahan cara panen dari sistem tebasan menjadi sistem jahit (disfungsi berupa fungsi baru yang muncul). Terjadi perubahan pembayaran upah kerja dari bagi hasil menjadi uang tunai (disfungsi). Fungsi laten kelompok sebagai penyedia modal menjadi hilang (non fungsi), petani akan beralih ke tengkulak. Tidak ada lagi iuran anggota setiap habis panen yang jumlahnya bervariasi antara 5-10 kg beras per orang/ha (non fungsi). Pada beberapa Kelompok Tani yang tidak lagi ada tanaman padi, Kelompok tani berubah fungsi menjadi kelompok simpan pinjam.

Bentuk dan Proses Disfungsi Kelembagaan Kelompok Tani dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35. Bentuk dan Proses Disfungsi Kelembagaan Kelompok Tani/Gapoktan

Dampak Tambang Emas	Perubahan Fungsi Kelembagaan	Hasil Analisis Disfungsi
Dampak Fisik Tambang: Dampak terhadap air, dampak Lumpur, puso/kekeringan/perubahan bentang alam	Kelompok tani berubah fungsi sebagai wadah penyaluran bantuan dari pemerintah atau lembaga lainnya akibat kerusakan lingkungan/kegagalan pertanian (fungsi distribusi)	Fungsi Laten
	Gapoktan berfungsi sebagai wadah perjuangan bagi petani memperoleh bantuan-bantuan (fungsi jaringan)	Fungsi Laten
	Kelompok Tani (Koneantou, Tumbuntonia, Tetetari, Sumber Sejati) tidak jalan sama sekali karena usahatani padi sawah sudah tidak ada di Desa Wumbubangka sehingga semua fungsi produksi pada tanaman padi menjadi hilang, hanya struktur yang ada (fungsi lama hilang)	Non fungsi
	Gapoktan Winua Sangkula hadir membawa fungsi baru dari usaha tani padi sawah menjadi usaha simpan pinjam petani oleh adanya dana PUAP	Mutasi Fungsi
	Norma dan aturan dalam Kelompok Tani berupa ADRT tidak berjalan baik: -Proses pergantian pengurus tidak melalui pemilihan dalam rapat kelompok tetapi langsung penetapan -Pengurus lama yang berhenti tidak melakukan pertanggungjawaban kepada kelompok -Ketua Kelompok mengambil alih fungsi Sekretaris dalam urusan persuratan/laporan dan fungsi Bendahara yaitu mengatur dan memegang uang Kelompok	Disfungsi
	Penentuan waktu tanam, waktu panen, jenis benih/bibit yang semula keputusan kelompok menjadi keputusan perorangan petani	Disfungsi
	Sistem tanam dengan bibit menjadi tanam benih langsung	Disfungsi
	Iuran kelompok tidak ada lagi	Non fungsi
	Gotong royong pembersihan saluran irigasi semakin intens	Manifes
	Gotong royong dan resiprositas dalam penanaman dan panen berkurang	Disfungsi
	Tidak ada lagi peminjaman modal dari Kelompok tani	Non fungsi
	Dampak Sosial: Budaya	Perubahan pembayaran dari bagi hasil menjadi uang tunai
Dampak Ekonomi: Tumbuhnya investasi	Perubahan dari sistem tebasan menjadi sistem jahit dengan mobil panen	Disfungsi

B. Kelembagaan Pengairan

a. Kelompok Tani Pemakai Air, Upacara Penjemputan Air dan Dampak Tambang Emas

Kelembagaan Pengairan di wilayah penelitian mulai dibentuk pada tahun 1992 yaitu P3A Langkowala yang berada di Kecamatan Lantari Jaya. P3A ini mempunyai 9 pintu air (BL)¹. Dalam perkembangannya P3A mengalami banyak masalah internal sekalipun pernah mengalami masa jaya tahun 1992-1998. Tahun 2005 P3A Kowala berubah menjadi Gabungan P3A dan 9 BLnya dipecah menjadi 3 P3A yang menjadi anggotanya. Tahun 2008 Ketua Gabungan P3A yaitu Dewa Made Merta mengundurkan diri dan menyerahkan pengaturan air kepada Kelompok Tani. Sejak itu Gabungan P3A bubar dan ketiga P3A anggotanya bergabung dengan Kelompok-Kelompok Tani untuk mengatur air. Selanjutnya dikenal sebagai KTPA (Kelompok Tani Pemakai Air).

KTPA telah ada sejak tahun 1997 ketika irigasi desa mulai dibangun. Awalnya di Kecamatan Rarowatu Utara yaitu irigasi Mertasari. Berikut ini adalah KTPA yang ada pada irigasi semi teknis dan irigasi Desa yang dapat diidentifikasi di daerah penelitian.

¹ BL adalah singkatan dari Bendungan Langkowala, mulai dari BL1 hingga BL9. Setiap BL diatur oleh seorang ulu-ulu.

Tabel 36. Kelompok Tani Pemakai Air di Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara

No	Pengairan	Kelompok Tani Pemakai Air (KT yang bergabung)	Desa yang Diairi
1	Bendungan Langkowala	Tunas Maju, Setia Kawan, Mekar Sari, Sinar Harapan	Lombakasih
		Karya Bakti, Tunas Baru, Kejar Usaha, Setia Tani, Briuk Padamara	Langkowala
		Sari Bumi, Tunas Harapan, Pupuk Sari, Sumber Rejeki, Karya Subur, Sukamaju	Kalaero
2	Embung La Usu	Matirobulu, Samaturu1, Samaturu2, Saromase	Tinabite
3	Irigasi Lababo	Bonto Marannu, Bonto Harapan	Tinabit e
4	Irigasi Sumbertani	Sinar Matahari, Maju Bahagia, Mekar Sari, Sama Enre, Darma Bakti II	Rarongkeu
		Bangun Tani, Tenri Sanna, tiga Belas, Merta Sari, Karya Sakti, Darma Bakti, Sumber Makmur, Lantari Indah, Mekar Sari, Tunas Baru, Mandiri	Lantari
		Wani ate	Pasare Apua
5	Irigasi Lantari	Mertasari, Darma Bakti, Mekar Sari, Karya Sakti, Bangun Tani	Lantari
		Puspasari, Sumbertani, Sidomukti, Tri Buana	Anugerah
6	Irigasi Lebo	Tunas Baru	Langkowala
7	Irigasi Wije	Banyu Mas Murti, Banyu Mas Indah	Lantari
8	Irigasi Puuroda	Bangun Tani, Tiga belas, Darma Bakti	Lantari
9	Irigasi Sidomulyo	Sidomulyo, Puspa Sari, Sumber Tani	Anugerah
10	Irigasi Mertasari	Karya Baru, Dwi Karya Murni, Jaya Makmur, Karya Sakti	Marga Jaya
11	Irigasi La Sangi	Tetetari, Tumbutonia, Sumber Sejati, Koneantau	Wumbubangka
12	Embung La Aho	Sumber Tani, Sumber Alam Sultra, Karya Usaha Makmur, Sido Makmur, Sumber Rejo, Sumber Rejeki,	Aneka Marga
13	Irigasi Larobu 1	Larobu 1, Larobu 2, Rendewita	Tembe
14	Irigasi Larobu 2	Pada Idi Pada Elo, Jati Raya, Sipatua Sipatokong	Hukaea
15	Irigasi Jembatan Merah	Mappadeceng, Solata	Marga Jaya

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian

Selain KTPA, terdapat kelembagaan pengairan berupa institusi lokal yang hidup di daerah ini, disebut Upacara Penjemputan Air. Pada awalnya upacara penjemputan air (kadang disebut juga Upacara Pelepasan Air) dilakukan oleh suku Bali. Upacara ini merupakan sebuah prosesi keagamaan sebagai permohonan kepada Yang Maha Kuasa untuk diberkati selama melakukan penanaman padi agar berhasil dan dijauhkan dari kegagalan karena kekurangan air (kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta bencana lainnya. Dari upacara penjemputan air yang diselenggarakan umat Hindu lahir upacara penjemputan air oleh gabungan semua suku (Bali, Jawa, Bugis, Lombok dan Moronene). Karena merupakan kegiatan bersama maka upacara penjemputan air ini dilakukan dengan berdoa menurut agama masing-masing agar diberi kemudahan dan hasil yang berlimpah selama satu musim tanam.

Dampak tambang emas telah mempengaruhi kelembagaan pengairan yang ada. Dampak tambang tersebut adalah dampak atas lingkungan fisik yaitu dampak terhadap air, banjir lumpur, perubahan bentang alam/ bentuk fisik tanah dan puso/kekeringan. Selain itu dampak sosial yaitu berkurangnya kepercayaan terhadap Pemerintah/ DPR/ Perusahaan.

b. Deskripsi Kelembagaan Pengairan

Kelompok Tani Pemakai Air didirikan pada pada ketiga irigasi semi teknis (Bendungan Langkowala, Embung La Usu dan Embung La Aho) serta pada beberapa irigasi desa. KTPA dari irigasi desa dibentuk pada irigasi yang mengairi lebih dari dua hamparan (dua Kelompok Tani) untuk menghindari terjadinya perebutan air. Struktur organisasi Kelompok Tani Pemakai Air cukup sederhana, yaitu Ketua sekaligus pengatur air dan anggota. Ketua yang dipilih adalah orang yang dipercaya sebagai ulu-ulu oleh semua anggota kelompok tani yang bergabung dalam KTPA.

Sumber daya utama yang dikelola dalam KTPA adalah air. Air dapat berasal dari sungai juga dapat berasal dari hujan. Air tersebut kemudian ditampung pada irigasi dan dialirkan/dibagikan ke lahan-lahan petani dengan aturan yang disepakati bersama. Sebelum masa tanam biasanya diadakan rapat antara pengurus Kelompok Tani yang tergabung dalam KTPA. Pembagian air disesuaikan dengan kondisi air. Beberapa KTPA yang anggotanya adalah suku Bali menggunakan aturan Subak. Aturan Subak membagi air dengan luas lubang air yang berbeda. Untuk lahan dekat irigasi luasnya 10 cm sedangkan lahan yang jauh dari irigasi luasnya 20 cm. Pada KTPA yang tidak menggunakan sistem Subak, pengaturan air dilakukan dengan mengatur waktu pengisian air (Lama air mengalir) untuk setiap lahan. Biasanya jika air tersedia cukup maka dapat digunakan tanpa batas, tetapi

jika debit air kurang maka dibatasi sesuai kesepakatan. Berikut wawancara dengan Nyoman Damiyo (58), petani perintis Subak Mertasari dari desa Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara.

“Pengaturan airnya kita gunakan pakai sistem subak di Bali tapi tidak sama persis. Air saya atur yang di depan, dekat sumber air dapat 10 cm lubangnya, yang di belakang jauh dari sumber air dapat 20 cm lubangnya.”(Wawancara pada tanggal 15 Desember 2013)

Dalam KTPA terdapat iuran yang dilakukan untuk membiayai pengaturan air. Besarnya iuran tergantung keperluan. Biasanya iuran digunakan untuk memperbaiki saluran yang rusak, membersihkan saluran dan membayar jasa ulu-ulu yang bekerja membuka tutup pintu air.

Di lokasi penelitian terdapat Upacara penjemputan air yang terdiri dari dua kelompok. Pertama, upacara yang dilakukan khusus oleh umat Hindu dan kedua adalah upacara yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Biasanya petani melakukan pengumpulan uang secara sukarela untuk menyembelih hewan (ayam, kambing bahkan sapi) dan dimakan bersama-sama ketika acara kumpul dan berdoa bersama selesai dilakukan di bendungan. Suku Bali melaksanakan upacara penjemputan air dua kali yaitu di kelompoknya (umat Hindu) dan digabungkan suku-suku.

Pada umat Hindu, upacara penjemputan air dilaksanakan setiap tahun pada bulan mati dengan kepercayaan ada terang setelah gelap. Berkah Sang

Hyang Widhi datang bersama bulan terang. Sehingga penanaman sampai panen akan lancar. Upacara dilakukan dengan persembahan ayam/itik dengan 5 warna bulu yang berbeda. Makna persembahan adalah ditujukan kepada Tuhan yang menjelma menjadi 5 Bhuta (penguasa). Kelima Bhuta di bendungan akan merestui kegiatan petani (ada harmonisasi manusia dengan sesamanya, dengan alam dan dengan penciptanya). Upacara harus dipimpin oleh Kepala Pura yang telah disucikan dan diikuti oleh semua umat Hindu agar mendapat berkah dan keselamatan. Pada Upacara penjemputan air gabungan, upacara dilaksanakan setiap tahun ketika akan melakukan penanaman. Upacara dipimpin oleh tokoh masyarakat yang melakukan doa bersama di bendungan. Doa ini bertujuan agar air yang dijemput dapat mencukupi kebutuhan tanaman sehingga hasil produksi akan melimpah. Setelah berdoa, upacara dilanjutkan dengan makan bersama hewan yang disembelih di bendungan (ayam, kambing ataupun sapi). Ini bertujuan menambah keakraban dan rasa persatuan diantara semua warga yang berbeda suku dan agama.

c. Fungsi Sebelum Ada Dampak Tambang Emas

Sebelum ada dampak tambang emas, fungsi utama Kelembagaan pengairan KTPA adalah fungsi distribusi air. Pengaturan air oleh KTPA mampu mendistribusikan air dengan baik ke lahan-lahan anggota . Anggota

KTPA mentaati kesepakatan pembagian air dan melakukan iuran sebesar Rp2 ribu – Rp 10 ribu rupiah untuk kegiatan kelompok. Besarnya iuran tergantung kesepakatan atau kebutuhan kelompok bulan itu. Umumnya digunakan untuk pemeliharaan saluran dan biaya pengaturan air. Jika ada masalah yang timbul maka petani akan melapor ke Ketua Kelompok Taninya dan diselesaikan secara baik-baik. Selain mendistribusikan air, KTPA juga berfungsi menjaga irigasi, pintu air dan saluran air terawat dengan baik. Karena itu, setiap musim tanam tiba, KTPA akan melakukan gotong royong pembersihan saluran.

Upacara Penjemputan air memiliki tiga fungsi yaitu keselarasan hubungan manusia dengan Tuhan, keselarasan hubungan manusia dengan sesamanya dan keselarasan hubungan manusia dengan alam. Upacara penjemputan air memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi petani dalam melaksanakan penanaman padi sebab petani yakin akan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Upacara penjemputan air juga berfungsi dalam menjaga keakraban dan hubungan baik antar sesama manusia, dan juga menjaga manusia dalam memanfaatkan alam secara bijaksana yaitu tidak mengambil berlebihan dari alam dan tidak melakukan pengrusakan terhadap alam.

d. Fungsi Sesudah Ada Dampak Tambang Emas

Sesudah ada dampak tambang emas, fungsi distribusi air terganggu oleh rendahnya debit air dan tercemarnya air yang tersedia di irigasi. Timbul rasa curiga dan ketidakpercayaan petani anggota KTPA dengan pengurus air akan pembagian air yang adil. Akibatnya, petani yang memerlukan air akan ke bendungan/irigasi dan mengatur sendiri air yang masuk ke lahannya. Seringkali terjadi perebutan air diantara anggota KTPA. Rasa ketidakpercayaan terhadap ulu-ulu membuat petani tidak lagi membayar iuran bulanan, sehingga kegiatan KTPA terganggu. Pintu-pintu air dan saluran yang rusak menjadi terbengkalai dan tidak ada upaya perbaikan. Contohnya yang terjadi di Kecamatan Rarowatu Utara pada Irigasi La Aho. Kurang berfungsinya irigasi membuat petani enggan memperbaiki pintu air dan saluran yang rusak.

Adanya lumpur menyebabkan air menjadi keruh, ini menjadi alasan petani tidak akan menggunakan air yang terlalu keruh untuk mengolah sawahnya sebab akan menyebabkan pendangkalan sawah. Tanah menjadi alot dan sukar diolah yang menyebabkan biaya pengolahan semakin mahal. Berikut penuturan H.Muliadi (42), petani dari Desa Lombakasih.

“Di sini air irigasi sangat kurang. Jika ada air dan airnya terlalu berlumpur, kita tidak masukkan air irigasi ke sawah sebab sawah akan penuh lumpur, tanahnya menjadi susah diolah. Perlu pakai dompeng yang lama, perlu pupuk yang banyak. Itu berarti biayanya mahal. Saya coba pakai sumur bor. Tapi ternyata ongkos untuk menyalakan sumur bor lebih besar dari hasilnya. Kalau saya ambil air dari bendungan, maka miring sawah karena lumpur.” (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2013)

Keadaan air yang kurang dan tercemar telah terjadi sejak tahun 2009. Janji pemerintah untuk memperbaiki keadaan sampai kini belum terealisasi. Janji pembuatan bendungan baru dari sumber air yang masih aman belum terwujud. Bahkan pengerukan lumpur yang memenuhi irigasi hanya sekali dilakukan pemerintah, yaitu setelah kunjungan anggota DPRD tahun 2012. Itupun hanya mengeruk lumpur yang ada di saluran sekunder, sedangkan di bendungan tidak disentuh. Akibatnya dua minggu setelah pengerukan, saluran irigasi kembali berlumpur. Tahun 2013, petani secara swadaya mengumpulkan uang sebesar Rp 50.000 per keluarga untuk melakukan pembersihan saluran dengan menyewa alat berat. Keadaan ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap kepedulian pemerintah dan DPRD pada pertanian dan nasib petani menjadi hilang. (Lebih jelas pada Box 11 Bab V).

Sesudah ada dampak tambang emas, upacara penjemputan air pada umat Hindu tetap dilaksanakan karena upacara merupakan ibadah yang wajib dilakukan. Jika ritual tidak dilaksanakan, umat Hindu percaya akan terjadi bencana pada umat. Sementara itu, upacara penjemputan air gabungan

tidak lagi dilaksanakan oleh petani sejak tahun 2009. Ini disebabkan air yang akan dijemput sudah tidak ada (tidak cukup). Akibatnya hubungan antar suku dan agama berbeda yang setiap tahun dipersatukan oleh Upacara penjemputan air menjadi renggang.

e. Perubahan Fungsi

Dari penjelasan di atas dapat diidentifikasi perubahan fungsi yang terjadi pada Kelompok Tani Pemakai Air akibat dampak tambang emas di Kabupaten Bombana. Hilangnya fungsi pengaturan pembagian air oleh pengurus dan beralih ke petani-petani yang membutuhkan air (disfungsi). Hilangnya kepercayaan dalam Kelompok Tani Pemakai Air sehingga masalah yang ada tidak mampu diselesaikan oleh kelompok. Hilangnya iuran bulanan yang dipungut Kelompok pada anggota KTPA sehingga pintu air dan saluran yang rusak tidak dapat diperbaiki. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, DPRD dan Perusahaan juga berkurang karena belum ada upaya pemerintah memperbaiki sumber air irigasi untuk berfungsi kembali dengan baik.

Hilangnya upacara penjemputan air yang dilakukan oleh gabungan petani dari berbagai suku di daerah penelitian menyebabkan fungsi keselarasan pada hubungan masyarakat yang semula rekat dipersatukan upacara penjemputan air menjadi renggang.

Bentuk dan Proses Disfungsi Kelembagaan Pengairan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37. Bentuk dan Proses Disfungsi Kelembagaan Pengairan

Dampak Tambang Emas	Perubahan Fungsi Kelembagaan	Hasil Analisis Disfungsi
Dampak Fisik Tambang: Dampak terhadap air, dampak Lumpur, puso/kekeringan/ perubahan bentang alam	Hilangnya kepercayaan terhadap ulu-ulu yang mengatur air	Disfungsi
	Fungsi pengaturan air oleh ulu-ulu hilang diganti oleh petani yang memerlukan air (air diatur masing-masing petani)	Disfungsi
	Iuran bulanan KTPA tidak ada lagi	Non Fungsi
	Tidak ada pemeliharaan pada beberapa irigasi sedangkan pada irigasi tetentu (Langkowala) biaya pemeliharaan meningkat untuk pengerukan Saluran	Disfungsi
Dampak Sosial: Kepercayaan	Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, DPRD dan perusahaan	Disfungsi

C. Kelembagaan Kredit

a. Tengkulak, Koperasi dan Dampak Tambang Emas

Dalam memenuhi kebutuhan mendesaknya, masyarakat di wilayah penelitian lebih mempercayai tengkulak dibanding lembaga-lembaga perbankan resmi. Selain karena telah terbiasa dengan tengkulak yang dianggapnya 'orang yang berjasa' padanya, masyarakat/petani memiliki ikatan dengan para tengkulak yang telah dikenalnya sejak lama. Apalagi lembaga Perbankan adalah sesuatu yang baru dan dianggap 'repot dan

menyulitkan' dengan agunannya bagi petani yang terbiasa hidup dengan cara-cara sederhana.

Di Desa Kalaero Kecamatan Lantari Jaya terdapat Koperasi Dharma Citra Sejahtera yang berdiri sejak tahun 2007. Koperasi Dharma Citra Sejahtera didirikan oleh Made Piarsa, seorang sarjana ekonomi asal Desa Kalaero yang kembali ke kampungnya untuk bertani. Awal dibentuknya Koperasi adalah untuk memudahkan petani memperoleh pupuk bersubsidi yang ketika itu sulit didapatkan. Dalam perjalanannya terjadi perubahan jenis kredit dari pupuk menjadi uang tunai.

Adanya dampak-dampak tambang emas mempengaruhi kelembagaan kredit Tengkulak dan Koperasi. Dampak terhadap lingkungan fisik mempengaruhi tanaman petani sehingga hasil produksi menurun. Akibatnya, Tengkulak yang selama ini memberikan pinjaman dengan sistem ijon, tidak lagi bersedia menerima tanaman padi sebagai jaminan pembayaran kredit ketika panen, Jaminan berubah menjadi barang berharga. Hal yang sama terjadi pada Koperasi. Petani-petani yang melakukan pinjaman di Koperasi Dharma Citra Sejahtera juga mengalami kegagalan panen sehingga tidak mampu membayar pinjamannya. Meski demikian, kepercayaan Koperasi dan mental petani untuk bertahan membuat pinjaman tersebut dapat dilunasi. Koperasi Dharma Citra Sejahtera dapat bertahan ditengah dampak-dampak tambang.

b. Deskripsi Tengkulak dan Koperasi

Tengkulak adalah lembaga kredit non formal yang telah berakar dalam kehidupan petani dan sedia memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak dari petani. Tengkulak di daerah penelitian adalah orang kaya Desa yang secara terang-terangan ataupun diam-diam 'menjalankan' uang untuk memperoleh keuntungan. Sebelum ada tambang emas, sistem ijon adalah yang paling banyak diberlakukan oleh Tengkulak. Masyarakat meminjam uang dan membayarnya kelak dengan hasil panennya berikut bunga dari pinjaman tersebut. Pembayaran menggunakan gabah yang dihasilkan. Sekalipun bunga yang dikenakan tengkulak seringkali tinggi. Petani tetap bersedia meminjam kepada mereka sebab percaya bahwa para tengkulak ini adalah penyelamat ketika petani terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Hubungan antara Tengkulak dan petani bersifat patron klien.

Pinjaman kepada Tengkulak dinilai berdasarkan harga gabah/beras. Jika pinjam 1 karung gabah/beras biasanya akan mengembalikan 2 karung gabah/beras setelah panen. Tetapi jika meminjam dalam bentuk uang maka akan dikembalikan berikut bunga pinjaman yang besarnya tergantung kesepakatan. Tata hubungan semacam ini oleh Scott (1976) dipandang sebagai bentuk eksploitasi yang adil sekalipun bagi pandangan umum dinilai tidak wajar. Pengembalian dengan bunga yang tinggi (pinjam 1 karung gabah harus kembali 2 karung gabah) menurut ukuran moral petani yang

terbantu dikala terdesak bukan bentuk eksploitasi tetapi adalah wajar. Secara moral petani (klien) merasa harus membalas kebaikan tengkulak (patron) dengan jumlah dua kali lipat sebagai bentuk pertukaran yang sepadan dan rasa terima kasih atas pertolongan yang diterimanya.

Koperasi Dharma Citra Sejahtera adalah Koperasi yang berbadan hukum dan berdiri tahun 2007. Pada awal terbentuknya beranggotakan 12 petani yang semuanya dari suku Bali. Selanjutnya istri dari anggota bergabung sehingga anggota Koperasi menjadi 24 orang. Manajemen Koperasi ini berbeda dari biasanya sebab beranggotakan petani sehingga bersifat guyub (12 orang petani dalam koperasi tergabung sebagai kelompok gotong royong laki-laki dan 12 orang istri tani tergabung kedalam kelompok pemberdayaan perempuan). Selain itu pertemuan anggota rutin dilaksanakan setiap minggu kliwon. Rapat Koperasi tahunan dilakukan untuk mempertanggungjawabkan modal yang terpakai. Modal keuangan Koperasi berasal dari simpanan wajib anggota sebesar Rp 1.000 setiap bulan, Rp 50.000 setiap habis panen, simpanan sukarela dan pinjaman dari luar Koperasi. Aturan yang berlaku adalah ADRT Koperasi. Keputusan tertinggi ada pada hasil rapat anggota. Pada awal terbentuknya tahun 2007 Koperasi mendapat pinjaman awal dari BPMD sebesar Rp 10 juta. Dengan wadah Koperasi dana tersebut digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi sebanyak

2,5 ton. Koperasi selanjutnya meminjamkan pupuk bersubsidi kepada anggotanya.

c. Fungsi Sebelum Ada Dampak Tambang Emas

Sebelum ada dampak tambang emas, Tengkulak memberikan kredit kepada anggotanya dengan jaminan hasil panen. Ada kepercayaan dan ikatan saling membutuhkan diantara keduanya. Apalagi Tengkulak yang menjadi patron ini adalah teman sekelompok atau petani pemilik lahan yang sawahnya digarap oleh klien. Jika Kelompok tani menjadi tempat petani meminjam modal usahatani maka Tengkulak biasanya menjadi tempat petani meminjam untuk kebutuhan-kebutuhan mendesaknya. Besarnya bunga pinjaman tergantung kepada siapa dan untuk keperluan apa. Jika yang meminjam uang adalah orang yang mempunyai hubungan khusus dengan Tengkulak (saudara, tetangga, penggarap lahannya) biasanya akan menerima bunga yang lebih ringan 2-3%. Akan tetapi jika yang meminjam adalah orang 'lain' maka akan dikenakan bunga 5-10% per bulan. Khusus untuk kebutuhan mendesak karena musibah seperti untuk berobat atau kematian biasanya dikenakan bunga paling banyak 5%.

Koperasi Dharma Citra Sejahtera bergerak dalam pemberian kredit berupa pupuk bersubsidi kepada anggotanya. Tahun 2007-2008, kredit

pupuk ini berjalan lancar tanpa kendala. Setiap tutup buku, semua petani melunasi pinjamannya.

Fungsi Sesudah Ada Dampak Tambang Emas

Sesudah ada dampak tambang emas, terjadi perubahan pendapatan petani dimana produksi padi yang turun menyebabkan rendahnya penerimaan petani dari usahatani padi sawah. Akibatnya, petani kecil seringkali terdesak dan memerlukan uang segera untuk kebutuhan hidupnya ataupun modal untuk melakukan usahatani padi sawah ketika musim tanam tiba. Hal ini meningkatkan jumlah petani kecil yang datang ke Tengkulak untuk meminjam beras ataupun uang. Tengkulak memberikan pinjaman dalam bentuk beras atau uang tunai. Peminjaman dalam bentuk beras, pengembaliannya juga dalam beras setelah panen. Akan tetapi peminjaman dalam bentuk uang tunai, tidak lagi diberikan oleh Tengkulak tanpa jaminan barang berharga (sertifikat tanah, emas, motor, atau barang elektronik). Tengkulak tidak lagi menerima jaminan berupa tanaman padi oleh besarnya resiko kegagalan panen akibat dampak-dampak tambang. Tindakan tengkulak ini menurut Popkin adalah bentuk tindakan rasional dimana tengkulak adalah manusia yang memiliki perhitungan untung rugi dan bukan hanya diikat oleh nilai-nilai moral. Hadirnya tambang membuat tengkulak bereaksi terhadap factor-faktor yang mengancam keamanan ekonominya. Dalam hal ini tanaman tidak lagi menjadi jaminan yang dapat dipercaya

karena besarnya resiko kegagalan panen akibat dampak tambang. Untuk itu, tindakan tengkulak untuk menerima jaminan berupa barang berharga adalah tindakan yang rasional. Hal ini menyebabkan hubungan antara Tengkulak dan peminjam berubah, dari erat menjadi renggang. Rasa saling tidak percaya timbul diantara keduanya yang sebelum ada tambang emas hidup saling membutuhkan. Tengkulak membutuhkan petani peminjam dalam bentuk tenaga dan pengabdian sedangkan petani peminjam membutuhkan Tengkulak sebagai jaminan kehidupan keluarganya.

Setelah ada dampak tambang, terjadi guncangan pada Koperasi Dharma Citra Sejahtera. Tahun 2009, karena tidak ada air maka anggota Koperasi mengalami kegagalan panen sehingga tidak mampu mengembalikan kredit pupuk yang dipinjamnya. Kredit pupuk yang sedianya untuk membantu justru membawa kesulitan bagi petani. Koperasi memaklumi keadaan ini sebagai musibah karena kondisi alam dan memberikan kepercayaan kepada anggotanya untuk membayar setelah mampu. Kepercayaan tersebut tidak disia-siakan anggota Koperasi. Tahun 2010 petani berhasil panen dan melunasi semua sisa kreditnya.

Pada tahun 2011 Koperasi mampu membeli tanah dan membangun kantor sendiri serta tempat sembahyang yang menghabiskan dana Rp 15.000.000,-. Selain dana dari Koperasi juga ada sumbangan sukarela dari anggota. Pembangunan ini dilakukan secara gotong royong karena anggota Koperasi mempunyai ketrampilan membangun rumah. Tahun 2011, Koperasi

meminjamkan pupuk lagi dan petani mengalami kegagalan oleh dampak tambang yaitu puso. Kembali petani kesulitan mengembalikan pinjamannya. Tetapi ketika bantuan puso diterima, maka petani melunasi pinjaman tersebut.

Setelah kejadian itu, Koperasi Dharma Citra Sejahtera mengalami mutasi fungsi dimana bentuknya berubah menjadi guyub dan jenis usahanya berubah dari penyedia sarana produksi menjadi usaha simpan pinjam. Koperasi memberikan pinjaman uang dengan bunga pinjaman 3% sebulan yang digunakan anggota sesuai kebutuhannya. (Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi fungsi pada Koperasi dapat dilihat pada bagian akhir Bab VI).

d. Perubahan Fungsi

Perubahan fungsi yang terjadi pada Tengkulak dan Koperasi setelah ada dampak pertambangan emas. Pada Tengkulak, terjadi perubahan sistem ijon menjadi sistem bunga pinjaman dengan jaminan barang berharga (disfungsi) dan terjadi perubahan pada hubungan antara pemilik modal dengan petani dari erat menjadi renggang. Sedangkan pada Koperasi, terjadi perubahan jenis kredit dari pupuk sebelum ada tambang menjadi uang tunai setelah ada tambang.

Bentuk dan Proses Disfungsi Kelembagaan Kredit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38. Bentuk dan Proses Disfungsi Kelembagaan Kredit

Dampak Tambang Emas	Perubahan Fungsi Kelembagaan	Hasil Analisis Disfungsi
Dampak Fisik Tambang: Dampak terhadap air, dampak Lumpur, puso/kekeringan/ perubahan bentang alam	Tengkulak tidak bersedia menerima tanaman yang ditanam sebagai jaminan (mengikis sistem ijon) dan menerima jaminan barang berharga untuk pinjaman uang	Disfungsi
	Menggeser tata hubungan patron klien antara tengkulak dengan petani peminjam yang dilandasi etika moral (Scott) sekalipun bersifat eksploitatif menjadi hubungan untung rugi sebagai tindakan rasional Tengkulak (Popkin)	Disfungsi
	Merenggangkan hubungan Tengkulak dan petani peminjam	Disfungsi
	Menjadi bersifat Guyub dan merubah jenis usaha yang dikelola dari “bantuan saprodi” menjadi Koperasi Simpan pinjam	Mutasi Fungsi
	Menguatkan hubungan resiprositas antara anggota tidak hanya dalam kegiatan Koperasi tapi juga dalam kehidupan sehari-hari dengan terbentuknya kelompok Gotong royong laki-laki dan kelompok pemberdayaan perempuan dalam Koperasi	Fungsi Laten
Dampak Sosial: Kepercayaan	Kepercayaan dalam Lingkungan Internal Koperasi DCS mendorong majunya Koperasi ditandai dengan pembangunan Kantor dan rumah ibadah (pura) sendiri	Fungsi Laten
Dampak Ekonomi: Perubahan Pendapatan	Perubahan pendapatan petani kecil yang turun karenarendahnya produksi menyebabkan banyak petani yang meminjam beras/uang pada tengkulak	Fungsi Manifes

D. Lumbung Pangan

a. Lumbung Pangan dan Dampak Tambang Emas

Lumbung pangan adalah lembaga pertanian baru yang lahir sebagai respon dari dampak-dampak pertambangan emas di Kabupaten Bombana. Sebelum ada tambang emas, petani tidak memerlukan adanya lumbung pangan disebabkan daerah ini sudah merupakan lumbung beras bagi

propinsi Sulawesi Tenggara oleh melimpahnya hasil tanaman padi setiap tahun. Akan tetapi keadaan berubah sejak dilakukannya kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Bombana.

Dampak fisik tambang yaitu dampak terhadap air berupa berkurangnya debit air dan pencemaran air telah menyebabkan turunnya produksi tanaman padi secara tajam. Petani yang dulunya menanam dua kali setahun menjadi sekali saja. Keadaan semakin parah oleh banjir lumpur ketika musim hujan dan puso/kekeringan ketika musim kemarau. Akibatnya daerah ini rawan terhadap persediaan pangan beras. Terbukti dari beredarnya beras-beras dari Sulawesi Selatan di pasar-pasar lokal. Timbul kecemasan petani akan kecukupan pangan di masa depan. Petani mencemaskan produksi padi dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya oleh berkurangnya air sebagai kebutuhan pokok dalam melakukan usahatani padi sawah. Sumber pendapatan petani juga terancam dengan semakin memburuknya kondisi lingkungan. Situasi ini mendorong lahirnya Lumbung Pangan sebagai lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ketika musim paceklik tiba.

b. Deskripsi Lumbung Pangan

Di daerah penelitian berdiri dua Lumbung Pangan sebagai respon terhadap berkurangnya produksi padi akibat tambang. Lumbung Pangan di

Kecamatan Rarowatu Utara berdiri tahun 2009 di desa Aneka Marga bernama Lumbung Pangan Mitra Karya Muda. Lahir dari usulan Kelompok Tani Mitra Karya Muda. Ketua dari Lumbung Pangan ini adalah Sutranoyo, sekretaris Ngadiman dan Bendaharanya adalah Joko. Tahun 2011 Lumbung Pangan Mitra Karya Muda mengajukan permohonan dana ke Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Bombana yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa untuk membangun gudang Lumbung Pangan di Kecamatan Rarowatu Utara. Tahun 2012 gudang tersebut dibangun setelah usulan tersebut diterima oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Bombana. Akan tetapi setelah Lumbung Pangan terbentuk dan gudang selesai, Lumbung Pangan ini tidak jalan sebagaimana tujuan pembentukannya. Menurut Kusaeri, PPL di Kecamatan Rarowatu Utara, hal itu disebabkan Lumbung Pangan ini tidak mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa sehingga tidak dapat berkembang. Meski mempunyai 20 anggota, petani tersebut tidak berani menyimpan gabah/beras di Lumbung Pangan karena khawatir dengan resikonya. Petani kuatir Lumbung Pangan tidak dapat mengelola simpanan gabah petani dan habis begitu saja. Apalagi Lumbung Pangan ini sudah tidak punya dana lagi untuk membeli beras dari anggota ataupun dari petani di sekitar Desa. Akibatnya, Lumbung Pangan di Kecamatan Rarowatu Utara hingga kini belum berfungsi. Hanya struktur dan gudang lumbung saja yang ada.

Tahun 2010 berdiri juga Lumbung Pangan Lomba Rejeki di Desa Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya. Ketuanya adalah Ikep, petani yang dipercaya oleh Kepala Desa dan warga untuk mengelolanya. Ia dipilih karena pengalamannya sebagai petani sekaligus tengkulak yang selalu meminjamkan beras kepada masyarakat. Struktur kelembagaan Lumbung pangan adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota. Pada akhir tahun 2012, Lumbung Pangan Lomba Rejeki telah beranggotakan 20 petani.

Adanya bantuan sosial dari Dinas Sosial sebesar Rp 20 juta pada tahun 2010 digunakan untuk membeli cadangan pangan (gabah) dari petani-petani di sekitar Desa Lombakasih. Karena belum mempunyai gudang, maka Lumbung Pangan meminjam sebuah ruangan bekas Sekolah untuk dijadikan gudang penyimpanan. Gabah tersebut kemudian disimpan di gudang tersebut. Jika ada yang membutuhkan barulah dibawa ke pabrik untuk digiling dan dijual. Lumbung pangan belum mempunyai penggilingan sendiri. Selisih harga gabah yang dibeli dan dijual merupakan jasa (keuntungan) bagi lumbung pangan. Besarnya selisih harga tersebut lebih rendah dari yang petani dapatkan jika membeli beras di luar Lumbung Pangan pada masa-masa paceklik. Pada akhir tahun 2012, Lumbung Pangan Lomba Rejeki telah mampu mempunyai gudang sendiri dari keuntungan yang diperolehnya.

Petani yang meminjam satu karung beras di Lumbung Pangan Lomba Rejeki akan mengembalikan sebesar 1,5 karung ketika panen dengan

pertimbangan harga beras ketika paceklik jauh lebih tinggi daripada musim panen. Jika pinjam beras pada tengkulak maka petani harus mengembalikan dua kali lipat setelah panen. Lumbung pangan juga memberi pinjaman benih sebesar 30 kg/ha bagi petani yang akan menanam tetapi tidak mempunyai modal.

Keberhasilan Lumbung Pangan Lomba Rejeki dibanding Mitra Karya Muda disebabkan oleh dua hal yaitu dukungan pemerintah dan pengelolaan modal. Pertama, Lumbung pangan Lomba Rejeki mendapat dukungan penuh dari Kepala Desa Lombakasih. Ini terlihat dari upaya Kepala Desa memberikan tempat milik pemerintah Desa bagi Lumbung Pangan untuk dijadikan sebagai gudang. Sebelumnya memberikan ruangan sebagai gudang sementara bagi Lumbung Pangan Lomba Rejeki sebelum mempunyai gudang sendiri. Kepala Desa Lombakasih juga mendorong petani-petani anggota dan bukan anggota yang berada di Desa Lombakasih untuk menjual dan membeli gabah di Lumbung Pangan Lomba Rejeki, bahkan memfasilitasi petani untuk memperoleh benih untuk modal usahatani di Lumbung Pangan bukan ke Tengkulak. Sementara Lumbung Pangan Mitra Karya Muda tidak didukung seperti itu oleh Kepala Desa Aneka Marga. Kepala Desa hanya mendukung dalam bentuk rekomendasi bagi Mitra Karya Muda untuk mendirikan Lumbung Pangan. Setelah terbentuk, segala urusan diserahkan kepada ketuanya. Kedua, Ikep sebagai Ketua Lumbung Pangan

Lomba Rejeki, memanfaatkan dana yang ada untuk memumpuk modal dengan membeli gabah/beras dari petani sehingga terjadi perputaran uang. Sementara Sutranoyo menghabiskan dana yang ada untuk membangun gudang sehingga tidak tersisa lagi uang untuk membeli gabah petani. Apalagi petani anggota tidak yakin untuk menyimpan gabah/berasnya begitu saja di Lumbung pangan ini akan berhasil dikelola baik oleh pengurus.

Lumbung Pangan Sebelum Ada Tambang Emas

Sebelumnya, pernah dibentuk gudang penyimpanan beras kelompok yang menjadi lumbung pangan anggota kelompok tani pada tahun 1990. Namun gudang beras kelompok ini merugikan petani yang menyimpan berasnya karena pengurus meminjamkan beras tersebut kepada petani lainnya dan tidak kembali (macet). Sejak itu petani kehilangan kepercayaannya dan menyimpan sendiri hasil panen gabah di rumah masing-masing. Kadang-kadang sebagian di simpan (dititip) pada pabrik penggilingan kepercayaannya untuk digiling menjadi beras setiap kali petani membutuhkannya.

Pabrik penggilingan padi mempunyai organisasi sendiri yaitu Perpadi (Perhimpunan Pabrik Padi) yang dibentuk tahun 2001. Setiap pabrik padi biasanya mempunyai gudang penyimpanan gabah/beras. Perpadi sempat berkembang baik tahun 2001 hingga 2006. Namun sejak tahun 2007 tidak

pernah aktif lagi kecuali di Kabupaten. Ketuanya sejak didirikan hingga sekarang (tahun 2013) adalah Baso Pance.

c. Lumbung Pangan Sesudah Ada Tambang Emas

Di Kecamatan Lantari Jaya, Lumbung Pangan adalah lembaga pertanian yang memberikan rasa aman bagi petani-petani di sekitarnya, baik anggota maupun bukan karena Lumbung Pangan menjamin kebutuhan paling dasar dari petani yaitu makanan. Fungsi Lumbung Pangan adalah membantu anggotanya dengan membeli gabah anggota dengan harga layak dan menampung gabah tersebut di gudangnya. Karena anggotanya masih sedikit, maka Lumbung pangan juga menerima gabah dari petani sekitar Desa yang bukan anggota. Lumbung pangan selanjutnya membantu petani memperoleh beras dengan mudah dan murah ketika musim paceklik tiba, yaitu dengan menggilingkan dan menjual beras yang ditampungnya. Jika tidak mempunyai uang, petani dapat meminjam beras tersebut dan menggantinya dengan gabah ketika panen tiba.

Selain itu, Lumbung Pangan Lomba Rejeki juga berfungsi memberi bantuan benih bagi petani yang akan menanam padi tetapi tidak mempunyai modal. Karena itu hadirnya Lumbung Pangan mampu menekan berkembangnya sistem ijon yang banyak dilakukan Tengkulak yang sesungguhnya merugikan petani. Tengkulak biasanya meminjamkan beras

dengan aturan pinjam satu karung kembali dua karung. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ikep (55) Ketua Lumbung Pangan Lomba Rejeki yang berada di Desa Lombakash Kecamatan Lantari Jaya.

“Tahun 2011 saya kumpulkan 3 ton dari masyarakat lalu dijual. Saya beli gabahnya seharga 295rb/kwintal (295rb/100kg). Lalu kita bawa ke penggilingan kalau mau dijual kembali seharga 300.000 per sak (isi 50kg). Anggota Lumbung Pangan itu yang kita beli gabahnya, tapi kita juga tetap menerima gabah dari luar. Fungsi Lumbung pangan lomba rejeki membantu petani yang pada musim paceklik butuh beras juga membantu petani yang akan menanam. Waktu panen kami membeli gabah dari petani dan meminjamkan kepada mereka saat memerlukannya dengan harga lebih murah dari tengkulak. Kalau petani pinjam beras disini, pinjam 1 sak kembali 1,5 sak beras. Kalau di luar sana, pinjam 1 sak kembali 2 sak. Jadi lumbung pangan ini membantu petani juga. Dulu disini ada sistem ijon, tapi sekarang sudah kurang. Saya juga pernah lakukan. Kita beli 100 kg atau 1 kwintal nanti saat kembali menjadi 200 kg. Tapi saya sudah berhenti. Sejak ada tambang sistem ijon sudah kurang bahkan hilang.” (Wawancara pada tanggal 5 Desember 2012)

d. Perubahan Fungsi

Sebelum ada tambang emas, belum ada lumbung pangan di daerah penelitian. Setelah ada tambang emas, produksi padi menurun tajam menimbulkan kecemasan di masyarakat akan cukupnya ketersediaan pangan bagi masyarakat sepanjang tahun. Sehingga tahun 2010 lumbung pangan Lomba Rejeki didirikan ketika ada dana bantuan sebesar 20 juta rupiah dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan provinsi melalui Dinas Pertanian Bombana. Terjadi fungsi baru dari kelembagaan baru yang muncul dengan adanya dampak pertambangan emas.

Bentuk dan Proses Terben tuknya Kelembagaan Lumbung Pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39. Bentuk dan Proses Disfungsi Terbentuknya Kelembagaan Lumbung Pangan

Dampak Tambang Emas	Perubahan Fungsi Kelembagaan	Hasil Analisis fungsi
Dampak Fisik Tambang: Dampak terhadap air, dampak Lumpur, puso/kekeringan/	Mendorong lahirnya Lumbung pangan yang semula tidak ada	Disfungsi (munculnya fungsi baru yang semula tidak ada)
Dampak Sosial: Kecemasan	Menambah jumlah petani yang tergabung dalam Lumbung Pangan baik sebagai anggota maupun yang memperoleh bantuan gabah/beras/benih	Fungsi Manifes
Kepercayaan	Ketidakpercayaan pada pemerintah Desa di Aneka Marga membuat Lumbung Pangan di Kecamatan Rarowatu Utara tidak berjalan	Non Fungsi
	Kepercayaan pada Lumbung Pangan Lomba Rejeki di Kecamatan Lantari Jaya mengurangi praktek tengkulak yang memberatkan petani	Fungsi Laten

E. Kelompok Ternak

a. Kelompok Ternak dan Dampak Pertambangan Emas

Daerah penelitian memiliki potensi pengembangan ternak besar karena mempunyai padang penggembalaan yang luas. Data pada tabel 10 menunjukkan lebih dari 30% sapi berada di kedua Kecamatan ini, selebihnya tersebar pada 20 Kecamatan lainnya. Kelompok ternak mulai terbentuk tahun 1998 yaitu Kelompok Ternak Langkowala di Kecamatan Lantari Jaya

sedangkan di Kecamatan Rarowatu Utara adalah Karya Utama yang berdiri tahun 2002. Saat ini jumlah Kelompok Ternak di Kecamatan Lantari Jaya adalah 29 buah dan di Kecamatan Rarowatu Utara adalah 25 buah. (Lihat Lampiran 3)

Di tengah penurunan produksi tanaman padi oleh dampak tambang, muncul Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDS/K) dari kementerian Pertanian sesuai peraturan Menteri Pertanian No.19/permentan/OT.140/2/2010. Kabupaten Bombana termasuk Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara menjadi salah satu lokasi pelaksanaan PSDS. Hadirnya PSDS membuat Kelompok Ternak berkembang. Kelompok-kelompok yang besar dipecah menjadi kelompok-kelompok baru untuk merespon PSDS. Ditunjuknya daerah ini sebagai lokasi PSDS selain karena factor alam berupa luasnya padang penggembalaan juga karena petani di daerah ini rajin dan telaten memelihara sapi. Selain itu, juga untuk membantu petani yang mengalami kesulitan ekonomi karena produksi padi menurun dan sering terjadi gagal panen akibat dampak tambang. Dengan demikian, Kelompok ternak justru berkembang setelah ada dampak tambang dan PSDS.

b. Deskripsi Kelompok Ternak

Kelompok ternak dibentuk sebagai wadah bagi pemilik sapi di daerah penelitian untuk mengembangkan usaha ternak sapi potong, wadah

pemeliharaan kesehatan sapi dan pembelajaran melalui pelatihan-pelatihan teknis serta wadah penyaluran bantuan-bantuan pemerintah kepada petani peternak.

Kelompok ternak mempunyai struktur organisasi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Kelompok. Di daerah ini sapi biasanya dipelihara sendiri atau oleh penggaduh yang dipercayakan. Ranch ternak tersedia tetapi tidak berfungsi untuk pemeliharaan melainkan sebagai tempat pengumpulan sapi yang akan divaksinasi secara bersama-sama. Sapi di daerah penelitian digembalakan di padang-padang penggembalaan yang tersedia luas baik di Kecamatan Lantari Jaya maupun Rarowatu Utara.

Sapi yang digaduhkan atau yang dipelihara sendiri biasanya tidak mempunyai kandang khusus. Sapi hanya diikat tali pada pohon besar atau tiang di sekitar (halaman) rumah. Petani yang memelihara sapi disebut penggaduh. Setiap pagi sapi dibawa ke padang dan dilepas, siang hari penggaduh akan membawa sapi untuk minum, sore hari membawa pulang sapi untuk diikat di halaman rumah. Jika petani penggaduh sapi berhalangan oleh pekerjaan lainnya maka istri atau anak-anaknya akan menggantikan tugas tersebut.

Program PSDS mempersyaratkan Kelompok Ternak yang berhak mendapat bantuan adalah yang berjalan minimal 3 tahun. Direktorat Jendral Peternakan Kementerian Pertanian, menetapkan 5(lima) langkah Strategis

dan 9(sembilan) langkah Operasional sebagai langkah pencapaian tujuan dan sasaran program PSDS/K Sulawesi Tenggara. Lima langkah strategis, meliputi : Faktor Bibit, Faktor Penyakit, Faktor Manajemen Budidaya, Faktor Regulasi, dan Faktor Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, yang dijabarkan dalam 9 langkah operasional : Peningkatan Kelahiran IB dan INKA, Penyebaran Bibit Ternak Sapi, Pengendalian Penyakit Ecto dan Endo Parasit, Pengendalian Penyakit Reproduksi, Exotis, dan Ekonomi Tinggi, Pola Pemeliharaan Sapi, Pakan Ternak Sapi, Pengendalian Pematangan Ternak Betina Produktif, Sistem Lalu Lintas dan Perdagangan Ternak, dan Sumberdaya Peternak dan Aparatur Peternakan.

c. Fungsi Sebelum Ada Dampak Tambang Emas

Sebelum ada pertambangan emas, sapi sudah dipelihara oleh petani, baik sebagai pemilik maupun sebagai penggaduh. Petani yang tidak memiliki sapi, menjadi 'penggaduh' (penggembala/pemelihara sapi orang lain). Dengan menjadi penggaduh akan mendapatkan bagi hasil berupa anak dari sapi yang di'gaduh'kan. Biasanya setelah dua atau tiga tahun penggaduh akan memiliki sapi sendiri. Semakin banyak sapi yang digaduhkan akan semakin besar pula pembagian sapi yang diperolehnya. Umumnya bagi hasil sapi adalah anak pertama menjadi bagian pemilik, anak kedua menjadi bagian penggaduh. Biasanya petani yang mempunyai banyak ternak akan

membagi ternaknya ke lebih dari satu penggaduh untuk memelihara ternaknya.

Fungsi dari Kelompok Ternak sebagai wadah yang menaungi petani dalam urusan pemeliharaan ternak sapi. Pemeriksaan kesehatan sapi/ penyuntikan dilakukan melalui Kelompok Ternak. Jika ada bantuan atau program pemerintah, petani pemilik ternak dapat memperoleh manfaat tersebut melalui Kelompok Ternak. Ternak sapi dipelihara oleh petani karena berfungsi sebagai aset/modal yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan mendesak petani, ternak sapi berguna ketika ada hajatan dalam keluarga tani dan sebagai sumber makanan berprotein tinggi. Beberapa petani masih menggunakan sapi untuk membajak sawah.

d. Fungsi Sesudah Ada Dampak Tambang Emas

Sebagian padang-padang tempat sapi biasanya digaduhkan berubah menjadi area pertambangan. Banyak sapi menjadi korban pertambangan, baik yang mati terperosok ke dalam lubang-lubang bekas galian tambang maupun karena minum air bekas limbah tambang yang beracun. Sebagian juga hilang tanpa kejelasan. Meskipun demikian, potensi pengembangan ternak tetap besar oleh rajinnya petani beternak sapi dan luasnya padang.

Proyek PSDS menjadi salah satu sumber pendapatan bagi petani yang mengalami penurunan pendapatan dari pertanian padi sawah. Dalam

pelaksanaan proyek, petani memperoleh bantuan berupa sapi dan juga uang tunai. Karena itu proyek ini dimanfaatkan pemerintah setempat untuk membantu ekonomi petani. Persyaratan penyaluran bantuan adalah melalui Kelompok-kelompok ternak. Untuk memaksimalkan penyaluran bantuan proyek PSDS maka pada tingkat lapangan dibentuk kelompok-kelompok ternak baru sebagai wadah pelaksanaan program-program tersebut. Pembentukan kelompok ternak baru di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara dilakukan dengan memekarkan kelompok-kelompok ternak yang sudah ada. Kelompok Ternak menjadi wadah penyaluran bantuan pemerintah kepada petani.

e. Perubahan Fungsi

Terjadi perubahan fungsi kelembagaan kelompok ternak sapi dimana fungsi pemeliharaan ternak sapi yang semula ditujukan sebagai penyelamat/simpanan dikala kebutuhan ekonomi mendesak dan untuk acara hajatan keluarga menjadi sumber penghidupan baru bagi petani.

Setelah ada tambang emas, Kelompok ternak mempunyai fungsi laten yang menjadi fungsi utama yaitu untuk mendapatkan dana-dana hibah dari pemerintah melalui dana PSDS.

Bentuk dan Proses Disfungsi Kelembagaan Kelompok Tani dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40. Bentuk dan Proses Disfungsi Kelembagaan Kelompok Ternak

Dampak Tambang Emas	Perubahan Fungsi Kelembagaan	Hasil Analisis Disfungsi
Dampak Fisik Tambang: Dampak terhadap air, puso/kekeringan/perubahan bentang alam	Sapi banyak yang mati akibat keracunan mengkonsumsi air yang tercemar oleh tambang tanpa sengaja, sehingga sapi petani peternak berkurang	Disfungsi
	Dampak tambang membuat petani memelihara sapi sebagai aset yang dapat diuangkan dalam keadaan terdesak sehingga kelompok ternak berkebang	Fungsi Laten
	Puso/kekeringan menyebabkan hilangnya pakan ternak dari sisa-sisa panen pada musim tanam tersebut	Non fungsi
	Perubahan bentang alam menjadi lubang-lubang bekas galian tambang membuat sapi sering terperosok ke dalamnya	Disfungsi
	Perubahan fungsi lahan menjadi tambang mengurangi padang penggembalaan sapi berkurang	Disfungsi
Dampak Fisik Pencemaran udara	Suara bising mesin tambang membuat sapi ketakutan dan gelisah sehingga harus dipelihara jauh dari aktivitas tambang	Disfungsi

F. Mutasi Fungsi Pada Kelembagaan Pertanian

Dari perubahan fungsi yang dianalisis dengan teori struktural fungsional Merton, ditemukan fenomena menarik yang terjadi pada kelembagaan pertanian di daerah penelitian. Analisa struktural fungsional Merton menitikberatkan pada konsekuensi objektif lain dari fungsi yaitu disfungsi. Namun perubahan dari fungsi teramati (manifest) menjadi disfungsi terjadi dalam satu level perubahan. Sementara peneliti menemukan terjadinya loncatan-loncatan perubahan yang ekstrim yang dalam penelitian ini disebut sebagai 'mutasi fungsi'.

Mutasi fungsi terjadi oleh faktor eksternal yang ekstrim sehingga kelembagaan melakukan re-adaptasi yang melahirkan bentuk baru dan

fungsi-fungsi baru kelembagaan. Peneliti menganalogikan mutasi genetik pada ilmu Biologi ke ranah ilmu Sosiologi dalam penelitian ini untuk menjelaskan teori mutasi fungsi.

Mutasi genetik dalam Biologi adalah perubahan informasi dan sifat di dalam genetik sebuah organisme karena adanya pengaruh dari luar, atau lingkungan. Ini biasanya terjadi jika terdapat perubahan yang drastis terhadap habitat yang memaksa gen untuk berubah dan beradaptasi untuk tetap bertahan hidup. Hal yang sama dapat dianalogikan pada mutasi fungsi yang terjadi pada Gapoktan Winua Sangkula di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara dan Koperasi Dharma Citra Sejahtera di Desa Kalaero Kecamatan Lantari Jaya. Genetik dalam ilmu Biologi dianalogikan sebagai Gapoktan Winua Sangkula dan Koperasi Dharma Citra Sejahtera.

Gapoktan Winua Sangkula di Desa Wumbubangka mengalami mutasi fungsi akibat perubahan lingkungan yang ekstrim oleh kegiatan pertambangan. Kelompok tani dalam Gapoktan Winua Sangkula menjadi disfungsi (non fungsi) oleh hilangnya kegiatan pertanian padi sawah. Setelah non fungsi selama dua tahun dalam kegiatan pertanian padi sawah, Gapoktan Winua Sangkula muncul kembali oleh adanya program pemerintah yang memberi bantuan dana PUAP. Gapoktan Winua Sangkula melakukan re-adaptasi untuk merespon dana bantuan tersebut, sehingga terlahir dengan bentuk baru dan fungsi baru. Jika semula kelembagaan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi tanaman

padi sawah maka setelah mutasi fungsi berubah menjadi kelembagaan simpan pinjam yang bertujuan menyelamatkan kehidupan petani dari keterpurukan melalui pemberian kredit modal usaha yang digunakan sesuai keperluan anggotanya. Organisasi dan keanggotaannya masih sama, tetapi bentuk usaha dan fungsi-fungsi baru yang dijalankan telah berubah sama sekali.

Mutasi fungsi juga terjadi pada Koperasi Dharma Citra Sejahtera yang dikelola oleh suku Bali di Desa Kalaero. Pada awal pembentukannya tahun 2007, Koperasi menjadi wadah pengadaan sarana produksi (khususnya pupuk bersubsidi yang saat itu sulit diperoleh) bagi petani-petani anggotanya. Hadirnya tambang emas membawa perubahan ekstrim dimana petani meninggalkan pertanian padi sawah dan ikut menambang pada akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2009. Ketika itu Koperasi hanya menjadi nama dan tidak berfungsi (non fungsi). Setelah tambang rakyat ditutup, anggota Koperasi kembali ke usahatani padi sawah dan Koperasi kembali berfungsi menyalurkan pupuk kepada anggotanya, namun kerusakan lingkungan akibat tambang menyebabkan kekeringan sehingga penanaman padi tahun 2009 macet. Hal ini berdampak pada macetnya kredit pupuk sehingga Koperasi Dharma Citra Sejahtera kembali mengalami disfungsi. Tahun 2010 petani berhasil panen dan melunasi pinjamannya pada Koperasi. Namun tahun 2011 kembali kredit pupuk macet oleh dampak

tambang (puso) yang menyebabkan kegagalan panen pada anggota Koperasi.

Setelah selalu mengalami disfungsi akibat dampak tambang maka Koperasi Dharma Citra Sejahtera selanjutnya melakukan re-adaptasi dan mengalami mutasi fungsi oleh kondisi ekstrim akibat tambang, dimana sifatnya berubah menjadi guyub untuk merespon kesulitan-kesulitan yang dialami anggota akibat dampak tambang. Dan bentuk usahanya berubah dari penyedia sarana produksi menjadi usaha simpan pinjam. Di dalam Koperasi, terbentuk kelompok gotong royong laki-laki yang saling bantu dalam tenaga dan keuangan serta kelompok pemberdayaan perempuan yang saling bantu dalam kegiatan konsumsi ketika ada hajatan anggota atau upacara keagamaan. Secara organisasi, masih bernama Koperasi Dharma Citra Sejahtera dengan anggota yang sama dan struktur organisasi yang sama, tetapi didalamnya telah berubah bentuk baru menjadi usaha simpan pinjam yang bersifat guyub dengan fungsi-fungsi baru yang berbeda dari Koperasi ketika pertama kali terbentuk tahun 2007.

BAB VII

STRATEGI PENGHIDUPAN PETANI DALAM MERESPON DISFUNGSI KELEMBAGAAN PERTANIAN

Petani di daerah penelitian sangat dinamis, beragam dan memiliki respon berbeda dalam menghadapi berbagai perubahan seperti terjadinya perubahan fungsi kelembagaan pertanian akibat dampak tambang emas, terutama disfungsi pada kelembagaan tersebut. Respon tersebut menggerakkan petani menggunakan sumberdaya yang dimiliki baik berupa modal alam, modal fisik, modal Sumber Daya Manusia, modal finansial dan modal sosial (Conway dan Chambers, 1992). Hal ini karena pada hakekatnya sebagian besar rumah tangga pedesaan tidak mampu menghindari resiko baik yang disebabkan manusia maupun faktor lingkungan (Ellis, 2000).

Kabupaten Bombana menurut data BPS tahun 2008 mempunyai 67 % penduduk yang hidup dari sektor pertanian. Di daerah penelitian, sumber pencarian nafkah utama penduduk adalah pertanian padi sawah, jika ada sumber lain, lebih sebagai sumber nafkah sampingan.

Disfungsi Kelembagaan Pertanian akibat kegiatan pertambangan emas telah menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan petani dari

tanaman padi sawah sebesar 30-60% (Bab V). Untuk itu, petani berjuang untuk bertahan hidup dan untuk meningkatkan standar hidupnya.

Dari hasil analisis menggunakan pemikiran Ellis (2000) maka strategi livelihood petani terdiri dari kegiatan on farm, off farm maupun non farm. Strategi tersebut adalah mencari pekerjaan lain, melakukan penghematan, penjualan aset, menerima transfer dan melakukan pinjaman. Dari kelima strategi tersebut, rumah tangga tani boleh jadi menempuh lebih dari satu strategi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun satu dari strategi tersebut adalah strategi utama bagi keluarganya.

A. Strategi Mencari Pekerjaan Lain

Salah satu strategi yang dilakukan petani dalam mengganti pendapatannya yang hilang akibat dampak tambang emas adalah mencari pekerjaan di luar usahatani padi sawah. Pekerjaan yang paling banyak dilakukan petani di daerah penelitian adalah bekerja di sektor pertambangan. Dari 35 perusahaan pertambangan emas yang mempunyai ijin produksi, tercatat 5 (lima) perusahaan yang aktif, yaitu PT Bahtera Sultra Mining, PT Sultra Utama Nikel, PT Panca Logam Makmur, PT Dinasti Thamier Dwi Jaya dan PT Tiran Indonesia. Di lokasi penelitian terdapat PT Sultra Utama Nikel dan PT Panca Logam Makmur yang menjadi pilihan tempat kerja bagi petani. Kedua perusahaan berada di sekitar wilayah pemukiman warga sehingga

mudah dijangkau. Rendahnya sumber daya manusia (ketrampilan) di bidang tambang membuat petani mendapat posisi sebagai buruh tambang. Bahkan petani hanya diterima bekerja pada mitra-mitra perusahaan. Dengan bekerja pada mitra, perusahaan pertambangan tidak memiliki ikatan dengan petani (lihat box 7) sehingga tidak ada gaji, tunjangan apalagi jaminan kesehatan untuk petani. Hanya pegawai perusahaan yang mendapat gaji bulanan dari perusahaan. Khusus untuk petani yang memiliki jaringan yang baik dengan pihak perusahaan akan mendapat tempat bekerja dalam lingkungan perusahaan. Berikut adalah strategi bertahan hidup dengan mencari pekerjaan lain di luar pertanian padi sawah yang dilakukan Sardin dan Supardi.

Box 18. Strategi Mencari Pekerjaan Lain

Sardin (28) adalah petani dari Desa Watu-Watu yang hidup dari pertanian padi sawah. Ia mempunyai 1 ha lahan yang dikelola sendiri. Tanggungan keluarga tiga, seorang istri dan dua anak yang masih kecil. Sardin mengolah sawahnya tanpa menggunakan pupuk dan memperoleh sedikitnya 35 karung per hektar. Keadaan berubah sejak ada tambang. Seperti petani lainnya, akhir tahun 2008 Sardin terbawa euforia dan ikut menambang sampai pertambangan rakyat ditutup pemerintah. Hasil yang diperoleh lumayan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang ketika itu melonjak tinggi, membeli motor bahkan menyimpan sedikit emas untuk tabungan. Ketika pertambangan rakyat ditutup Sardin ingin kembali menanam tetapi Desa Watu-watu mengalami kerusakan fisik yang parah akibat tambang emas.

Tidak ada air (kekeringan). Akibatnya, Sardin menjadi pengangguran. Berbekal sisa emas yang dijual sedikit demi sedikit Sardin bertahan hidup bersama keluarganya. Akan tetapi persediaan emas akhirnya habis dan mulailah Sardin mencari pekerjaan lain. Dengan memanfaatkan relasi sosial Bapaknya yang merupakan tokoh masyarakat Moronene dan Kepala Desa Watu-watu, Sardin menjadi pegawai honor di Kantor Dinas PU Kabupaten Bombana. Apalagi ada keluarganya yang menjadi pejabat di Kantor Daerah. Pendapatan pegawai honorer tidak menentu, kadang terima tiga bulanan dengan gaji Rp 300.000 per bulan. Kalau ada proyek barulah dapat honor tambahan dari pekerjaan proyek. Karena minimnya pendapatan, Sardin melamar di PT SUN dan diterima sebagai Security. Posisi Bapaknya yang disegani sebagai pemuka suku Moronene membuat Sardin tidak ditempatkan sebagai buruh tambang. Posisi Security cukup terhormat di perusahaan. Sardin memperoleh gaji Rp1.500.000,- sebulan. Sardin bekerja selama 15 bulan. Gaji dari perusahaan tambang sungguh membantu ekonomi rumah tangga. Akan tetapi, sejak akhir tahun 2011 Sardin keluar dari perusahaan sebab tidak mendapat izin untuk bekerja di dua tempat baik oleh perusahaan maupun oleh Dinas PU. Sekalipun honor yang diperolehnya sangat rendah, Sardin memilih bekerja di Dinas PU sebagai pegawai honorer dengan harapan nantinya akan terangkat sebagai PNS. Kehilangan gaji dari perusahaan membuat Sardin 'mencanggkikan ikat pinggang' dengan mengumpulkan sagu atau pakis yang ada di dekat sungai untuk makan. Masak menggunakan kayu bakar yang dikumpulkan sendiri. Sardin lalu mencari tambahan pendapatan untuk membiayai keluarganya. Sebagai anak Kepala Desa dan Ketua Kelompok Tani, Sardin mempunyai relasi sosial yang cukup luas. Berteman dengan banyak orang akhirnya membawa Sardin bekerja sampingan sebagai 'calo' yang membantu melakukan urusan-urusan administrasi di Kasipute, ibukota Bombana. Jarak Desa Watu-watu dengan Kasipute hampir 20 km membuat jasanya digunakan warga yang membutuhkan. Urusan KTP, KK, sertifikat tanah dan sebagainya akan mendatangkan 'uang jasa' dari petani yang dibantunya. Petani yang tidak terbiasa dengan urusan administrasi pemerintahan, merasa sangat tertolong oleh jasa Sardin. Untuk menghemat pengeluaran, Sardin memohon ditempatkan sebagai penjaga/pengawas pintu air bendungan. Akhirnya Sardin ditempatkan sebagai penjaga bendungan Langkowala Sejak itu ia menjadi jarang masuk kantor. Hanya jika ada urusan di Kasipute ia menyempatkan diri masuk kantor. Bila ada kebutuhan mendesak, Sardin akan menambah pendapatan dengan ikut menambang pada Bos di Watu-Watu. Sebagai anak Kepala Desa, Sardin selalu diterima oleh Bos.

Supardi (33) adalah petani penggarap sawah, putra seorang tokoh agama asal Lombok yang merupakan penghulu di Desa. Tanggungan keluarganya lima orang, istri dan empat anak. Setiap tahun Supardi menanam hingga dua kali, pada lahan orang dengan sistem bagi hasil. Tetapi sejak ada tambang, Supardi hanya menanam sekali setahun dengan hasil yang menurun tajam. Sebelum ada tambang hasil produksi padi 5 ton per hektar. Akan tetapi setelah ada tambang kurang dari 3 ton bahkan dua kali gagal yaitu tahun 2009 dan 2011 akibat kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Supardi mencari pekerjaan lain. Memanfaatkan relasi Bapaknya, ia dipercaya warga dan diangkat sebagai Kepala Dusun dengan gaji Rp 300.000 per bulan untuk mengurus warga. Hasil tanaman padi yang kerap gagal ditambah gaji kepala Dusun tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, Supardi memerlukan sumber nafkah lain untuk bertahan hidup. Apalagi anak Supardi yang tua sudah duduk di Kelas 2 SMP dan dua adiknya di SD, ketiganya memerlukan biaya sekolah. Diluar waktu tanam dan panen, Supardi bekerja sebagai buruh tambang, sebuah pilihan untuk ketrampilan menambang yang dipelajarinya dari pendatang yang menambang ketika tambang rakyat dilegalkan. Supardi diterima baik pada mitra PT Panca Logam Makmur, PT Sultra Utama Nikel ataupun Bos di Desa Watuwatu. Semua mitra bersedia menerimanya karena Supardi terampil sebagai buruh tambang.

Melakukan penghematan dalam keluarga adalah salah satu strategi agar pendapatan yang diperoleh petani dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Penghematan dilakukan oleh Petani yang secara fisik sudah berumur dan tidak mempunyai banyak tanggungan keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya akan melakukan penghematan dari pada menambah volume bekerja. Berikut strategi yang ditempuh Ketut Sudarma dan Sumo Sumar.

Box 19. Strategi Penghematan

Ketut Sudarma (42) adalah petani dari Desa Langkowala yang hidup hanya menanggung istri karena kedua anaknya sudah menikah. Sebelum ada tambang emas, Ketut Sudarma bertani padi sawah pada lahan seluas 1,75 ha. Sebagian dikerja sendiri dan sebagian bagi hasil dengan penggarap. Sejak ada tambang emas, produksi padi menurun sehingga pendapatan keluarga juga menurun. Hasil produksi disimpan untuk di makan, Kadang ditukar 2-3 kg dengan teh dan gula di Kios. Untuk bekerja di luar pertanian, Ketut Sudarma tidak mempunyai ketrampilan. Jika keadaan sangat terdesak, Ketut Sudarma akan menambang secara sembunyi-sembunyi di sungai pada wilayah IUP. Karena resikonya besar untuk ditangkap oleh aparat Perusahaan, pekerjaan ini jarang dilakukan. Untuk mencukupi keperluan keluarganya, Ketut Sudarma dan istrinya melakukan penghematan. Perbaikan rumah atau kandang dilakukan sendiri dengan mencari bambu di sekitar Desa. Setiap hari istrinya masak dengan kayu bakar yang dikumpulkan selama musim kemarau. Halaman rumah ditanami ubi, tomat dan 268lombok. Ubi ditanam agar daunnya dapat dijadikan sayur dan umbinya dimakan. Awalnya ia juga menanam kacang-kacangan, tapi semua kacang habis dimakan sapi sehingga Ketut Sudarma tidak mau menanamnya lagi. Keduanya juga memelihara Babi yang ditangkap di hutan untuk dikonsumsi sendiri. Tindakan penghematan seperti ini mampu membuat rumah tangga Ketut Sudarma bertahan.

Sumo Sumar (59) adalah Ketua Kelompok Tani Tetetari dari Desa Wumbubangka yang mempunyai lahan sawah seluas 4 ha. Tanggungan keluarga dua orang yaitu istri dan seorang anak yang sekolah di SMK. Sejak tahun 2009 di desanya tidak ada lagi penanaman padi sawah akibat dampak tambang emas. Sumo Sumar kehilangan sumber pencarian nafkah dan melakukan berbagai tindakan adaptasi, mulai dari menyewakan lahannya di tahun 2008-2009. Ketika tambang rakyat dilegalkan, sewa lahan Sumo Sumar mencapai Rp 7 juta untuk 28 kapling, tetapi setelah tambang rakyat ditutup, mulailah hidupnya susah. Sewa lahan Sumo Sumar tinggal Rp1 juta saja dan terus menurun. Tak ada pekerjaan, Sumo Sumar membuka kios sembako di rumahnya, namun pendapatannya tidak seberapa. Bensin yang dijual hanya menutupi bensin yang dipakainya sendiri. Pernah terdesak membayar uang sekolah anaknya di SMK, Sumo Sumar menjual seekor sapinya dari dua ekor yang dimilikinya, sisa dari keperluan sekolah selama empat bulan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Kadang jika anaknya yang sudah menikah longgar, ia mendapat kiriman. Namun itu semua hanya sesekali saja selama bertahun-tahun. Sementara rumah tangga Sumo Sumar harus bisa bertahan. Sumo Sumar melakukan penghematan agar apa yang ada dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.

Untuk memasak Sumo Sumar menggunakan kayu bakar yang dikumpulkan sendiri dari kebunnya. Untuk beras dan ikan memang harus membeli tetapi sayur biasanya petik jantung pisang, nangka, daun kelor atau daun ubi yang ada di kebun atau di halaman. Sumo Sumar juga memelihara ayam untuk konsumsi rumah tangganya. Listrik rumahnya menggunakan solar terpaksa dikurangi pemakaiannya, sebagian rumah diterangi menggunakan lampu teplok, lampu dari kaleng bekas yang diberi sumbu dan dinyalakan dengan sedikit minyak. Ia juga mengantarkan sendiri anaknya ke sekolah sekalipun berada di Kecamatan tetangga. Upaya-upaya penghematan ini membuat Sumo Sumar bertahan hidup.

C. Strategi Menjual Aset

Ada dua aset yang paling banyak dijual petani untuk bertahan hidup setelah ada dampak tambang, yaitu emas dan sapi. Emas yang dimiliki petani sebagian besar adalah emas yang diperoleh ketika pertambangan rakyat dilegalkan pemerintah November 2008-Maret 2009. Sedangkan sapi adalah aset sebagian petani yang sejak sebelum ada tambang dipelihara untuk kebutuhan mendesak. Setelah ada tambang emas, pemeliharaan sapi berkembang oleh adanya PSDS (Program Swasembada Daging Sapi) dari kementerian pertanian. Petani yang tidak punya sapi akan menjadi penggaduh sehingga dalam 2-3 tahun akan memiliki sapi sendiri, sedangkan petani yang banyak sapinya akan membagi sapinya ke penggaduh-penggaduh untuk dipeliharakan. Sapi inilah yang menjadi modal bertahan hidup ketika kondisi petani terdesak.

Box 20. Strategi Menjual Aset

Wayan Rake (46) adalah petani dari Desa Kalaero yang mempunyai lahan pada dua areal berbeda. Luasnya 1,75 ha dan 1,80 ha. Setelah ada tambang emas, tinggal lahan seluas 1,75 ha yang masih ditanami. Seluas 0,4 ha Lahan dari 1,80 ha sudah dihibahkan, sisanya belum pernah ditanami lagi sejak ada tambang emas. Lahan yang ditanamipun mengalami kegagalan panen akibat kekeringan tahun 2009 dan 2011. Selebihnya mengalami penurunan produksi dari rata-rata 6,5 ton/ha menjadi 3,5 ton/ha. Dengan jumlah tanggungan keluarga sebanyak lima orang, istri dan empat anak laki-laki yang telah besar, hasil tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Panen hanya sekali setahun, sementara kebutuhan datang setiap hari. Karena itu Wayan Rake menjual aset-asetnya ketika ada keperluan mendesak yang harus dipenuhi. Bermula dari menjual emas yang diperolehnya dari pertambangan rakyat untuk membeli makanan (beras), sebab tahun 2009 ia gagal menanam karena tidak ada air. Akibatnya ia tidak punya persediaan beras. Aset emasnya sudah habis semua. Jika terpaksa, Wayan Rake menambang diam-diam di wilayah IUP, namun resiko ketahuan Perusahaan membuat Wayan Rake memilih menjual sapi untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Ketika gagal panen oleh puso tahun 2011, Wayan Rake kembali menjual sapi untuk bertahan hidup. Sejak ada emas, sudah dua kali Wayan Rake menjual sapi untuk bertahan hidup. Anak Wayan Rake bahkan telah berhenti sekolah sejak tamat SMP tahun 2011.

Berbeda dengan kasus di atas, Ketut Wirdjana dari Desa Langkowala menjual sapi untuk modal usaha tani agar dapat bertahan hidup. Sejak ada tambang ia dan petani lainnya selalu menjual seekor sapi setiap musim tanam tiba. Tahun 2012 Ketut Wirdjana memiliki 9 ekor sapi, sekalipun ia tidak menjadi anggota Kelompok Ternak. Sapi inilah yang terus dipelihara, berkembang dan dijual setiap tahun. Meski sesungguhnya tidak memiliki tanggungan lagi sebab istri telah meninggal dunia dan enam anak sudah menikah semua, Ketut Wirdjana mempunyai banyak keperluan. Rumahnya besar dan membutuhkan perawatan. Anak dan cucu sering bertandang sehingga kebutuhan juga besar. Terkadang jika bukan musim tanam, Ketut Wirdjana berjualan es di daerah sekitarnya.

D. Strategi Menerima Transfer

Ada dua macam transfer yang terjadi pada petani dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga tani yaitu transfer yang berasal dari keluarga dan transfer dari luar keluarga (pemerintah dan perusahaan).

Transfer dari luar keluarga adalah bantuan hibah dari pemerintah atau perusahaan yang diterima petani tanpa perlu mengembalikannya. Beberapa bantuan hibah sejak ada dampak tambang emas adalah bantuan puso tahun 2011 yang diterima oleh petani pada tahun 2012. Bantuan puso diberikan kepada 5(lima) Desa di Kecamatan Lantari Jaya yaitu Lombakasih, Langkowala, Kalaero, Lantari dan Anugrah yang besarnya Rp 2.294.000.000. Sedangkan Kecamatan Rarowatu utara diberikan kepada 4 (empat) Desa yaitu Tembe, Hukaea, Aneka Marga dan Marga Jaya dengan jumlah bantuan Rp 1.221.000.000. Bantuan hibah lainnya berasal dari PSDS dalam bentuk uang tunai untuk insentif sapi bunting, bantuan UFO dan bantuan induk sapi. Ini terjadi sejak tahun 2010 hingga 2013. Petani di Kecamatan Rarowatu Utara juga mendapat bantuan ganti rugi sebagai kompensasi akibat dampak lumpur dari PT Sultra Utama Nikel berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- per kapling kepada 18 petani pemilik lahan yang gagal panen. Sementara itu, petani di Kecamatan Lantari Jaya memperoleh bantuan hibah senilai Rp 250 juta pada tahun 2012 dari Kementerian Pertanian. Dana ini bertujuan sebagai modal usahatani bagi petani-petani yang tergabung dalam Gapoktan

Kowala. Ketika itu petani kesulitan melakukan penanaman padi karena kekurangan modal akibat dampak tambang emas. Melalui bantuan-bantuan itulah petani di Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara bertahan hidup di tengah disfungsi kelembagaan pertanian akibat tambang.

Berikut adalah bentuk transfer yang diterima oleh Fajaruddin (petani asal Lombok), Ambo Tang (petani asal Sulawesi Selatan) dan Dewa Made Merta (petani asal Bali).

Box 21. Strategi Menerima Transfer

Fajaruddin (42) adalah petani asal Lombok yang hidup dengan mengandalkan lahannya seluas 1,5 ha di Desa Langkowala. Tanggungan keluarga lima orang dengan anak yang masih kecil. Sebelum ada tambang emas, Fajaruddin hidup dari pertanian padi sawah yang diolahnya sendiri. Ia menanam dua kali setahun, sebab lahannya berada dekat dengan sumber air bendungan Langkowala. Fajaruddin adalah ulu-ulu yang mengatur air, dan sejak tahun 2007 menjadi Ketua Gapoktan Kowala. Ketika ada tambang emas, Fajaruddin sempat menambang, terbawa oleh eforia pertambangan, namun hanya beberapa hari saja ia tidak tahan dengan pekerjaan menambang dan kembali ke pertanian. Baginya menambang bukan keahliannya, pertanian adalah hidupnya. Setelah pertambangan tradisional berhenti, sebagian petani kembali menanam namun ketiadaan air tahun 2009 menyebabkan tanah menjadi kering. Di situasi itu, ketika petani lainnya sibuk menambang secara diam-diam untuk bertahan hidup, Fajaruddin menanam palawija. Setiap malam ia menjaga tanamannya dari serangan Babi hutan yang banyak masuk ke Desa akibat hutan diusik oleh tambang. Siang hari ia menjaga tanamannya dari sapi-sapi milik tetangga. Fajaruddin tidak mau menambang sebab ia tidak ingin diperlakukan buruk seperti diusir apalagi dipukuli oleh aparat perusahaan. Hasil tanaman tak cukup untuk hidup sehingga ia pun menggaduh sapi. Tahun 2010 Fajaruddin kembali menanam padi dan berhasil panen sekalipun hasil panen berkurang banyak dan kualitas padi rendah, berwarna buram. Tahun 2011 tanaman padinya terkena puso. Namun disaat yang sama Fajaruddin mendapat hibah dari Kelompok ternak yaitu insentif sapi bunting. Ia hidup dengan bantuan itu dan juga menjadi buruh bangunan sambil menanam kacang-kacangan. Pertanian tidak pernah ditinggalkannya sekalipun lingkungan sudah porak poranda oleh dampak tambang.

Tahun 2012 ia mendapat ganti rugi puso sebesar 5,5 Juta. Fajarudin hidup dari bantuan itu sambil tetap menanam padi sawah. Akhir tahun 2012 ia menerima dana PUAP sebesar 250 juta bagi Gapoktan yang dipimpinnya. Uang PUAP dibelikan mesin penggilingan padi untuk Kelompok dan sisanya dibagikan kepada anggota sebagai pinjaman usahatani yang harus dikembalikan dan digulirkan kembali. Dengan cara itulah Fajaruddin bertahan hidup, dari transfer-transfer pemerintah dalam bentuk dana hibah.

Ambo Tang adalah petani sekaligus tengkulak yang mendapat transfer dari Keluarga untuk memenuhi kebutuhan mendesaknya. Tanggungan Ambo Tang ada 4, yaitu istri dan 3 anak. Seorang anak sudah menikah dan hidup mandiri dengan bekerja di Makassar. Sebagai tengkulak hidup Ambo Tang menjadi susah sejak ada tambang. Orang-orang yang meminjam uang padanya kebanyakan gagal panen dan tidak mungkin ditagih. Ia malah mendapat tanah jaminan seluas 1 ha yang digunakannya untuk menanam padi. Akan tetapi hasil tanaman padinya sedikit, tahun 2011 hanya 5 karung yang membuatnya kesulitan hidup. Karena itu, anak Ambo Tang yang sudah menikah dan bekerja di Makassarlah yang membantunya dengan mengirimkan uang. Kondisi ini telah terjadi sejak ada tambang. Jaminan hidup keluarga Ambo Tang menjadi tanggungan anaknya.

Nyoman Damiyo (58) adalah petani yang sukses dari Desa Aneka Marga. Anaknya 4, satu telah berhasil menjadi Dosen di Akper Kendari. Satu menjadi Guru dan lainnya kuliah di Kendari. Sebelum ada tambang Ia mampu menyekolahkan anaknya dengan modal usaha tani padi sawah, pabrik penggilingan padi dan sapi miliknya yang sempat mencapai 50 ekor. Tahun 2009, hasil pertanian padi sawah menurun dan semua pabrik penggilingan padi macet karena petani hampir tidak menanam. Nyoman Damiyo mempunyai 5 induk sapi dan 14 ekor anak sapi. Sejak ada tambang, ada 5 anak sapi milik Nyoman Damiyo yang mati tanpa diketahui penyebabnya. Diduga Karena minum air dari limbah tambang yang beracun. Karena tanaman dan pabrik penggilingan tidak bisa diharapkan penghasilannya, Nyoman Damiyo hidup dari bantuan hibah. Bermodalkan sapi miliknya, Nyoman Damiyo mendapat bantuan hibah dari Program Swasembada Daging Sapi melalui Kelompok Ternaknya, Ia mendapat bantuan ternak dimana dua ekor dipelihara sendiri 8 ekor yang lain dibagi dan dipelihara anggota kelompok, bantuan UFO didapatkan tahun 2010 dan lima kali mendapat insentif sejak 2010-2012, yaitu setiap ada induk sapi yang hamil. Selain itu, Nyoman Damiyo juga mendapat ganti rugi untuk 3 ha tanah puso tahun 2011 yang diterima tahun 2012 sebesar Rp 3.700.000,- per hektar. Melalui bantuan-bantuan inilah Nyoman Damiyo bertahan hidup di tengah kesulitan yang dialaminya karena dampak-dampak tambang, walaupun untuk keadaan tertentu seperti membayar uang kuliah anaknya ia harus menjual sapi.

E. Strategi Melakukan Pinjaman

Dalam keadaan terjepit, petani akan melakukan berbagai hal termasuk meminjam uang. Namun di daerah penelitian terdapat petani yang hidup dengan melakukan pinjaman dari waktu ke waktu. Gali lubang tutup lubang. Berikut adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan Subandi.

Subandi (40) adalah petani penggarap dari Desa Lombakasih. Ia mempunyai tiga tanggungan keluarga. Sejak ada dampak tambang, tanaman padi sawah mengalami penurunan produksi dari 60 karung menjadi 30 karung sementara biaya produksi meningkat dari penggunaan 2 karung pupuk per ha menjadi lebih dari 6 karung pupuk per ha. Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya Subandi akan meminjam pada Tengkulak dan membayarnya setelah panen. Kadang juga Subandi mendapat panggilan bekerja sebagai buruh tukang batu tetapi tidak sering. Karena itu meminjam adalah jalan keluar bagi Subandi. Ketika panen tiba, hasil yang diperoleh habis untuk dibagi ke pemilik lahan dan untuk membayar hutang. Ketika hutang sudah banyak, Subandi akan menjual sapi untuk melunasi hutang-hutangnya dan memenuhi kebutuhan mendesaknya. Sejak ada tambang emas Subandi setiap tahun menjual sapi untuk membayar hutang-hutangnya. Hingga tahun 2012, sudah empat ekor sapi yang dijual Subandi. Sapi yang tersisa adalah 2 induk sapi dan 4 ekor anak sapi.

Kelima strategi yang digambarkan di atas adalah apa yang umumnya dilakukan petani-petani lainnya di daerah penelitian. Bagi sebagian petani, menambang adalah jalan termudah untuk bekerja, baik pada perusahaan ataupun pada Bos. Bahkan tidak jarang petani menambang secara ilegal dengan resiko tertangkap oleh aparat perusahaan. Ketika tidak punya uang atau beras, petani akan meminjam dan untuk keperluan besar akan menjual

asetnya yaitu emas (pada awal-awal tambang rakyat ditutup) dan sapi di tahun-tahun berikutnya. Beberapa petani mendapat bantuan dari kiriman anak-anaknya atau tertolong oleh adanya bantuan pemerintah. Menghadapi masa-masa sulit petani melakukan penghematan agar dapat bertahan hidup. Kesemua strategi yang ditempuh petani menurut White(1999) masuk ke kategori survival. Dari semua strategi di atas, hanya Nyoman Damiyo yang melakukan strategi konsolidasi dan tidak ada petani yang mampu menjadi kaya dengan mengakumulasi modal setelah adanya dampak tambang emas yang menyebabkan disfungsi pada kelembagaan pertanian.

BAB VIII

PENUTUP

Bab ini adalah rangkuman hasil analisis penelitian yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan teori yang berkaitan sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Penelitian ini mengkaji dampak-dampak tambang yang berkaitan dengan perubahan bentuk fungsi lembaga pertanian. Kekhasan dari penelitian ini karena analisis struktural fungsional yang digunakan bertumpu pada pemikiran Merton (1968) mengenai konsekuensi objektif lain dari fungsi yaitu disfungsi, non fungsi dan fungsi laten, sekaligus menganalisis konsekuensi teramati dari fungsi yaitu fungsi manifest. Penelitian ini juga membahas strategi penghidupan yang ditempuh petani sebagai respon atas perubahan fungsi lembaga pertanian dengan kerangka Ellis (2000).

Penelitian kelembagaan pertanian ini menyangkut kegiatan tambang yang sarat dengan nuansa ketertutupan fakta, baik pada proses pengumpulan data-data sekunder maupun dalam proses penggalian informasi di lapangan terhadap informan kunci. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan peneliti untuk memperoleh kebenaran pada fakta di lapangan. Karenanya metode triangulasi dilakukan pada perbaikan data penelitian dengan selalu merujuk pada fakta yang ada di lapangan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dibuat kesimpulan dalam bentuk preposisi yang menjawab ketiga pertanyaan penelitian. Berikut adalah preposisi pertanyaan penelitian yang pertama yaitu "Bagaimana dampak-dampak kegiatan pertambangan emas terhadap lingkungan fisik, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi lembaga pertanian di Kabupaten Bombana"

1. ***Sumber penghidupan baru yang terbuka di sebuah daerah membawa datangnya penduduk (migrasi penduduk) -- selanjutnya menimbulkan berbagai dampak yang secara simultan mempengaruhi masyarakat lokal***

Pada awal ditemukannya emas, terjadi eforia menambang pada masyarakat di Kabupaten Bombana. Mudahnya mendapatkan emas oleh besarnya potensi emas yang tersimpan di dalam tanah membuat petani setempat dapat menghasilkan jutaan rupiah setiap hari. Besarnya peluang mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah melalui menambang menjadi magnet datangnya penduduk dari luar, termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku dan lainnya. Banyaknya manusia menyebabkan dampak sosial seperti kerawanan sosial (mati tertimbun, terserang penyakit, rawan konflik), keamanan (perampokan) dan tingginya prostitusi. Banyaknya uang beredar juga membuat tumbuhnya investasi yang terdorong (*induce investment*) seperti penyewaan lahan untuk rumah

tinggal, usaha penginapan, usaha rumah kos, toko emas, warung/rumah makan, bengkel, permainan bilyard, kafe, air mineral, jasa angkutan, jasa mobil panen dan sebagainya. Semakin banyak migrasi penduduk ke Bombana menyebabkan harga barang meningkat oleh tingginya permintaan akan barang dan jasa. Banyaknya orang menambang membuat lingkungan alam tidak mampu menampung semuanya sehingga makan, minum, kakus dilakukan di mana saja. Akibatnya alam rusak, terjadi degradasi lingkungan.

2. ***Eksplorasi terhadap sumberdaya alam yang mengakibatkan degradasi lingkungan akan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal***

Kegiatan pertambangan emas yang dilakukan di hutan, kebun, padang penggembalaan dan sepanjang sungai menyebabkan terjadinya perubahan bentang alam. Daerah yang semula hijau menjadi tandus, semula rata menjadi bergunung dan membentuk kubangan-kubangan air, batang-batang sungai hilang tertimbun. Terjadi penurunan debit air irigasi sehingga mengganggu kegiatan usahatani padi sawah. Pada musim hujan, terjadi banjir sebab air mengalir ke mana-mana oleh hilangnya batang-batang sungai. Kegiatan menambang yang menggunakan merkuri (disebut raksa oleh penduduk lokal) dan membuang sisa-sisa air bercampur tailing (limbah lumpur) ke sungai dan melalui saluran irigasi masuk ke lahan-lahan pertanian menyebabkan lahan sawah rusak (terjadi

pendangkalan) oleh lumpur, dan produksi tanaman padi terganggu. Sapi yang digembalakan secara liar (dilepas begitu saja) juga banyak yang mati keracunan karena meminum air dari saluran irigasi (lihat catatan kaki 5).

Selanjutnya adalah preposisi yang menjawab pertanyaan kedua dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana bentuk terjadinya perubahan fungsi lembaga pertanian akibat perkembangan pertambangan emas di Kabupaten Bombana."

3. Masyarakat cenderung merespon situasi kritisnya dengan bekerjasama menghimpun diri dalam sebuah wadah untuk mempertahankan zona amannya

Kurangnya air dan rusaknya lingkungan menyebabkan produksi pertanian padi sawah menurun sehingga mengancam ketersediaan pangan penduduk lokal. Ini terlihat dengan banyaknya beras dari Sulawesi Selatan memenuhi pasar-pasar lokal (hasil wawancara dengan H. Ahmading). Sedangkan sebelum ada tambang, daerah ini dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi Tenggara atau 'tanahnya Dewi Sri'. Kekhawatiran terjadinya kerawanan pangan mendorong masyarakat bersama pemerintah membentuk Lumbung Pangan. Lumbung pangan memberikan rasa aman bagi anggotanya dan petani di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan paling dasar bagi manusia yaitu pangan. Terdapat dua lumbung pangan di daerah penelitian, yaitu Lumbung Pangan Mitra Karya Muda di Kecamatan Rarowatu Utara dan Lumbung Pangan Lomba Rejeki di Kecamatan Lantari Jaya. Lumbung Pangan Lomba Rejeki memberi pinjaman beras kepada

petani yang membutuhkannya ketika musim paceklik tiba dan petani akan mengembalikannya ketika musim panen tiba.

4. Dalam sebuah komunitas yang mengalami tekanan, perubahan fungsi sebuah lembaga cenderung membawa perubahan fungsi pada lembaga lainnya.

Kegiatan pertambangan emas secara serentak (simultan) menyebabkan dampak atas lingkungan fisik yaitu rusaknya bentang alam, kurangnya debit air dan terjadinya pencemaran air oleh tailing (limbah lumpur) menyebabkan disfungsi pada Kelompok Tani Pemakai Air dimana pengaturan air oleh ulu-ulu hilang sebab air yang tersedia tidak cukup untuk dibagi. Akibatnya, kegiatan Kelompok tani dalam proses penanaman padi sawah juga terganggu. Sistem tanam bibit berubah menjadi sistem tanam benih langsung sebagai respon atas berkurangnya air. Tidak ada lagi penentuan masa tanam sehingga waktu panen juga tidak bersamaan.

5. Fungsi Manifest dari sebuah lembaga mungkin menyebabkan disfungsi bagi lembaga lainnya

Hadirnya Lumbung Pangan sebagai sebuah lembaga yang merespon kerawanan pangan akibat rendahnya produksi tanaman padi akibat tambang emas, membuat praktek tengkulak khususnya di daerah sekitar lumbung pangan menjadi hilang. Ini terjadi karena petani kecil yang biasanya hidup tergantung pada pemberian hutang dari tengkulak

memperoleh pinjaman pangan dari Lumbung Pangan dengan sistem pembayaran yang jauh lebih menguntungkan dibanding tengkulak. Jika meminjam gabah/beras sebanyak 1 karung, maka melalui Lumbung pangan akan dikembalikan 1,5 karung sedangkan jika melalui Tengkulak akan dikembalikan 2 karung.

6. Faktor eksternal ekstrim yang mengakibatkan perubahan fungsi secara cepat dan radikal pada sebuah lembaga pertanian disebut Mutasi Fungsi

Gapoktan Winua Sangkula di Desa Wumbubangka mengalami mutasi fungsi dari usaha tani padi sawah menjadi simpan pinjam setelah mengalami disfungsi akibat dampak sosial dan ekonomi tambang. Dimana petani anggotanya beralih menjadi penambang. Tambang rakyat yang berpusat di Desa ini menimbulkan dampak lingkungan Fisik yang parah. Setelah tambang rakyat ditutup dan perusahaan PT PLM masuk dengan IUP mendirikan kantornya di Desa ini, PT PLM melakukan penimbunan terhadap sungai La Sangi, sumber air irigasi petani. Hilang sama sekali sumber air irigasi petani sehingga tidak ada lagi usaha tani padi sawah dilakukan. Sembilan puluh (90) petani kehilangan sumber nafkahnya dari pertanian padi sawah. Ditengah perubahan yang cepat dan ekstrim, Gapoktan Winua Sangkula selanjutnya secara radikal mengalami mutasi fungsi dari usaha tani padi sawah menjadi usaha simpan pinjam pada

berbagai usaha lainnya (termasuk kegiatan non pertanian). Hal ini terjadi secara spontan, radikal dan cepat serta tidak melalui tahapan seperti proses *metamorphosis* atau evolusi yang memerlukan waktu yang panjang.

Preposisi berikut menjawab pertanyaan ketiga dalam penelitian ini yaitu "Bagaimana strategi penghidupan yang ditempuh petani dalam merespon perubahan fungsi lembaga pertanian dibalik perkembangan pertambangan emas."

7. *Orang-orang cenderung mempertahankan kebiasaannya dalam mencari nafkah—upaya lain dilakukan ketika tingkat hidupnya terancam jatuh*

Meskipun dampak tambang menyebabkan air menjadi kurang namun petani tetap mempertahankan usaha tani padi sawah sebagai jaminan pangan keluarganya. Sekalipun hasil produksi rendah bahkan gagal panen. Bersawah telah melekat dalam hidup petani. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, petani bekerja mencari sumber nafkah lain, sebagai buruh tambang dan kepala dusun seperti Supardi, menjadi penambang liar seperti Wayan Rake dan Ketut Sudarma, bekerja kantor dan menjadi calo seperti Sardin, bekerja kantor dan berkebun seperti Made Piarsa, menanam tanaman lainnya dan bekerja bangunan (kepala tukang) seperti Fajaruddin, menjadi tengkulak seperti Ambo Tang, memelihara ternak dan

menjual es seperti Ketut Wirdjana, dan berbagai jenis sumber pencarian nafkah hidup lainnya.

8. Pola-pola pencarian nafkah alternative selalu disesuaikan dengan dukungan lingkungan

Turunnya pendapatan petani oleh rendahnya produksi tanaman padi akibat dampak tambang menyebabkan ternak menjadi aset penting untuk dikembangkan. Semua petani baik kaya maupun miskin ingin memiliki aset berupa ternak sapi yang dapat diuangkan di saat terdesak. Karena itu hubungan patron klien antara petani kaya pemilik sapi dengan petani penggaduh sapi yang sudah ada sebelum tambang berkembang dengan pesat. Terjadi *social mechanism* Desa seperti *share poverty* dimana semua petani miskin mendapat kesempatan memiliki sapi dengan menjadi penggaduh sapi. Perkembangan ini didukung oleh program PSDS dimana pemerintah menyalurkan berbagai macam bantuan dan insentif kepada peternak melalui kelompok ternak.

B. Implikasi Teoritik

Pemikiran Merton (1968) mengenai teori struktural fungsional yang digunakan dalam menganalisis perubahan fungsi kelembagaan terbukti secara empiris pada lembaga pertanian di penelitian ini. Merton

membedakan kategori fungsi atas empat yaitu fungsi manifest, fungsi laten, disfungsi dan non fungsi. Lima lembaga pertanian (Kelompok tani/Gapoktan, kelembagaan pengairan, kelembagaan kredit, Lumbung Pangan dan Kelompok Ternak) yang dianalisis menunjukkan minimal dua kategori perubahan fungsi Merton terjadi pada lembaga tersebut.

Hadirnya lumbung pangan sebagai lembaga baru yang menjamin keamanan pangan Desa yang terancam oleh dampak-dampak tambang, telah menyebabkan tergesernya praktik Tengkulak di Desa Lombakasih yang selama ini *embedded* dalam kehidupan petani. Hal ini dipandang oleh Merton (1968) bahwa apa yang fungsional bagi satu kelompok (lumbung pangan), boleh jadi tidak fungsional (disfungsi) bagi kelompok lainnya (tengkulak).

Hal yang sama terjadi dalam Kelompok Tani dimana teknologi mobil panen sebagai bentuk dari *induce investment* akibat adanya tambang emas, muncul menggantikan fungsi lama dalam sistem panen. Terjadi perubahan dari *sistem tebas dross* oleh petani/buruh tani menjadi *sistem jahit* oleh pengusaha mobil panen.

Merton menyadari bahwa beberapa struktur mungkin memiliki konsekuensi keduanya yaitu fungsi dan disfungsi. Dalam penelitian ini, terlihat pada Tengkulak. Pada satu sisi, Tengkulak menjalankan fungsinya memberikan bantuan ekonomi kepada petani kecil baik dalam bentuk uang tunai, beras atau lainnya. Namun disisi lain Tengkulak telah menyebabkan petani kecil terikat kewajiban membayar hutangnya sekaligus mengabdikan

dirinya untuk kepentingan tengkulak. Terjadi disfungsi dalam arti muncul konsekuensi objektif dari fungsi (fungsi yang tidak diharapkan dari sisi petani). Ini membuat petani terlepas dari satu masalah dan terperangkap ke dalam masalah lain yang mungkin tidak disadarinya.

Penelitian ini juga menemukan fenomena berbeda dari fungsi dan disfungsi Merton yang dalam penelitian ini disebut Mutasi Fungsi Kelembagaan. Konsep mutasi fungsi kelembagaan adalah hal baru yang berbeda dan dapat melengkapi khasanah teori-teori fungsi yang sudah ada yaitu fungsi manifest, fungsi laten, disfungsi dan non fungsi. Pilihan istilah Mutasi fungsi kelembagaan karena peneliti melihat adanya suatu perubahan fungsi yang berlangsung secara cepat dan radikal yang memiliki kecocokan dengan mutasi pada fungsi organisma dalam Biologi yang juga berlangsung cepat. Peristiwa mutasi fungsi kelembagaan ini bukan melalui proses evolusi yang panjang juga bukan terjadi bertahap seperti peristiwa *metamorphosis*.

Istilah mutasi dalam Biologi oleh peneliti dibawa pada fungsi kelembagaan dalam ranah sosiologi. Apa yang terjadi dalam peristiwa mutasi genetik organisma analog dengan mutasi fungsi pada kelembagaan pertanian di penelitian ini. Dalam Biologi, mutasi genetik diartikan sebagai perubahan informasi dan sifat di dalam genetik sebuah organisma karena adanya pengaruh dari luar, atau lingkungan. Ini biasanya terjadi jika terdapat perubahan yang drastis terhadap habitat yang memaksa gen untuk berubah dan beradaptasi untuk tetap bertahan hidup. Perubahan drastis pada habitat

dapat terjadi secara alami ataupun buatan. Mutan atau hasil peristiwa mutasi gen dapat berubah sedikit dari asalnya juga dapat berbeda sama sekali dari asalnya. Contohnya adalah perubahan buah cabai menjadi tiga kali lebih besar karena sinar radioaktif. Contoh lain adalah mutasi gen pada Kaktus yang hidup di Kepulauan Galagos yang di huni kura-kura berbeda dengan yang tidak di huni kura-kura. Pada pulau yang tidak dihuni kura-kura, kaktus tumbuh rendah dengan duri-duri lunak sedangkan pada pulau yang dihuni kura-kura, kaktus menyerupai pohon, berbatang tebal dan tinggi dengan duri yang keras dan kaku.

Dalam penelitian ini, organisma diidentikkan sebagai lembaga pertanian dan genetik diidentikkan sebagai fungsi. Perubahan genetik oleh pengaruh dari luar/lingkungan bermakna perubahan fungsi kelembagaan oleh pengaruh dari lingkungan. Perubahan drastis pada lingkungan oleh sinar radioaktif dalam Biologi disamakan dengan perubahan radikal lingkungan akibat dampak-dampak kegiatan pertambangan emas. Gapoktan Winua Sangkula yang berfungsi mendukung usahatani padi sawah berada pada lingkungan alam yang mendukung keberhasilan pertanian seperti tanah yang subur dan air yang cukup. Pengaruh pertambangan secara radikal mengubah lingkungan fisik alam dan ketika ada program pemerintah (dana PUAP) akan digelontorkan, memaksa Gapoktan Winua Sangkula mengubah bentuk dan fungsi di dalamnya. Dana PUAP diidentikkan dengan DNA kromosom pembawa sifat gen. Winua Sangkula menjadi Gapoktan dengan bentuk

usaha baru yaitu simpan pinjam dengan fungsi-fungsi baru. Konsep mutasi fungsi ini sekaligus melengkapi teori Merton yang menganalisis sampai pada konsekuensi lain dari fungsi. Proses adaptasi fungsi dalam sebuah sistem dapat mengubahnya menjadi disfungsi (laten, disfungsi dan non fungsi). Konsep mutasi fungsi kelembagaan menjelaskan lebih jauh lompatan-lompatan perubahan di luar kategori Merton.

Pada awal pertambangan emas, Gapoktan Winua Sangkula mengalami dampak sosial dan ekonomi dimana anggotanya meninggalkan tanaman padi dan menjadi penambang sehingga Gapoktan Winua Sangkula menjadi disfungsi (bahkan non fungsi pada beberapa fungsi di dalamnya), sebagaimana teori Merton. Pada level selanjutnya, Winua Sangkula menghadapi perubahan lingkungan akibat tambang yang terjadi secara radikal. Perubahan lingkungan tersebut adalah sawah menjadi wilayah tambang, air sungai dibendung PT PLM sehingga tidak tersedia air pada irigasi, kebun dan hutan di sekitar pemukiman dihabisi penambang sehingga penguapan rendah dan curah hujan terganggu, didirikan kantor perusahaan di Desa ini yang diharapkan menampung warga lokal bekerja di dalamnya, meski pada akhirnya warga lokal hanya menempati posisi sebagai buruh tambang oleh kualitas SDM yang rendah)

Selain pada Gapoktan Winua Sangkula, mutasi fungsi kelembagaan akibat dampak tambang juga terjadi pada Koperasi Dharma Citra Sejahtera yang unit usahanya adalah pengadaan sarana produksi. Didirikan pada

tahun 2007 untuk memudahkan anggotanya memperoleh pupuk bersubsidi. Dalam perjalanannya Koperasi Dharma Citra Sejahtera mengalami mutasi fungsi kelembagaan oleh kegagalan panen akibat dampak-dampak tambang. Dua kali kegagalan panen di tahun berbeda dan penurunan hasil produksi tanaman setelah ada tambang emas, memaksa Koperasi Dharma Citra Sejahtera berubah unit usaha dari penyalur pupuk menjadi usaha simpan pinjam multi fungsi sesuai kebutuhan anggota. Sifat Koperasi sebagai organisasi ekonomi menjadi separuh guyub untuk merespon kesulitan-kesulitan yang dialami anggota akibat dampak tambang. Di dalam Koperasi, terbentuk kelompok gotong royong laki-laki yang saling bantu dalam tenaga dan keuangan serta kelompok pemberdayaan perempuan yang saling bantu dalam kegiatan konsumsi ketika ada hajatan anggota atau upacara keagamaan. Terjadi mutasi fungsi pada lembaga Koperasi Dharma Citra Sejahtera dengan bentuk yang berbeda dari Koperasi ketika pertama kali terbentuk tahun 2007.

Selain dari implikasi teoritik dari struktural fungsional Merton, penelitian ini juga mengandung implikasi teoritik lainnya. Salah satu lembaga kredit yang ada di daerah penelitian adalah Tengkulak. Sejak sebelum ada tambang maupun sesudah ada tambang Tengkulak meminjamkan gabah/beras kepada petani peminjam dengan bunga 100%, artinya meminjam 1 karung beras akan mengembalikan 2 karung beras. Tindakan ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap petani kecil. Akan tetapi ada ikatan

antara tengkulak dan peminjam sebagai ikatan patron klien yang saling membutuhkan. Tata hubungan ini oleh Scott (1976) dipandang sebagai eksploitasi yang adil sekalipun kebanyakan orang menilainya tidak wajar. Secara moral, petani (klien) merasa harus membalas kebaikan tengkulak (patron) dengan jumlah dua kali lipat sebagai bentuk pertukaran yang sepadan dan rasa terima kasih atas pertolongan yang diterimanya. Setelah ada tambang, Tengkulak tidak lagi menerima jaminan berupa tanaman padi oleh besarnya resiko kegagalan panen akibat dampak-dampak tambang. Tindakan tengkulak ini menurut Popkin (1979) adalah bentuk tindakan rasional dimana tengkulak adalah manusia yang memiliki perhitungan untung rugi dan bukan hanya diikat oleh nilai-nilai moral. Hadirnya tambang membuat tengkulak bereaksi terhadap faktor-faktor yang mengancam keamanan ekonominya. Untuk itu, tindakan tengkulak untuk mengganti jaminan dari tanaman menjadi barang berharga adalah tindakan yang rasional.

Warren dan Uphoff (1969) dalam sebuah studinya menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat terjadi secara tiba-tiba yang berlangsung dalam dua fase penting. Pertama, fase utama yang secara langsung berhubungan dengan penemuan-penemuan baru pada penduduk yang menyebabkan migrasi atau imigrasi. Kedua adalah kegagalan beradaptasi akibat kemajuan fase pertama (halaman 12). Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori ini

sejalan dengan apa yang terjadi di Kabupaten Bombana, yaitu fase pertama adalah penemuan emas yang diikuti oleh datangnya penduduk dari berbagai tempat ke Bombana. Fase kedua adalah terjadinya disfungsi lembaga pertanian akibat adanya kegiatan pertambangan emas.

Perubahan akibat fase pertama adalah terjadinya perubahan struktur. Pertama, tergesernya struktur kepemilikan lahan-lahan pertanian dan perkebunan petani menjadi milik kuasa pertambangan. Kedua adalah terbentuknya struktur baru dalam struktur sosial masyarakat yaitu pengusaha tambang, pedagang emas, mitra perusahaan tambang dan pekerja/buruh tambang yang sebelumnya tidak ada dalam struktur sosial masyarakat. Ketiga, tumbuhnya struktur baru pada kegiatan perekonomian di sekitar lokasi penambangan berupa usaha-usaha baru yang didominasi oleh etnik Bugis Makassar (rumah makan, barang jasa, penginapan). Keempat adalah berkembangnya struktur masyarakat sipil yang membawa nilai-nilai demokratis (*freedom, equality, liberty*) seperti LSM (Jatam), Media Cetak/elektronik, Ormas (Pemuda Pancasila) yang sebelumnya tidak ada. Berkembangnya struktur masyarakat sipil ini sesuai dengan Ife dan Torsoriero (2008) yang menjelaskan tentang *civil society* sebagai masyarakat madani untuk struktur-struktur formal atau semi formal yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan inisiatif mereka sendiri bukan sebagai konsekuensi program ataupun arahan tertentu dari

pemerintah. Masyarakat madani mencakup Negara (pemerintah), swasta (perusahaan pertambangan) dan masyarakat/keluarga.

Dampak fisik kegiatan pertambangan emas yaitu dampak terhadap air, dampak lumpur, puso/kekeringan dan perubahan bentang alam telah menyebabkan disfungsi pada lembaga pertanian (terutama kelompok tani dan lembaga pengairan) yang membuat terjadinya penurunan produksi tanaman padi sawah bahkan kegagalan panen. Akibatnya petani melakukan berbagai strategi *livelihood* untuk menghidupi keluarganya. Petani tidak berdaya untuk melarang pertambangan sekalipun kegiatan itu telah memporak-porandakan sumber penghidupan komunitas tani di wilayah tambang. Ini sejalan dengan kesimpulan Kemp, et. al. (2011) pada beberapa penelitian pertambangan yaitu perusahaan pertambangan secara global didakwa menjadi penyebab konflik atau memperburuk kelesuan yang laten dalam komunitas. Hasil penelitian ini sesuai dengan motivasi konflik oleh Kemp et.al. adalah ekonomi atau jaminan sumber mata pencaharian, kepemilikan tanah, akses air, degradasi lingkungan, kekerasan HAM dan ketidakadilan.

Pembentukan Kelompok Tani dilandasi adanya kepentingan yang sama diantara petani dalam melakukan usahatani untuk tujuan yang sama yaitu meningkatkan pendapatan melalui peningkatan hasil produksi tanaman padi. Sedangkan pembentukan Gapoktan yang bersamaan pada setiap Desa

di Kecamatan Lantari Jaya dan Rarowatu Utara dilakukan untuk memperoleh dana PUAP yang menjadi program bantuan pemerintah. Demikian juga dengan pembentukan Kelompok Ternak yang semula untuk peningkatan produksi sapi menjadi laten untuk mendapatkan dana bantuan melalui PSDS. Menurut Merton (1968), ini menunjukkan bahwa dalam teori fungsional struktural harus diperhitungkan alternatif dari fungsi yang dimaksudkan. Pembentukan Gapoktan dan Kelompok Ternak ternyata lebih pada fungsi laten dari pada fungsi sebenarnya yang dimaksudkan.

Hadirnya tambang mengubah uang menjadi ukuran transaksi dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem panen dan bagi hasil dalam kelompok tani. Ini disebabkan pada awal adanya tambang, sangat mudah memperoleh uang dengan menambang sehingga banyak uang beredar dalam masyarakat tani. Akibatnya uang menjadi ukuran dalam setiap transaksi, menggeser nilai-nilai yang ada dalam sistem panen dan bagi hasil. Ini sesuai teori Simmel dalam Ritzer (2009), bahwa uang memungkinkan orang mereduksi fenomena berbeda menjadi sejumlah Dollar. Dengan kata lain merelatifkan segalanya (halaman 30-31). Ini terlihat ketika petani menggunakan tenaga buruh dari luar untuk panen dimana buruh tidak lagi bersedia dibayar dengan bagi hasil tetapi menentukan tarif sebesar Rp 1.000.000,- per hektar untuk tebas dan Rp 20.000,- untuk setiap karung gabah yang di digiling.

Petani di daerah penelitian sangat dinamis, beragam dan memiliki respon berbeda dalam menghadapi berbagai perubahan seperti terjadinya disfungsi lembaga pertanian akibat dampak tambang emas. Hasil penelitian menunjukkan strategi penghidupan yang ditempuh oleh rumah tangga tani terdiri atas 5 (lima) strategi yaitu mencari pekerjaan lain, melakukan penghematan, penjualan aset, menerima transfer dan melakukan pinjaman. Hal ini sesuai dengan Ellis (2000) bahwa pada hakekatnya sebagian besar rumah tangga pedesaan tidak mampu menghindari resiko baik yang disebabkan manusia maupun faktor lingkungan. Dari kelima strategi tersebut, rumah tangga tani dapat menempuh lebih dari satu strategi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun satu dari strategi tersebut adalah strategi utama bagi keluarganya, disesuaikan dengan modal yang dimilikinya. Sejalan dengan Conway dan Chamber (1992) bahwa respon petani dilakukan dengan menggunakan sumberdaya yang dimiliki baik berupa modal alam, modal fisik, modal Sumber Daya Manusia, modal finansial dan modal sosial (Conway dan Chambers, 1992).

Dari hasil penelitian terlihat bahwa modal sosial yaitu jaringan dimanfaatkan oleh Sardin ketika ia menjadi Sekurity di PT SUN (memanfaatkan Bapaknya yang merupakan Kepala Desa), dan menjadi pegawai honorer di Dinas PU (memanfaatkan keluarganya yang menjadi pejabat di Kantor Bupati). Begitu juga dengan Supardi yang diangkat sebagai

Kepala Dusun karena Bapaknya adalah tokoh agama dan penghulu Desa yang berakhlak baik di mata masyarakat. Selain jaringan keluarga, relasi (hubungan pertemanan) dimanfaatkan Sardin menjadi 'calo' pengurus administrasi bagi warga Desa dan sekitar Desanya. Timbul hubungan simbiosis mutualisme antara Sardin dan warga yang dibantunya. Modal sosial lainnya yaitu kepercayaan dimanfaatkan oleh Sumo Sumar, Fajaruddin dan Made Merta yang berhasil mendapatkan dana PUAP dan dana hibah PSDS dari pemerintah. Supardi memanfaatkan ketrampilannya dalam menambang sebagai sumber pencarian hidup jika tidak sedang menanam.

Menerima transfer dan menjual aset adalah strategi penghidupan yang ditempuh oleh petani yang berada dalam kondisi *vulnerable* (rentan). Menurut Moser (1996), semakin banyak rumah tangga kehilangan asetnya semakin *vulnerable* rumah tangga tersebut. Petani semacam ini oleh Scott (1976), ibarat orang yang berdiri terendam air sampai ke leher, sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup untuk menenggelamkannya.

C. Implikasi Kebijakan

Disfungsi lembaga pertanian akibat kehadiran tambang emas di daerah pertanian telah menurunkan produksi tanaman padi sawah dan mengancam bukan saja ketahanan pangan wilayah ini tetapi mereduksi sumber penghidupan petani. *Political will* pemerintah untuk memperbaiki

kehidupan petani semestinya dimulai dari perbaikan kelembagaan pertanian yang ada. Tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan-bantuan hibah ataupun pinjaman lunak melalui program-program seperti PUAP, PSDS, SMB, BPMD yang sifatnya menyelesaikan masalah di kulit luarnya saja tetapi akar dari permasalahan harus diselesaikan. Sebagai contoh pada lembaga pengairan, fungsi-fungsi utama dari kelembagaan hanya akan berjalan jika sumber air petani terjamin baik jumlah (debit air) yang cukup dan berkualitas (tidak tercemar). Karena itu pemerintah dengan *power* yang dimilikinya selayaknya mengambil tindakan yang diperlukan seperti membuat irigasi baru dari sumber air yang belum tercemar (di lokasi penelitian dapat diperoleh pada sumber air yang berasal dari Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai)

Otoritas Negara (pemerintah) dalam memberikan hak pengelolaan tambang yang berada di bawah permukaan tanah kepada perusahaan tidak serta merta mengabaikan kepentingan petani sebagai masyarakat lokal yang telah membangun peradaban pertaniannya sejak dulu. Jika hal ini diabaikan maka konflik akan menjadi potensi laten yang dapat terjadi kapan saja. Salah satu upaya yang mungkin untuk diterapkan adalah penggunaan teknologi yang dapat meminimalisir pencemaran yang terjadi akibat penggunaan zat-zat kimia berbahaya. Hal ini telah dilakukan di Ghana dimana kerjasama antara Pemerintah, Universitas dan Lembaga terkait dalam sebuah riset

menghasilkan CP (*Cleaner Production*) yang dapat meminimalkan limbah merkuri untuk industri kecil. Dimana pada Kabupaten Bombana adalah pertambangan yang dilakukan oleh mitra-mitra perusahaan.

Di tingkat pusat, kebijakan sektor pertambangan dan pertanian berada di Kabinet. Diperlukan koordinasi menyeluruh untuk mencakup seluruh masalah penting dalam pengembangan kedua sektor, termasuk mengisi kekosongan kerangka hukum mengenai tumpang tindihnya lahan-lahan milik masyarakat dengan wilayah IUP. Perlu ada perlindungan lingkungan alam dari kerusakan sebagai dampak negatif kegiatan pertambangan yang mempengaruhi langsung kegiatan pertanian di sekitar wilayah tambang. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga khusus untuk melakukan Pengawasan terhadap kegiatan pertambangan dari pemerintah selain dari *civil society* yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Saleh S. 2000. *Pengetahuan Lokal dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan :Perspektif dari Kaum Marjinal*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian Unhas 24 Maret, Unhas, Makassar
- Alderman, H. dan Christina, H.Paxson. 1994. "Do the Poor Insure? A Synthesis of the Literature on Risk and Consumption in Developing Countries". Economics in a Changing World, ed. E. Bacha, 48-78. St. Martin's Press, New York.
- Almond, G.A. dan G.B. Powel Jr. 1968. *Comparative Politics: A Development Approach*. Little Brown and Company.
- Armin. 2011. *Emas Melimpah Petani di Bombana Menjerit*. Society and News Environment. <http://id.shvoong.com>. Diakses 17 oktober 2011
- Berreby, David. 1996. *Between Chaos and Order: What Complexity Theory Can Teach Business.OrganiZation and People*. www. Strategy-business.com/article/15009?gko=73fbc.
- Brinkerhoff, W. Derick dan Goldsmith A. Arthur. 1990. *Institutional Sustainability in Agriculture and Rural Development*. New York, Wesport, Connecticut, London: Praeger.
- Bryman, Alan. 2001. *Social research methods*. New York :Oxford University Press
- Burkard, Gunter. 2002. *Stability or Sustainability? Dimension of Socio-economic Security in a Rain Forest Margin. Reasearch Project on Stability of Rain Forest Margins (STORMA). Funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft under SFB 552*
- Carney, D., 1998. *Implementing the Sustainable Rural Livelihoods Approach*. London: Overseas Development Institute, UK. Available at: [/http://www.dfid.gov.uk/public/what/advisory/group6/-rld/dianakey.html](http://www.dfid.gov.uk/public/what/advisory/group6/-rld/dianakey.html)
- Chambers, Robert and Gordon Conway. 1992. *Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century*. www.dfid.org.uk
- Creswell, John W & Vicki L. Plano Clark. *Designing and Conducting: Mixed Methods Research*. London: Sage Publications, 2007

- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford Calif. Stanford University Press.
- Damsar. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darma, Rahim., A.Majdah Zain, Riri Amandaria. 2012. *Zakat, Local Social Organization and Social Capital in Rural Economic Development*. Sociology Study. Volume 2 Number 3 Edisi Maret. (189-197) ISSN. 2159-5526.
- Daryanto, Arief. 2004. *Penguatan Kelembagaan Sosial Ekonomi Masyarakat Sebagai Modal Sosial Pembangunan*. Agrimedia. Volume 9, no.1 Edisi Maret.
- Daymon, Christine dan Immy Halloway. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Penerjemah Cahya Wiaratama. Bentang Pustaka, Yogyakarta.
- Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta.
- Denzin, Norman K., and Y.S. Lincoln. 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Thousands Oaks, London. New Delhi: SAGE Publications.
- Dougherty, M.L. 2011. *Peasants, Firms and Activists in The Struggle Over Gold Mining in Guatemala: Shifting Landscapes of Extraction and Resistance*. University of Wisconsin Madison.
- Editorial The Japan Times Online. 2006. *Minamata's Latest Chapter*. Tuesday Oct.3
- Ellis, Frank. 1998. Household Strategies and Rural Livelihood Diversification. *The Journal of Development Studies*. Vol 35/1. Pp 1-38.
- Ellis, Frank 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. UK, Oxford University Press.
- Frankfort, Chava., Nachmias. 1992. *Research Methods in the social sciences*. London: St. Martins Press, Inc.
- Garkovich, Lorraine E. 1989. "Local Organizations and Leadership in Community Development" dalam *Community Development in Perspective*. Editor James A. Christenson dan Jerry W. Robinson, Jr. Iowa State University Press. Iowa.

- Gamst, C. Frederick. 1974. *Peasants in Complex Society*. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Giddens, Anthony. 2000. *Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives*. New York: Routledge
- Gillin, J. Lewis & Gillin, J.P.. 1954. *Cultural Sociology*. New York : The Macmillan Company. Damsar. 2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Guba, E.G. 1990. *The Paradigm Dialog*. Newbury Park. London. New Delhi: SAGE Publications.
- Guba, E.G. & Lincoln, Y.S. 1998. *Competing paradigms in social research*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The landscape of qualitative research*. (p. 195-220). London: Sage.
- Hayami, Y. dan M. Kikuchi. 1987. *Dilema ekonomi Desa. Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia*. Yayasan Obor Indonesia
- Hasrul, Y. 2009. <http://yoshasrul.blogspot.com/2009/01/cerita-pilu-dari-tnraw-2.html>
- Hilson, G. *The Environmental Impact of Small-Scale Gold Mining in Ghana: Identifying Problems and Possible Solutions*. The Geographical Journal, Vol. 168, No. 1 (Mar., 2002), pp. 57-72
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ilchman, F. Warren & Uphoff, N.T. . 1969. *The Political Economy of Change*. California: University of California Press
- Johnson, D.P., 1981. *Sociological Theory Classical, Founders and Contemporary Perspectives*. John Wiley & Sons Inc.
- Juslén, J., 1995. *Social impact assessment: a look at Finnish experiences*. Project Appraisal. Volume 10, Issue:3, (163-170)
- Kemp, Deanna.. Owen, J.R., Gotzmann, R., Bond, C.J. (2010). *Just Relations and Company-Community*. Journal of Business Ethics (2011) 101:93–109

- Kendari Pos, 11 Mei 2013. *Tiga Perampokan Belum Diungkap*. P.7. diakses 18 Maret 2014.
- Latorre, J.G., Latorre J.G., Picon S.A., 2001. *Dealing with aridity: socio-economic structures and environmental changes in an arid Mediterranean region*. Pergamon: Land Use Policy 18 (53-64)
- Lay Yoon Fah. 2009. *Introduction to Computer Data Analysis With SPSS 16.0 for Windows*. Malaysia: Venton Publishing (M) Sdn. Bhd
- Lauer, H.R., 1991. *Perspective on Social Change*. A Division Of Simon & Schuster, Inc., Needham Heights, Massachusetts.
- Linton, R., 1936. *The Study of The Man, An Introduction*. New York: Appleton Century Crofts
- Lockie, S., Franettovich, M., Timmer, V.P., Rolfe, J., Ivanova G., 2009. *Coal mining and the resource community cycle: A longitudinal assessment of the social impacts of the Coppabella coal mine*. Environmental Impact Assessment Review 29 (330–339)
- Manule R.M. Rhommy , Ali, M. Saleh., Salman, D., Sitti Bulkis. 2006. *Studi tentang strategi penghidupan petani menurut Status penguasaan lahan dan pendekatan ekosistem Di kabupaten pinrang sulawesi selatan*. J. Sains & Teknologi, Desember, Vol. 6 No. 3: 109–120 ISSN 1411-4674
- Mayo, E. 1962. *The Human Problems of an Industrial Civilization*. New York : The Viking Press.
- Media Sultra. 2011. *Curah Hujan Tak Normal, Ratusah Hektar Sawah Bombana Kekeringan*. Diakses 17 Oktober 2011.
- Media Sultra. 2012. *Bantuan Gagal Panen di Bombana Salah Sasaran*. Diakses 22 April 2014.
- Merton, R. 1968. *Social Theory and Sosial Structure*. New York: Free Press.
- Moleong, J. Lexi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, J. Lexi. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moore, Wilbert E. 1963. *Social Change*. Englewood Cliffs, NewJersey :Prentice Hall.

- Moser, Caroline, O.N. 1996. "Confronting Crisis, a Comparative study of Household Responses on Poverty and Vulnerability in Four Poor Urban Communities". The World Bank, Washington
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pasaribu, Arman. 2010. *Analisis Dampak Pertambangan Emas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
- Polanyi, Karl., 1957. *The Great Transformation*. Boston: Beacon Press.
- Popkin, Sanuel L. 1979. *The Rational Peasant*. Berkeley: University of California Press.
- Pudjiastuti, Tri N. 2010. *Persoalan dalam Kebijakan Pertambangan Rakyat di Indonesia: Kasus Bombana*. Jakarta: LIPI
- Rachim, Jufry. 2009. *Maut Merkuri di Tambang Emas Bombana*. <http://www.kabarindonesia.com> Diakses 3 Januari 2012
- Rahardjo, Didit P.E. 2010. *Nestapa dari Kilau Emas*. Liputan khusus Gadget Show. lipsus.kompas.com. diakses 5 Maret 2014
- Reardon, T., Vosti, S.A., 1995. *Links between rural poverty and the environment in developing countries: asset categories and investment poverty*. *World Development* 23 (9), 1495–1506
- Ritzer, G., Goodman, D.J., 2009. *Teori Sosiologi. Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta
- Rogers, M. Everett, Burdige, J. R., Korsching F.P., Donnermeyer, F.J., 1988. *Social Change in Rural Societies an Introduction to Rural Sociology*. Third Edition. New Jersey. Prentice-Hall, Inc.
- Saunders, M., Lewis, P.& Thornhill, A. 2007. *Research Methods for Business Students*, 4th edn. Harlow: FT Prentice Hall.
- Saban, Abdul. 2009. *Dampak Tambang Emas Bombana*. 30 September. www.kabarindonesia.com

- Salman, Darmawan. 2006. *Jagad Maritim: Dialektika Modernitas dan Artikulasi Kapitalisme pada Komunitas Konjo Pesisir di Sulawesi Selatan*. Ininnawa, Makassar.
- Salman, Darmawan. 2012. *Tarian Paradigma Dalam Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Masa Depan*. Makalah yang disampaikan dalam Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluh Pertanian Indonesia. Bandung.
- Salman, Darmawan. 2012. *Keberlanjutan Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Perdesaan*. Bahan Kuliah Kelembagaan Pertanian. Disampaikan pada tanggal 20 April di UNHAS. Makassar : Tidak Dipublikasikan.
- Salman, Darmawan. 2012. *Kelembagaan Pembangunan Pertanian*. Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian, Program Pascasarjana UNHALU. Kendari: Tidak Dipublikasikan
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar*. Jakarta: P.T. Indeks
- Sawabi, I.G.N., 2009. *Tambang emas Bombana Ditutup 17 Maret*. Female.Kompas.com. Diakses 20 April 2013.
- Scoones, Ian. 1998. *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework For Analysis*. Institute of Development Studies
- Scott, James C., 1994. *Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Sherbinin de Alex, et.al. *Rural household demographics, livelihoods and the environment*, *Global Environmental Change* 18 (2008) 38–53.
- Sethi, S.Prakash., Lowry, B.David, Veral, A. Emre., Shapiro, H. Jack., Emelianova, Olga. 2011. *Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc.: An Innovative Voluntary Code of Conduct to Protect Human Rights, Create Employment Opportunities, and Economic Development of the Indigenous People*. *Journal of Business Ethics* (103) 1–30
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S.2001. *Makro Ekonomi ed.2*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sugiswati, B. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat di Indonesia*. *Perspektif* (17:1) pp 31-43

- The Senate. 2009. *The impacts of mining in the Murray Darling Basin*. Environment, Communications, and the Arts References Committee. Commonwealth of Australia, ISBN 978-1-74229-198-7
- Turner, H. Jonathan., 1991. *The Structure of Sociological Theory*. Fifth Edition. USA: Wadsworth Publishing Company.
- Uphoff, Norman T., 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Kumarian Press.
- Vanclay, Frank. 2002. *Conceptualising social impacts*. *Environmental Impact Assessment Review* . Vol.22 .(2002).p. 183–211
- Walhi., 2004. HuMa, SumberBerita. Suara Pembaruan Daily, 13 Oktober. *Konflik Akibat Pertambangan*. <http://www.huma.or.id>. Diakses 2 Januari 2012
- Wallace, L. Walter. 1969. *Sociological Theory an Introduction*. London: Heinemann
- White, B., Boomgaard, P. dan Alexander, P. (Editor). 1991. *In the Shadow of Agriculture, Non-farm Activities in the Javanese Economy, Past and Present*. Royal Tropical Institute. Amsterdam
- Widayati. 2003. *Kajian Kelembagaan. Materi Semiloka*. Studi/Kajian Perda Sektor Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan.LP3MPK. Makassar
- Wilson, J. Lisa 2004. *The Resource Roller Coaster: Understanding Socioeconomic Differences between Mining Communities*. Boston: *Rural Sociology* 69(2), pp. 261–281
- Wilson, John. 1983. *Social Theory*. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 07632
- Young, Kimball &. Mack, W.R. 1959. *Sociology and Social Life*. New York : American Company.

Lampiran 1:

**IDENTIFIKASI KELEMBAGAAN PETANI
KELOMPOK TANI 2014**

KABUPATEN
KECAMATAN
BPP

: BOMBANA
: LANTARI JAYA
: LANTARI JAYA

NO	NAMA POKTAN	NAMA DESA	ALAMAT SEKRETARIAT LENGKAP	TAHUN BERDIRI	TOTAL LUAS GARAPAN (Ha)
1	2	3	4	5	18
1	1. BANGUN TANI	LANTARI	DESA LANTARI	1984	24
	2. KARYA SAKTI		DESA LANTARI	1984	18.5
	3. TIGA BELAS		DESA LANTARI	1984	18.5
	4. DARMA BAKTI 1		DESA LANTARI	1984	28
	5. MERTASARI		DESA LANTARI	1984	25
	6. TUNAS BARU		DESA LANTARI	1984	33
	7. RUKUN MAKMUR		DESA LANTARI	2013	25
	8. SETIA TANI		DESA LANTARI	2013	25
	9. LANTARI INDAH		DESA LANTARI	2013	28
	10. MERTA SARI		DESA LANTARI	2013	30
	11. TENRISANNA		DESA LANTARI	2012	25
	12. MANDIRI		DESA LANTARI	2012	25
	13. SUMBER MAKMUR		DESA LANTARI	2013	26
2	1. PUSPA SARI	ANUGRAH	DESA ANUGRAH	1985	22
	2. SARI BUMI		DESA ANUGRAH	1983	38
	3. PANCAR GALUH		DESA ANUGRAH	1983	42
	4. DWI KERTA		DESA ANUGRAH	1983	30
	5. BANYUMAS MUKTI		DESA ANUGRAH	1984	21
	6. BANYUMAS INDAH		DESA ANUGRAH	1984	21
	7. SIDO MULYO		DESA ANUGRAH	1983	34
	8. SIDO MUKTI		DESA ANUGRAH	1983	30
	9. ANUGERAH PERMAI		DESA ANUGRAH	2014	28
	10. TRIBUANA		DESA ANUGRAH	1983	45
	11. PADA IDI PADA ELO		DESA ANUGRAH	2012	33
	12. LANTARI JAYA		DESA ANUGRAH	2012	27
3	1. ASSAMATURUKANG	PASAREAPUA	DESA PASAREAPUA	2014	21
	2. BUANA ASE		DESA PASAREAPUA	2014	31
	3. EROTHA		DESA PASAREAPUA	2014	21
	4. AIR LANGIT		DESA PASAREAPUA	2014	13
	5. MAJU SEJAHTERA		DESA PASAREAPUA	2014	24
	6. PUNCUNG ASE		DESA PASAREAPUA	2014	22
	7. SUBUR SEJAHTERA		DESA PASAREAPUA	2014	43
	8. SALIBU		DESA PASAREAPUA	2014	22
4	1. SUMBER REJEKI	KALAERO	DESA KALAERO	1986	32.4
	2. KARYA SUBUR		DESA KALAERO	1986	35.5
	3. SARI BUMI		DESA KALAERO	1986	47
	4. PUPUK SARI		DESA KALAERO	1986	37

	5. TUNAS HARAPAN		DESA KALAERO	1986	53
	6. SUKA MAJU		DESA KALAERO	1986	35
	7. MULTI		DESA KALAERO	2014	34
5	1. KARYA BAKTI	LANGKOWALA	DESA LANGKOWALA	2007	26.75
	2. KEJAR USAHA		DESA LANGKOWALA	2002	38.5
	3. BRUK PADAMARA		DESA LANGKOWALA	2002	30.75
	4. SETIA TANI		DESA LANGKOWALA	2002	18
	5. TUNAS BARU		DESA LANGKOWALA	2002	32.5
	6. TUNAS HIJAU		DESA LANGKOWALA	2002	32
6	2	3	4	5	18
	1. ALAM SUBUR	TINA BITE	DESA TINA BITE	2007	49
	2. BONTO HARAPAN		DESA TINA BITE	2007	25
	3. MATIRO BULU		DESA TINA BITE	2007	22
	4. TINABITE		DESA TINA BITE	2007	49
	5. WAMBABELLE		DESA TINA BITE	2007	49
	6. BONTOMARANU		DESA TINA BITE	2007	25
	7. SARAMASE		DESA TINA BITE	2007	20
	8. SAMATURUE		DESA TINA BITE	2007	25
	9. LAUSU		DESA TINA BITE	2007	32
7	1. TUMBUNTONIA	WATU-WATU	DESA WATU-WATU	1996	40
	2. EEBOLULU		DESA WATU-WATU	2009	36
	3. TUJU WALI WALI		DESA WATU-WATU	2008	40
	4. TETETARI		DESA WATU-WATU	2008	40
8	1. TUNAS MAJU	LOMBAKASI	DESA LOMBAKASI	1987	30
	2. SINAR HARAPAN		DESA LOMBAKASI	1987	41
	3. MEKAR SARI		DESA LOMBAKASI	1987	50
	4. SETIA KAWAN		DESA LOMBAKASI	1987	52
9	1. SINAR MATAHARI	RARONGKEU	DESA RARONGKEU		27
	2. SAMA ENDRE		DESA RARONGKEU		26
	3. DARMA BAKTI DUA		DESA RARONGKEU		38
	4. MEKAR SARI		DESA RARONGKEU		31
	5. MAJU BAHAGIA		DESA RARONGKEU		30

**IDENTIFIKASI KELEMBAGAAN PETANI
KELOMPOK TANI 2014**

KABUPATEN : BOMBANA
KECAMATAN : RAROWATU UTARA
BPP :

NO	NAMA POKTAN	NAMA DESA	ALAMAT SEKRETARIAT	TAHUN BERDIRI	JUMLAH ANGGOTA	TOTAL LUAS GARAPAN (Ha)	KETUA KELOMPOK
1	2	3	4	5	10	18	19
1	1. RENDE WITA 2. TUMBUNTONIA 3. LAROBU 1 4. TEWOLENTONIA 5. LAROBU 2 6. SIPATUO SIPATOKKONG	TEMBE	DESA TEMBE DESA TEMBE DESA TEMBE DESA TEMBE DESA TEMBE DESA TEMBE	2003 2007 2007 1985 2007 2007	31 25 21 20 12 12	67 60.5 47 32 15 30	Narsun Nusman Tarjono Ruslan Kasmin Rusli
2	1. KONEANTOU 2. TUMBUNTONIA 3. TETETARI 4. SUMBER SEJATI	WUMBUBANGKA	DESA WUMBUBANGKA DESA WUMBUBANGKA DESA WUMBUBANGKA DESA WUMBUBANGKA	2008 2008 1999 2008	20 23 20 27	48 120.5 63 37.5	Matus Syarifudin Sumo Sunar Muslia
3	1. SIDO MAKMUR II 2. KARYA MULIA 3. KARYA TUNGGAL 4. SIDO MAKMUR I 5. TIRTA KENCANA 6. SUMBER ALAM SULTRA 7. SIDO LUHUR 8. SIDO REJO	ANEKA MARGA	DESA ANEKA MARGA DESA ANEKA MARGA DESA ANEKA MARGA DESA ANEKA MARGA DESA ANEKA MARGA DESA ANEKA MARGA DESA ANEKA MARGA DESA ANEKA MARGA	2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006	22 22 25 23 20 22 24 24	33 46 30 23 44 68 24 24	Margono Imam. S Misran Sugino Usman Ponirin Syahri Sudarjo
4	1. BONTO MANAE 2. MATTIROWALIE 3. API-API 4. BULUSIPONG	TUNAS BARU	DESA TUNAS BARU DESA TUNAS BARU DESA TUNAS BARU DESA TUNAS BARU	2007 1997 1997 1999	28 20 17 20	14 25 1.75 -	Basing Arif Salam Baharudin H. Amir
5	1. MEKALOLARO 2. SIPATUO SIPATOKKONG 3. JATI RAYA 4. TUMBUNTONIA	HUKAEA	DESA HUKAEA DESA HUKAEA DESA HUKAEA DESA HUKAEA	2003 2003 2006 2006	27 26 23 22	24 32 31 29	Muri Jamaluddin Syaruddin Suyono

1	2	3	4	5	10	18	19
6	1. KARYA UTAMA	MARGA JAYA	DESA MARGA JAYA	1985	27	59	Sudaryono
	2. SRINADI		DESA MARGA JAYA	1985	21	49	kt.Payu
	3. SUMBER USAHA		DESA MARGA JAYA	2002	20	56	Bambang S
	4. Karya Sari		DESA MARGA JAYA	1987	17	44	Kadek Ponia
	5. SOLATA		DESA MARGA JAYA	2006	18	54	Pither
	6. TRI TUNGGAL		DESA MARGA JAYA	2008	13	26	Marsono
	7.KARYA ABADI						
	8. MAPADECENG		DESA MARGA JAYA	2006	30	99	Jalile Ketut
	9. SUBUR TANI		DESA MARGA JAYA	2003	26	93	Sudarpo

Lampiran 2:

**DATA GABUNGAN KELOMPOKTANI (GAPOKTAN)
TAHUN 2014**

KABUPATEN : BOMBANA
KECAMATAN : LANTARI JAYA
BPP : LANTARI JAYA

NO	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	JUMLAH POKTAN YANG TERGABUNG (NAMA POKTAN)	JUMLAH ANGGOTA	NAMA KETUA
1	LAUSU	LOMBAKASI	1. TUNAS MAJU 2. SINAR HARAPAN 3. MEKAR SARI 4. SETIA KAWAN	138 Org	WAYAN SUDIANA
2	CAHAYA ALAM	ANUGRAH	1. PUSPA SARI 2. SARI BUMI 3. PANCAR GALU 4. DWI KERTA 5. SIDO MULYO 6. SIDO MUKTI	136 Org	SURAHMAN
3	KARYA INDAH	LANTARI	1. BANGUN TANI 2. KARYA SAKTI 3. TIGA BELAS 4. DARMA BAKTI 1 5. MERTASARI 6. TUNAS BARU 7. BANYU MAS MURTI 8. BANYUMAS INDAH	107 Org	SUWANTO
4	BAHTERA APUA	PASERE APUA	1. NAPAN KAE 2. SIPATUA 3. BUANA ASEH 4. WAE SIDURU	51 Org	MUH. ANAS SANUSI

NO	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	JUMLAH POKTAN YANG TERGABUNG (NAMA POKTAN)	JUMLAH ANGGOTA	NAMA KETUA
5	HARAPAN TANI	TINA BITE	1. ALAM SUBUR 2. BONTO HARAPAN 3. MATIRO BULU 4. TINABITE 5. WAMBABELE 6. BONTOMARANU 7. SARAMASE 8. SAMATURUE	131 Org	ANDI ANWAR
6	MEKAR SARI	KALAERO	1. SUKA MAJU 2. SUMBER SARI 3. PUPUK SARI 4. SUMBER REJEKI 5. KARYA SUBUR 6. SARI BUMI	85 Org	I DEWA MADE MERTHA
7	DAMAI	RARONGKEU	1. SINAR MATAHARI 2. SAMA ENDRE 3. SINAR ALAM 4. MAJU BAHAGIA	144 Org	ANDI TAWAKKAL
8	KOWALA	LANGKOWALA	1. BRIUK PADAMARA 2. TUNAS BARU 3. TUNAS BARU 2 4. KEJAR USAHA 5. KARYA BAKTI 6. SETIA TANI	160 Org	PAJARUDDIN

**DATA GABUNGAN KELOMPOKTANI (GAPOKTAN)
TAHUN 2014**

KABUPATEN : BOMBANA
KECAMATAN : RWT. UTARA
BPP :

NO	NAMA GAPOKTAN	NAMA DESA	PENERIMA DANA PUAP TAHUN	JUMLAH POKTAN YANG TERGABUNG (NAMA POKTAN)	NAMA KETUA
1	LANIPA	HUKAEA	2008	1. MEKALOLARO 2. SIPATUO SIPATOKKONG 3. JATI RAYA 4. TUMBUNTONIA	ASRI
2	LERE ETE	LANTOWUA	2008		HALYA
3	RUKUN TANI	MARGA JAYA	2009	1. KARYA BARU 2. KARYA SAKTI 3. SUMBER USAHA 4. DWI KARYA MURNI 5. SULATA 6. TRI TUNGGAL 7. MAPADECENG 8. JAYA MAKMUR	PARDI
4	MEKALOLARO	TEMBE	2009	1. RENDE WITA 2. TUMBUNTONIA 3. LAROBU 1 4. TEWOLENTONIA 5. LAROBU 2 6. SIPATUO SIPATOKKONG	TASRIF
5	WINUA SANGKULA	WUMBUBANGKA	2011	1. KONEANTOU 2. TUMBUNTONIA 3. TETETARI 4. SUMBER SEJATI	SUMO SUMAR

Lampiran 3:

**DAFTAR NAMA KELOMPOK TANI USAHA PETERNAKAN SAPI POTONG
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 1998 S/D 2013**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT / DESA	JML ANGGOTA (ORANG)	JML TERNAK (EKOR)	TGL BERDIRI KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Kecamatan Rarowatu Utara</u>					
1	Karya Mulia	Aneka Marga	24	117	15/9/2006	Imam Suyitno
2	Lembu Citra Jaya	Marga Jaya	25	92	10/8/2011	Joko Arianto
3	Tirta Kencana	Marga Jaya	22	107	8/5/2007	Usman G
4	Karya Utama	Marga Jaya	18	127	8/7/2002	Sudaryono
5	Sumber Usaha	Marga Jaya	21	212	5/5/2000	Bambang Sumitro
6	Tumbuh Ntonia	Hukaea	15	43	5/3/2010	Syafrudin
7	Sinar Rejeki	Marga Jaya	23	68	11/11/2011	Ketut Wartawan
8	Mekar Tani / Sumber Mulia	Tembe	11	51	4/3/2011	Joni
9	Harapan Makmur	Aneka Marga	20	99	7/11/2011	Suyatno
10	Suka Maju	Aneka Marga	19	19	24/7/2005	Suradi
11	Jaya Makmur	Marga Jaya	27	289	10/10/2003	Paryanto
12	Balanteo	Wumbubangka	25	254	17/1/2006	Baharuddin
13	Usaha Mandiri	Wumbubangka	10	22	21/7/2005	Darman
14	Pada Idi Samaturu	Wumbubangka	15		.../.../2003	Kamaruddin
15	Polewali	Wumbubangka	25		7/1/2004	M. Zain. AR
16	Mitra Karya Muda	Aneka Marga	21	61	1/10/2009	Ngadimin
17	Usaha Bersama	Marga Jaya	20	117	21/9/2010	Sarman
18	Sido Muncul	Marga Jaya	22	31	09/09/2012	Romdoni
19	Lembu Lai	Aneka Marga	26	58	10/02/2012	Sutiono
20	Sumber Sari	Marga Jaya	22	98	07/09/2011	Haris Arvan
21	Adecengetta	Lantowua	17	99	04/04/2010	Agus Salim
22	Tunas Mekar	Watumentade	5	7	5/3/2012	Askar
23	Sumber Rejeki	Aneka Marga	19	35	5/2/2012	Nuryadi
24	Karya Abadi	Aneka Marga	21	56	30/9/2012	Ahmad Kamali
25	lembu cahaya	Hukaea	20	66	7/5/2013	muslimin. AR
26	nime asa ako	Hukaea	25	110	13/6/2013	m. Agus
26	dua pitue	Hukaea	25	150	3/6/2013	masjidin
27	maju bersama	Aneka Marga	20	85	10/9/2012	karyono
28	Citra Mulia	Marga Jaya	25	120		Misiran

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT / DESA	JML ANGGOTA (ORANG)	JML TERNAK (EKOR)	TGL BERDIRI KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Kecamatan Lantari Jaya</u>					
1	Langkowala	Kalaero	22	150	8 Agust 1998	I Dewo Made Merta
2	Harapan Jaya	Lantari	15	1454	18/10/2013	Bagus PK
3	Tunas Baru	Lombakasih	20	61	5/5/2007	Wy. Damri
4	Ingin Madju	Langkowala	15	42	29/1/2007	Mahidin
6	Mattiro Walie	Tina Bite	12	613	2/1/2007	Rusdi
7	Leleteule	Watu-Watu	20	50	24/3/2000	Tamrin
9	Lomba Karya	Lombakasih	23	81	10/4/2011	Sumedi
10	Citra Karya Baru	Lantari	19	68	28/4/2011	Bambang Hariyanto
11	Sido Mukti	Anugrah	20	82	1/10/2011	Sukimyo
12	Pada Idi	Kalaero	20	72	23/7/2011	Hanong
13	Salaparan Maju	Lombakasih	20	84	6/1/2005	Hasanuddin
14	Polewali	Tina Bite	24	738	7/1/2004	Hasanuddin
15	Lestari Jaya	Tina Bite	19	406	10/10/2008	Hasanuddin AR
16	Sumber Tani	Lantari	28	58	15/11/2009	Adale
17	Sido Muncul	Lantari	20	50	10/11/2010	Moh. Nur Soleh
18	Sumber Sari	Langkowala	23	67	15/2/2012	Pajarudin
19	Polewali	Lantari	20	97	23/12/2008	H. Bahtiar
20	Sipatuo	Tinabite	25	29	15/6/2010	Yusup
21	Pada Idi	Tinabite	25	43	8/4/2010	Abd. Muis
22	Sumber Usaha	Watu-Watu	15	50	30/9/2012	M. Idham. K
23	Anugrah Jaya	Anugrah	20	25	3/9/2012	Putu Mahardika
24	Mandiri	Lantari	20	42	2/5/2011	Dahlan
25	dukung bersama	lombokasi	20	67	27/7/2012	Tahang
26	usaha bersama	kalaero	22	91	12/3/2011	Mansur
27	mekar jaya	lantari jaya	20	76	9/12/2012	Mulyadi
28	cipta karya	lantari	22	35	17/8/2010	Kistam
29	sumber utama	tinabite	18	67	14/5/2012	Sardine